



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

---

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**  
**TA 2022**





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan, dengan membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan disusun secara terstruktur untuk menggambarkan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi berupa sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan Pemerintah tingkat atas dan masyarakat, dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi-informasi tersebut Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

- a. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen  
Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)  
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
  - 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
  - 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

## 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018 Nomor 8);



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 291);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 290);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata 2017 Tahun 2017 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017– 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 297);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 298);



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

## PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 299);
50. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 58);
51. Peraturan Bupati Lembata Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 39);
52. Peraturan Bupati Lembata Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 62);
53. Peraturan Bupati Lembata Nomor 680 Tahun 2019 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lembata;
54. Peraturan Bupati Lembata Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 50);
55. Peraturan Bupati Lembata Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 69);
56. Peraturan Bupati Lembata Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 79);
57. Peraturan Bupati Lembata Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 92);

### 1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Target Kinerja APBD

#### III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

#### **IV. Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

#### **V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata**

- 5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  1. Pendapatan - LRA
  2. Belanja
  3. Pembiayaan
- 5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3. Penjelasan Akun-Akun Neraca
  1. Aset
  2. Kewajiban
  3. Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
  1. Pendapatan - LO
  2. Beban LO
  3. Kegiatan Non Operasional
  4. Akun Luar Biasa
- 5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
  1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
  2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
  3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
  4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan**

- 6.1. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
- 6.2. Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan
- 6.3. Potensi Pariwisata
- 6.4. Potensi Energy dan sumber Daya Mineral
- 6.5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- 6.6. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- 6.7. Lainnya

#### **VII. Penutup**





## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

### 2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penentuan arah dan kebijakan keuangan Kabupaten Lembata Tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, nasional dan provinsi NTT, selain memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017–2022. Karena tujuan dari arah kebijakan keuangan yang direncanakan harus menjadi indikator dalam mencapai sasaran penyelesaian masalah pembangunan ekonomi.

#### 2.1.1. Kondisi Perekonomian Global

Mengacu pada World Economic Outlook yang dirilis bulan Oktober tahun 2022, *International Monetary Fund* (IMF) mempertahankan outlook pertumbuhan ekonomi global kemungkinan melambat menjadi 3,2% pada 2022. Proyeksi ini tidak berubah dari perkiraan IMF pada Juli 2022. Adapun, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 awalnya 4,4% pada Januari 2022.

IMF mengingatkan bahwa perekonomian global mengalami sejumlah tantangan pada tahun ini dan tahun depan. Mulai dari inflasi lebih tinggi dari yang terlihat di beberapa dekade, ketaatannya kondisi keuangan di sebagian besar wilayah, perang Rusia ke Ukraina, dan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan IMF memaparkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat (AS) mengalami kontraksi pada semester I/2022, pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa juga berkontraksi pada kuartal II/2022. Selain itu, China masih terbelenggu kebijakan zero covid policy dan krisis di sektor properti.

IMF memprediksi inflasi global akan meningkat dari 4,7% pada 2021 menjadi 8,8% pada tahun 2022. Meski demikian, tekanan inflasi akan turun menjadi 6,5% pada 2023 dan menuju 4,1% pada 2024. Kejutan inflasi terbalik telah paling luas di antara negara-negara maju, dengan variabilitas yang lebih besar di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang. IMF mengungkapkan risiko terhadap prospek tetap luar biasa besar dan untuk sisi negatifnya. Pasalnya, pembuat kebijakan moneter bisa salah menghitung sikap yang tepat untuk menekan inflasi. Jalur kebijakan di sumber ekonomi terbesar dapat terus menyimpang, memimpin untuk melanjutkan apresiasi dolar AS dan lintas batas ketegangan. "Lonjakan harga energi dan harga pangan mungkin menyebabkan inflasi bertahan lebih lama,"

Dengan melihat perkembangan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi global Tahun 2021 menjadi 6,1% dari sebelumnya sebesar 5,8%, dan tahun 2022 sebesar 3,2%. Untuk itu proyeksi ekonomi global 2022 dapat dilihat dalam tabel yang menggambarkan proyeksi perekonomian global 2018 sampai dengan 2022 berikut ini:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

**Tabel 2.1.**  
**Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2022**

Negara	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Dunia</b>	<b>3,6</b>	<b>2,8</b>	<b>-3,3</b>	<b>6,1</b>	<b>3,2</b>
<b>Negara Maju</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>-4,7</b>	<b>5,2</b>	<b>2,5</b>
Amerika Serikat	3,0	2,2	-3,5	5,7	2,3
Kawasan Eropa	1,9	1,3	-6,8	5,4	2,6
Jepang	0,6	0,3	-4,7	1,7	1,7
<b>Negara Berkembang</b>	<b>4,5</b>	<b>3,6</b>	<b>-2,2</b>	<b>6,8</b>	<b>3,6</b>
Tiongkok	6,7	5,8	2,3	8,1	3,3
India	4,5	6,7	-7,1	8,7	7,4
ASEAN-5	5,3	4,8	-3,4	3,4	5,3
Amerika Latin	1,2	0,2	-7,0	6,9	3,0
Negara Berkembang Eropa	3,4	2,4	-2,0	6,7	-1,4
Timur Tengah dan Asia Tengah	2,0	1,4	-2,9	5,8	4,8

#### 2.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II/2022 mencapai Rp4.919,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.923,7 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan II/2022 terhadap triwulan II/2021 tumbuh sebesar 5,44% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,27%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,74%. Ekonomi Indonesia triwulan II/2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,72% (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,15%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (KPK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 32,00%. Penguatan ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II/2022 terlihat pada semua wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama dengan peranan sebesar 56,55% dari ekonomi Nasional, dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,66% (y-on-y) dibanding triwulan II/2021.

Tahun 2022 menjadi masa yang penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak Pandemi Covid-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Ditengah upaya penanganan Pandemi Covid-19 persiapan kebijakan fiskal dengan risiko ketidakpastian yang tinggi, harus dipersiapkan secara terarah dan terukur sebagai stimulus pemulihan perekonomian nasional serta komprehensif baik atas pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan negara.

Berdasarkan kondisi-kondisi ekonomi makro tersebut secara nasional ditetapkan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro 2022, sebagaimana termuat pada tabel berikut:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Tabel 2.2.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022

Indikator Makro	Target
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,2 - 6,0
Inflasi (%)	3,0
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9,0
Pengangguran Terbuka (%)	5,5 - 6,3
Rasio Gini	0,376 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	73,41 - 73,46

#### 2.1.3. Kondisi Ekonomi Provinsi NTT

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II/2022 mencapai Rp29,49 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp18,16 triliun.

Ekonomi NTT triwulan II/2022 tumbuh sebesar 3,01% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 23,36%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 51,73%. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan II/2022 tumbuh sebesar 6,22%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,61%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 44,94%.

Perekonomian NTT pada semester I 2022 tumbuh sebesar 2,45% (c-to-c). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 24,57%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 41,99%. Struktur Ekonomi NTT pada triwulan II 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 30,32%. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 70,66%.

##### a. Perkembangan Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 4,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 2,89% (yoy). Inflasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang tumbuh sebesar 4,35% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga dari kelompok komoditas transportasi, yakni tarif angkutan udara dan angkutan dalam kota. Hal ini seiring dengan kebijakan *fuel surcharge* yang diterapkan Kementerian Perhubungan untuk angkutan udara penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Kupang. Selain itu, beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman & tembakau seperti minyak goreng, rokok kretek filter, dan daging babi turut menjadi penyumbang inflasi di triwulan II 2022.

Pada triwulan III 2022, tekanan inflasi diperkirakan masih terjadi dan bahkan lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2022. Prakiraan ini didasarkan pada faktor pendorong inflasi yang berasal dari tarif angkutan udara yang dipengaruhi oleh meningkatnya



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

mobilitas masyarakat yang belum dapat diimbangi dengan pemulihan kapasitas maskapai penerbangan. Selain itu, komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah yang sempat mengalami kenaikan harga yang signifikan di awal triwulan III juga dapat menjadi penyumbang inflasi dari sisi bahan pangan.

b. Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan II 2022 masih terjaga. Hal ini tercermin dari nilai *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,47%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tercatat tumbuh sebesar 2,11% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun fungsi intermediasi tetap tinggi, dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 115,52%. Sementara itu, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 12,32% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,24% (yoy), sejalan dengan pemulihan ekonomi pada triwulan II. Tingkat risiko kredit masih terjaga, dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) (*gross*) yang tercatat sebesar 3,03%, masih terjaga di bawah level 5%.

c. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Februari 2022 tercatat sebesar 2,83 juta orang, menurun 1,74% dibandingkan Februari tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat menurun menjadi sebesar 3,30%. Kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari jumlah pekerja terdampak Covid-19 yang menurun dibandingkan periode Februari 2021. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret 2022 tercatat sebesar 20,05%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2022 tercatat masih rendah sebesar 94,86.

d. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,8–3,6% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya konsumsi swasta dan investasi seiring dengan berlanjutnya program vaksinasi sebagai game changer dalam pemulihan ekonomi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat penyebaran varian virus omicron pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap peningkatan kasus Covid-19 dan penebalan kebijakan pembatasan.

Dari gambaran ekonomi NTT tersebut ditetapkan asumsi dasar ekonomi makro 2022 sebagaimana Tabel 2.3.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

**Tabel 2.3.**

**Asumsi Dasar Ekonomi Makro Provinsi NTT Tahun 2022**

Indikator Makro	Target
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	6,33 - 6,90
Inflasi (%)	3,0
Tingkat Kemiskinan (%)	19,35-16,15
Pengangguran Terbuka (%)	2,5-1,9
Rasio Gini	0,34-0,33
Indeks Pembangunan Manusia	67,35-69,00
Prevelensi Stunting	16,7

#### 2.1.4. Kondisi Ekonomi Lembata

Kondisi perekonomian Kabupaten Lembata diproyeksikan akan tetap tumbuh dan meningkat yang antara lain didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur yang berpengaruh terhadap peningkatan investasi. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, nasional dan global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur PDRB, PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi.

Indikator ekonomi makro Kabupaten Lembata sebagaimana pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.4.**

**Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Lembata Tahun 2022**

Indikator Makro	Target
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,7-7
Inflasi (%)	6,25
Tingkat Kemiskinan (%)	25,18
Pengangguran Terbuka (%)	4,74
Rasio Gini	0,27 - 0,30
Indeks Pembangunan Manusia	65,47

##### a. Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan penanganan Covid-19 ditandai oleh perbaikan ekonomi yang terus membaik jika dibandingkan dengan tahun 2020. Perbaikan perekonomian tahun 2021 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Dimana pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2021 sebesar 1,53% dari tahun 2020 sebesar minus 0,37% dan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 ini



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebesar 2,51% dan Nasional sebesar 3,69%. Kondisi perekonomian tahun 2021 dan tahun 2022 makin membaik seiring terealisasinya program vaksinasi yang dilakukan sejak awal.

#### b. Inflasi

Laju inflasi nasional selama lima tahun terakhir dapat dikendalikan sesuai sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh bauran kebijakan pengendalian inflasi nasional, baik dari sisi fiskal, moneter maupun sektor riil. Pengendalian laju inflasi sesuai sasaran ini tidak terlepas dari kebijakan bersama Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi menciptakan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang strategis dan terukur untuk mencapai target inflasi agar sesuai sasaran tahun berjalan. Tugas yang dilakukan oleh TPIP dan TPID adalah melakukan *refocusing* program kerja untuk merespon dampak Inflasi. Berikut gambaran inflasi nasional dan kabupaten tahun 2017-2022 sebagaimana **Tabel 2.5** berikut ini.

**Tabel 2.5.**  
**Perkembangan Inflasi Tahun 2017-2022**

Tingkat Inflasi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	3,6	3,1	2,5	2,0	3,0	3,0
Kabupaten Lembata	3,5	3,5	2,02	0,29	3,0	6,25

#### c. Tingkat Kemiskinan

Angka penurunan jumlah penduduk miskin bergerak sangat kecil/lambat sebagai akibat pendapatan perkapita (*rupiah/perkapita/bulan*) mengalami kenaikan tetapi tidak sebanding dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Pada Tahun 2021 pendapatan perkapita naik sebesar Rp33.324,00 atau sebesar 9,00% dari tahun 2020 sebesar Rp388.577,00 menjadi Rp421.901,00 di tahun 2021 dan Rp464.542,00 di tahun 2022, tetapi tidak sebanding dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang mengalami penurunan tipis sebesar 0,27% dari tahun 2020 sebesar 26,14% menjadi 26,21% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar 25,18%.

Gambaran jumlah penduduk miskin lima tahun terakhir Kabupaten Lembata sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.6.**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lembata Tahun 2017 – 2022**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/perbulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	335.693	36.26	26,48
2018	353.957	36.95	26,45
2019	359.792	37.46	26,30
2020	388.577	37.92	26,14
2021	421.901	38,75	26,21
2022	464.542	37,88	25,18



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Untuk mendukung pengentasan kemiskinan tahun 2022 Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp93.465.055.833,00 dalam beberapa program sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.7.**  
**Rekapitulasi Program untuk Mendukung**  
**Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Lembata Tahun 2022**

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	74.162.896.687,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.047.546.030,00
3	Program Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh	1.510.458.968,00
4	Kegiatan Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	9.685.434.502,00
5	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	25.110.970,00
6	Program Rehabilitas Sosial	829.493.970,00
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	236.146.780,00
8	Program Pengendalian Penduduk	443.077.200,00
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana	3.883.226.296,00
10	Program Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera	641.664.430,00
<b>Jumlah</b>		<b>93.465.055.833,00</b>

1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional diperkirakan berada pada kisaran 5,5%–6,3%. Diharapkan penurunan pengangguran dapat menurunkan angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan (rasio gini) pada tahun 2021 yang masing-masing diperkirakan berada pada kisaran 9,2%–9,7% dan 0,377%–0,379%. Kondisi Kabupaten Lembata tahun 2022 tingkat pengangguran sebesar 4,74% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 4,94% dan target provinsi sebesar 3,54% dan lebih rendah jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 5,86%.

2) Rasio Gini

Indeks Gini (*gini ratio*) merupakan alat analisis untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau suatu daerah pada suatu periode tertentu dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan, karena terdapat hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan/ketimpangan menyebabkan kemiskinan yang parah. Secara nasional, rasio gini diperkirakan berada pada kisaran 0,376–0,378%. Untuk Kabupaten Lembata tahun 2022 rasio gini ditargetkan sebesar 0,27%–0,30%, lebih rendah dari target provinsi NTT sebesar 0,33%.

3) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup / umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), indeks tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu :

- a) Rendah ( $< 60$ )
- b) Sedang ( $60 \leq IPM < 70$ )
- c) Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ )
- d) Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata diketahui tingkat capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lembata Tahun 2022 sebesar 65,47 poin yang berarti masuk kategori sedang.

Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lembata ini didasarkan pada indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.8.**

**Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lembata Tahun 2022**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kesehatan – Umur Harapan Hidup saat lahir	66,57	66,97	67,07	67,20	67,52
2	Pendidikan					
	A Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,95	8,21	8,22	8,23	8,25
	B Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,26	12,4	12,42	12,43	12,45
3	Pengeluaran perkapita per tahun disesuaikan	7.253.000	7.474.000	7.305.000	7.257.000	7.622.000
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		<b>63,96</b>	<b>64,91</b>	<b>64,74</b>	<b>64,75</b>	<b>65,47</b>

Sumber: <https://www.bps.go.id/indeks-pembangunan-manusia>. BPS RI, 2021.

#### 2.1.5. Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Lembata tahun 2022 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, yang mana tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Lembata.

Kuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah merupakan satu kesatuan siklus keuangan pemerintah yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan.

Kebijakan keuangan daerah 2022 diarahkan untuk sinkron dengan kebijakan keuangan Pemerintah Pusat dalam melanjutkan pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Secara umum kebijakan keuangan daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:

Melakukan penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan mendesak yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan pergeseran anggaran, antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan serta antar jenis belanja, antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja.

Melakukan penyesuaian SiLPA terhadap prediksi SiLPA dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 sesuai kondisi riil Kas Daerah per 31 Desember 2021.

Melakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari kementerian terkait yang baru diterbitkan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 khususnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengalokasikan biaya operasional untuk mendukung dana stimulan perbaikan rumah rusak pasca bencana dan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat.

Melakukan penyesuaian terhadap pendapatan daerah khususnya dana transfer antar daerah/bagi hasil pajak provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Melakukan penyesuaian belanja daerah sesuai dinamika evaluasi/rasionalisasi Pendapatan Asli Daerah dan belanja mandatori.

Melakukan penyesuaian kembali terhadap prediksi SiLPA Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT Nomor. 96.A/LHP/XIX/KUP/05/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Melakukan pengurangan belanja dengan merasionalisasi belanja gaji dan tunjangan khusus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang belum mendapat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan rasionalisasi terhadap Belanja Tidak Terduga.

Melakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir kebutuhan belanja yang bersifat penting dan mendesak.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

### 2.2.1. Kebijakan dan Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah, pendapatan daerah dimaksud dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
  1. Pajak daerah;
  2. Retribusi daerah;
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  4. Lain-lain PAD yang sah.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- b. Pendapatan Transfer, yang terdiri dari:
  1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  2. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang terdiri dari:
  1. Pendapatan Hibah;
  2. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rencana dan proyeksi pendapatan tahun 2022 adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.9.**  
**Rencana dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Sebelum Perubahan APBD	Setelah Perubahan APBD
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>54.796.736.943</b>	<b>43.427.259.576,00</b>
Pajak Daerah	13.649.993.367	13.269.993.367
Retribusi Daerah	25.747.785.364	21.109.219.512
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.500.000.000	2.474.364.950
Lain-lain PAD yang sah	8.898.958.212	6.573.681.747
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>742.869.084.002</b>	<b>742.586.777.795,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	723.482.166.056	717.121.310.718
Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.386.917.946	25.465.467.077
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>32.473.950.000</b>	<b>45.243.859.076</b>
Pendapatan Hibah	0	13.324.179.000
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	32.473.950.000	31.919.680.076
<b>Jumlah</b>	<b>830.139.770.945,00</b>	<b>831.257.896.447,00</b>

Kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2022 mengalami penyesuaian dari sebelum perubahan sebesar Rp830.139.770.945,00 menjadi Rp831.257.896.447,00, penyesuaian ini sebagai akibat perubahan target komponen-komponen pendapatan daerah yang sesuai asumsi awal harus disesuaikan karena sebagian potensi pendapatan setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh yang akan tercapai sampai dengan akhir tahun.

Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan dan setelah perubahan terjadi penyesuaian (pengurangan) yang signifikan untuk mendudukkan postur pendapatan sesuai dengan kondisi riil yang bisa dicapai. Kondisi sebelum perubahan dengan target sebesar Rp54.796.736.943,00 didukung dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Eksplorasi dan akselerasi sumber-sumber penerimaan daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah melalui:
  1. Upaya intensifikasi pendapatan daerah.
  2. Upaya ekstensifikasi pendapatan daerah.
  3. Penelusuran dan optimalisasi basis pendapatan baru, termasuk memanfaatkan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan/bank daerah.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- b. Harmonisasi dan penyempurnaan berbagai produk hukum daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kebijakan relaksasi terhadap pelaku usaha dan investasi di daerah, melalui:
  1. Melakukan *rapid assessment* terhadap berbagai produk hukum daerah yang saling *overlap* dan disharmonisasi.
  2. Memberikan relaksasi prosedur terhadap perizinan-perizinan yang bersifat strategis bagi pelaku usaha.
  3. Penerapan kebijakan insentif dalam berinvestasi terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. Pembaharuan sistem dan manajemen tata kelola pendapatan pada berbagai fungsi/aspek, termasuk revolusi *soft skill* dan *database* berorientasi hasil (*result oriented*) melalui:
  1. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset dan atau sewa aset yang bernilai ekonomi tinggi (*highest and best use*).
  2. Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam skala terbatas.
  3. Pemutakhiran dan penyempurnaan *database* pajak dan retribusi daerah secara berkala.
  4. Reorientasi cara kerja dan budaya kerja dari orientasi prosedural menjadi ekstra normal.

Terhadap arah kebijakan pendapatan dalam rencana perubahan APBD, Pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendapatan sebelum perubahan untuk merasionalisasikan target yang diprediksi tidak dapat tercapai sampai dengan akhir tahun, diantaranya dengan melakukan kebijakan pendapatan antara lain sebagai berikut:

1. Merasionalisasikan kembali target pendapatan daerah sesuai potensi dan kondisi yang ada dengan tetap menjaga fleksibilitas dan represif terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Harmonisasi dan penyempurnaan berbagai produk hukum daerah dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi di daerah.
3. Perbaikan tata kelola pendapatan pada berbagai fungsi/aspek, termasuk personalia dan *database* yang terstruktur.
4. Penerapan Pakta Integritas sebagai kontrak kinerja antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari revolusi kinerja.

#### 2.2.2. Target Pendapatan Daerah

Target pendapatan sebelum perubahan dan penyesuaian dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah target sebelum perubahan sebesar Rp54.796.736.943,00 setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp43.427.259.576,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pajak Daerah target sebelum perubahan sebesar Rp13.649.993.367,00 setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp13.269.993.367,00
  - b. Retribusi Daerah target sebelum perubahan sebesar Rp25.747.785.364,00 setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp21.109.219.512,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan target sebelum perubahan Rp6.500.000.000,00 setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp2.474.364.950,00
- d. Lain-lain PAD yang Sah target sebelum perubahan sebesar Rp8.898.958.212,00 setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp6.573.681.747,00
2. Pendapatan Transfer target sebelum perubahan sebesar Rp742.869.084.002,00 setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp742.586.777.795,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat target sebelum perubahan sebesar Rp723.482.166.056,00 setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp717.121.310.718,00
  - b. Pendapatan Transfer antar Daerah target sebelum perubahan sebesar Rp19.386.917.946,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp25.465.467.077,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebelum perubahan sebesar Rp32.473.950.000,00 setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp45.243.859.076,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Hibah sebelum perubahan sebesar Rp0,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp13.324.179.000,00.
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum perubahan sebesar Rp32.473.950.000,00 setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp31.919.680.076,00.

#### 2.2.3. Kebijakan dan Target Belanja Daerah

Untuk mencapai keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah, maka perlu ada sinergisitas dan sinkronisasi kebijakan/program-program prioritas pada setiap tingkatan pemerintahan. Kebijakan belanja daerah harus mendukung capaian target prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan belanja diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dan provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka postur belanja daerah idealnya mencakupi urusan wajib pemerintahan, urusan penunjang, urusan pendukung, urusan pengawas, urusan kewilayahan dan urusan pemerintahan umum.

Dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan (*mandatory spending*). *Mandatory spending* ini bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data *mandatory spending* Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebesar 20%.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Lembata.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD Induk TA. 2022 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp252.944.334.859,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.065.139.770.945,00 atau sebesar 23,75%. Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Perubahan TA. 2022 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp199.341.950.999,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.044.144.986.609,00 atau sebesar 19,09%.

#### 2. **Mandatory Spending Fungsi Kesehatan.**

Sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Lembata.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Induk TA. 2022 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp136.621.741.129,00 dari nilai belanja daerah diluar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp1.020.012.527.878,00 atau sebesar 13,39%. Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Perubahan TA. 2022 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp138.690.883.579,00 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai Rp800.248.392.136,00 atau sebesar 17,33%.

#### 3. **Mandatory Spending Fungsi Pengawasan.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022. Alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Induk TA. 2022 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp6.714.059.034,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.065.139.770.945,00 atau sebesar 0,63%. Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Perubahan TA. 2022 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp6.081.303.999,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.044.144.986.609,00 atau sebesar 0,58%.

#### 4. **Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur.**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA. 2022, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja,



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lembata.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Induk TA. 2022 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp534.471.415.470,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.065.139.770.945,00 atau sebesar 50,18%. Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Perubahan TA. 2022 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp537.961.622.835,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.044.144.986.609,00 atau sebesar 51,52%.

#### 5. **Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa.**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Perhitungan alokasi anggaran belanja ADD dalam APBD Induk TA. 2022 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp46.114.833.002,60 dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK senilai Rp447.498.337.806,00 atau sebesar 10,3%. Sedangkan Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD dalam APBD Perubahan TA. 2022 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp46.114.833.002,60 dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK senilai Rp448.110.443.989,00 atau sebesar 10,3%.

#### 6. **Mandatory Spending Fungsi Penanganan Dampak Inflasi.**

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA. 2022, alokasi anggaran fungsi penanganan dampak inflasi Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 2% dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 dan Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan IV TA. 2022.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi adalah memberikan perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Perhitungan alokasi anggaran belanja fungsi penanganan dampak inflasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA. 2022 Kabupaten Lembata dialokasikan senilai Rp4.088.879.940,00 dari nilai penyaluran Dana Alokasi Umum setelah ditambah penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV senilai Rp116.113.160.978,00 atau sebesar 3,52%.

Berikut gambaran kebijakan belanja daerah berdasarkan kelompok belanja daerah Tahun Anggaran 2022:

##### 1. **Kebijakan Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, belanja operasi dimaksud meliputi:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

- a. Belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara.
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- c. Belanja hibah diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dengan sasaran hibah kepada organisasi masyarakat dan belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja bantuan sosial diarahkan untuk menunjang pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dalam rangka menunjang program, kegiatan/sub kegiatan pemerintah daerah.

#### 2. Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan belanja modal diarahkan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. memenuhi batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Khusus pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur strategis daerah. Untuk belanja modal bangunan dan gedung seluruh jenis bangunan dan gedung yang bersifat strategis/bangunan gedung pemerintah dianggarkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan sub urusan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung untuk urusan pendidikan dan kesehatan dianggarkan pada OPD yang secara fungsional melaksanakan urusan pendidikan dan kesehatan.

#### 3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### 4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, diantaranya belanja bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah dan belanja bantuan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD).



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Bantuan keuangan diarahkan kepada desa-desa untuk tujuan tertentu yang bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Selain itu, belanja transfer juga menganggarkan Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Secara umum kebijakan belanja daerah sebelum perubahan dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.10.**  
**Rencana dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	Sebelum Perubahan APBD	Setelah Perubahan APBD
<b>Belanja Operasi</b>	<b>546.092.960.741,00</b>	<b>531.437.547.847,00</b>
Belanja Pegawai	336.467.178.939,00	308.310.404.211,00
Belanja Barang dan Jasa	190.591.802.881,00	202.191.015.315,00
Belanja Bunga	6.294.815.621,00	5.200.346.251,00
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	2.384.163.300,00	5.170.782.070,00
Belanja Bantuan Sosial	10.355.000.000,00	10.565.000.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>340.472.984.310,00</b>	<b>339.970.822.759,00</b>
Belanja Modal Tanah	3.679.191.076,00	3.917.953.076,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.666.589.982,00	26.990.453.168,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.896.636.347,00	21.281.753.582,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	287.838.671.975,00	283.117.547.524,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.391.894.930,00	4.663.115.409,00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>8.527.209.891,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
Belanja Tidak Terduga	8.527.209.891,00	3.000.000.000,00
<b>Belanja Transfer</b>	<b>170.046.616.003,00</b>	<b>169.736.616.003,00</b>
Belanja Bagi Hasil	1.364.999.222,00	1.364.999.222,00
Belanja Bantuan Keuangan	168.681.616.781,00	168.371.616.781,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.065.139.770.945,00</b>	<b>1.044.144.986.609,00</b>

Dari Tabel diatas tergambar postur belanja daerah tahun 2022, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan APBD. Pada perubahan APBD dilakukan penyesuaian antar kelompok belanja sehingga secara keseluruhan terdapat pengurangan belanja daerah sebesar Rp20.994.784.336,00.

Adapun kebijakan Belanja Daerah 2022 adalah:

- 1) Harmonisasi belanja dengan pendapatan daerah dan melakukan penyempurnaan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan tahun anggaran berkenaan untuk meminimalkan risiko moril.
- 2) Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi ketentuan *mandatory spending* fungsi pendidikan.
- 3) Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang bersifat penting dan mendesak.

#### 2.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan yang ditempuh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 meliputi:

- 1) Penyesuaian SiLPA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021.
- 2) Rekalkulasi plafon Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah sesuai syarat perjanjian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.

#### 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dengan asumsi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp212.887.090.162,00 maka untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut sumber penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan sisa anggaran akibat tidak tercapainya target kinerja, yang termasuk dalam kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah penerimaan yang bersumber dari pinjaman PEN untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

#### 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebesar Rp5.000.000.000,00. Kebijakan Pembiayaan Daerah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.11.**  
**Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	Target		+/-
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>29.231.987.662,00</b>	<b>75.088.377.315,00</b>	<b>(45.856.389.653,00)</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>240.000.000.000,00</b>	<b>217.887.090.162,00</b>	<b>(22.112.909.838,00)</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000,00	5.327.806.337,00	(9.672.193.663,00)
Penerimaan Pinjaman Daerah	225.000.000.000,00	212.555.702.007,00	(12.444.297.993,00)
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	-
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>235.000.000.000,00</b>	<b>212.887.090.162,00</b>	<b>(22.112.909.838,00)</b>

#### 2.3. Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 dan perubahannya, dengan indikator dan capaian kinerja yang keseluruhannya tersebar dalam program dan kegiatan berdasarkan urusan dan fungsi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku penanggungjawab program dan kegiatan.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Capaian kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 jika dibandingkan dengan kinerja APBD periode 2021 baik pendapatan, belanja daerah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah pusat terhadap pengurangan alokasi dana transfer sehingga berpengaruh terhadap Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2022 dari sisi pendapatan yang berdampak pada capaian kinerja belanja daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 2.3.1. Pendapatan Daerah.

Jumlah Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan APBD adalah sebesar Rp831.257.896.447,00 dengan realisasi sebesar Rp802.899.281.163,20 atau 96,58%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp786.646.026.698,47 terdapat kenaikan pendapatan daerah senilai Rp16.253.254.464,73 atau 2,07%.

#### 2.3.2. Belanja Daerah

Jumlah Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan APBD adalah sebesar Rp1.044.144.986.609,00 dengan realisasi sebesar Rp920.219.183.786,00 atau 88,13%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp800.156.597.676,03 terdapat kenaikan realisasi belanja daerah senilai Rp120.062.586.109,97 atau sebesar 15,00%.

#### 2.3.3. Pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan APBD adalah sebesar Rp212.887.090.162,00 dengan realisasi sebesar Rp212.899.900.493,80 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp18.838.377.314,70 terdapat kenaikan realisasi pembiayaan daerah senilai Rp194.061.523.179,10 atau 1030,14%.

Persentase tercapainya Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 secara umum sebagaimana disajikan dalam berikut ini.

Tabel 2.12.

#### Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>831.257.896.447,00</b>	<b>802.899.281.163,20</b>	<b>96,59</b>	<b>786.646.026.698,47</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>43.427.259.576,00</b>	<b>41.605.946.911,20</b>	<b>95,81</b>	<b>38.138.079.160,47</b>
Pajak Daerah	13.269.993.367,00	12.537.250.436,00	94,48	10.010.621.852,00
Retribusi Daerah	21.109.219.512,00	20.687.364.582,00	98,00	14.979.864.145,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.474.364.950,00	2.474.364.950,00	100,00	4.837.043.529,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.573.681.747,00	5.906.966.943,20	89,86	8.310.549.634,47
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>742.586.777.795,00</b>	<b>727.806.014.320,00</b>	<b>98,01</b>	<b>731.703.335.938,00</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>587.130.897.718,00</b>	<b>581.593.054.974,00</b>	<b>99,06</b>	<b>585.188.642.087,00</b>
Dana Transfer Umum –Dana Bagi Hasil (DBH)	9.613.882.989,00	10.514.486.704,00	109,37	12.800.921.362,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dana Transfer Umum –Dana Alokasi Umum (DAU)	438.496.561.000,00	436.974.250.495,00	99,65	437.999.954.000,00
Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.787.069.729,00	88.678.698.279,00	95,57	94.987.490.248,00
Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	46.233.384.000,00	45.425.619.496,00	98,25	39.400.276.477,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>129.990.413.000,00</b>	<b>129.709.942.030,00</b>	<b>99,78</b>	<b>133.302.249.800,00</b>
DID	6.368.630.000,00	6.368.630.000,00	100,00	0,00
Dana Desa	123.621.783.000,00	123.341.312.030,00	99,77	133.302.249.800,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>25.465.467.077,00</b>	<b>16.503.017.316,00</b>	<b>64,81</b>	<b>13.212.444.051,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil	25.465.467.077,00	16.503.017.316,00	64,81	13.212.444.051,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>45.243.859.076,00</b>	<b>33.487.319.932,00</b>	<b>74,02</b>	<b>16.804.611.600,00</b>
Pendapatan Hibah	13.324.179.000,00	13.324.179.000,00	100,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	31.919.680.076,00	20.163.140.932,00	63,17	16.804.611.600,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.044.144.986.609,00</b>	<b>920.219.183.786,00</b>	<b>88,13</b>	<b>800.156.597.676,03</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>531.437.547.847,00</b>	<b>501.183.224.645,00</b>	<b>94,31</b>	<b>480.889.361.566,66</b>
Belanja Pegawai	308.310.404.211,00	301.481.512.135,12	97,79	302.508.861.983,00
Belanja Barang dan Jasa	202.191.015.315,00	180.563.002.888,88	89,30	166.260.128.776,14
Belanja Bunga	5.200.346.251,00	5.200.346.251,00	100,00	0,00
Belanja Hibah	5.170.782.070,00	5.045.863.370,00	97,58	4.521.940.207,52
Belanja Bantuan Sosial	10.565.000.000,00	8.892.500.000,00	84,17	7.598.430.600,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>339.970.822.759,00</b>	<b>249.758.102.523,00</b>	<b>73,46</b>	<b>127.420.364.842,37</b>
Belanja Modal Tanah	3.917.953.076,00	3.917.953.074,00	100,00	1.654.743.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.990.453.168,00	22.654.556.480,00	83,94	20.099.069.382,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.281.753.582,00	20.611.697.456,00	96,85	36.428.364.408,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	283.117.547.524,00	200.252.654.512,00	70,73	64.032.970.721,38
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.663.115.409,00	2.321.241.001,00	49,78	5.205.217.330,46
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>94.710.807,00</b>	<b>3,16</b>	<b>11.246.336.607,00</b>
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	94.710.807,00	3,16	11.246.336.607,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>169.736.616.003,00</b>	<b>169.183.145.811,00</b>	<b>99,67</b>	<b>180.600.534.660,00</b>
Belanja Bagi Hasil	1.364.999.222,00	1.092.000.000,00	80,00	2.774.572.460,00
Belanja Bantuan Keuangan	168.371.616.781,00	168.091.145.811,00	99,83	177.825.962.200,00
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(212.887.090.162,00)</b>	<b>(117.319.902.622,80)</b>	<b>55,11</b>	<b>(13.510.570.977,56)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>212.887.090.162,00</b>	<b>212.899.900.493,80</b>	<b>100,00</b>	<b>18.838.377.314,70</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>217.887.090.162,00</b>	<b>217.899.900.493,80</b>	<b>100,00</b>	<b>21.338.377.314,70</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.327.806.337,00	5.327.806.337,14	100,00	21.338.377.314,70
Penerimaan Pinjaman Daerah	212.555.702.007,00	212.564.908.020,66	100,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.581.818,00	7.186.136,00	200,63	0,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>212.887.090.162,00</b>	<b>212.899.900.493,80</b>	<b>100,00</b>	<b>18.838.377.314,70</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>95.579.997.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327.806.337,14</b>

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

1. Capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022 selain keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan sejak dari perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan, secara teknis penetapan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah dirasionalisasikan sesuai kondisi riil potensi pendapatan daerah dan kebutuhan belanja daerah dengan skala prioritas dan indikator-indikator pencapaian kinerja masing-masing program dan kegiatan.
2. Kondusifitas dan dukungan kehidupan bermasyarakat yang aman sehingga tercipta stabilitas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan sehingga program-program prioritas dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Penguatan fungsi dan peran Sumber Daya Manusia (SDM) birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keuangan Negara/Daerah, diantaranya ketepatan waktu dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Faktor penghambat tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

1. Rasionalisasi potensi pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diikuti dengan strategi dan sumber daya yang memadai untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan.
2. Persentase tingkat kepatuhan kewajiban masyarakat pada negara/daerah untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih menjadi persoalan, karena masyarakat mempertanyakan kompensasi atas kewajiban mereka kepada negara/daerah atau asas manfaat yang diterima oleh masyarakat.
3. Kewaspadaan terhadap aktivitas titik rawan bencana, yang berdampak pada penetapan lokus pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sehingga perlu dilakukan realokasi dan relokasi lokus kegiatan.
4. Adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
5. Untuk belanja modal, rendahnya realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 disebabkan oleh tidak selesainya pekerjaan yang sudah ada perikatan kontrak dengan pihak ketiga, diantaranya yang bersumber dari DAK Fisik dan Dana PEN.
6. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat tidak didukung dengan sumber daya keuangan daerah yang memadai, sehingga pemerintah kesulitan membiayai kebutuhan infrastruktur yang diharapkan masyarakat.



**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**





### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

### 3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan merupakan ikhtisar capaian program dan kegiatan yang menghasilkan output pendapatan dan belanja yang tersebar pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Data ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang disajikan menunjukkan ukuran secara kuantitatif penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Lembata pada periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 yang akan dijelaskan dalam Bab V, penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

Kinerja (*performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya *measurement* atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang pengelolaannya menggunakan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

#### 3.1.1. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang. Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Tujuan analisis rasio keuangan ini adalah untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.



### 3.1.2. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu Kinerja Anggaran dan Anggaran Kinerja. Kinerja Anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja Kepala Daerah, sedangkan Anggaran Kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh Kepala Daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali Kepala Daerah selaku manager eksekutif. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Analisis *Surplus/Defisit* APBD

Analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal di pemerintahan daerah. Analisis ini disajikan dengan pendekatan *surplus/defisit* = Pendapatan Daerah - Belanja Daerah.

2. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

DDF antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti (i) PAD terhadap total penerimaan daerah, (ii) Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Daerah (BHP-BPD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), (iii) Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD).

3. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

4. Upaya Fiskal/Posisi Fiskal

Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas membayar di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat. Hal ini berarti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajak.

5. Analisis Efektivitas

Analisis ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

6. Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah

Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk mengetahui jenis pajak/retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang.

7. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio ini digunakan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 8. Kemampuan Pinjaman Daerah

Kemampuan suatu daerah dalam mendapatkan uang atau manfaat dari pihak lain yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik.

Dengan indikator-indikator tersebut, dapat dihitung kinerja keuangan daerah selama periode 2022 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2022, periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 baik untuk pendapatan maupun terhadap belanja daerah.

Dari Total Pendapatan Daerah (TPD) sebesar Rp831.257.896.447,00 yang ditargetkan dalam Perubahan APBD, realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp802.899.281.163,20 atau 96,59%. Target Pendapatan Daerah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 92 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dari total realisasi pendapatan daerah tersebut di atas, salah satu jenis yang menjadi Indikator Kinerja Keuangan Daerah adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah yang akan terukur dari analisis efektivitas (PAD) yaitu Analisa terhadap jumlah belanja yang dikeluarkan untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan atau dapat melebihi target, selain itu untuk menentukan indeks kinerja pajak dan retribusi daerah apakah termasuk kategori prima, potensial, berkembang dan/atau terbelakang.

Tahun Anggaran 2022 realisasi PAD sebesar Rp41.605.946.911,20 atau sebesar 95,81% dari target setelah perubahan APBD sebesar Rp43.427.259.576,00. Pencapaian target ini dapat menjadi gambaran tentang kinerja fiskal daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dalam mendanai penyelenggaraan dan pembangunan di Kabupaten Lembata. Secara SKPD realisasi Pendapatan Daerah dapat disajikan dalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dinas Pendidikan	5.000.000,00	6.358.011,00	(1.358.011,00)	127,16	21.437.281,00
2	Dinas Kesehatan	1.410.470.000,00	1.042.318.139,00	368.151.861,00	73,89	6.746.663.875,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	15.428.118.612,00	16.039.995.472,00	(611.876.860,00)	103,96	11.307.662.106,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176.900.000,00	310.357.780,00	(133.457.780,00)	175,44	30.935.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	2.500.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	2.500.000,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	500.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
10	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.500.000,00	4.538.905,00	(2.038.905,00)	181,55	30.129.694,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000,00	10.725.000,00	(725.000,00)	107,25	16.628.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	2.500.000,00
13	Dinas Perhubungan	1.506.526.400,00	1.099.041.950,00	407.484.450,00	72,95	905.179.236,98
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	145.000.000,00	178.800.009,00	(33.800.009,00)	123,31	95.604.549,00
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	701.296.000,00	668.375.400,00	32.920.600,00	95,30	462.272.850,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110.306.000,00	110.441.000,00	(135.000,00)	100,12	47.928.000,00
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan	563.320.000,00	431.431.900,00	131.888.100,00	76,58	1.000.000,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	35.000.000,00	160.301.625,00	(125.301.625,00)	458,00	18.144.000,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	2.500.000,00
20	Dinas Perikanan	332.000.000,00	369.478.000,00	(37.478.000,00)	111,28	354.386.000,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	521.500.000,00	470.934.000,00	50.566.000,00	90,30	548.655.070,00
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.000,00	500.367,00	(367,00)	100,07	500.000,00
23	Sekretariat Daerah	187.000.000,00	167.626.000,00	19.374.000,00	89,63	70.024.686,69
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	5.500.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	5.000.000,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	796.417.438.568,00	768.711.609.289,20	27.705.829.278,80	96,52	755.655.025.214,55
27	Badan Pendapatan Daerah	13.483.070.867,00	12.934.228.976,00	548.841.891,00	95,92	10.232.540.135,25
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.250.000,00	3.760.000,00	(510.000,00)	115,69	4.560.000,00
29	Inspektorat Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	2.500.000,00
30	Kecamatan Nubatukan	188.000.000,00	147.759.340,00	40.240.660,00	78,59	59.051.000,00
31	Kecamatan Lebatukan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
32	Kecamatan Omesuri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.200.000,00
33	Kecamatan Buyasuri	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	500.000,00
34	Kecamatan Atadei	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
35	Kecamatan Nagawutung	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	500.000,00
36	Kecamatan Ile Ape	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
37	Kecamatan Wulandoni	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
38	Kecamatan Ile Ape Timur	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	5.000.000,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>831.257.896.447,00</b>	<b>802.899.281.163,20</b>	<b>28.358.615.283,80</b>	<b>96,59</b>	<b>786.646.026.698,47</b>

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tabel 3.1 menjadi indikator untuk menghitung kinerja keuangan yaitu tingkat kemandirian dan ketergantungan Pemerintah Daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lembata.

#### 1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Dengan menggunakan formula berikut ini, dapat dihitung tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Pembiayaan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

Dengan menganut basis akrual sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.605.946.911,20 dibagi dengan realisasi Pendapatan Transfer dan Pinjaman Daerah sebesar Rp940.370.922.340,66 adalah sebesar 4,42%.

**Tabel 3.2.**

#### Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,01 -10,00	Sangat Kurang
10,01 -20,00	Kurang
20,01 -30,00	Sedang
30,01 -40,00	Cukup
40,01 -50,00	Baik
> 50,000	Sangat Baik



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Dari rasio kemandirian pembiayaan daerah sebesar 4,42 % pada Tahun Anggaran 2022 di atas, dan berdasarkan Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah pada tabel 3.2 di atas, maka tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lembata tahun 2022 masuk dalam kategori **sangat kurang** dan bahkan turun 0,79% dari 5,21% pada tahun 2021 sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata pada Tahun Anggaran 2022 juga tetap memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap alokasi dana dari pemerintah tingkat atas dan pinjaman daerah. Jika dihubungkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Kabupaten Lembata masuk dalam kategori pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Rasio kemandirian yang kurang menunjukkan bahwa pada sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal, sebagai akibat masih relatif potensi PAD yang dapat digali oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam pemungutan berdasarkan undang-undang/persyaratan pemerintah pusat dan daerah hanya menjalankan serta menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan bantuan provinsi. Inisiatif, kreatifitas dan kemauan daerah sangat diperlukan dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari jalan yang dapat memungkinkan mengatasi kekurangan pembiayaan di daerahnya.

#### 2. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Dengan menggunakan formula di bawah ini dapat dihitung tingkat ketergantungan daerah.

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Pendapatan APBD Tanpa Subsidi}}$$

Berdasarkan LRA Tahun Anggaran 2022 dapat dihitung tingkat ketergantungan daerah adalah sebesar realisasi PAD Rp41.605.946.911,20 bagi realisasi pendapatan dalam APBD tanpa subsidi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp802.899.281.163,20 dikurangi pendapatan transfer sebesar Rp727.806.014.320,00 sama dengan Rp75.093.266.843,20 atau sama dengan 55,41%.

Tabel 3.3.

#### Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,01 -10,00	Sangat Rendah
10,01 -20,00	Rendah
20,01 -30,00	Sedang



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
30,01 -40,00	Cukup
40,01 -50,00	Tinggi
> 50,000	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri ± Fisipol UGM , 1991

Dengan penilaian tingkat ketergantungan keuangan daerah sebesar 55,41% maka tingkat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD rendah dan kemandirian keuangan daerah rendah, sehingga keuangan daerah Kabupaten Lembata diklasifikasikan memiliki tingkat penilaian ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Lembata **sangat tinggi**. Hal ini juga menggambarkan bahwa pada Tahun Anggaran 2022 ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lembata terhadap bantuan pemerintah tingkat atas sangat tinggi.

### 3. Tingkat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio Desentralisasi Fiskal juga merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) di kali 100%. Secara umum, semakin tinggi Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin tinggi tingkat Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dan sebaliknya, semakin rendah Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin rendah Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dihitung dengan memperhitungkan rasio Total Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah, sehingga semakin besar rasio penilaian ini, maka semakin baik tingkat pelaksanaan dan tanggung jawab kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dengan menggunakan formula berikut ini dapat dihitung tingkat desentralisasi fiskal daerah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Penerimaan Pendapatan Daerah}}$$

Dari LRA Tahun Anggaran 2022 dapat dihitung tingkat desentralisasi fiskal adalah sebesar realisasi PAD sebesar Rp41.605.946.911,20 bagi realisasi



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp802.899.281.163,20 sama dengan 5,18%.

Tabel 3.4.

#### Kriteria Penilaian Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,01 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,000	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri ± Fisipol UGM, 1991

Dari hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Lembata pada Tahun Anggaran 2022 dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih **sangat kurang** karena hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 5,18% dari total pendapatan daerah.

#### 4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1% atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Dengan menggunakan formula berikut ini dapat dihitung tingkat rasio efektivitas PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Penerimaan Pendapatan Daerah}}$$

Dari LRA Tahun Anggaran 2022 dapat dihitung rasio efektivitas PAD dari realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.605.946.911,20 berbanding dengan target PAD dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.427.259.576,00 sama dengan 95,81%.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

## PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

**Tabel 3.5.**  
**Kriteria Rasio Efektivitas PAD**

Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
Di atas 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 -90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Berdasarkan hasil rasio efektivitas PAD Kabupaten Lembata pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 95,81% dapat dijelaskan bahwa efektivitas PAD di Kabupaten Lembata pada Tahun Anggaran 2022 tergolong dalam kategori **efektif**.

### 5. Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1% atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pengelolaan PAD semakin baik, dengan menggunakan formula berikut ini, rasio efisiensi PAD dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Total Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

Dari LRA Tahun Anggaran 2022 dapat dihitung rasio efisiensi PAD dari total realisasi dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.183.065.213,00 yang merupakan akumulasi dari realisasi Program dan Kegiatan Belanja pada belanja Bidang Teknis antara lain belanja insentif aparat pemungut pajak dan retribusi daerah sebesar Rp502.533.948,00 belanja barang dan jasa sebesar Rp1.680.531.265,00 berbanding dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.605.946.911,20 sama dengan 5,25%.

**Tabel 3.6.**  
**Kriteria Rasio Efisiensi PAD**

Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
Di atas 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 -90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pemungutan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 sebesar 5,25 % dikategorikan **sangat efisien**, karena dengan rasio efisiensi sebesar 5,25% berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik dalam pemungutan pendapatan asli daerah.

Sedangkan untuk ikhtisar Anggaran Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan target dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 dan perubahannya, dimana target belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp1.044.144.986.609,00 dengan realisasi sebesar Rp920.219.183.786,00 atau 88,13%, dengan rincian realisasi belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.7.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD**

No	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dinas Pendidikan	179.626.646.080,00	163.821.850.045,00	15.804.796.035,00	91,20	159.081.207.609,78
2	Dinas Kesehatan	84.243.657.939,00	78.896.335.815,00	5.347.322.124,00	93,65	59.797.149.995,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	50.082.491.885,00	48.688.192.701,00	1.394.299.184,00	97,21	54.201.801.363,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	299.694.464.898,00	224.340.516.266,00	75.353.948.632,00	74,85	82.031.189.066,38
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.977.903.554,00	13.897.049.621,00	80.853.933,00	99,42	15.731.031.431,27
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.916.727.413,00	4.861.768.413,00	54.959.000,00	98,88	3.454.559.552,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.143.821.359,00	3.581.777.425,00	13.562.043.934,00	20,89	2.320.577.008,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.446.949.370,00	3.386.290.197,00	60.659.173,00	98,24	5.562.063.902,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.941.112.045,00	1.921.676.055,00	19.435.990,00	98,99	1.589.284.138,00
10	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.469.374.449,00	8.249.369.577,00	220.004.872,00	97,40	8.275.774.489,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.807.743.338,00	2.749.878.847,00	57.864.491,00	97,93	2.542.559.790,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.180.159.220,00	3.118.675.746,00	61.483.474,00	98,06	4.543.111.062,00
13	Dinas Perhubungan	5.105.619.653,00	5.027.577.161,00	78.042.492,00	98,47	12.048.052.056,10
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.252.550.276,00	3.227.243.357,00	25.306.919,00	99,22	3.696.809.551,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

No	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	5.245.773.013,00	5.176.897.187,00	68.875.826,00	98,68	4.361.237.957,00
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.128.436.554,00	2.020.885.469,00	107.551.085,00	94,94	1.889.718.491,00
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan	10.593.730.152,00	10.349.339.442,00	244.390.710,00	97,69	11.633.986.279,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.765.395.672,00	4.717.596.417,00	47.799.255,00	98,99	6.276.649.412,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.070.805.278,00	3.492.718.637,00	578.086.641,00	85,79	5.681.425.704,00
20	Dinas Perikanan	3.699.894.171,00	3.638.675.253,00	61.218.918,00	98,34	4.421.982.566,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17.986.286.565,00	17.573.561.782,00	412.724.783,00	97,70	15.666.038.639,00
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.905.677.640,00	1.868.882.682,00	36.794.958,00	98,06	1.504.651.746,00
23	Sekretariat Daerah	24.687.668.114,00	23.315.291.902,00	1.372.376.212,00	94,44	22.591.210.958,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.348.382.885,00	25.617.937.373,00	730.445.512,00	97,22	21.855.191.825,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.431.170.095,00	5.258.266.846,00	172.903.249,00	96,81	4.230.365.538,00
26	Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	202.798.726.665,00	197.371.408.851,00	5.427.317.814,00	97,32	214.648.461.431,00
27	Badan Pendapatan Daerah	5.663.565.908,00	5.243.290.034,00	420.275.874,00	92,57	3.947.429.031,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.690.204.625,00	8.372.336.334,00	1.317.868.291,00	86,39	25.490.012.521,00
29	Inspektorat Daerah	6.081.303.999,00	5.980.801.592,00	100.502.407,00	98,34	5.867.205.804,00
30	Kecamatan Nubatukan	11.561.924.026,00	11.343.806.520,00	218.117.506,00	98,11	12.290.647.218,00
31	Kecamatan Lebatukan	2.415.293.960,00	2.394.971.809,00	20.322.151,00	99,15	2.200.383.724,00
32	Kecamatan Omesuri	2.300.774.482,00	2.270.887.433,00	29.887.049,00	98,70	2.100.277.797,00
33	Kecamatan Buyasuri	2.406.636.939,00	2.379.793.853,00	26.843.086,00	98,88	2.404.756.101,00
34	Kecamatan Atadei	2.463.571.453,00	2.431.153.255,00	32.418.198,00	98,68	2.035.225.686,00
35	Kecamatan Nagawutung	2.396.381.188,00	2.383.105.408,00	13.275.780,00	99,44	2.592.731.519,00
36	Kecamatan Ile Ape	2.101.487.417,00	2.089.261.789,00	12.225.628,00	99,41	1.991.468.000,00
37	Kecamatan Wulandoni	2.359.355.047,00	2.270.895.084,00	88.459.963,00	96,25	2.555.294.450,00
38	Kecamatan Ile Ape Timur	1.994.643.001,00	1.952.384.912,00	42.258.089,00	97,88	1.942.072.117,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.158.676.281,00	4.936.832.696,00	221.843.585,00	95,69	5.103.002.148,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.044.144.986.609,00</b>	<b>920.219.183.786,00</b>	<b>123.864.583.905,00</b>	<b>88,13</b>	<b>800.156.597.676,03</b>

Untuk Pembiayaan Daerah dari target Pembiayaan Netto dalam perubahan APBD TA. 2022 sebesar Rp212.887.090.162,00 terealisasi sebesar Rp212.899.900.493,80. Dengan realisasi *Surplus/Defisit* LRA sebesar (Rp117.319.902.622,80) maka *Surplus/Defisit* LRA dijumlahkan dengan Pembiayaan Netto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sebesar Rp95.579.997.870,99. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8.**  
**Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>212.887.090.162,00</b>	<b>212.899.900.493,80</b>	<b>100,00</b>
2	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>217.887.090.162,00</b>	<b>217.899.900.493,80</b>	<b>100,00</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.327.806.337,00	5.327.806.337,14	100,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	212.555.702.007,00	212.564.908.020,66	100,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.581.818,00	7.186.136,00	200,63
3	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
4	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>212.887.090.162,00</b>	<b>212.899.900.493,80</b>	<b>100,00</b>
5	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	-	<b>95.579.997.870,99</b>	-

### 3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Kinerja keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang tergambar dalam realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara makro sebagaimana tergambar dalam uraian diatas dalam setiap tahapan masih terdapat masalah-masalah yang menyebabkan kinerja keuangan belum maksimal sesuai target, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Perencanaan target dan kinerja pendapatan daerah yang telah dirasionalkan sesuai potensi/sumber pendapatan daerah belum dimaksimalkan pencapaiannya yang dalam pelaksanaan pemungutan, selain kesungguhan dari aparat pemungut untuk bertanggung jawab atas target yang telah ditetapkan, juga disebabkan oleh masyarakat yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban kepada negara dan daerah.

Daerah belum mampu membangun sumber-sumber pendapatan yang potensial untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena minimnya pendanaan/pembiayaan daerah.

Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat/Penandatanganan Kontrak (PPK) masing-masing belum memahami fungsi, tugas dan kewenangan mereka dalam mengorganisir kegiatan/paket pekerjaan yang menjadi kewenangan masing-masing pejabat, hal ini ditunjukkan dengan tidak disalurkannya DAK Fisik tahap III pada dua SKPD, yang berdampak pada tingkat realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan.

Keterbatasan SDM pada SKPD dalam mengoperasikan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi kendala teknis bagi daerah dalam mempercepat realisasi penyerapan belanja daerah.

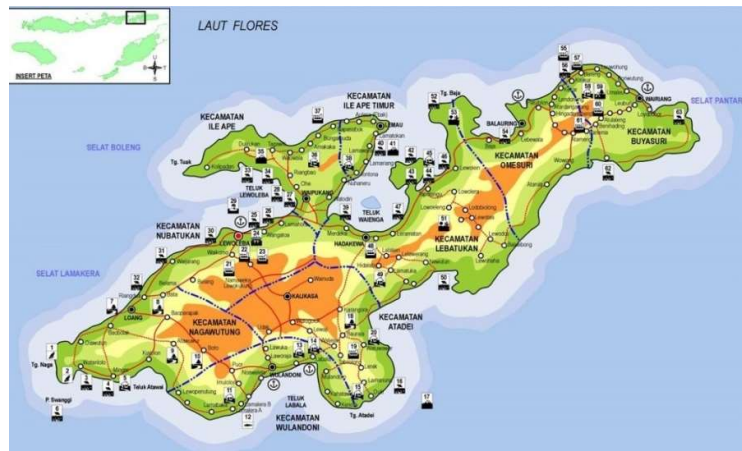
Sebagian SDM pejabat pengelola keuangan daerah/SKPD tidak memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang diembannya, sehingga dalam pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan dan belanja daerah SKPD mengalami kesulitan.

### 3.3. FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG DALAM PENCAPAIAN KINERJA

1. Adanya komitmen yang tinggi dari Penjabat Bupati Lembata dalam mendorong percepatan pembangunan dan pencapaian kinerja yang tinggi di segala bidang pelaksanaan tugas termasuk dalam bidang keuangan daerah.
2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah memberikan jaminan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD dengan membuat Pakta Integritas.
3. Sinergisitas dan harmonisasi antar Lembaga Eksekutif dan Lembaga DPRD sebagai mitra dan Aparat Penyelenggara Pemerintahan di Daerah semakin terbangun dengan baik.
4. Ada langkah strategis untuk meningkatkan *performance* pengelola keuangan daerah dan memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dilakukan dengan mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah secara penuh di Kabupaten Lembata.



**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**





**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**4.1. ENTITAS PELAPORAN**

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan Keuangan entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada Pemerintah Kabupaten Lembata terdapat 39 entitas akuntansi yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

**4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu basis kas.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Neraca sesuai LHP BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada Laporan Keuangan periode sebelumnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas Laporan Keuangan.

**4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan



untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### 4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

##### 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang tidak melalui RKUD untuk Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana Kapitasi JKN yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang tidak melalui RKUD untuk Dana BOS pada SD / SMP Negeri berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPD) yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.

##### 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
  - 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.  
Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
  - 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- (a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dan dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
- (b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu, maka atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- (c) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
  - 1) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
  - 2) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;
  - 3) Pengeluaran yang tidak melalui RKUD untuk Dana Kapitasi JKN, diakui berdasarkan SP2B yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD;
  - 4) Pengeluaran yang tidak melalui RKUD untuk Dana BOS, diakui berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.
- b. Pengukuran :
  - 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
  - 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



#### 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

b. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian terhadap beban yaitu :

- 1) Beban pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- 3) Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 5) Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.



c. Beban diukur sesuai dengan:

Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### 4.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- c. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Pengakuan Transfer :

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer:

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
  - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
  - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- 3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan Laporan Keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

- 5) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

g. Pengukuran Transfer:

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer:

- a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer:

- a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Penilaian Transfer :

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya.

#### 4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



b. Pengukuran

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

**4.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

- a. Setara Kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- b. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.
- c. Klasifikasi

Dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Kas di Kas Daerah
- 2) Kas di bendahara pengeluaran
- 3) Kas di bendahara penerimaan
- 4) Kas di BLUD
- 5) Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN
- 6) Kas di Bendahara Dana BOS

d. Pengakuan

Kas dan Setara Kas diakui pada saat Kas dan Setara Kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

**4.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek**

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
  - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
  - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- b. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

#### 4.4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

##### a. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

##### b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
- 2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 3) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 4) Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Central) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 6) Dana Bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan pendapatan dana bergulir yang digulirkan lagi.

#### 4.4.10. Kebijakan Akuntansi Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

- d. Piutang diakui saat *Diterbitkan surat ketetapan*; atau
- 1) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
  - 2) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- e. Pengukuran Piutang
- 1) Pengukuran Piutang Pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
    - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
    - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
    - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
  - 2) Pengukuran Piutang Transfer adalah sebagai berikut:
    - a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
    - b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
    - c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- f. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Nilai nominal penyisihan piutang tak tertagih di catat dalam Aset Lainnya sebagai piutang tidak lancar lainnya.
- g. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- 1) Kualitas Piutang Lancar dengan kriteria 0 sampai dengan 1 tahun;
  - 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar dengan kriteria 1 sampai dengan 3 tahun;
  - 3) Kualitas Piutang Diragukan dengan kriteria 3 sampai 5 tahun, dan
  - 4) Kualitas Piutang Macet dengan kriteria diatas 5 tahun.
- h. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- 1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
  - 2) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).



#### 4.4.11. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; atau
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

b. Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

c. Penatausahaan

- 1) Persediaan dicatat dengan menggunakan Metode Perpektual/buku. Seluruh mutasi persediaan, baik masuk maupun keluar serta saldo persediaan dicatat dalam pembukuan;
- 2) Mutasi keluar-masuk barang dan pencatatannya menggunakan Metode FIFO (*First In First Out*). Dengan metode ini, barang yang dikeluarkan adalah barang yang lebih dahulu masuk, sehingga saldo persediaan adalah barang-barang persediaan yang berasal dari pembelian yang termuda/terakhir; dan
- 3) Beban Persediaan

Dengan pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera, tidak dimaksud untuk sepanjang satu periode.

d. Beban Persediaan:

Pengukuran pemakaian persediaan di akhir periode pelaporan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan harga pembelian terakhir.



#### 4.4.12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

a. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

b. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
  - (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - (e) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

c. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan alat angkutan dan alat berat yang sama dengan atau lebih besar dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - (a) Pengeluaran untuk peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat yang sama dengan atau lebih besar dari Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - (b) Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan/ternak, tanaman, dan Aset Tetap Lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sama dengan atau lebih besar dari Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - (c) Aset tetap lainnya berupa buku-buku perpustakaan sama dengan atau lebih besar dari Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); dan
  - (d) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, bangunan/gedung, dan jalan/irigasi/jaringan.

d. Pengukuran Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- e. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- 1) Biaya perencanaan;
    - (a) Biaya lelang;
    - (b) Biaya persiapan tempat;
    - (c) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
    - (d) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
    - (e) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
    - (f) Biaya konstruksi; dan
    - (g) Biaya kepanitiaan.
  - f. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
    - 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ke atas;
    - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke atas;
    - 3) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan Aset Tetap Lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke atas; dan
    - 4) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) ke atas.
  - g. Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*). Dan penyusutan ditetapkan per bulan dengan beban penyusutan yang dihitung mulai bulan bersangkutan Aset Tetap mulai dimanfaatkan.
  - h. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
  - i. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
  - j. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

#### 4.4.13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

#### a. Pengakuan

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Utang Beban, diakui pada saat:
  - a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
  - b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah; dan
- 4) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

#### b. Pengukuran

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

#### 4.4.14. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
- b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

## PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

### BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### BAB V

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

##### 5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, menyajikan informasi sumber-sumber daya dan ekonomi dan penggunaannya, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan, atas akun pendapatan, belanja dan transfer, surplus/(defisit), pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Selain itu menggambarkan kinerja dan kemampuan keuangan daerah untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

##### 5.1.1. PENDAPATAN– LRA

*dalam rupiah*

Pendapatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	831.257.896.447,00	802.899.281.163,20	786.646.026.698,47

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp802.899.281.163,20 atau sebesar 96,59% dari target setelah Perubahan APBD 2022 sebesar Rp831.257.896.447,00 dengan kenaikan sebesar Rp16.253.254.464,73 atau sebesar 2,07% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp786.646.026.698,47.

##### 5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

*dalam rupiah*

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	43.427.259.576,00	41.605.946.911,20	38.138.079.160,47

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.605.946.911,20 atau sebesar 95,81% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp43.427.259.576,00 dengan kenaikan sebesar Rp3.467.867.750,73 atau sebesar 9,09% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp38.138.079.160,47 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.**  
**Pendapatan Asli Daerah - LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Pendapatan Pajak Daerah	13.269.993.367,00	12.537.250.436,00	94,48	10.010.621.852,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	21.109.219.512,00	20.687.364.582,00	98,00	14.979.864.145,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.474.364.950,00	2.474.364.950,00	100,00	4.837.043.529,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	6.573.681.747,00	5.906.966.943,20	89,86	8.310.549.634,47
	<b>Jumlah</b>	<b>43.427.259.576,00</b>	<b>41.605.946.911,20</b>	<b>95,81</b>	<b>38.138.079.160,47</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LRA***dalam rupiah*

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>13.269.993.367,00</b>	<b>12.537.250.436,00</b>	<b>10.010.621.852,00</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah Rp12.537.250.436,00 atau sebesar 94,48% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp13.269.993.367,00 dengan kenaikan sebesar Rp2.526.628.584,00 atau sebesar 25,24% dari realisasi pada periode 2021 sebesar Rp10.010.621.852,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.**  
**Pendapatan Pajak Daerah – LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Pajak Hotel – LRA	87.500.000,00	108.593.300,00	124,11	47.579.500,00
1.1	Pajak Hotel	70.000.000,00	77.713.000,00	111,02	36.233.500,00
1.2	Pajak Losmen	5.000.000,00	0,00	0,00	286.000,00
1.3	Pajak Rumah penginapan dan sejenisnya	10.000.000,00	30.880.300,00	308,80	11.060.000,00
1.4	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar lebih dari 10 (sepuluh)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	1.055.000.000,00	1.752.341.095,00	166,10	1.932.248.524,00
2.1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.000.000,00	22.561.000,00	225,61	209.107.815,00
2.2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	35.000.000,00	43.170.000,00	123,34	33.713.400,00
2.3	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pajak Jasa Boga / Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000,00	1.686.610.095,00	168,66	1.689.427.309,00
3	Pajak Hiburan	5.000.000,00	5.850.000,00	117,00	0,00
3.1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	5.000.000,00	5.850.000,00	117,00	0,00
4	Pajak Reklame	75.500.000,00	116.896.744,00	154,83	73.536.027,00
4.1	Pajak Reklame Papan/Billboard / Videotron /Megatron	65.000.000,00	77.137.931,00	118,67	50.285.689,00
4.2	Pajak Reklame Kain	10.000.000,00	37.933.813,00	379,34	23.250.338,00
4.3	Pajak Reklame Berjalan	500.000,00	1.825.000,00	365,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan	2.366.708.236,00	2.815.751.120,00	118,97	2.474.134.503,00
5.1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.366.708.236,00	2.815.751.120,00	118,97	2.474.134.503,00
6	Pajak Air Tanah	5.000.000,00	5.508.000,00	110,16	3.090.000,00
6.1	Pajak Air Tanah	5.000.000,00	5.508.000,00	110,16	3.090.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.363.051.943,00	5.790.939.380,00	78,65	3.755.659.941,00
7.1	Pajak Granit/Andesit	1.250.000.000,00	672.893.445,00	53,83	538.373.636,00
7.2	Pajak Pasir dan Kerikil	1.562.500.000,00	526.277.935,00	33,68	503.655.242,00
7.3	Pajak Tanah Liat	1.875.000,00	8.822.697,00	470,54	17.800.302,00
7.4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.548.676.943,00	4.582.945.303,00	100,75	2.695.830.761,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.962.233.188,00	1.486.615.417,00	75,70	1.472.625.807,00
8.1	PBBP2	1.962.233.188,00	1.486.615.417,00	75,76	1.472.625.807,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	350.000.000,00	454.755.380,00	129,93	251.747.550,00
9.1	BPHTB-Pemindahan Hak	350.000.000,00	454.755.380,00	129,93	251.747.550,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.269.993.367,00</b>	<b>12.537.250.436,00</b>	<b>94,48</b>	<b>10.010.621.852,00</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pencapaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 mencapai 94,48% dari target setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pencapaian Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan sangat baik, namun beberapa jenis pajak daerah masih memiliki tingkat pencapaian yang rendah seperti Pajak Granit/Andesit yang hanya mencapai 53,83%, dan Pajak Pasir dan Kerikil yang hanya mencapai 33,68%, sedangkan Pajak Losmen, Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya, dan Pajak Kantin dan Sejenisnya tidak ada realisasi. Pencapaian yang sangat baik ini juga perlu ditingkatkan dan dievaluasi untuk mendapatkan data potensi pajak dan pemungutannya dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah Kabupaten Lembata di masa yang akan datang.

#### 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

*dalam rupiah*

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	21.109.219.512,00	20.687.364.582,00	14.979.864.145,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah Rp20.687.364.582,00 atau sebesar 98,00% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp21.109.219.512,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2022 ini mengalami peningkatan sebesar Rp5.707.500.437,00 atau sebesar 38,10% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp14.979.864.145,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.**  
**Pendapatan Retribusi Daerah – LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Retribusi Jasa Umum	17.627.793.248,00	17.851.669.017,00	101,27	12.910.570.595,00
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.816.052.248,00	17.055.523.608,00	101,42	12.140.920.242,00
1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	175.000.000,00	115.950.000,00	66,26	45.297.000,00
1.3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00	67.380.000,00	96,26	66.480.000,00
1.4	Retribusi Pelayanan Pasar	377.496.000,00	370.002.400,00	98,01	409.725.850,00
1.5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	67.745.000,00	85.200.000,00	125,77	157.525.000,00
1.6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.500.000,00	2.313.000,00	154,20	1.922.500,00
1.7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000,00	155.300.009,00	129,42	88.700.003,00
2	Retribusi Jasa Usaha	3.171.120.264,00	2.528.629.565,00	79,74	1.968.882.550,00
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	639.353.864,00	534.323.215,00	83,57	707.589.010,00
2.2	Retribusi Tempat Pelelangan	52.000.000,00	57.800.000,00	111,15	79.060.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
2.3	Retribusi Terminal	86.640.000,00	48.000.000,00	55,40	48.500.000,00
2.4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	333.800.000,00	257.255.400,00	77,07	254.338.000,00
2.5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.171.226.400,00	861.856.950,00	73,59	551.290.540,00
2.6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	519.600.000,00	451.460.000,00	86,89	15.978.000,00
2.7	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	368.500.000,00	317.934.000,00	86,28	312.127.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	310.306.000,00	307.066.000,00	98,96	100.411.000,00
3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	108.456.000,00	0,00	0,00	43.303.000,00
3.2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000,00	196.625.000,00	98,31	52.483.000,00
3.3	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000,00	1.400.000,00	140,00	4.625.000,00
3.4	Retribusi Izin Usaha Perikanan	850.000,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	109.041.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.109.219.512,00</b>	<b>20.687.364.582,00</b>	<b>98,00</b>	<b>14.979.864.145,00,00</b>

Tabel tersebut diatas menunjukkan pencapaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.687.364.582,00 atau sebesar 98,00% dari target setelah perubahan sebesar Rp21.109.219.512,00. Pencapaian Pendapatan Retribusi Daerah secara keseluruhan sangat baik, namun beberapa jenis Pendapatan Retribusi Daerah masih memiliki tingkat pencapaian yang rendah seperti Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang hanya mencapai 66,26% dan Retribusi Terminal yang hanya mencapai 55,40%.

**5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA***dalam rupiah*

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	2.474.364.950,00	2.474.364.950,00	4.837.043.529,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 adalah Rp2.474.364.950,00 atau sebesar 100% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp2.474.364.950,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp2.362.678.579,00 atau sebesar 95,49% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp4.837.043.529,00 dengan rincian sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.1.4.**  
**Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan***dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
<b>Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD</b>					
1	PT Bank NTT	2.474.364.950,00	2.474.364.950,00	100,00	4.837.043.529,00
2	PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PD Purin Lewo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.474.364.950,00</b>	<b>2.474.364.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.837.043.529,00</b>

**5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LRA***dalam rupiah*

Lain Lain PAD yang Sah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>6.573.681.747,32</b>	<b>5.906.966.943,20</b>	<b>8.310.549.634,47</b>

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 adalah Rp5.906.966.943,20 atau sebesar 89,86% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp6.573.681.747,32. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp2.403.582.691,27 atau sebesar 40,69% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.310.549.634,47 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.5.**  
**Lain-Lain PAD Yang Sah – LRA***dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	500.000.000,00	335.001.549,00	67,00	68.886.000,00
1.1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	335.001.549,00	67,00	11.681.000,00
1.2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	57.205.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
2.1	Hasil Sewa BMD	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
3	Jasa Giro	355.000.000,00	415.203.297,74	116,96	718.721.522,98
3.1	Jasa Giro Pada Kas Daerah	320.000.000,00	350.639.970,60	109,57	619.889.871,30
3.2	Jasa Giro Pada Kas di Bendahara	35.000.000,00	49.541.782,53	141,55	98.831.651,68
3.3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	615.498,61	0,00	0,00
3.4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	14.406.046,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Bunga	1.242.000.000,00	1.824.226.152,22	146,88	107.899.691,00
4.1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.242.000.000,00	1.824.226.152,22	146,88	107.899.691,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.800.000.000,00	2.282.630.494,97	60,07	1.482.912.933,57
5.1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	500.000.000,00	383.757.573,00	76,75	12.309.188,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
5.2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain	3.300.000.000,00	1.898.872.921,97	57,54	1.470.603.745,57
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	249.995.000,00	369.767.375,27	147,91	54.850.000,00
6.1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	249.995.000,00	369.767.375,27	147,91	54.850.000,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	415.683.907,00	0,00	86.383.962,23
7.1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	415.683.907,00	0,00	86.383.962,23
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	162.130.493,00
8.1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
8.2	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	142.130.493,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	8.750.000,00	11.640.000,00	133,03	19.000.000,00
9.1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.500.000,00	5.700.000,00	380,00	0,00
9.2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	7.250.000,00	5.940.000,00	81,93	19.000.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	215.436.747,32	50.314.167,00	23,35	65.093.156,69
10.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	187.039,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	215.034.599,32	50.313.800,00	23,40	58.365.686,69
10.3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	367,00	0,00	6.727.470,00
10.4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	215.109,00	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	5.542.171.875,00
11.1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,0	0,00	5.542.171.875,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.573.681.747,32</b>	<b>5.906.966.943,20</b>	<b>89,86</b>	<b>8.310.549.634,47</b>

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pencapaian realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar 89,86%. Rendahnya pencapaian realisasi ini antara lain terdapat pada:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

1. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan dengan persentase realisasi yang hanya mencapai 67,00%, yang disebabkan tidak terlaksananya rencana penjualan alat angkutan pada Tahun Anggaran 2022;
2. Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang hanya mencapai 60,07% yang disebabkan penetapan target terlalu tinggi dan tidak berdasarkan jumlah nilai SKTJM yang sudah ditetapkan atau yang diprediksi akan ditetapkan maupun potensi tertagihnya kerugian daerah dalam tahun berjalan.

#### 5.1.1.2. Pendapatan Transfer – LRA

*dalam rupiah*

Pendapatan Transfer -LRA	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	742.586.777.795,00	727.806.014.320,00	731.703.335.938,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp727.806.014.320,00 atau sebesar 98,01% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp742.586.777.795,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp3.897.321.618,00 atau sebesar 0,53% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp731.703.335.938,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.6.**  
**Pendapatan Transfer – LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	717.121.310.718,00	711.302.997.004,00	99,19	718.490.891.887,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.465.467.077,00	16.503.017.316,00	64,81	13.212.444.051,00
<b>Jumlah</b>		<b>742.586.777.795,00</b>	<b>727.806.014.320,00</b>	<b>98,01</b>	<b>731.703.335.938,00</b>

#### 5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

*dalam rupiah*

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	717.121.310.718,00	711.302.997.004,00	718.490.891.887,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp711.302.997.004,00 atau sebesar 99,19% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp717.121.310.718,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp7.187.894.883,00 atau sebesar 1,00% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp718.490.891.887,00 dengan rincian sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.1.7.**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA***dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Dana Perimbangan	587.130.897.718,00	581.593.054.974,00	99,06	585.188.642.087,00
1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	9.613.882.989,00	10.514.486.704,00	109,37	12.800.921.362,00
1.2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	438.496.561.000,00	436.974.250.495,00	99,65	437.999.954.000,00
1.3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.787.069.729,00	88.678.698.279,00	95,57	94.987.490.248,00
1.4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	46.233.384.000,00	45.425.619.496,00	98,25	39.400.276.477,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	6.368.630.000,00	6.368.630.000,00	100,00	0,00
2.1	Dana Insentif Daerah (DID)	6.368.630.000,00	6.368.630.000,00	100,00	0,00
3	Dana Desa	123.621.783.000,00	123.341.312.030,00	99,77	133.302.249.800,00
3.1	Dana Desa	123.621.783.000,00	123.341.312.030,00	99,77	133.302.249.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>717.121.310.718,00</b>	<b>711.302.997.004,00</b>	<b>99,19</b>	<b>718.490.891.887,00</b>

**5.1.1.2.1.1.Dana Perimbangan***dalam rupiah*

Dana Perimbangan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>587.130.897.718,00</b>	<b>581.593.054.974,00</b>	<b>585.188.642.087,00</b>

Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp581.593.054.974,00 atau sebesar 99,06% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp587.130.897.718,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp3.595.587.113,00 atau sebesar 0,61% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp585.188.642.087,00 dengan rincian sebagai berikut:

**a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA***dalam rupiah*

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>9.613.882.989,00</b>	<b>10.514.486.704,00</b>	<b>12.800.921.362,00</b>

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.514.486.704,00 atau sebesar 109,37% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp9.613.882.989,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp2.286.434.658,00 atau sebesar 17,86% dari realisasi periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.800.921.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.1.8.  
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.716.788.953,00	5.846.480.824,00	123,95	7.434.893.213,00
2	DBH PPh Pasal 21	2.183.483.062,00	2.022.763.000,00	92,64	2.478.263.944,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	225.700.498,00	188.760.692,00	83,63	198.107.610,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	111.689.378,00	103.887.353,00	0,00	91.339.049,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	330.040.000,00	292.174.500,00	88,53	899.159.673,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	44.412.098,00	102.053.335,00	229,79	20.250.098,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	43.458.000,00	56.000,00	0,13	4.407.625,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
<b>Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>		<b>9.613.882.989,00</b>	<b>10.514.486.704,00</b>	<b>109,36</b>	<b>12.800.921.362,00</b>

**b. Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA**

*dalam rupiah*

Dana Transfer Umum - DAU	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	438.496.561.000,00	436.974.250.495,00	437.999.954.000,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 adalah Rp436.974.250.495,00 atau sebesar 99,65% dari target setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp438.496.561.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp1.025.703.505,00 atau sebesar 0,23% dari realisasi periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp437.999.954.000,00.

**c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA**

*dalam rupiah*

Dana Transfer Khusus –DAK Fisik	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	92.787.069.729,00	88.678.698.279,00	94.987.490.248,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus–DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 adalah Rp88.678.698.279,00 atau sebesar 95,57% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp92.787.069.729,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp6.308.791.969,00 atau sebesar 6,64% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp94.987.490.248,00. Rincian DAK Fisik meliputi DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

**Tabel 5.1.9.**  
**Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.367.461.824,00	1.367.461.824,00	100,00	865.144.350,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.954.287.350,00	8.954.287.350,00	100,00	5.491.001.455,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.394.599.889,00	7.919.956.100,00	76,19	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	0,00	0,00	0,00	3.269.825.869,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	465.312.000,00	465.312.000,00	100,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	1.840.376.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	19.245.277.014,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.896.125.347,00	3.802.674.450,00	97,60	5.271.392.500,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	12.185.104.478,00	12.185.104.478,00	100,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	490.864.632,00	488.124.768,00	99,44	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.723.457.590,00	1.723.457.590,00	100,00	1.398.828.180,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	1.038.712.200,00	1.038.712.200,00	100,00	349.280.800,00
13	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	100,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.410.292.725,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.962.860.444,00	9.962.860.444,00	100,00	11.736.340.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	14.597.236.000,00	14.597.236.000,00	100,00	7.506.547.848,00
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.430.826.161,00	4.430.826.161,00	100,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	11.882.180.550,00
19	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.125.123.000,00	3.587.586.100,00	70,00	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.617.296.000,00
21	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.341.341.096,00
22	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	11.943.897.750,00	11.943.897.750,00	100,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3.691.201.064,00	3.691.201.064,00	100,00	0,00
24	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler	0,00	0,00	0,00	9.240.298.861,00
25	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	0,00	8.467.304.000,00
26	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.054.763.000,00
<b>Jumlah Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>		<b>92.787.069.729,00</b>	<b>88.678.698.279,00</b>	<b>95,57</b>	<b>94.987.490.248,00</b>

**d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA***dalam rupiah*

Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>46.233.384.000,00</b>	<b>45.425.619.496,00</b>	<b>39.400.276.477,00</b>

Realisasi Dana Alokasi Khusus–DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 adalah Rp45.425.619.496,00 atau sebesar 98,25% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp46.233.384.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp6.025.343.019,00 atau sebesar 15,29% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp39.400.276.477,00. Rincian DAK Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.1.10.**  
**Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	21.882.523.000,00	21.882.523.000,00	100,00	23.586.991.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.320.000.000,00	1.480.250.000,00	112,14	726.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.558.231.000,00	2.558.231.000,00	100,00	3.449.631.400,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.982.400.000,00	1.487.104.000,00	75,02	1.663.800.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	207.200.000,00	284.400.000,00	137,26	492.500.000,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.808.518.000,00	0,00	0,00	3.253.145.157,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.861.353.000,00	13.687.420.115,00	126,02	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	401.576.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.323.990.000,00	2.904.551.000,00	87,38	0,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	400.199.952,00	99,85	390.304.000,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.734.392.230,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	369.695.000,00	297.235.429,00	80,40	392.223.000,00
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	3.151.289.690,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	663.198.000,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	453.900.000,00	443.705.000,00	97,75	560.000.000,00
<b>Jumlah Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-Non Fisik)</b>		<b>46.233.384.000,00</b>	<b>45.425.619.496,00</b>	<b>98,25</b>	<b>39.400.276.477,00</b>

#### 5.1.1.2.1.2. Dana Insentif Daerah -LRA

dalam rupiah

Dana Insentif Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>6.368.630.000,00</b>	<b>6.368.630.000,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan Dana Insentif Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.368.630.000,00 dari anggaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.368.630.000,00.

#### 5.1.1.2.1.3. Dana Desa

dalam rupiah

Dana Desa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>123.621.783.000,00</b>	<b>123.341.312.030,00</b>	<b>133.302.249.800,00</b>

Pendapatan Dana Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2022 adalah sebesar Rp123.341.312.030,00 dari anggaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp123.621.783.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp9.960.937.770,00 atau sebesar 7,47% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp133.302.249.800,00.

#### 5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA

dalam rupiah

Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>25.465.467.077,00</b>	<b>16.503.017.316,00</b>	<b>13.212.444.051,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Lembata adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.503.017.316,00 atau sebesar 64,81% dari anggaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.465.467.077,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp3.290.573.265,00 atau sebesar 24,91% dari realisasi Tahun Anggaran 2021

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

sebesar Rp13.212.444.051,00 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.11.**  
**Dana Transfer Antar Daerah – LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Pendapatan Bagi Hasil	25.465.467.077,00	16.503.017.316,00	64,80	13.212.444.051,00
1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.465.467.077,00	16.503.017.316,00	64,80	13.212.444.051,00
1.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.334.775.368,00	2.282.152.194,00	42,78	1.723.942.228,00
1.1.2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.597.059.470,00	773.360.430,00	29,78	1.024.847.355,00
1.1.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.392.410.213,00	3.912.693.279,00	52,93	2.004.282.354,00
1.1.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	14.508.181,00	5.985.578,00	41,26	7.173.767,00
1.1.5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.126.713.845	9.528.825.835,00	94,10	8.452.198.347,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>		<b>25.465.467.077,00</b>	<b>16.503.017.316,00</b>	<b>64,81</b>	<b>13.212.444.051,00</b>

**5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**

*dalam rupiah*

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>45.243.859.076,00</b>	<b>33.487.319.932,00</b>	<b>16.804.611.600,00</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.487.319.932,00 atau sebesar 74,02% dari target setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp45.243.859.076,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp16.682.708.332,00 atau sebesar 99,27% dari realisasi periode Tahun 2021 sebesar Rp16.804.611.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.12.**  
**Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah –LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Pendapatan Hibah	13.324.179.000,00	13.324.179.000,00	100,00	0,00
2	Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	31.919.680.076,00	20.163.140.932,00	63,17	16.804.611.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>45.243.859.076,00</b>	<b>33.487.319.932,00</b>	<b>74,02</b>	<b>16.804.611.600,00</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****5.1.2. BELANJA DAERAH-LRA***dalam rupiah*

Belanja Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>1.044.144.986.609,00</b>	<b>920.219.183.786,00</b>	<b>800.156.597.676,03</b>

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah Rp920.219.183.786,00 atau sebesar 88,13% dari alokasi anggaran Belanja Daerah setelah perubahan APBD sebesar Rp1.044.144.986.609,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp120.062.586.109,97 atau sebesar 15,00% dari realisasi belanja daerah pada periode Tahun 2021 sebesar Rp800.156.597.676,03 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.13.**  
**Belanja Daerah-LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Operasi	531.437.547.847,00	501.183.224.645,00	94,31	480.889.361.566,66
2	Belanja Modal	339.970.822.759,00	249.758.102.523,00	73,46	127.420.364.842,37
3	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	94.710.807,00	3,16	11.246.336.607,00
4	Transfer	169.736.616.003,00	169.183.145.811,00	99,67	180.600.534.660,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.044.144.986.609,00</b>	<b>920.219.183.786,00</b>	<b>88,13</b>	<b>800.156.597.676,03</b>

**5.1.2.1. BELANJA OPERASI***dalam rupiah*

Belanja Operasi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>531.437.547.847,00</b>	<b>501.183.224.645,00</b>	<b>480.889.361.566,66</b>

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah Rp501.183.224.645,00 atau sebesar 94,31% dari alokasi anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp531.437.547.847,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp20.293.863.078,34 atau sebesar 4,22% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp480.889.361.566,66.

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.14.**  
**Belanja Operasi – LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Pegawai	308.310.404.211,00	301.481.512.135,12	97,78	302.508.861.983,00
2	Belanja Barang dan Jasa	202.191.015.315,00	180.563.002.888,88	89,30	166.260.128.776,14
3	Belanja Bunga	5.200.346.251,00	5.200.346.251,00	100,00	0,00
4	Belanja Hibah	5.170.782.070,00	5.045.863.370,00	97,58	4.521.940.207,52
5	Belanja Bantuan Sosial	10.565.000.000,00	8.892.500.000,00	84,17	7.598.430.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>531.437.547.847,00</b>	<b>501.080.424.645,00</b>	<b>94,31</b>	<b>480.889.361.566,66</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai - LRA

dalam rupiah

Belanja Pegawai – LRA	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	308.310.404.211,00	301.481.512.135,12	302.508.861.983,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah Rp301.481.512.135,12 atau sebesar 97,79% dari alokasi anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp308.310.404.211,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp1.027.349.847,88 atau sebesar 0,34% dari realisasi periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp302.508.861.983,00,00 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.15.**  
**Belanja Pegawai – LRA**

dalam rupiah

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	241.707.028.416,00	238.013.428.511,00	98,47	236.129.542.071,00
1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	181.869.091.618,00	179.999.359.754,00	98,97	178.465.938.173,00
1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.585.153.685,00	17.198.752.025,00	97,80	17.367.765.851,00
1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.084.542.974,00	6.007.210.000,00	98,72	5.541.405.000,00
1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.151.390.512,00	11.075.332.000,00	99,31	10.875.312.000,00
1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.297.121.643,00	3.260.280.159,00	98,88	3.254.035.000,00
1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.216.963.930,00	11.101.407.140,00	98,96	11.405.468.220,00
1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	413.568.517,00	407.135.315,00	98,44	379.735.894,00
1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.795.537,00	2.538.341,00	66,87	2.777.886,00
1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.400.000.000,00	7.478.450.628,00	89,02	7.377.992.843,00
1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	440.400.000,00	370.740.517,00	84,18	334.323.982,00
1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.245.000.000,00	1.112.222.632,00	89,33	1.124.787.222,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.241.613.954,00	7.811.524.547,00	94,78	9.756.372.321,00
2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.241.613.954,00	7.811.524.547,00	94,78	9.725.997.321,00
2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestari Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	30.375.000,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.517.506.558,00	43.900.607.689,12	94,37	40.874.680.681,00
3.1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pungutan Pajak Daerah	515.681.592,00	364.095.214,00	70,60	366.075.386,00
3.2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pungutan Retribusi Daerah	199.067.828,00	24.973.438,00	12,54	45.346.923,00
3.3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	22.558.131.700,00	21.995.228.760,00	97,50	23.749.263.340,00
3.4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.583.231.000,00	2.581.921.800,00	99,94	3.679.521.500,00
3.5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.420.550.000,00	3.016.350.000,00	88,18	2.849.325.000,00
3.6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.207.437.322,00	4.263.547.437,12	81,87	2.638.221.551,00
3.7	Belanja Honorarium	10.497.148.116,00	10.136.420.600,00	96,56	6.651.330.381,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
3.8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.536.259.000,00	1.518.070.440,00	98,81	895.596.600,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.233.948.855,00	11.222.308.026,00	99,89	10.016.221.960,00
4.1	Belanja Uang Representasi DPRD	589.338.973,00	589.260.000,00	99,98	672.420.000,00
4.2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47.245.800,00	47.245.800,00	100,00	47.245.800,00
4.3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	56.487.600,00	56.487.600,00	100,00	56.487.600,00
4.4	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00	48.132.000,00
4.5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	814.233.000,00
4.6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.147.900,00	87.147.900,00	100,00	87.147.900,00
4.7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	2.231.550,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
4.9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	472.500.000,00
4.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	809.652,00	809.652,00	100,00	718.852,00
4.11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.566.222.380,00	2.556.892.074,00	99,63	2.561.336.808,00
4.12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.659.600.000,00	4.659.600.000,00	100,00	3.366.000.000,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	239.146.428,00	175.741.694,00	73,48	161.011.972,00
5.1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	19.845.000,00	12.600.000,00	63,49	53.400.000,00
5.2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	833.013,00	0,00	0,00	1.092.000,00
5.3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	34.020.000,00	22.680.000,00	66,66	96.120.000,00
5.4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	651.780,00	434.520,00	66,66	3.258.900,00
5.5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	633.048,00	546.520,00	86,33	1.638.512,00
5.6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	810,00	480,00	59,25	1.280,00
5.7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.413.968,00	940.800,00	17,37	5.144.160,00
5.8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	460.512,00	20.160,00	4,37	84.960,00
5.9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384,00	60.480,00	17,51	272.160,00
5.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	67.249.687,00	50.704.153,00	75,39	0,00
5.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	109.693.226,00	87.754.581,00	80,00	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	371.160.000,00	357.901.668,00	96,42	266.460.005,00
6.1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	83.160.000,00	83.160.000,00	100,00	0,00
6.2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	288.000.000,00	274.741.668,00	95,39	266.460.005,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	5.304.572.973,00
7.1	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	5.304.572.973,00
	<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>308.310.404.211,00</b>	<b>301.481.512.135,12</b>	<b>97,79</b>	<b>302.508.861.983,00</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Informasi yang termuat dalam tabel diatas dapat dijelaskan lebih lanjut untuk keterbandingan penyajian data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya akibat perubahan penyajian rincian belanja antara belanja pegawai dengan belanja barang dan jasa. Nilai total realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp301.481.512.135,12 apabila dibandingkan dengan nilai total realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp302.508.861.983,00.

#### 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa –LRA

*dalam rupiah*

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	202.191.015.315,00	180.563.002.888,88	166.260.128.776,14

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 adalah Rp180.563.002.888,88 atau sebesar 89,30% dari anggaran belanja barang dan jasa setelah perubahan APBD sebesar Rp202.191.015.315,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp14.302.874.112,74 atau sebesar 8,60% dari realisasi belanja barang dan jasa pada periode 2021 sebesar Rp166.260.128.776,14 dengan rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1.16.**

**Rincian Belanja Barang dan Jasa –LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Barang	46.302.067.512,00	44.032.006.449,00	95,10	48.907.230.317,27
2	Belanja Jasa	87.713.874.071,00	79.115.845.361,88	90,20	65.524.601.560,50
3	Belanja Pemeliharaan	13.883.401.225,00	10.900.870.127,00	78,52	15.387.748.774,37
4	Belanja Perjalanan Dinas	34.190.206.711,00	31.104.876.639,00	90,98	26.657.167.377,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.076.460.578,00	2.040.959.216,00	98,29	577.250.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.025.005.218,00	13.368.445.096,00	74,17	9.206.130.747,00
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>202.191.015.315,00</b>	<b>180.563.002.888,88</b>	<b>89,30</b>	<b>166.260.128.776,14</b>

#### a. Belanja Barang -LRA

*dalam rupiah*

Belanja Barang	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	46.302.067.512,00	44.032.006.449,00	48.907.230.317,27

Realisasi Belanja Barang adalah sebesar Rp44.032.006.449,00 atau sebesar 95,10% dari anggaran belanja barang setelah perubahan APBD sebesar Rp46.302.067.512,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp4.875.223.868,27 atau sebesar 9,97% dari realisasi Belanja Barang periode Tahun 2021 sebesar Rp48.907.230.317,27, dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

**Tabel 5.1.17.**  
**Rincian Belanja Barang - LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Barang Pakai Habis	46.285.967.512,00	44.018.586.449,00	95,10	48.902.647.817,27
2	Belanja Bahan/Material	16.100.000,00	13.420.000,00	83,35	4.582.500,00
<b>Jumlah Belanja Barang</b>		<b>46.302.067.512,00</b>	<b>44.032.006.449,00</b>	<b>95,10</b>	<b>48.907.230.317,27</b>

#### b. Belanja Jasa

*dalam rupiah*

Belanja Jasa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>87.713.874.071,00</b>	<b>79.115.845.361,88</b>	<b>65.524.601.560,50</b>

Realisasi belanja Jasa adalah Rp79.115.845.361,88 atau sebesar 90,20% dari anggaran belanja jasa setelah perubahan APBD sebesar Rp87.713.874.071,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.591.243.801,38 atau sebesar 20,74% dari realisasi belanja jasa periode 2021 sebesar Rp65.524.601.560,50.

**Tabel 5.1.18.**  
**Rincian Belanja Jasa - LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Jasa Kantor	56.124.316.002,00	52.525.337.562,88	93,59	51.726.734.548,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.972.778.950,00	10.951.158.600,00	99,80	3.525.844.500,00
3	Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	18.000.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.006.298.880,00	869.659.300,00	86,42	458.598.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.168.121.440,00	1.066.150.526,00	91,27	590.045.847,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	99.350.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.400.000,00	3.000.000,00	55,56	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.768.942.799,00	8.915.320.807,00	0,00	5.670.559.265,50
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	175.000.000,00	12.500.000,00	7,14	0,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.487.016.000,00	4.766.718.566,00	0,00	3.435.469.400,00
<b>Jumlah Belanja Jasa</b>		<b>87.713.874.071,00</b>	<b>79.115.845.361,88</b>	<b>90,20</b>	<b>65.524.601.560,50</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### c. Belanja Pemeliharaan

dalam rupiah

Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	13.883.401.225,00	10.900.870.127,00	15.387.748.774,37

Realisasi belanja pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp10.900.870.127,00 atau sebesar 78,52% dari anggaran pemeliharaan setelah perubahan APBD sebesar Rp13.883.401.225,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.486.878.647,37 atau sebesar 29,16% dari realisasi belanja pemeliharaan periode Tahun 2021 sebesar Rp15.387.748.774,37.

**Tabel 5.1.19.**  
**Rincian Belanja Pemeliharaan - LRA**

dalam rupiah

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	303.696.000,00	299.917.000,00	98,76	5.154.785.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.425.603.014,00	2.110.098.395,00	86,99	2.396.191.963,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.819.444.541,00	7.318.910.376,00	74,53	4.183.804.893,37
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.334.657.670,00	1.171.944.356,00	87,81	3.652.966.918,00
<b>Jumlah Belanja Pemeliharaan</b>		<b>13.883.401.225,00</b>	<b>10.900.870.127,00</b>	<b>78,52</b>	<b>15.387.748.774,37</b>

#### d. Belanja Perjalanan Dinas

dalam rupiah

Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	34.190.206.711,00	31.104.876.639,00	26.657.167.377,00

Realisasi belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2022 adalah Rp31.104.876.639,00 atau sebesar 90,98% dari anggaran perjalanan dinas setelah perubahan APBD sebesar Rp34.190.206.711,00 dengan kenaikan sebesar Rp4.447.709.262,00 atau sebesar 16,68% dari realisasi belanja perjalanan dinas periode 2021 sebesar Rp26.657.167.377,00.

**Tabel 5.1.20.**  
**Rincian Belanja Perjalanan Dinas- LRA**

dalam rupiah

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.190.206.711,00	31.104.876.639,00	90,98	26.657.167.377,00
<b>Jumlah Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>34.190.206.711,00</b>	<b>31.104.876.639,00</b>	<b>90,98</b>	<b>26.657.167.377,00</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

*dalam rupiah*

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	2.076.460.578,00	2.040.959.216,00	577.250.000,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.040.959.216,00 atau sebesar 98,29% dari anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setelah perubahan APBD sebesar Rp2.076.460.578,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.463.709.216,00 atau sebesar 253,57% dari realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 2021 sebesar Rp577.250.000,00.

**Tabel 5.1.21.**

#### Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat– LRA

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.333.250.000,00	1.323.421.400,00	99,26	520.250.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	743.210.578,00	717.537.816,00	96,55	57.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>		<b>2.076.460.578,00</b>	<b>2.040.959.216,00</b>	<b>98,29</b>	<b>577.250.000,00</b>

#### f. Belanja Barang dan Jasa BOS

*dalam rupiah*

BelanjaBarang dan Jasa BOS	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	18.025.005.218,00	13.368.445.096,00	9.206.130.747,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp13.368.445.096,00 atau sebesar 74,17% dari anggaran Belanja barang dan Jasa BOS setelah perubahan APBD sebesar Rp18.025.005.218,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.162.314.349,00 atau sebesar 45,21% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS periode 2021 sebesar Rp9.206.130.747,00.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.1.2.1.3. Belanja Bunga – LRA

dalam rupiah

Belanja Bunga	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	5.200.346.251,00	5.200.346.251,00	0,00

Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2022 adalah Rp5.200.346.251,00 atau sebesar 100,00% dari alokasi anggaran Belanja Bunga setelah perubahan APBD sebesar Rp5.200.346.251,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.200.346.251,00 dari realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00.

#### 5.1.2.1.4. Belanja Hibah – LRA

dalam rupiah

Belanja Hibah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	5.170.782.070,00	5.045.863.370,00	4.521.940.207,52

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 adalah Rp5.045.863.370,00 atau sebesar 97,58% dari alokasi anggaran Belanja Hibah setelah perubahan APBD sebesar Rp5.170.782.070,00 mengalami kenaikan sebesar Rp523.923.162,48 atau sebesar 11,59% dari realisasi belanja hibah periode 2021 sebesar Rp4.521.940.207,52 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.22.**  
**Rincian Belanja Hibah – LRA**

dalam rupiah

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.669.781.050,00	4.544.862.350,00	97,32	4.020.939.187,52
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	501.001.020,00	501.001.020,00	100,00	501.001.020,00
<b>Jumlah Belanja Hibah</b>		<b>5.170.782.070,00</b>	<b>5.045.863.370,00</b>	<b>97,58</b>	<b>4.521.940.207,52</b>

##### a. Belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

dalam rupiah

Belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	4.669.781.050,00	4.544.862.350,00	4.020.939.187,52

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.544.862.350,00 atau sebesar 97,32% dari Alokasi Anggaran Belanja Hibah Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.669.781.050,00 mengalami kenaikan sebesar Rp523.923.162,48 atau sebesar 13,03% dari Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 sebesar Rp4.020.939.187,52 dengan rincian sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.1.23.****Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia***dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	583.828.100,00	583.608.100,00	99,96	0,00
2	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.176.952.950,00	3.052.254.250	96,07	1.578.926.562,52
3	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan	909.000.000,00	909.000.000,00	100,00	2.442.012.625,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.669.781.050,00</b>	<b>4.544.862.350,00</b>	<b>97,32</b>	<b>4.020.939.187,52</b>

**b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik***dalam rupiah*

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>501.001.020,00</b>	<b>501.001.020,00</b>	<b>501.001.020,00</b>

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp501.001.020,00 atau sebesar 100% dari Alokasi Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp501.001.020,00 tidak mengalami perubahan dari Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 sebesar Rp501.001.020,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.24.****Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik***dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Hibah Kepada DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR)	82.760.724,00	82.760.724,00	100	82.760.724,00
2	Belanja Hibah Kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	61.896.600,00	61.896.600,00	100	61.896.600,00
3	Belanja Hibah Kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	47.990.196,00	47.990.196,00	100	47.990.196,00
4	Belanja Hibah Kepada DPC Partai Demokrat	61.300.224,00	61.300.224,00	100	61.300.224,00
5	Belanja Hibah Kepada DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	53.131.680,00	53.131.680,00	100	53.131.680,00
6	Belanja Hibah Kepada DPD Partai Amanat Nasional (PAN)	49.716.072,00	49.716.072,00	100	49.716.072,00
7	Belanja Hibah Kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	20.837.016,00	20.837.016,00	100	20.837.016,00
8	Belanja Hibah Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	59.429.772,00	59.429.772,00	100	59.429.772,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi Tahun 2021
9	Belanja Hibah Kepada DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	33.207.300,00	33.207.300,00	100	33.207.300,00
10	Belanja Hibah Kepada DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	30.731.436,00	30.731.436,00	100	30.731.436,00
<b>JUMLAH</b>		<b>501.001.020,00</b>	<b>501.001.020,00</b>	<b>100</b>	<b>501.001.020,00</b>

#### 5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial – LRA

dalam rupiah

Belanja Bantuan Sosial - LRA	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>10.565.000.000,00</b>	<b>8.892.500.000,00</b>	<b>7.598.430.600,00</b>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 adalah Rp8.892.500.000,00 atau sebesar 84,17% dari alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp10.565.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.294.069.400,00 atau 17,03% dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.25.**  
**Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial -LRA**

dalam rupiah

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	60.000.000,00	0,00	0,00	1.795.930.600,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	10.355.000.000,00	8.892.500.000,00	85,87	5.802.500.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial</b>		<b>10.565.000.000,00</b>	<b>8.892.500.000,00</b>	<b>84,17</b>	<b>7.598.430.600,00</b>

Dari uraian dalam Tabel diatas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

##### a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Realisasi Bantuan sosial barang yang direncanakan kepada Individu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari Alokasi Anggaran setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp60.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.795.930.600,00 atau sebesar 100% dari realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.795.930.600,00.

##### b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat berupa Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.892.500.000,00 atau sebesar 85,88% dari Alokasi Anggaran setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp10.355.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.090.000.000,00 atau sebesar 53,25% dari realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.802.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Tabel 5.1.26.

#### Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

dalam Rupiah

No	Uraian	Alamat Penerima	Jumlah Dana
1	Pembayaran Tahap I 25% atas Belanja Bantuan Sosial Uang untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan	Desa Atakore	93.750.000,00
		Desa Baobolak	93.750.000,00
		Desa Dikesare	93.750.000,00
		Desa Imulolong	93.750.000,00
		Desa Katakeja	93.750.000,00
		Desa Kolipadan	93.750.000,00
		Desa Lamadale	93.750.000,00
		Desa Lelata	93.750.000,00
		Desa Loyobohor	93.750.000,00
		Desa Palilolon	93.750.000,00
		Desa Penikene	93.750.000,00
		Desa Petuntawa	93.750.000,00
		Desa Posiwatu	93.750.000,00
<b>Jumlah 1</b>			<b>1.218.750.000,00</b>
2	Pembayaran Tahap II 45% atas Belanja Bantuan Sosial Uang untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan	Desa Atakore	168.750.000,00
		Desa Baobolak	168.750.000,00
		Desa Dikesare	168.750.000,00
		Desa Imulolong	168.750.000,00
		Desa Katakeja	168.750.000,00
		Desa Kolipadan	168.750.000,00
		Desa Lamadale	168.750.000,00
		Desa Lelata	168.750.000,00
		Desa Loyobohor	168.750.000,00
		Desa Palilolon	168.750.000,00
		Desa Penikene	168.750.000,00
		Desa Petuntawa	168.750.000,00
		Desa Posiwatu	168.750.000,00
<b>Jumlah 2</b>			<b>2.193.750.000,00</b>
3	Pembayaran Tahap I sebesar 50% atas Belanja Bantuan Sosial Uang untuk diserahkan kepada masyarakat : Bantuan rumah untuk korban bencana	Desa Lodotodokowa	40.000.000,00
<b>Jumlah 3</b>			<b>40.000.000,00</b>
4	Pembayaran Tahap II sebesar 50% atas Belanja Bantuan Sosial Uang untuk diserahkan kepada masyarakat : Bantuan rumah untuk korban bencana	Desa Lodotodokowa	40.000.000,00
<b>Jumlah 4</b>			<b>40.000.000,00</b>
5	Pembayaran Tahap I 25% atas Belanja Bantuan Sosial Uang untuk diserahkan kepada masyarakat : Pekerjaan Peningkatan Kualitas Perumahan	Desa Pada	150.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Barat	150.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba	150.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Selatan	150.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Tengah	150.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Timur	150.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Utara	150.000.000,00
		Kelurahan Selandoro	150.000.000,00
<b>Jumlah 5</b>			<b>1.200.000.000,00</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	Alamat Penerima	Jumlah Dana
6	Pembayaran Tahap II 45% atas Belanja Bantuan Sosial Uang Uang untuk diserahkan kepada masyarakat : Pekerjaan Peningkatan Kualitas Perumahan	Desa Pada	270.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Barat	270.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba	270.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Selatan	270.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Tengah	270.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Timur	270.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Utara	270.000.000,00
		Kelurahan Selandoro	270.000.000,00
<b>Jumlah 6</b>			<b>2.160.000.000,00</b>
7	Pembayaran Tahap III 30% atas Belanja Bantuan Sosial Uang Uang untuk diserahkan kepada masyarakat : Pekerjaan Peningkatan Kualitas Perumahan	Desa Pada	180.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Barat	180.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba	180.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Selatan	180.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Tengah	180.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Timur	180.000.000,00
		Kelurahan Lewoleba Utara	180.000.000,00
		Kelurahan Selandoro	180.000.000,00
<b>Jumlah 7</b>			<b>1.440.000.000,00</b>
8	Bantuan Sosial (Hibah Khusus Pamsimas)	Desa Baolangu	200.000.000,00
		Desa Lewoeleng	200.000.000,00
		Desa Watokobu	200.000.000,00
<b>Jumlah 8</b>			<b>600.000.000,00</b>
<b>TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>			<b>8.892.500.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana digambarkan di atas berupa bantuan peningkatan kualitas perumahan sebanyak 120 unit rumah yang tersebar di 7 (tujuh) kelurahan dan 1 (satu) desa, dengan masing-masing kelurahan/desa sebanyak 15 (lima belas) unit rumah. Pelaksanaan kegiatan ini telah direalisasikan seluruhnya, namun saat ini sedang dalam proses penyelidikan Kejaksaan Negeri Lembata karena diduga adanya indikasi kerugian keuangan negara/daerah yang disebabkan adanya kelalaian dalam proses perencanaan.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Realisasi Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0% dari Alokasi Anggaran setelah perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp150.000.000,00 tidak mengalami perubahan dan tidak ada realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2022.

#### 5.1.2.2. Belanja Modal –LRA

dalam rupiah

Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>339.970.822.759,00</b>	<b>249.758.102.523,00</b>	<b>127.420.364.842,36</b>

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah Rp249.758.102.523,00 atau sebesar 73,46% yang merupakan Realisasi dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari rencana anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp339.970.822.759,00 mengalami kenaikan sebesar Rp122.337.737.680,63 atau 96,01% dari realisasi 2021 sebesar Rp127.420.364.842,36 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.27.**  
**Rincian Belanja Modal – LRA**

dalam rupiah

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Modal Tanah	3.917.953.076,00	3.917.953.074,00	100,00	1.654.743.000,00
2	Peralatan dan Mesin	26.990.453.168,00	22.654.556.480,00	83,94	20.099.069.382,53
3	Gedung dan Bangunan	21.281.753.582,00	20.611.697.456,00	96,85	36.428.364.408,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	283.117.547.524,00	200.252.654.512,00	70,73	64.032.970.721,38
5	Aset Tetap Lainnya	4.663.115.409,00	2.321.241.001,00	49,77	5.205.217.330,46
<b>Jumlah</b>		<b>339.970.822.759,00</b>	<b>249.758.102.523,00</b>	<b>73,46</b>	<b>127.420.364.842,37</b>

#### 5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

dalam rupiah

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>3.917.953.076,00</b>	<b>3.917.953.074,00</b>	<b>1.654.743.000,00</b>

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 adalah Rp3.917.953.074,00 atau 100,00%, dari pagu setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.917.953.076,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.263.210.074,00 atau sebesar 136,77% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.654.743.000,00.

Realisasi tersebut merupakan Pengadaan Tanah untuk:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### a. Belanja Modal Tanah Persil:

Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat tinggal sebesar Rp3.679.191.074,00 atau sebesar 100,00% dari target Setelah perubahan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp3.679.191.076,00.

#### b. Belanja Modal Tanah Non Persil:

Belanja Modal Tanah Pertambangan sebesar Rp238.762.000,00 atau sebesar 100% dari target Setelah perubahan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp238.762.000,00.

#### 5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*dalam rupiah*

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	26.990.453.168,00	22.654.556.480,00	20.099.069.382,53

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 adalah Rp22.654.556.480,00 atau sebesar 83,94% dari anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp26.990.453.168,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.555.487.097,47 atau sebesar 12,71% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp20.099.069.382,53.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.654.556.480,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.28.**  
**Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0	239.096.000,00
1.1	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0	239.096.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	224.889.300,00	199.800.000,00	88,84	0,00
2.1	Belanja Modal Electric Generating Set	224.889.300,00	199.800.000,00	88,84	0,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	119542500,00	110850000,00	92,72	1.361.722.500,00
3.1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	1.274.450.000,00
3.2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	119.542.500,00	110.850.000,00	92,72	87.272.500,00
4	Belanja Modal Alat Pengolahan	4.979.300,00	4.854.650,00	97,49	0,00
4.1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.979.300,00	4.854.650,00	97,49	0,00
5	Belanja Modal Alat Kantor	655.620.642,00	167.497.360,00	25,54	752.200.756,00
5.1	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.811.250,00	0,00	0	1.512.500,00
5.2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	151.177.392,00	143.926.360,00	95,20	351.963.576,00
5.3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	502.632.000,00	23.571.000,00	4,68	398.724.680,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.284.891.032,00	2.960.372.618,00	90,12	2.823.768.133,00
6.1	Belanja Modal Mebel	2.375.995.108,00	2.180.606.513,00	91,77	1.698.664.830,00
6.2	Belanja Modal Alat Pendingin	405.835.231,00	339.524.900,00	83,66	592.845.840,00
6.3	Belanja Modal Alat Dapur	161.832.693,00	161.173.755,00	99,59	6.954.723,00
6.4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us)	33.814.3000,00	275.987.200,00	81,61	522.277.740,00
6.5	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.085.000,00	3.080.250,00	99,84	3.025.000,00
7	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	46.694.080,00	46.623.200,00	99,84	61.325.976,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
7.1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	31.694.080,00	31.638.200,00	99,82	61.325.976,00
7.2	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90	0,00
8	Belanja Modal Alat Studio	69.850.000,00	67.914.000,00	97,22	374.604.695,00
8.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.650.000,00	4.763.000,00	71,62	154.581.745,00
8.2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	23.200.000,00	23.151.000,00	99,78	20.222.950,00
8.3	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100	199.800.000,00
9	Belanja Modal Alat komunikasi	3.500.000,00	3.500.000,00	100	79.016.000,00
9.1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.500.000,00	3.500.000,00	100	6.981.000,00
9.2	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00	38.962.000,00
9.3	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	0,00	0,00	0,00	31.273.000,00
9.4	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	2.700.000.000,00	2.697.000.000,00	99,88	0,00
10.1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	2.700.000.000,00	2.697.000.000,00	99,88	0,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.271.957.575,00	5.266.377.417,00	99,89	2.487.035.514,00
11.1	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	363.309.614,00	363.308.814,00	99,99	0,00
11.2	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.032.901.936,00	1.029.685.938,00	99,68	2.473.455.514,00
11.3	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.875.746.025,00	3.873.382.665,00	99,93	2.473.455.514,00
12.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	13.580.000,00
12.1	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.580.000,00
13	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	580.175.250,00	580.175.250,00	100	340.960,00
13.1	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	580.175.250,00	580.175.250,00	100	0,00
13.2	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,0	0,00	0,00	340.960,00
14	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	6.665.400.000,00	6.246.563.740,00	93,71	6.806.748.738,53
14.1	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,0	0,00	0,00	19.081.000,00
14.2	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	6.665.400.000,00	6.246.563.740,00	93,71	6.787.667.738,53
15	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,0	0,00	0,00	485.900,00
15.1	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	0,0	0,00	0,00	485.900,00
16	Belanja Modal Komputer Unit	1.370.004.470,00	1.288.599.493,00	94,05	1.708.161.790,00
16.1	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,0	0,00	0,00	982.008.500,00
16.2	Belanja Modal Personal Computer	1.122.518.470,00	1.041.176.496,00	92,75	718.156.290,00
16.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	247.486.000,00	247.422.997,00	99,97	7.997.000,00
17	Belanja Modal Peralatan Komputer	776.604.618,00	719.223.881,00	92,61	259.254.805,00
17.1	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	303.477.118,00	246.688.381,00	81,28	101.729.805,00
17.2	Belanja Modal Peralatan Jaringan	473.127.500,00	472.535.500,00	99,87	153.885.000,00
17.3	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,0	0,00	0,00	3.640.000,00
18	Belanja Modal Sumur	75.000.000,00	74.052.000,00	98,73	0,00
18.1	Belanja Modal Sumur Pemboran	75.000.000,00	74.052.000,00	98,73	0,00
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	93.600.000,00	84.426.000,00	90,19	115.500.000,00
19.1	Belanja Modal Peralatan Permainan	93.600.000,00	84.426.000,00	90,19	115.500.000,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.047.744.401,00	2.136.726.871,00	42,33	3.029.807.615,00
18.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.047.744.401,00	2.136.726.871,00	42,33	3.029.807.615,00
<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		<b>26.990.453.168,00</b>	<b>22.654.556.480,00</b>	<b>83,94</b>	<b>20.099.069.382,53</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan –LRA***dalam rupiah*

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	21.281.753.582,00	20.611.697.456,00	36.428.364.408,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 adalah Rp20.611.697.456,00 atau sebesar 96,85% dari anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp21.281.753.582,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.816.666.952 atau 43,42% dari realisasi periode Tahun 2021 sebesar Rp36.428.364.408,00. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.611.697.456,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.29.**  
**Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan – LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	21.027.868.272,00	20.360.638.250,00	96,82	36.239.314.408,00
1.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.247.928.272,00	16.601.997.250,00	96,25	29.565.502.408,00
1.2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.779.940.000,00	3.758.641.000,00	99,43	6.673.812.000,00
2	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
2.1	Belanja Modal Candi/tugu/Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
3	Belanja Modal Tugu/Titik Kontrol/Pasti	253.885.310,00	251.059.206,00	98,88	176.950.000,00
3.1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	253.885.310,00	251.059.206,00	98,88	176.950.000,00
<b>Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>		<b>21.281.753.582,00</b>	<b>20.611.697.456,00</b>	<b>96,85</b>	<b>36.428.364.408,00</b>

**5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan –LRA***dalam rupiah*

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -LRA	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	283.117.547.524,00	200.252.654.512,00	64.032.970.721,38

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 adalah Rp200.252.654.512,00 atau sebesar 70,73% dari anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp283.117.547.524,00 dengan kenaikan sebesar Rp136.219.683.790,62 atau 212,73% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp64.032.970.721,38. Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp200.252.654.512,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.30.**  
**Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	275.180.427.738,00	193.376.518.247,00	70,27	46.645.748.668,57
1.1	Belanja Modal Jalan	274.818.560.295,00	193.110.018.894,00	70,26	46.014.719.218,57
1.2	Belanja Modal Jembatan	361.867.443,00	266.499.353,00	73,64	631.029.450,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	1.588.209.000,00	1.261.345.700,00	79,41	3.194.416.378,81
2.1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.667.086.378,81

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
2.2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai /Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	634.165.000,00	634.165.000,00	100	279.285.000,00
2.3	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	100	0,00
2.4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	944.044.000,00	617.180.700,00	65,37	1.248.045.000,00
3	Belanja Modal Instalasi	512.855.200,00	510.366.200,00	99,51	2.793.949.895,00
3.1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	312.855.200,00	312.366.200,00	99,84	657.068.895,00
3.2	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	1.955.881.000,00
3.3	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	200.000.000,00	198.000.000,00	99,00	181.000.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	5.836.055.586,00	5.104.424.365,00	87,46	11.398.855.779,00
4.1	Belanja Modal Jaringan Air Minum	5.586.571.336,00	4.855.673.365,00	86,91	10.613.915.279,00
4.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	56.720.250,00	56.000.000,00	98,73	199.000.000,00
4.3	Belanja Modal Jaringan Telepon	192.764.000,00	192.751.000,00	99,99	585.940.500,00
<b>Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>		<b>283.117.547.524,00</b>	<b>200.252.654.512,00</b>	<b>70,73</b>	<b>64.032.970.721,38</b>

**5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya***dalam rupiah*

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –LRA	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>4.663.115.409,00</b>	<b>2.321.241.001,00</b>	<b>5.205.217.330,45</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 adalah Rp2.321.241.001,00 atau sebesar 49,78% dari anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp4.663.115.409,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.883.976.329,45 atau 55,41% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp5.205.217.330,46. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.321.241.001,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.31.**  
**Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.558.138.000,00	1.557.592.097,00	99,96	3.564.908.586,46
1.1	Belanja Modal Buku Umum	658.138.000,00	657.592.097,00	99,91	2.375.044.784,46
1.2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	900.000.000,00	900.000.000,00	100	1.189.863.802,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	21.000.000,00	20.979.000,00	99,90	0,00
2.1	Belanja Modal Alat Musik	21.000.000,00	20.979.000,00	99,90	0,00
3	Belanja Modal Ternak	96.100.000,00	94.102.000,00	97,92	0,00
3.1	Belanja Modal Ternak Potong	96.100.000,00	94.102.000,00	97,92	0,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	99.999.000,00
4.1	Belanja Modal Kajian	0,00	0,00	0,00	99.999.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.987.877.409,00	648.567.904,00	21,70	1.540.309.744,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
5.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.987.877.409,00	648.567.904,00	21,70	1.540.309.744,00
<b>Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>		<b>4.663.115.409,00</b>	<b>2.321.241.001,00</b>	<b>49,78</b>	<b>5.205.217.330,45</b>

#### 5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

dalam rupiah

Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>94.710.807,00</b>	<b>11.246.336.607,00</b>

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah Rp94.710.807,00 atau sebesar 3,16% dari anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp3.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.151.625.800,00 atau sebesar 99,16% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp11.246.336.607,00.

Realisasi Belanja tidak terduga tahun 2022 sesuai SP2D dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.32.**  
**Rincian Belanja Tak Terduga –LRA**

dalam rupiah

No	Nama OPD	Uraian	Nomor dan Tanggal SP2D	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata	Lanjutan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Lembata Tahun 2021	24.06/04.0/000010/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.02/3/2022	184.611.130,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lembata	Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	24.06/04.0/000019/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.02/4/2022	2.110.091.716,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata	Penanganan CoronaVirus Disease 19 (COVID – 19) di Kabupaten Lembata Tahun 2022	24.06/04.0/000024/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.02/5/2022	15.432.700,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lembata	Bantuan Sosial kepada Alm. Bapak Petrus Aloysius (Pemulangan Jenazah dari Denpasar ke Lembata)	24.06/04.0/000070/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.06/9/2022	15.000.000,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lembata	Permintaan Pembayaran Kekurangan Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan, Belanja Provisi PEN	24.06/04.0/000106/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.07/12/2022	92.060,00
<b>Jumlah Realisasi</b>				<b>2.325.227.606,00</b>
<b>Total Pagu</b>				<b>3.000.000.000,00</b>
<b>Sisa Pagu</b>				<b>674.772.394,00</b>

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp94.710.807,00 sementara total Belanja Tidak Terduga sesuai SP2D sebesar Rp2.325.227.606,00. Selisih antara total Belanja Sesuai SP2D Rp2.325.227.606,00 dengan LRA Rp94.710.807,00 adalah sebesar Rp2.230.516.799,00. Dari nilai Rp2.230.516.799,00, sebesar Rp2.110.091.716,00 merupakan sisa kas pada bendahara Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dan sebesar Rp120.425.083,00 merupakan sisa kas pada bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tahun 2022. Rincian atas penyetoran sisa penghematan Belanja Tidak Terduga sesuai STS dengan rincian sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.1.33.****Rincian Penyetoran Sisa Penghematan Atas Belanja Tak Terduga***dalam rupiah*

Nomor dan Tanggal STS	Uraian	Jumlah Setor
1	2	3
0973/PAD.TB/VIII/PB/2022-03/08/2022	Penyetoran Sisa Penghematan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Covid-19 sesuai SP2D Nomor:24.06/04.0/000019/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.02/4/2022	2.110.091.716,00
02361/PAD.TB/XII/PB/2022-29/12/2022	Penyetoran Sisa Penghematan Belanja Tidak Terduga untuk Lanjutan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten : 24.06/04.0/000010/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/14/3/2022	120.425.083,00
<b>Jumlah STS Pengembalian Belanja Tak Terduga</b>		<b>2.230.516.799,00</b>

**5.1.2.4. Belanja Transfer***dalam rupiah*

Transfer	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>169.736.616.003,00</b>	<b>169.183.145.811,00</b>	<b>180.600.534.660,00</b>

Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2022 adalah Rp169.183.145.811,00 atau 99,67% dari anggaran setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp169.736.616.003,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.417.388.849,00 atau sebesar 6,32% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp180.600.534.660,00 sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.34.****Rincian Belanja Transfer***dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
	BELANJA TRANSFER				
1	Belanja Bagi Hasil	1.364.999.222,00	1.092.000.000,00	80,00	2.774.572.460,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	168.371.616.781,00	168.091.145.811,00	99,83	177.825.962.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>169.736.616.003,00</b>	<b>169.183.145.811,00</b>	<b>99,67</b>	<b>180.600.534.660,00</b>

**5.1.2.4.1. Belanja Transfer Bagi Hasil***dalam rupiah*

Belanja Transfer Bagi Hasil	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>1.364.999.222,00</b>	<b>1.092.000.000,00</b>	<b>2.774.572.460,00</b>

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 adalah Rp1.092.000.000,00 atau sebesar 80,00% dari alokasi anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp1.364.999.222,00 mengalami Penurunan sebesar Rp1.682.572.460,00 atau 60,64% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp2.774.572.460,00 dengan uraian sebagai berikut:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

**Tabel 5.1.35.**  
**Rincian Uraian Belanja Transfer Bagi Hasil**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.364.999.222,00	1.092.000.000,00	80,00	878.424.270,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	1.896.148.190,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.364.999.222,00</b>	<b>1.092.000.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>2.774.572.460,00</b>

Realisasi transfer bagi hasil pajak daerah adalah Rp1.092.000.000,00 atau sebesar 80,00% dari alokasi anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp1.364.999.222,00 yang direalisasikan kepada 144 Desa pada 9 Kecamatan, jika dibandingkan dengan periode 2021 dengan realisasi sebesar Rp878.424.270,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp213.575.730,00 atau sebesar 24,31%. Realisasi transfer bagi hasil retribusi daerah adalah Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari alokasi anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan periode 2021 dengan realisasi sebesar Rp1.896.148.190,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.896.148.190,00 atau sebesar 100,00%.

#### 5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

*dalam rupiah*

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>168.371.616.781,00</b>	<b>168.091.145.811,00</b>	<b>177.825.962.200,00</b>

Realisasi Bantuan Keuangan umum daerah kabupaten kepada pemerintah desa Tahun Anggaran 2022 adalah Rp168.091.145.811,00 atau sebesar 99,83% dari alokasi anggaran setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp168.371.616.781,00. Realisasi tersebut dialokasikan kepada 144 Desa pada 9 Kecamatan. Realisasi Bantuan Keuangan umum daerah kabupaten kepada pemerintah desa Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.734.816.389,00 atau sebesar 5,47% dari realisasi periode 2021 sebesar Rp177.825.962.200,00.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.36.**  
**Uraian Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Dana Desa	123.621.783.000,00	123.341.312.030,00	99,99	133.302.249.800,00
2	Alokasi Dana Desa	44.749.833.781,00	44.749.833.781,00	100	44.523.712.400,00
	<b>Sub Total</b>	<b>168.371.616.781,00</b>	<b>168.091.145.811,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>177.825.962.200,00</b>
	Bantuan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	P3ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>168.371.616.781,00</b>	<b>168.091.145.811,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>177.825.962.200,00</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Jika dirinci masing-masing dana yang ditransfer maka:

1. Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp123.341.312.030,00 atau sebesar 99,99% dari Alokasi Anggaran setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp123.621.783.000,00. Sisa Dana yang belum direalisasikan adalah sebesar Rp280.470.970,00 adalah Dana Desa Tahap II dan III untuk Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan yang dipotong langsung.
2. Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp44.749.833.781,00 atau sebesar 100,00% dari Alokasi Anggaran setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp44.749.833.781,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp44.523.712.400,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp226.121.381,00 atau 0,51%.

#### 5.1.3. SURPLUS/DEFISIT

*dalam rupiah*

Surplus / Defisit	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	(212.887.090.162,00)	(117.319.902.622,80)	(13.510.570.977,56)

Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2022 adalah deficit senilai Rp117.319.902.622,80 atau sebesar 55,11% dari target dalam perubahan APBD sebesar Rp212.887.090.162,00 yang merupakan selisih antara total realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp802.899.281.163,20 dengan total realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp920.219.183.786,00. Jika dibandingkan dengan realisasi periode 2021 defisit sebesar Rp13.510.570.977,56 terjadi penurunan defisit periode 2021 sebesar Rp103.809.331.645,24. Kondisi ini sebagai akibat kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak maksimal untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah, selain penetapan target PAD yang tidak rasional.

#### 5.1.4. PEMBIAYAAN DAERAH

*dalam rupiah*

Pembiayaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	212.887.090.162,00	212.899.900.493,00	18.838.377.314,70

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah Rp212.899.900.493,80 atau sebesar 100,01% dari target dalam perubahan APBD sebesar Rp212.887.090.162,00 yang merupakan selisih antara total realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp217.899.900.493,80 dengan total realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan periode 2021 dengan realisasi sebesar Rp18.838.377.314,70 maka terjadi kenaikan pada periode 2022 sebesar Rp194.061.523.178,30 atau sebesar 1.030,14%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

dalam rupiah

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	217.887.090.162,00	217.899.900.493,80	21.338.377.314,70

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp217.899.900.493,80 atau sebesar 100,01% dari target dalam perubahan APBD sebesar Rp217.887.090.162,00. Rincian Penerimaan Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1.37.**  
**Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022**

dalam rupiah

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.327.806.337,00	5.327.806.337,14	100	21.338.377.314,70
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	212.555.702.007,00	212.564.908.020,66	100	0,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.581.818,00	7.186.136,00	200,63	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>217.887.090.162,00</b>	<b>217.899.900.493,80</b>	<b>100</b>	<b>21.338.377.314,70</b>

#### 5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

dalam rupiah

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 atau sebesar 100% dari target setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi ini adalah Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00, sehingga mengalami kenaikan di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00.

#### 5.1.4.3. Pembiayaan Netto

dalam rupiah

Pembiayaan Netto	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	212.887.090.162,00	212.899.900.493,80	18.838.377.314,70

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 adalah Rp212.899.900.493,80 atau sebesar 100% dari target dalam Perubahan APBD sebesar Rp212.887.090.162,00. Jika dibandingkan dengan periode 2021 realisasi pembiayaan netto sebesar Rp18.838.377.314,70 atau terjadi kenaikan pembiayaan netto pada periode 2022 sebesar (Rp90.296.260.233,86) atau sebesar (1030,13%).



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)– LRA

*dalam rupiah*

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	0,00	95.579.997.871,00	5.327.806.337,14

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 adalah Rp95.579.997.871,00 dari target dalam Perubahan APBD sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan periode 2021 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp5.327.806.337,14 atau terjadi kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada periode 2022 sebesar Rp90.252.191.533,86 atau naik sebesar 1.693,98%.

Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 diperoleh dari Surplus/Defisit ditambah Pembiayaan Netto. Jika disandingkan dengan Laporan Neraca maka pembentukan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 dapat dirincikan sebagaimana Tabel berikut ini:

**Tabel 5.1.38.**

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 dan Tahun 2021**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Kas di Kas Daerah	95.263.811.223,46	3.190.114.819,54
2	Kas di Bendahara Penerimaan	43.544.000,00	160.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	14.971.098,00	188.394.566,35
4	Kas di Bendahara BOS	152.264.295,29	1.394.867.028,00
5	Kas di Bendahara JKN	117.269.218,25	555.752.059,25
6	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(11.861.964,00)	-1.482.136,00
	<b>SILPA</b>	<b>95.579.997.871,00</b>	<b>5.327.806.337,14</b>

#### 5.2. PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp5.327.806.337,14.

##### 2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022, sebesar Rp5.327.806.337,14.

##### 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp95.579.997.871,00 dapat diuraikan sebagai berikut:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Tabel 5.2.1.

#### Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021

dalam rupiah

No	Uraian	SILPA/SIKPA 2022	SILPA/SIKPA 2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.327.806.337,14	21.338.377.314,70
2	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan	5.327.806.337,14	21.338.377.314,70
3	Subtotal (1-2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	95.579.997.871,00	5.327.806.337,14
5	Subtotal (3+4)	95.579.997.871,00	5.327.806.337,14
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain Lain	0,00	0,00
8	<b>Saldo Anggaran Lebih</b>	<b>95.579.997.871,00</b>	<b>5.327.806.337,14</b>

#### 4. Lain-lain

Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL sebesar Rp0,00.

#### 5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran lebih akhir tahun 2022 sebesar Rp95.579.997.871,00 merupakan penjumlahan dari selisih saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah SiLPA/SiKPA Tahun 2022 ditambah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

### 5.3. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Jumlah Aset sebesar Rp1.758.627.858.368,41. Jumlah Kewajiban sebesar Rp230.473.227.273,30 dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp1.528.154.631.095,11 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp1.758.627.858.368,41.

Saldo Aset per 31 Desember 2022 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.

#### Rincian Aset Pemerintah Per 31 Desember 2022

dalam rupiah

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
Aset Lancar	118.366.287.285,96	38.892.509.671,87	79.473.777.614,09
Investasi Jangka Panjang	51.223.811.314,00	46.986.122.391,00	4.237.688.923,00
Aset Tetap	1.564.030.082.551,45	1.431.647.101.063,61	132.382.981.487,84
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	25.007.677.217,00	20.842.975.754,46	4.164.701.462,54
<b>Jumlah</b>	<b>1.758.627.858.368,41</b>	<b>1.538.368.708.880,94</b>	<b>220.259.149.487,47</b>

Berdasarkan rincian pada Tabel diatas, Aset Pemerintah Kabupaten Lembata pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp220.259.149.487,47 dari perolehan Aset periode 2021 sebesar Rp1.538.368.708.880,94 atau 14,32%.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****5.3.1. Aset Lancar**

Aset Lancar	31 Desember 2022		31 Desember 2021
	118.366.287.285,96		38.892.509.671,87

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp118.366.287.285,96 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.**  
**Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
1	Kas di Kas Daerah	95.263.811.223,46	3.190.114.819,54	92.073.696.403,92
2	Kas di Bendahara Penerimaan	34.472.000,00	160.000,00	34.312.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	14.971.098,00	188.394.566,35	(173.423.468,35)
4	Kas di Bendahara JKN	114.479.254,25	555.752.059,25	(441.272.805,00)
5	Kas di Bendahara BOS	152.264.295,29	1.394.867.028,00	(1.242.602.732,71)
6	Kas Lainnya	367.262.340,81	353.195.488,74	14.066.852,07
7	Piutang Pajak Daerah	3.349.348.928,19	3.016.388.451,87	332.960.476,32
8	Piutang Retribusi Daerah	1.915.001.635,03	1.078.774.135,03	836.227.500,00
9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	305.055.407,54	304.788.410,54	266.997,00
10	Piutang Transfer Antar Daerah	4.352.349.290,00	4.607.747.530,00	(255.398.240,00)
11	Piutang Lainnya	86.177.010,00	496.134.994,00	(409.957.984,00)
12	Penyisihan Piutang	(3.520.931.025,65)	(3.146.493.959,55)	(374.437.066,10)
13	Beban Dibayar Dimuka	-	241.662.636,35	(241.662.636,35)
14	Persediaan	15.932.025.829,04	26.611.023.511,75	(10.678.997.682,71)
	<b>Jumlah</b>	<b>118.366.287.285,96</b>	<b>38.892.509.671,87</b>	<b>79.473.777.614,09</b>

**5.3.1.1. Kas dan Setara Kas***dalam rupiah*

Kas dan Setara Kas	31 Desember 2022		31 Desember 2021
	95.947.260.211,81		5.682.483.961,88

Saldo Kas per 31 Desember Tahun 2022 sebesar RpRp95.947.260.211,81 dan Tahun 2021 sebesar Rp5.682.483.961,88 berupa Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah***dalam rupiah*

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	95.263.811.223,46	3.190.114.819,54

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp95.263.811.223,46 sedangkan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.190.114.819,54.

Hasil Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

**Tabel 5.3.3.**  
**Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

SALDO MENURUT BKU PEMDA 2022		95.266.542.317,68
<b>A</b>	<b>Penambahan</b>	
1	Kelebihan Pencatatan Penerimaan (sts no. 000192, 0513)	9,78
	<b>Jumlah A</b>	<b>9,78</b>
<b>B</b>	<b>Pengurangan</b>	
1	Kelebihan Pemindahbukuan (Sp2D No 01 TU Pertanian dan 06 LS Pertanian)	111.085.000,00
2	Pengembalian kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp35.990 pada aplikasi nomor 77 tanggal 22 Mei 2019 (potongan pajak seharusnya hanya sebesar Rp26.441.979 namun pada slip penarikan tercatat sebesar Rp26.477.969).	35.990,00
3	Penerimaan yg kurang dicatat di Bank (sts No. 294)	500,00
	<b>Jumlah B</b>	<b>111.121.490,00</b>
<b>C</b>	<b>SALDO AKHIR (SALDO AWAL+A-B)</b>	<b>95.155.420.837,46</b>
	<b>SALDO MENURUT BANK 31 DESEMBER 2021</b>	<b>95.155.420.837,46</b>
	<b>SELISIH</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulasi rekening dan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.4.**  
**Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

No	Nomor Rekening	Tujuan Pembukaan Rekening	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Bank NTT Cabang Lewoleba			
1	010.01.04.00001.0	Penerimaan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.117.588,45	2.630.078.185,51
2	010.01.04.00403.0	Transfer dari Pemerintah Pusat	95.122.428.784,84	562.731.740,03
3	010 09 268 17 0004	Pungutan PPN dan PPh yang berasal dari perhitungan SP2D Gaji, LS Barang dan Jasa.		0,00
4	010 09 268 17 0005	Pungutan iuran wajib dan pungutan dan Taperum PNS yang diperhitungkan melalui SP2D Gaji dan Tunjangan		0,00
5	010 09 268 17 0006	Penerimaan asli daerah yang diperhitungkan melalui SP2D LS Barang dan Jasa sebelum dipindahbukukan ke rekening penampung pendapatan asli daerah	(1.000.000,00)	(1.963.442,00)
6	2504551035	Pinjaman PEN Daerah	13.874.464,17	
		<b>Jumlah</b>	<b>95.155.420.837,46</b>	<b>3.190.846.483,54</b>

Dari saldo Bank sebesar Rp95.155.420.837,46, jika dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp95.263.811.223,46 terdapat selisih kurang sebesar



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Rp108.390.386,00. Penjelasan terhadap selisih dimaksud sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.5.**  
**Penyesuaian Akuntansi per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

<b>A</b>	<b>SALDO MENURUT BANK 31 DESEMBER 2022</b>	<b>95.155.420.837,46</b>
<b>PENYESUAIAN AKUNTANSI</b>		
<b>B</b>	<b>Penambahan</b>	
1	Pengembalian kelebihan penyetoran pajak sebesar Rp35.990 pada aplikasi nomor 77 tanggal 22 Mei 2019 (potongan pajak seharusnya hanya sebesar Rp26.441.979 namun pada slip penarikan tercatat sebesar Rp26.477.969).	35.990,00
2	Kelebihan Pemindahbukuan (Sp2D No 01 TU Dinas Pertanian dan 06 LS Dinas Pertanian)	111.085.000,00
3	Penerimaan PAD atas STS nomor 294 yang belum dicatat di Bank	500,00
4	Penerimaan PAD atas STS nomor 2459 yang belum dicatat di Bank	1,00
	<b>Jumlah B</b>	<b>111.121.491,00</b>
<b>C</b>	<b>Pengurangan</b>	
1	Lebih setor Jagir JKN Puskesmas Loang	2.254.096,00
2	Nilai sebesar Rp477.000 merupakan penarikan atas Taperum dimana Taperum telah ditutup sehingga Pemda tidak dapat melakukan pengiriman ke Taperum. Terhadap nilai ini telah dilakukan penarikan dari Rekening Titipan BUD ke Rekening Kas Umum Daerah	477.000,00
3	Kelebihan Pencatatan Penerimaan (STS nomor 513	9,00
	<b>Jumlah C</b>	<b>2.731.105,00</b>
<b>D</b>	<b>SALDO AKHIR KASDA (A+B-C)</b>	<b>95.263.811.223,46</b>

Saldo Kas di Kas Daerah Tahun 2022 sebesar Rp95.263.811.223,46 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank NTT. Terhadap deposito penempatan Tahun 2022 pada akhir tahun telah dilimpahkan kembali ke rekening giro Kas Daerah.

Pada Rekening Kas Daerah Nomor 010 09 268 17 0006, saldo akhir Kas tercatat sebesar (Rp1.000.000,00). Saldo minus ini disebabkan oleh adanya pendobelan pemindahbukuan atas titipan PAD yang dipotong melalui SP2D Nomor: 00197/LS/1.03.2.15.0.00.01.0000/P.6/12/2022 kepada CV. Lamuda Jaya Group pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana pada tanggal 14 Desember 2022 telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Titipan PAD ke Rekening Kas Umum Daerah/PAD sebesar Rp1.500.000,00 namun pada tanggal 19 Desember 2022 karena kekeliruan penerbitan STS, maka oleh Bank kembali dilakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp1.500.000 dari Rekening Titipan PAD ke Rekening Kas Umum Daerah/PAD terhadap nomor STS yang sama (seharusnya Rp1.500.000,00 menjadi Rp3.000.000,00). Dengan demikian saldo per 19 Desember pada rekening titipan PAD menjadi minus Rp1.500.000,00 (minus satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022, terjadi kekeliruan pemindahbukuan dana dari rekening titipan CMS ke rekening titipan PAD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan adanya saldo minus sebesar Rp1.500.000,00 dan saldo plus sebesar Rp500.000,00 mengakibatkan saldo akhir Rekening Kas Daerah minus sebesar Rp1.000.000,00.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

Terhadap kelebihan pemindahbukuan pada Rekening Kas Daerah dapat dijelaskan bahwa pada bulan Desember 2022 terdapat realisasi pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk kegiatan belanja operasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan-KP) senilai Rp57.395.000,00 dan pembayaran belanja pekerjaan pengembangan ayam petelur pada Distan-KP senilai Rp53.690.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2022 dana belum dikembalikan ke RKUD karena terlambat dilakukan rekonsiliasi Kas di Kas Daerah dengan Bank dan SKPD. Terhadap kondisi ini, telah dilakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah pada tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp57.395.000,00 untuk TUP Distan KP dan senilai Rp51.153.119,00 untuk belanja pekerjaan pengembangan ayam petelur serta pada tanggal 2 Maret 2023 senilai Rp2.536.881,00 untuk PPN dan PPh Pasal 22.

### 5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*dalam rupiah*

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	34.472.000,00	160.000,00

Per tanggal 31 Desember 2022 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp34.472.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp160.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.6.**  
**Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

NO	URAIAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
1.	Dinas Kesehatan	160.000,00	203.000,00	160.000,00	203.000,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	2.621.000,00	0,00	2.621.000,00
3.	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	31.648.000,00	0,00	31.648.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>160.000,00</b>	<b>34.472.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>34.472.000,00</b>

Jumlah sebesar Rp34.472.000,00 merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 yang masih ada di Kas Bendahara Penerimaan SKPD; Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah; serta Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp31.648.000,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan.

Terhadap Jumlah Kas Bendahara Penerimaan tahun 2021 sebesar Rp160.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp80.000,00 dan Retribusi Pemeriksaan Laboratorium sebesar Rp80.000,00 pada Dinas Kesehatan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.3.7.  
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

No	SURAT TANDA SETORAN			NILAI KAS BENDAHARA PENERIMAAN 2021
	NOMOR	TANGGAL	NILAI	
	<b>Dinas Kesehatan Rp160.000,00</b>			
1.	0008/PAD.TS//PB/2022	06-Jan-22	80.000,00	80.000,00
2.	0009/PAD.TS//PB/2022	06-Jan-22	80.000,00	80.000,00
	<b>Jumlah</b>			<b>160.000,00</b>

Untuk penambahan Kas Bendahara Penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp34.472.000,00 diakui sebagai Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022. Terhadap Kas Bendahara Penerimaan Tahun 2022 ini, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp34.472.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.8.  
Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023**

*dalam rupiah*

No	SURAT TANDA SETORAN			NILAI KAS BENDAHARA PENERIMAAN 2023
	NOMOR	TANGGAL	NILAI	
<b>A</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>			
1.	00074/PAD.TB//PB/2023	20-Jan-23	203.000,00	203.000,00
<b>B</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>			
2.	00001/PAD.TB//PB/2023	6-Jan-23	2.621.000	2.621.000
<b>C</b>	<b>Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan</b>			
3.	00063/PAD.TB//PB/2023	18-Jan-23	31.648.000,00	31.648.000,00
	<b>Jumlah</b>			<b>34.472.000,00</b>

**5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran**

*dalam rupiah*

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<b>Rp14.971.098</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.971.098, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.9.  
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

NO	URAIAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
1.	Sisa Uang Persediaan	186.292.790,00	14.971.098,00	186.292.790,00	14.971.098,00
2.	Pajak Negara yang masih ada di Bendahara Pengeluaran	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
3.	Pajak Daerah yang masih ada di Bendahara Pengeluaran	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
4.	Jasa Giro yang masih ada di Bendahara Pengeluaran	791.776,35	0,00	791.776,35	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>188.394.566,35</b>	<b>14.971.098,00</b>	<b>188.394.566,35</b>	<b>14.971.098,00</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp14.971.098,00, terdiri dari:

- Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp1.232.883,00 berupa sisa Tambahan Uang Persediaan.
- Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp20.000,00 berupa sisa Uang Persediaan
- Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan berupa sisa Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp13.718.215,00.

Dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.971.098,00, sebesar Rp14.971.098,00 telah disetor ke Kas Daerah/Kas Negara pada Tahun 2023 sesuai bukti setoran sebagai berikut:

**Tabel 5.3.10.**  
**Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022**

*dalam rupiah*

No	BUKTI TANDA SETORAN		
	NOMOR	TANGGAL	NILAI
<b>Dinas Kesehatan</b>			
1.	0172/PAD-TB/01/PB/2023	07 Februari 2023	1.232.883,00
<b>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan</b>			
2	0052/PAD-TB/01/PB/2023	16 Januari 2023	20.000,00
<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan</b>			
3	0045/PAD-TB/01/PB/2023	13 Januari 2023	8.500.000,00
	0046/PAD-TB/01/PB/2023	13 Januari 2023	4.249.210,00
	0047/PAD-TB/01/PB/2023	13 Januari 2023	969.005,00
<b>Jumlah</b>			<b>14.971.,098,00</b>

Rincian mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD/OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.11.**  
**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

NAMA SKPD	SALDO AWAL			MUTASI		SALDO AKIR
	SISA UP	PAJAK DAN JASA GIRO	JUMLAH	BERTAMBAH	BERKURANG	SISA UP
Dinas Kesehatan	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	1.232.883,00	1.306.000,00	1.232.883,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.967.230,00	253.991,54	164.221.221,54	0,00	164.221.221,54	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	6.040,56	6.040,56	0,00	6.040,56	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

NAMA SKPD	SALDO AWAL			MUTASI		SALDO AKIR
	SISA UP	PAJAK DAN JASA GIRO	JUMLAH	BERTAMBAH	BERKURANG	SISA UP
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	13.718.215,00	0,00	13.718.215,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.804.100,00	0,00	2.804.100,00	0,00	2.804.100,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	7.098,05	7.098,05	0,00	7.098,05	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	524.646,20	524.646,20	0,00	524.646,20	0,00
Kantor Camat Atadei	19.521.460,00	0,00	19.521.460,00	0,00	19.521.460,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>186.292.790,00</b>	<b>2.101.776,35</b>	<b>188.394.566,35</b>	<b>14.971.098,00</b>	<b>188.394.566,35</b>	<b>14.971.098,00</b>

**5.3.1.1.4. Kas Dana BOS***dalam rupiah*

Kas Dana BOS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<b>152.264.295,29</b>

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp152.264.295,29. Saldo sebesar Rp152.264.295,29 terdiri dari Saldo pada Bendahara BOS Sekolah Dasar sebesar Rp22.576.593,69 dan Bendahara BOS SMP Rp129.687.701,60. Saldo Kas tersebut sesuai hasil verifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap 101 SD, dan 38 SMP yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lembata.

**Tabel 5.3.12.****Saldo Kas Bendahara BOS SD Negeri dan SD Inpres***dalam rupiah*

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2022	SALDO AKHIR 2021
<b>A</b>	<b>KEC. NAGAWUTUNG</b>		
1	SD NEGERI PENIKENEK	0,00	24.715.500,00
2	SD INPRES LABALIMUT	27,00	7.719.973,00
3	SD INPRES PASIR PUTIH	3.950,00	19.445.487,00
4	SD INPRES LEWOBLONG	351.000,00	22.662.188,00
5	SD INPRES 2 LOANG	1.000,00	8.826.992,00
6	SD INPRES 1 LOANG	5.342.000,00	32.827.000,00
7	SD INPRES TEWAOWUTUNG	173.300,00	11.508.015,00
8	SD INPRES LAMALEWAR	0,00	132.035,00
9	SD INPRES BAOPUKANG	0,00	3.103.007,00
10	SD INPRES BATA	30,00	3.298.000,00
	<b>JUMLAH A</b>	<b>5.871.307,00</b>	<b>134.238.197,00</b>
<b>B</b>	<b>KEC. NUBATUKAN</b>		
11	SD NEGERI BAKALEREK	958,00	1.150.458,00
12	SD NEGERI WANGATOA	0,00	1.569.527,00
13	SD NEGERI PADA	1.819.000,00	1.559.031,00
14	SD INPRES 2 LEWOLEBA	138.978,00	39.356.178,00
15	SD NEGERI BATAS KOTA	490.525,00	46.755,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2022	SALDO AKHIR 2021
16	SD INPRES LITE	2.600,00	1.197.503,00
17	SD INPRES 2 WAIKOMO	0,00	58.711.704,00
18	SD INPRES LUSIKAWAK	0,00	4.428.332,00
19	SD INPRES PAOBOKOL	82.380,00	3.981.620,00
20	SD NEGERI KOTA BARU	0,00	11.981.481,00
21	SD NEGERI NAMAWEKA	126.860,00	8.048.821,00
22	SD INPRES 1 LEWOLEBA	119.233,00	30.437.455,00
23	SD INPRES 1 WAIKOMO	3.662,00	4.533.838,00
24	SD NEGERI WAIJARANG	52.147,00	2.689.478,00
25	SD NEGERI LAMAHORA	15.153,00	45.138.153,00
26	SD NEGERI LABANOBOL	36.000,00	12.270.930,00
27	SD INPRES RIANGDUA	0,00	0,00
28	SD NEGERI LEWOKUKUNG	3.100,00	1.467.979,00
29	SD NEGERI TOBITALEREK	17.000,00	18.956.737,00
30	SD INPRES UDAK	12,00	2.535.388,00
31	SD INPRES URUOR	37.885,00	20.823.115,00
	<b>JUMLAH B</b>	<b>2.945.493,00</b>	<b>270.884.483,00</b>
<b>C</b>	<b>KEC. BUYASURI</b>		
32	SD INPRES PANAMA	2.912,71	6.460.630,00
33	SD INPRES LEUWOHUNG	0,00	322.800,00
34	SD INPRES BARENG	0,00	22.360,00
35	SD INPRES RUMANG	0,00	0,00
36	SD INPRES MULEWAQ	0,00	1.610.000,00
37	SD INPRES 92 BEAN	1.506,58	63.200,00
38	SD INPRES LEUBURI	0,00	0,00
39	SD INPRES AIHUA	0,00	3.948.000,00
40	SD NEGERI WAIKORO	0,00	0,00
41	SD NEGERI DULIN	2.698,82	5.636.086,00
42	SD INPRES KAOHUA	0,00	3.191,00
43	SD NEGERI LOYOBOHOR	419.000,00	505.853,00
44	SD INPRES ATULALENG	0,00	551.000,00
45	SD INPRES TOBOTANI	0,00	35.285.500,00
46	SD INPRES MOLELEMA	0,00	45.931,00
	<b>JUMLAH C</b>	<b>426.118,11</b>	<b>54.454.551,00</b>
<b>D</b>	<b>KEC. ATADEI</b>		
47	SD INPRES LEREK	37.314,00	731.446,00
48	SD INPRES DULIR	138.662,00	52.338,00
49	SD INPRES ILEKIMOK	737.170,00	7.879.253,00
50	SD INPRES MUDALEREK	25.539,00	7.920.811,00
51	SD NEGERI WAIPEI	1.238.000,00	10.238.890,00
52	SD INPRES WAIWEJAK	4.029,00	16.249.171,00
53	SD INPRES WAIMUDA	0,00	46.677.380,00
54	SD INPRES ATALOJO	35,00	1.442.215,00
55	SD INPRES PAULOLO	1.506,58	277.608,00
56	SD INPRES LEWAJI	216.290,00	6.596.220,00
57	SD INPRES NAPOR	82.277,00	506.723,00
	<b>JUMLAH D</b>	<b>2.480.822,58</b>	<b>98.572.055,00</b>
<b>E</b>	<b>KEC. ILE APE</b>		
58	SD INPRES OHE	1.558.751,00	353.249,00
59	SD INPRES KIMAKAMA	280,00	2.042.450,00
60	SD INPRES HOLORIANG	0,00	802.303,00
61	SD INPRES DULITUKAN	335,00	4.786.665,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2022	SALDO AKHIR 2021
62	SD INPRES MURUONA	880.000,00	578.000,00
63	SD NEGERI TANUNG BAHAGIA	0,00	0,00
64	SD INPRES WAOWALA	162.111,00	210.389,00
65	SD NEGERI ELTARI	16.494,00	15.779,00
	<b>JUMLAH E</b>	<b>2.617.971,00</b>	<b>8.788.835,00</b>
<b>F</b>	<b>KEC. LEBATUKAN</b>		
66	SD INPRES TANAH TEREKET	5.448.500,00	8.152.214,00
67	SD INPRES LODOTODOKOWA	155.375,00	11.268.709,00
68	SD INPRES ATAKOWA	813.408,00	34.143.132,00
69	SD NEGERI TAPOLANGU	119.464,00	2.305.536,00
70	SD INPRES LAMADALE	3.000,00	17.936.838,00
71	SD INPRES MERDEKA	0,00	3.400.119,00
72	SD NEGERI LEWODOLI	1.078,00	163.922,00
73	SD INPRES TAPOBARAN	92.000,00	42.907,00
74	SD INPRES LERAHINGA	43.573,00	1.722.373,00
75	SD INPRES ILEWUTUNG	60.931,00	6.419.069,00
	<b>JUMLAH F</b>	<b>6.737.329,00</b>	<b>85.554.819,00</b>
<b>G</b>	<b>KEC. OMESURI</b>		
76	SD NEGERI ROMA	0,00	50.000,00
77	SD NEGERI NORMAL	166.800,00	166.800,00
78	SD NEGERI DOLULOLONG	1.600,00	3.482.100,00
79	SD NEGERI WAILOLONG	0,00	0,00
80	SD INPRES ARAMENGI	862,00	26.992.638,00
81	SD INPRES BALAURING	271.000,00	0,00
82	SD INPRES PEUUMA	0,00	5.648.860,00
83	SD INPRES WALANGSAWA	4.002,00	2.019.502,00
84	SD INPRES LEUDANUNG	3.800,00	21.432.000,00
85	SD INPRES LEBE	0,00	0,00
86	SD INPRES HULE	4.000,00	900,00
87	SD NEGERI LEUWALANG	0,00	0,00
88	SD NEGERI WOWONG	0,00	500.000,00
	<b>JUMLAH G</b>	<b>452.064,00</b>	<b>60.292.800,00</b>
<b>H</b>	<b>KEC. WULANDONI</b>		
89	SD INPRES LAMALERA	0,00	2.588.834,00
90	SD INPRES ATAILI	534,00	1.915.466,00
91	SD INPRES POSIWATU	170.000,00	155.567,00
92	SD INPRES LELATA	0,00	282.715,00
93	SD NEGERI KARTINI LABALA	4.220,00	775.780,00
94	SD NEGERI WATUWARA	0,00	578.417,00
95	SD INPRES LUKI	65.000,00	79.748,00
96	SD NEGERI WULANDONI	105.592,00	101.116,00
97	SD NEGERI LAMAMANU	99.633,00	173.367,00
	<b>JUMLAH H</b>	<b>444.979,00</b>	<b>6.651.010,00</b>
<b>I</b>	<b>KEC. ILE APE TIMUR</b>		
98	SD INPRES TOKOJAENG	0,00	32.222,00
99	SD INPRES WAIWARU	443.410,00	5.096.981,00
100	SD NEGERI LAMAU	157.100,00	2.150.744,00
101	SD INPRES HAMAHERA	0,00	74.000,00
	<b>JUMLAH I</b>	<b>600.510,00</b>	<b>7.353.947,00</b>
	<b>TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>22.576.593,69</b>	<b>726.790.697,00</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Tabel 5.3.13.  
Saldo Kas Bendahara BOS SMP Negeri

dalam rupiah

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2022	SALDO AKHIR 2021
<b>A</b>	<b>KEC. OMESURI</b>		
1	SMP NEGERI 1 OMESURI	35.510,00	6.037.100,00
2	SMP NEGERI 3 OMESURI	670,00	6.825.000,00
3	SMP NEGERI 4 OMESURI	4.600,00	2.620.400,00
4	SMP NEGERI 02 OMESURI SATAP WAILOLONG	7.340,00	26.663.320,00
5	SMP NEGERI 5 OMESURI	440,00	6.802.000,00
6	SMP NEGERI 3 OMESURI SATAP HULE	215.160,00	9.444.184,00
	<b>JUMLAH A</b>	<b>263.720,00</b>	<b>58.392.004,00</b>
<b>B</b>	<b>KEC. BUYASURI</b>		
7	SMP NEGERI 2 BUYASURI	500,00	42.116.310,00
8	SMP NEGERI 1 BUYASURI	152.500,00	7.532.593,00
9	SMP NEGERI SATAP 92 BEAN	0,00	9.339.000,00
10	SMP NEGERI SATAP TOBOTANI	131.000,00	39.943.020,00
	<b>JUMLAH B</b>	<b>284.000,00</b>	<b>98.930.923,00</b>
<b>C</b>	<b>KEC. NUBATUKAN</b>		
11	SMP NEGERI 3 NUBATUKAN ATAP PAUBOKOL	14.520,00	18.930.003,00
12	SMP NEGERI 2 NUBATUKAN	0,00	29.388.961,00
13	SMP NEGERI 6 NUBATUKAN	0,00	1.035.174,00
14	SMP NEGERI 1 NUBATUKAN	22.517.847,00	24.813.543,00
15	SMP NEGERI 4 NUBATUKAN	170.207,00	25.744.623,00
	<b>JUMLAH C</b>	<b>22.702.574,00</b>	<b>99.912.304,00</b>
<b>D</b>	<b>KEC. ILE APE</b>		
16	SMP NEGERI SATU ATAP HOLORIANG	11.323,00	2.073.248,00
17	SMP NEGERI 1 ILE APE	5.502.446,00	5.454.596,00
18	SMP NEGERI 3 ILE APE	0,00	42.750.500,00
	<b>JUMLAH D</b>	<b>5.513.769,00</b>	<b>50.278.344,00</b>
<b>E</b>	<b>KEC. LEBATUKAN</b>		
19	SMP NEGERI TUJUH MARET HADAKEWA	992.200,00	23.596.059,00
20	SMP NEGERI 5 LEBATUKAN	3.717.800,00	2.456.500,00
21	SMP NEGERI 2 LEBATUKAN	2.804,00	31.663.196,00
22	SMP NEGERI 03 LEBATUKAN SATU ATAP ILOWUTUNG	2.577,60	1.414.321,00
23	SMP NEGERI 4 LEBATUKAN SATAP LEWODOLI	0,00	7.020.000,00
	<b>JUMLAH E</b>	<b>4.715.381,60</b>	<b>66.150.076,00</b>
<b>F</b>	<b>KEC. ILE APE TIMUR</b>		
24	SMP NEGERI 3 ILE APE TIMUR SATAP HAMAHERA	0,00	9.089.818,00
25	SMP NEGERI 02 ILE APE TIMUR SATAP WAIWARU	620.080,00	33.014.457,00
26	SMP NEGERI 01 ILE APE TIMUR	0,00	2.210.559,00
	<b>JUMLAH F</b>	<b>620.080,00</b>	<b>44.314.834,00</b>
<b>G</b>	<b>KEC. WULANDONI</b>		
27	SMP NEGERI 2 WULANDONI	0,00	17.840.000,00
28	SMP NEGERI 1 WULANDONI	1.864.711,00	35.255.289,00
29	SMP NEGERI 3 WULANDONI SATU ATAP LABALA	524.458,00	473.065,00
30	SMP NEGERI 4 WULANDONI	454.000,00	7.735.000,00
	<b>JUMLAH G</b>	<b>2.843.169,00</b>	<b>61.303.354,00</b>
<b>H</b>	<b>KEC. NAGAWUTUNG</b>		
31	SMP NEGERI 1 NAGAWUTUNG	7.335.100,00	65.599.719,00
32	SMP NEGERI 2 NAGAWUTUNG	199.600,00	11.231.700,00
33	SMP NEGERI SATAP PASIR PUTIH	3.903,00	13.661.477,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR 2022	SALDO AKHIR 2021
34	SMP NEGERI SATAP TEWAOWUTUNG	13.000,00	6.518.000,00
	<b>JUMLAH H</b>	<b>7.551.603,00</b>	<b>97.010.896,00</b>
<b>I</b>	<b>KEC. ATADEI</b>		
35	SMP NEGERI 2 ATADEI	133.446,00	5.248.624,00
36	SMP NEGERI 1 ATADEI	2.992.119,00	4.114.003,00
37	SMP NEGERI SATAP LEWAJI	1.039.380,00	1.400.000,00
38	SMP NEGERI 4 SATAP ILEKIMOK	81.028.460,00	81.020.969,00
	<b>JUMLAH I</b>	<b>85.193.405,00</b>	<b>91.783.596,00</b>
	<b>TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>129.687.701,60</b>	<b>668.076.331,00</b>

Saldo Kas Dana BOS sebesar Rp152.264.295,29 diperoleh dari saldo awal sebesar Rp1.394.867.028,00 ditambah pendapatan hibah sebesar Rp14.911.126.169,00 dan Jasa giro yang masih ada di Kas BOS sebesar Rp10.969,29 dikurangi belanja sebesar Rp16.153.739.871,00. Sisa Kas Dana BOS ini terdiri atas sisa kas tunai sebesar Rp17.457.114,29 serta sisa kas pada masing-masing rekening sekolah sebesar Rp134.807.181,00.

#### 5.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

dalam rupiah

Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	114.479.254,25	555.752.059,25

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp114.479.254,25 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp555.752.059,25. Total Rekening Kapitasi sesuai rekening Koran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp114.230.402,25. Selain itu terdapat juga sisa Kas Tunai yang masih ada di tangan Bendahara FKTP sebesar Rp3.038.816,00 sehingga Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP menjadi sebesar Rp117.269.218,25. Dari total saldo sebesar Rp117.269.218,25, terdapat Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Puskesmas Lewoleba sebesar 62.591,00 dan pada Puskesmas Waiknuit sebesar 2.727.373,00 dimana nilai ini disajikan pada akun kas lainnya sehingga saldo Kas di Bendahara JKN menjadi sebesar Rp114.479.254,25. Nilai sebesar Rp114.479.254,25 terdiri atas sisa Kas sebesar Rp114.452.142,25 dan Jasa Giro sebesar Rp27.112,00 yang belum disetor ke Kas Daerah yang tersebar pada beberapa FKTP sebagai berikut:

1. Puskesmas Loang sebesar Rp14.908,00;
2. Puskesmas Autaqnapoq sebesar Rp413,00;
3. Puskesmas Bean sebesar Rp11.791,00.

Rincian saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat disajikan sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.3.14.**  
**Kas Dana Kapitasi per 31 Desember 2022***dalam rupiah*

No	Kas di FKTP	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo akhir Sebelum Penyesuaian Kewajiban
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Puskesmas Lewoleba	213.538.301,00	1.655.407.599,00	1.817.788.524,00	51.157.376,00
2	Puskesmas Waipukang	82.226.681,75	371.612.693,00	453.839.374,00	0,75
3	Puskesmas Lamaau	16.144.303,00	227.773.997,00	243.918.300,00	-
4	Puskesmas Hadakewa	70.161.645,00	415.896.455,00	486.058.100,00	-
5	Puskesmas Balauring	53.216.345,00	723.698.200,00	746.102.654,00	30.811.891,00
6	Puskesmas Wairiang	5.314.967,00	785.997.408,00	791.312.375,00	-
7	Puskesmas Waiknuit	38.221,00	275.899.200,00	270.107.647,00	5.829.774,00
8	Puskesmas Loang	36.037.925,50	372.253.225,00	408.291.150,00	0,50
9	Puskesmas Wulandoni	77.921.824,00	322.464.686,00	400.386.510,00	-
10	Puskesmas Pada	0,00	73.883.600,00	73.710.500,00	173.100,00
11	Puskesmas Autaqnapoq	0,00	5.724.800,00		5.724.800,00
12	Puskesmas Bean	0,00	21.402.900,00		21.402.900,00
	<b>Jumlah di Rek. FKTP</b>	<b>554.600.213,25</b>	<b>5.252.014.763,00</b>	<b>5.691.515.134,00</b>	<b>115.099.842,25</b>

**Tabel 5.3.15.**  
**Kas Dana Kapitasi (Lanjutan) per 31 Desember 2022***dalam rupiah*

No	Kas di FKTP	Jasa Giro Yang Belum disetor ke Kas Daerah	Beban Administrasi Bank	Saldo Akhir Setelah Penyesuaian Kewajiban
		7	8	9=6+7-8
1	Puskesmas Lewoleba	0,00	0,00	51.157.376,00
2	Puskesmas Waipukang	0,00	0,00	0,75
3	Puskesmas Lamaau	0,00	0,00	0,00
4	Puskesmas Hadakewa	0,00	0,00	0,00
5	Puskesmas Balauring	0,00	0,00	30.811.891,00
6	Puskesmas Wairiang	0,00	0,00	0,00
7	Puskesmas Waiknuit	0,00	0,00	5.829.774,00
8	Puskesmas Loang	14.908,00	0,00	14.908,50
9	Puskesmas Wulandoni	0,00	0,00	0,00
10	Puskesmas Pada	0,00	173.100,00	0,00
11	Puskesmas Autaqnapoq	413,00	280.000,00	5.445.213,00
12	Puskesmas Bean	11.791,00	194.600,00	21.220.091,00
	<b>Jumlah di Rek. FKTP</b>	<b>27.112,00</b>	<b>647.700,00</b>	<b>114.479.254,25</b>

**Tabel 5.3.16.**  
**Kas Dana Kapitasi (Lanjutan) per 31 Desember 2022***dalam rupiah*

No	Kas di FKTP	Saldo akhir terdiri dari:			
		SALDO REKENING		SALDO TUNAI	
		SISA KAS	JASA GIRO	SISA KAS	JASA GIRO
1	2	3	5	6	7
1	Puskesmas Lewoleba	51.157.376,00	0,00	0,00	0,00
2	Puskesmas Waipukang	0,75	0,00	0,00	0,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Kas di FKTP	Saldo akhir terdiri dari:			
		SALDO REKENING		SALDO TUNAI	
		SISA KAS	JASA GIRO	SISA KAS	JASA GIRO
3	Puskesmas Lamaau	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Puskesmas Hadakewa	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Puskesmas Balauring	30.515.356,00	0,00	296.535,00	0,00
6	Puskesmas Wairiang	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Puskesmas Waiknuit	5.829.774,00	0,00	0,00	0,00
8	Puskesmas Loang	0,50	0,00	0,00	14.908,00
9	Puskesmas Wulandoni	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Puskesmas Pada	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Puskesmas Autaqnapoq	5.444.800,00	413,00	0,00	0,00
12	Puskesmas Bean	21.208.300,00	11.791,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah di Rek. FKTP</b>	<b>114.155.607,25</b>	<b>12.204,00</b>	<b>296.535,00</b>	<b>14.908,00</b>

#### 5.3.1.1.6. Kas Lainnya

*dalam rupiah*

Kas Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<b>367.262.340,81</b>

Pada Bulan April tahun 2021 terjadi bencana Banjir Bandang di Kabupaten Lembata. Pemerintah Daerah membuka rekening dana donasi untuk menampung dana donasi dari masyarakat. Dana dimaksud dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata dan disajikan pada Kas Lainnya.

Saldo awal Kas Lainnya adalah sebesar Rp353.195.488,74 sedangkan saldo akhir sebesar Rp367.262.340,81 saldo ini terdiri dari sisa saldo rekening dana donasi erupsi gunung berapi sebesar Rp943,69; saldo rekening dana donasi banjir bandang sebesar Rp355.399.433,12; serta saldo Utang Pajak Negara yang masih ada ditangan Bendahara senilai Rp11.861.964,00.

**Tabel 5.3.17.**  
**Rekening Dana Donasi Banjir Bandang**

NO	BANK PENAMPUNG	NO REK	NAMA REK
1	BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN	1185885620	DONASI BANJIR BANDANG PEMDA LEMBATA
2	Bank NTT	2503011061	DONASI BANJIR BANDANG PEMDA LEMBATA
3	Bank Rakyat Indonesia	68501007672539	DONASI PEMDA LEMBATA

Mutasi saldo dapat dilihat pada tabel berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.3.18.**  
**Mutasi Rekening Kas Lainnya***dalam rupiah*

NO	BANK PENAMPUNG	SALDO	Mutasi	Mutasi	SALDO
		31 Desember 2021	Bertambah	Berkurang	31 Desember 2022
<b>A</b>	<b>Kas Dana Donasi Erupsi</b>				
1	Kas Tunai	943,69			943,69
<b>B</b>	<b>Kas Dana Donasi Banjir</b>				
1	BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN	277.874.012,00	1.931.000,00		279.805.092
2	Bank NTT	36.985.672,05	339.808,07		37.325.480,12
3	Bank Rakyat Indonesia	38.334.861,00		66.000,00	38.268.861,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>353.195.488,74</b>	<b>2.270.888,07</b>	<b>66.000,00</b>	<b>355.400.376,81</b>

Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, dana ini masih tetap tersaji dalam rekening karena belum dimanfaatkan.

Untuk saldo Utang Pajak Negara yang masih ada ditangan Bendahara senilai Rp11.861.964,00. Dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 5.3.19.**  
**Pajak Negara yang masih ada di Kas Bendahara***dalam rupiah*

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Kas Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	9.072.000,00	Utang PPh 23 atas Sewa tanah telah disetor sesuai dengan NTPN 6B3EDOT69S2EVDRB tanggal 19 Januari 2023
2	Kas di FKTP Puskesmas Lewoleba	62.591,00	Utang PPN telah disetor sesuai dengan NTPN 8013-6/NER9DM8UH tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp55.743,00 dan Utang PPh pasal 22 telah disetor sesuai dengan NTPN /E441016HKUNUAK tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp6.847,00
3	Kas di FKTP Puskesmas Waiknuit	2.727.373,00	Utang PPN/PPH telah disetor sesuai tanggal 25 Januari 2023 dengan total sebesar Rp2.727.373,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.861.964,00</b>	

**5.3.1.2. Piutang Pendapatan***dalam rupiah*

Piutang Pendapatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<b>10.007.932.270,76</b>

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp10.007.932.270,76 dan Tahun 2021 sebesar Rp9.503.833.521,44 berupa Piutang Pajak, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Pemerintah Provinsi dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.3.20.  
Piutang Pendapatan Tahun 2022**

<i>dalam rupiah</i>			
No	Piutang Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Piutang Pajak Daerah	3.349.348.928,19	3.016.388.451,87
2	Piutang Retribusi Daerah	1.915.001.635,03	1.078.774.135,03
3	Piutang Lain Lain PAD Yang Sah	305.055.407,54	304.788.410,54
4	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	4.352.349.290,00	4.607.747.530,00
5	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	86.177.010,00	496.134.994,00
<b>Jumlah Piutang Pendapatan</b>		<b>10.007.932.270,76</b>	<b>9.503.833.521,44</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat pengurangan nilai piutang dari tahun sebelumnya. Pengurangan ini dipengaruhi oleh pengurangan piutang pajak PBB Tahun 2022 dan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi namun tidak diimbangi dengan penyeteroran atas piutang tahun-tahun sebelumnya yang cenderung tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang dari tahun ke tahun seperti piutang retribusi daerah dan piutang lain lain PAD yang sah seperti pada penjelasan pada masing-masing akun piutang dibawah ini.

Pengurangan nilai piutang pada periode 2022 yang tidak signifikan ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih berkoordinasi dengan SKPD dan pihak lain termasuk APH untuk membangun mekanisme percepatan penyelesaian piutang daerah. Selain itu SKPD diharapkan untuk tidak membuat kebijakan yang tidak sesuai ketentuan tentang pendapatan daerah yang berdampak pada munculnya piutang.

**5.3.1.2.1. Piutang Pajak**

<i>dalam rupiah</i>			
Piutang Pajak	31 Desember 2022		31 Desember 2021
		Rp3.349.348.928,19	

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.349.348.928,19 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.016.388.451,87. Mutasi Piutang Pajak yang terjadi selama tahun 2022 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.3.21.  
Piutang Pajak**

<i>dalam rupiah</i>					
No	Jenis Pajak	31-Des-21	Bertambah	Berkurang	31-Des-22
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Pajak Restoran	16.257.400,00			16.257.400,00
2	Pajak Hiburan	370.000,00			370.000,00
3	Pajak Reklame	103.078.499,50			103.078.499,50
4	Pajak Penerangan Jalan	30.085.278,00			30.085.278,00
5	Pajak Air Bawah Tanah	21.006.049,56			21.006.049,56

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

No	Jenis Pajak	31-Des-21	Bertambah	Berkurang	31-Des-22
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	954.532.357,51			954.532.357,51
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.891.058.867,30	444.357.988,32	111.397.512,00	2.224.019.343,62
<b>Jumlah</b>		<b>3.016.388.451,87</b>	<b>444.357.988,32</b>	<b>111.397.512,00</b>	<b>3.349.348.928,19</b>

Pada tabel terbaca bahwa untuk Piutang Pajak Hotel sampai pada Piutang Pajak Mineral Bukan Logam pada Tahun 2022 tidak mengalami mutasi.

Selanjutnya saldo awal Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp1.891.058.867,30 mengalami koreksi baik penambahan maupun pengurangan masing-masing sebesar Rp 444.357.988,32 dan sebesar Rp111.397.512,00 sehingga saldo akhir menjadi sebesar Rp 2.224.019.343,62 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.22.**  
**Penambahan dan Pengurangan Piutang Pajak PBBP2**

*dalam rupiah*

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>1.891.058.867,30</b>
<b>Penambahan</b>	<b>444.357.988,32</b>
Koreksi penambahan saldo awal	7.530.920,32
Pengakuan Piutang Murni Tahun 2022	436.827.068,00
<b>Pengurangan</b>	<b>111.397.512,00</b>
Koreksi pengurangan saldo awal	10.011,00
Penyetoran Piutang	111.387.501,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>2.224.019.343,62</b>

Rincian saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.224.019.343,62 seperti tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.23.**  
**Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

No	Tahun	31-Des-21	Bertambah	Berkurang	31-Des-22
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	PBB P2 2014	275.126.951,68	31.396,32	0,00	275.158.348,00
2	PBB-P2 2015	231.692.345,04	0,00	163.943,00	231.528.402,04
3	PBB-P2 2017	176.194.352,58	0,00	0,00	176.194.352,58
4	PBB-P2 2018	385.357.377,00	354,00	323.280,00	385.034.451,00
5	PBB-P2 2019	228.499.912,00	6.741.894,00	1.189.508,00	234.052.298,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

6	PBB-P2 2020	205.692.565,00	520.491,00	3.554.913,00	202.658.143,00
7	PBB-P2 2021	388.495.364,00	236.785,00	106.165.868,00	282.566.281,00
8	PBB-P2 2022	0,00	436.827.068,00	0,00	436.827.068,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.891.058.867,30</b>	<b>444.357.988,32</b>	<b>111.397.512,00</b>	<b>2.224.019.343,62</b>

Terhadap sisa piutang sebagaimana tabel dan uraian diatas akan tetap menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti di tahun 2023 agar pada akhir tahun per 31 Desember 2023 sisa piutang semakin berkurang.

#### 5.3.1.2.2. Piutang Retribusi

dalam rupiah

Piutang Retribusi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	1.915.001.635,03	1.078.774.135,03

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.915.001.635,03 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.078.774.135,03. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 mengalami mutasi bertambah sebesar Rp836.227.500,00 atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa klaim BPJS pada RSUD Lewoleba sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.3.24.**  
**Piutang Retribusi**

dalam rupiah

NO	Jenis Retribusi	31-Des-21	Bertambah	Berkurang	31-Des-22
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.048.453.615,00	0,00	0,00	1.048.453.615,00
2	Retribusi Pengendalian Menara	29.947.529,44	0,00	0,00	29.947.529,44
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan	372.990,59	836.227.500,00	0,00	836.600.490,59
<b>Jumlah</b>		<b>1.078.774.135,03</b>	<b>836.227.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.001.635,03</b>

- (1) Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari Sewa Alat Berat, Listrik PLTD, Sewa Tempat Permanen Pasar, Rumah Makan Berderet pada Sekretariat Daerah Dinas PU dan Perhubungan, Dinas Perikanan, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Koperindag UKM tidak mengalami penambahan dan pengurangan sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.048.453.615,00.
- (2) Saldo awal Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022 pada BKD sebesar Rp29.947.529,44. Saldo ini tidak mengalami perubahan sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 tetap sebesar Rp29.947.529,44.
- (3) Saldo awal Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2022 pada RSUD Lewoleba sebesar Rp372.990,59. Saldo mengalami mutasi bertambah sebesar Rp836.227.500,00 atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa klaim BPJS pada RSUD Lewoleba sehingga saldo akhir tahun 2022 tetap sebesar



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Rp836.600.490,59. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp836.227.500,00 merupakan pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional untuk susulan bulan Oktober 2022, susulan bulan November 2022, pelayanan bulan Desember 2022, dan susulan bulan Desember 2022. Total klaim BPJS yang diajukan oleh RSUD Lewoleba atas keempat kategori dimaksud adalah sebesar Rp938.336.100,00. Dari Total ini, jumlah klaim yang ditolak dan dipending oleh BPJS adalah masing-masing sebesar Rp3.483.100,00 dan Rp37.359.300,00. Dengan demikian jumlah klaim yang disetujui oleh BPJS hanya sebesar Rp897.493.700,00. Dari nilai yang disetujui BPJS sebesar Rp897.493.700,00, yang diakui sebagai piutang hanya sebesar Rp836.227.500,00. Sisa sebesar Rp61.266.200,00 merupakan kelebihan pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional sehingga harus dikembalikan kepada BPJS sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengawas Internal BPJS Kesehatan pada klaim JKN RSUD Lewoleba tanggal 15 Desember 2022

#### 5.3.1.2.3. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

dalam rupiah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp305.055.407,54	Rp304.788.410,54

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp305.055.407,54 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp304.788.410,54 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.25.

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

dalam rupiah

No	Uraian	31-Des-22	Bertambah	Berkurang	31-Des-21
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Denda Keterlambatan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	7.433.000,00	0,00	0,00	7.433.000,00
2	Denda Retribusi	200.311.050,54	0,00	0,00	200.311.050,54
3	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	17.985.160,00	0,00	0,00	17.985.160,00
4	Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	79.059.200,00	0,00	0,00	79.059.200,00
5	Remunerasi atas Dana TDF	0,00	266.997,00	0,00	266.997,00
<b>Jumlah</b>		<b>304.788.410,54</b>	<b>266.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.055.407,54</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- (1) Saldo piutang Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp7.433.000,00 tidak mengalami perubahan baik pada saldo awal tahun 2022 maupun saldo akhir tahun 2022.
- (2) Saldo piutang Denda Keterlambatan atas Pelaksanaan Pekerjaan awal tahun 2022 sebesar Rp200.311.050,54 tidak mengalami perubahan baik pada saldo awal tahun 2022 maupun saldo akhir tahun 2022.
- (3) Saldo piutang Denda Retribusi sebesar Rp17.985.160,00 tidak mengalami perubahan baik pada saldo awal tahun 2022 maupun saldo akhir tahun 2022.
- (4) Saldo piutang Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp79.059.200,00 tidak mengalami perubahan baik pada saldo awal tahun 2022 maupun saldo akhir tahun 2022.
- (5) Tidak ada saldo awal atas piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF). Piutang ini mengalami mutasi bertambah pada Tahun 2022 sebesar Rp266.997,00 sehingga saldo akhir menjadi sebesar Rp266.997,00.

#### 5.3.1.2.4. Piutang Transfer (Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi)

*dalam rupiah*

Piutang Transfer (Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi)	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	4.352.349.290,00	4.607.747.530,00

Saldo Piutang Transfer Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.352.349.290,00 dari Saldo awal tahun 2022 sebesar Rp4.607.747.530,00. Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.26.**

#### Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Tahun 2022

*dalam rupiah*

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pajak Kendaraan Bermotor	1.876.332.207,00	1.176.290.967,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.050.338.610,00	773.360.430,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	827.606.379,00	2.652.110.555,00
Pajak Air Permukaan	184.084,00	5.985.578,00
Pajak Rokok	597.888.010,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.352.349.290,00</b>	<b>4.607.747.530,00</b>

#### 5.3.1.2.5. Piutang Lainnya

*dalam rupiah*

Piutang Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	86.177.010,00	496.134.994,00

Saldo Piutang Lainnya merupakan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Saldo ini tersaji per 31 Desember 2022 sebesar Rp86.177.010,00 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp496.134.994,00. Ada perubahan atas saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian karena adanya pengurangan sebesar Rp409.957.984,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

terdiri dari penyetoran piutang sebesar Rp407.945.484,00 dan koreksi nilai piutang atas bukti penyetoran tahun 2021 sebesar Rp2.012.500,00.

#### 5.3.1.3. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp3.520.931.025,65)	(Rp3.146.493.959,55)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih tahun 2022 sebesar (Rp3.520.931.025,65) dan tahun 2021 sebesar (Rp3.146.493.959,55) sehingga nilai piutang bersih (*netto*) yang dapat direalisasikan untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.487.001.245,11 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.27.**  
**Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2022**

*dalam rupiah*

No	Jenis Piutang	Piutang Bruto 2022	Penyisihan 2022	Piutang Netto 2022
<b>A.</b>	<b>Piutang Pendapatan</b>	<b>9.921.755.260,76</b>	<b>3.439.254.015,65</b>	<b>6.482.501.245,11</b>
1	Piutang Pajak	3.349.348.928,19	2.029.747.251,14	1.319.601.677,05
2	Piutang Retribusi	1.915.001.635,03	1.082.955.272,53	832.046.362,50
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	305.055.407,54	304.789.745,53	265.662,01
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi	4.352.349.290,00	21.761.746,45	4.330.587.543,55
<b>B.</b>	<b>Piutang Lainnya</b>	<b>86.177.010,00</b>	<b>81.677.010,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
5	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	86.177.010,00	81.677.010,00	4.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.007.932.270,76</b>	<b>3.520.931.025,65</b>	<b>6.487.001.245,11</b>

Rincian piutang *bruto* dan penyisihan masing-masing akun sebagai berikut:

**Tabel 5.3.28.**  
**Nilai Piutang Setelah Penyisihan**

*Dalam rupiah*

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto 2022	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Netto 2022
1	2	3	4	5 (3-4)
<b>I</b>	<b>Piutang Pendapatan</b>	<b>9.921.755.260,76</b>	<b>3.439.254.015,65</b>	<b>6.482.501.245,11</b>
<b>A</b>	<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>3.349.348.928,19</b>	<b>2.029.747.251,14</b>	<b>1.319.601.677,05</b>
1	Pajak Restoran (BKD)	16.257.400,00	16.257.400,00	0,00
2	Pajak Hiburan (BKD)	370.000,00	370.000,00	0,00
3	Pajak Reklame (BKD)	103.078.499,50	69.272.687,50	33.805.812,00
4	Pajak Penerangan Jalan (BKD)	30.085.278,00	30.085.278,00	0,00
5	Pajak Air Bawah Tanah	21.006.049,56	4.195.649,56	16.810.400,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	954.532.357,51	954.532.357,51	0,00
7	PBB - P2	2.224.019.343,62	955.033.878,57	1.268.985.465,05
<b>B</b>	<b>Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>1.915.001.635,03</b>	<b>1.082.955.272,53</b>	<b>832.046.362,50</b>
1	Pelayanan Kesehatan (RSUD)	836.600.490,59	4.554.128,09	832.046.362,50
2	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi (BKD)	29.947.529,44	29.947.529,44	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto 2022	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Netto 2022
1	2	3	4	5 (3-4)
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (BKD)	1.048.453.615,00	1.048.453.615,00	0,00
<b>C</b>	<b>Piutang Lain-lain PAD Yang Sah</b>	<b>305.055.407,54</b>	<b>304.789.745,53</b>	<b>265.662,01</b>
1	Piutang Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.311.050,54	200.311.050,54	0,00
2	Piutang Denda Retribusi	17.985.160,00	17.985.160,00	0,00
3	Piutang Atas kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	79.059.200,00	79.059.200,00	0,00
4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	7.433.000,00	7.433.000,00	0,00
5	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	266.997,00	1.334,99	265.662,01
<b>D</b>	<b>Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi</b>	<b>4.352.349.290,00</b>	<b>21.761.746,45</b>	<b>4.330.587.543,55</b>
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi 2021	4.352.349.290,00	21.761.746,45	4.330.587.543,55
<b>II</b>	<b>Piutang Lainnya</b>	<b>86.177.010,00</b>	<b>81.677.010,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian	86.177.010,00	81.677.010,00	4.500.000,00
<b>Jumlah Total I + II</b>		<b>10.007.932.270,76</b>	<b>3.520.931.025,65</b>	<b>6.487.001.245,11</b>

**5.3.1.4. Beban Dibayar Dimuka***dalam rupiah*

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp241.662.636,35</b>

Beban Dibayar Dimuka tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp241.662.636,35 dari tahun 2021 sebesar Rp241.662.636,35

Penurunan sebesar Rp241.662.636,35 merupakan beban dibayar dimuka pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atas barang yang mau diserahkan kepada masyarakat masih dalam proses pengerjaan dimana sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 realisasi keuangan lebih besar daripada realisasi fisik namun pada 31 Desember 2022 sudah realisasi fisik sudah mencapai 100% seperti pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.29.**  
**Pengakuan Beban Di Bayar Di Muka**

*dalam rupiah*

No	Realisasi Keuangan	Nilai SPK/ Kontrak	Realisasi Keuangan Kontrak + Atribusi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Poktan Balulamarebong	180.952.400,00	189.242.487,00	100,00	100,00
2	Poktan Lusi Muri	180.952.380,00	189.242.466,00	100,00	100,00
3	Poktan Holowali	180.952.380,00	189.242.466,00	100,00	100,00
4	Poktan Uduq Tueng Belung Kain	180.952.380,00	189.242.466,00	100,00	100,00
5	Poktan Arapira	180.952.380,00	189.242.466,00	100,00	100,00
6	Poktan Nayu Baya	180.952.380,00	189.242.466,00	100,00	100,00
7	Poktan BPP Ile Ape	180.952.380,00	189.242.466,00	100,00	100,00
8	Poktan Baolaliduli	180.952.380,00	189.242.466,00	100,00	100,00
<b>Jumlah A</b>		<b>1.447.619.060,00</b>	<b>1.513.939.749,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.3.1.5. Persediaan

dalam rupiah

Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp15.932.025.829,04	Rp26.611.023.511,75

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.932.025.829,04 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.611.023.511,75. Perubahan Saldo Persediaan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.30.**  
**Penambahan Pengurangan Persediaan**

dalam rupiah

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>26.611.023.511,75</b>
<b>Penambahan</b>	<b>53.966.031.726,32</b>
Belanja Barang/Persediaan	48.899.632.576,00
Persediaan yang bersumber dari belanja Modal pada Dinas Pertanian	96.182.000,00
Persediaan yang bersumber dari Belanja Modal 2021 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi	1.246.169.424,49
Persediaan Obat-Obatan yang bersumber dari Buffer Stock Provinsi NTT	3.464.029.889,48
Persediaan Obat-Obatan Lainnya yang berasal dari alat kesehatan yang tidak memenuhi batas kapitalisasi	18.355.200,00
Persediaan yang bersumber dari Beban dibayar dimuka atas barang persediaan yang sudah diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pertanian	241.662.636,35
<b>Pengurangan</b>	<b>64.645.029.409,03</b>
Persediaan yang digunakan	64.608.618.669,03
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer menambah Aset Tetap pada Dinas Pendidikan	15.550.740,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor menambah Aset Tetap pada Dinas Pendidikan	20.860.000,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>15.932.025.829,04</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 berdasarkan hasil stok opname yang dilakukan pada akhir tahun, yang tersebar pada 39 (Tiga Puluh Sembilan) SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.31.**  
**Persediaan per OPD**

dalam rupiah

No	Uraian	2022	2021
1	Dinas Pendidikan	0,00	2.002.850,00
2	Dinas Kesehatan	11.006.672.336,56	11.071.465.762,31
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.435.133.271,84	3.463.496.529,87
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	45.346.250,00	25.720.625,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	2.618.860,00	8.079.542.174,54
6	Satuan Polisi Pamong Praja	238.150,00	4.079.250,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	694.130,00	4.399.550,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	364.117.966,00	271.285.910,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	630.930,00	423.430,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	114.727.937,50
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	227.232.750,00	230.067.330,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	971.650,00	855.320,00
13	Dinas Perhubungan	15.746.056,00	870.849.813,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	477.200,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan	1.963.850,00	198.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

No	Uraian	2022	2021
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	3.336.950,00	2.846.600,00
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	885.000,00	1.947.000,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	680.460,00	127.600,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	582.850,00	4.887.600,00
20	Dinas Perikanan	1.518.000,00	130.152.000,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	417.496.769,69	1.867.936.293,03
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.030.430,00	404.000,00
23	Sekretariat Daerah	28.463.858,00	68.479.028,00
24	Sekretariat DPRD	44.381.761,00	50.176.630,00
25	Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.967.800,00	4.093.000,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	58.069.860,00	52.643.200,00
27	Badan Pendapatan Daerah	230.899.310,00	257.580.514,00
28	Inspektorat	357.000,00	597.860,00
29	Kecamatan Nubatukan	14.447.200,00	6.223.498,50
30	Kecamatan Lebatukan	486.300,00	132.000,00
31	Kecamatan Omesuri	1.508.380,00	746.500,00
32	Kecamatan Buyasuri	1.921.800,00	1.057.500,00
33	Kecamatan Atadei	508.800,00	875.450,00
34	Kecamatan Nagawutung	448.000,00	210.000,00
35	Kecamatan Ile Ape	2.482.000,00	6.774.045,00
36	Kecamatan Wulandoni	346.080,00	1.193.200,00
37	Kecamatan Ile Ape Timur	271.930,00	265.150,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	8.493.000,00	3.065.000,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.598.889,95	9.495.361,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.932.025.829,04</b>	<b>26.611.023.511,75</b>

Rincian Persediaan dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.32.**  
**Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021**

*dalam rupiah*

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>A.</b>	<b>Bahan</b>	<b>136.439.468,95</b>	<b>356.631.643,00</b>
1	Bahan Kimia	0,00	114.727.937,50
2	Bahan Bakar dan Pelumas	136.439.468,95	241.903.705,50
3	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
4	Bahan Lainnya	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Suku Cadang</b>	<b>0,00</b>	<b>9.076.870,00</b>
6	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	9.076.870,00
<b>C.</b>	<b>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>	<b>6.579.023.588,62</b>	<b>422.200.439,00</b>
1	Alat Tulis Kantor	49.234.328,00	99.998.328,00
2	Kertas dan Cover	46.787.950,00	35.001.580,00
3	Bahan Cetak	216.806.900,00	220.931.900,00
4	Benda Pos	2.060.000,00	60.000,00
5	Bahan Komputer	30.740.368,00	43.966.521,00
6	Perabot Kantor	28.648.180,00	19.998.110,00
7	Alat Listrik	0,00	2.244.000,00
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.204.745.862,62	0,00
<b>D.</b>	<b>Obat-obatan</b>	<b>8.550.818.468,78</b>	<b>14.508.749.039,18</b>
1	Obat	8.550.818.468,78	14.508.749.039,18



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>E.</b>	<b>Persediaan untuk Dijual/Diserahkan</b>	<b>542.133.806,69</b>	<b>11.304.959.100,57</b>
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	319.645.706,69	11.082.821.100,57
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	222.488.100,00	222.138.000,00
<b>F.</b>	<b>Natura dan Pakan</b>	<b>123.610.496,00</b>	<b>9.406.420,00</b>
1	Natura	109.134.496,00	9.406.420,00
2	Pakan	14.476.000,00	0,00
<b>Total A+B+ C+D+E+F</b>		<b>15.932.025.829,04</b>	<b>26.611.023.511,75</b>

### 5.3.2. Investasi Jangka Panjang

dalam rupiah

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	51.223.811.315,00	46.986.122.391,00

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp51.223.811.315,00 terdiri dari Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir sebesar Rp2.755.593.487,00 dan Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp2.755.593.487,00 serta Investasi Permanen sebesar Rp51.223.811.315,00 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.3.33.**  
**Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021**

dalam rupiah

No	Uraian	31-Des-21	Mutasi		31-Des-22
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	7 (3 + 4 - 5)
<b>A.</b>	<b>Investasi Non Permanen</b>				
1	Dana Bergulir	2.762.779.623,00	0,00	7.186.136,00	2.755.593.487,00
2	Penyisihan Dana Pernerdayaan yang Diragukan	-2.762.779.623,00	0,00	(7.186.136,00)	-2.755.593.487,00
	<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Investasi Permanen</b>				
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
	Bank NTT	37.493.380.000,00	5.000.000.000,00	0,00	42.493.380.000,00
	PDAM	9.492.742.392,00	0,00	762.311.077,00	8.730.431.315,00
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>46.986.122.392,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>762.311.077,00</b>	<b>51.223.811.315,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>46.986.122.392,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>762.311.077,00</b>	<b>51.223.811.315,00</b>

#### 5.3.2.1. Investasi Non Permanen

dalam rupiah

Investasi Non Permanen	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara terus menerus. Investasi Non Permanen yang tersaji dalam Laporan Neraca ini adalah Dana Bergulir.

Bahwa dalam rangka menggerakkan roda perekonomian pada kelompok masyarakat usaha kecil menengah atau dalam rangka pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah mengambil langkah menyiapkan Dana Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir sebagai



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

Modal Usaha yang diberikan kepada kelompok usaha kecil menengah dan akan dikembalikan setiap bulan beserta bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Penganggaran dana bergulir dimaksud ditempatkan pada akun Pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Pengucuran dana tersebut dimulai sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008.

Program pemberdayaan ini bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah agar tetap *survive* dan dapat bertumbuh dan berkembang secara sehat guna memajukan perekonomian masyarakat secara khusus dan daerah pada umumnya. Namun demikian dalam praktek pengelolaannya tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan dana bergulir, sehingga sampai dengan tanggal jatuh tempo pengembalian baik pokok maupun bunga pinjaman tidak dapat dikembalikan oleh pihak penerima.

Pemerintah melalui Instansi pengelola Bagian Ekonomi dan Pembangunan–Sekretariat Daerah yang sebelumnya Bagian Ekonomi–Setda dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan gabungan dari Eks Dinas Koperasi UKM dan Eks Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telah melakukan berbagai upaya seperti evaluasi dan monitoring, koordinasi, upaya penagihan secara rutin dengan maksud agar program ini dapat berjalan dengan baik dan para penerima dapat memenuhi kewajibannya dengan mengangsur pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman secara tertib, namun demikian hasil yang diperoleh sangat tidak maksimal. Menyikapi persoalan yang semakin tidak maksimal dari tahun ke tahun serta umur pengelolaan dana bergulir yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk menata ulang Dana Bergulir agar penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan lebih realistis sehingga tidak menjadi persoalan bawaan yang muncul setiap tahun dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata.

Selain itu juga penerapan penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value/NRV*) sudah dilakukan dari tahun 2014 sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan.

Sebagai langkah awal dalam proses penyelesaian investasi dana bergulir dimaksud maka dibentuk tim inventarisasi dan rekonsiliasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 343 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Rekonsiliasi Dana Bergulir Tahun 2015. Pelaksanaan inventarisasi tersebut dilaksanakan pada 9 (sembilan) kecamatan dimana para penerima dana bergulir berada. Dan berdasarkan hasil inventarisasi tersebut diketahui bahwa dana bergulir yang dikucurkan sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008 sesungguhnya telah melewati masa jatuh tempo yang lebih dari 5 (lima) tahun, dengan uraian masing-masing masa jatuh tempo sebagai berikut :

- Dana digulirkan pada tahun 2001 dengan masa jatuh tempo Tahun 2005
- Dana digulirkan pada tahun 2002 dengan masa jatuh tempo Tahun 2006
- Dana digulirkan pada tahun 2003 dengan masa jatuh tempo Tahun 2007



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- Dana digulirkan pada tahun 2004 dengan masa jatuh tempo Tahun 2008
- Dana digulirkan pada tahun 2005 dengan masa jatuh tempo Tahun 2009
- Dana digulirkan pada tahun 2007 dengan masa jatuh tempo Tahun 2011
- Dana digulirkan pada tahun 2008 dengan masa jatuh tempo Tahun 2012

Langkah yang telah diambil Pemerintah untuk melakukan proses penghapusan dana bergulir, dengan menyerahkan urusan pengelolaan dana bergulir ini ke Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kupang (KPKNL) karena berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, persoalan Dana Bergulir masuk menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Penyerahan urusan dimaksud telah dilakukan dengan melampirkan dokumen hasil inventarisasi dan rekonsiliasi.

Terhadap keseluruhan dokumen yang telah disampaikan kepada KPKNL Kupang, pihak KPKNL sudah melakukan penelitian administrasi sesuai prosedur kerja yang berlaku dan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) terhadap beberapa penerima Dana Bergulir pada tahun 2021 dan 2022. Dokumen dimaksud akan digunakan dalam proses penghapusbukuan piutang Dana bergulir dari Laporan Neraca.

Selama tahun 2022 tidak ada mutasi yang terjadi pada tahun berjalan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.34.**  
**Investasi Non Permanen**

*dalam rupiah*

No	Tahun Investasi	Unit Pengelola	Saldo Awal 2022	Tambah	Kurang	Saldo Akhir 2022
1	2001/ 2004	Eks Dinas Koperasi dan PKM	1.024.942.850,00	0,00	858.636,00	1.024.084.214,00
2	2001/ 2004	Eks Bag. Ekonomi	839.833.484,00	0,00	6.327.500,00	833.505.984,00
3	2001/ 2004	Eks Dinas Perindag	898.003.289,00	0,00	0,00	898.003.289,00
		<b>Jumlah</b>	<b>2.762.779.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.186.136,00</b>	<b>2.755.593.487,00</b>

Terhadap saldo dimaksud seluruhnya sudah dilakukan penyisihan Dana Bergulir yang diragukan tertagih pada tingkat 100%, sesuai dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dimana poin penting dari ketentuan tersebut adalah terhadap penerima dana bergulir di atas 2 (dua) tahun sejak batas waktu jatuh tempo maka piutang tersebut dianggap macet sehingga dilakukan penyisihan sebesar 100%.

#### 5.3.2.2. Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

*dalam rupiah*

Investasi Permanen	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	<b>51.223.811.315,00</b>	<b>46.986.122.391,00</b>

Nilai Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2022 sebesar Rp51.223.811.315,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp46.986.122.391,00.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

**Tabel 5.3.35.**  
**Penyertaan Modal Pemerintah**

*dalam rupiah*

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
PT Bank NTT	42.493.380.000,00	37.493.380.000,00	5.000.000.000,00
PD. PURIN LEWO	0,00	0,00	0,00
PDAM	8.730.431.315,00	9.492.742.391,00	(762.311.077,00)
<b>Jumlah</b>	<b>51.223.811.315,00</b>	<b>46.986.122.391,00</b>	<b>4.237.688.923,00</b>

#### 5.3.2.2.1. Penyertaan Modal pada PT Bank NTT

Nilai Penyertaan Modal pada Bank NTT tahun 2022 sebesar Rp42.493.380.000,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp37.493.380.000,00.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nomor 06 tentang Akuntansi Investasi paragraf 37 menyatakan bahwa kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, penilaian investasi pemerintah menggunakan metode biaya. Dengan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi.

Penyertaan Modal pada PT Bank NTT yang saldo awalnya adalah sebesar Rp37.493.380.000,00 sampai dengan Tahun 2022 menjadi sebesar Rp42.493.380.000,00. Investasi pada Bank NTT mengalami peningkatan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2022 kepada Bank NTT.

Hasil dari investasi Penyertaan Modal pada Bank NTT berupa dividen untuk Tahun 2022 sebesar Rp2.474.364.950 sesuai dengan STS Nomor. 0427/PAD/TB/IV/PB/2022 tanggal 28 April 2022. Dengan demikian dari sisi manfaat finansial, investasi penyertaan modal pada PT Bank NTT telah mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata.

#### 5.3.2.2.2. Penyertaan Modal pada PDAM

Nilai Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tahun 2022 sebesar Rp8.730.431.315,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp9.492.742.391,00.

**Tabel 5.3.36.**  
**Nilai Investasi Penyertaan Modal pada PDAM**

*dalam rupiah*

Tahun	Ekuitas Awal PDAM (Rp)	Jumlah Investasi	Koreksi Nilai Investasi	Laba/(Rugi) PDAM (Rp)	Ekuitas Akhir PDAM (Rp)	Ket
2008		4.194.348.252,00	0,00	(280.395.342,00)	3.913.952.910,00	
2009	3.913.952.910,00	1.168.076.000,00	0,00	(1.195.333.466,00)	3.886.695.444,00	
2010	3.886.695.444,00	200.000.000,00	0,00	(648.524.689,00)	3.438.170.755,00	Sebelum Koreksi
2011	3.438.170.755,00	500.000.000,00	0,00	(287.242.152,00)	3.650.928.603,00	Sebelum Koreksi
2010	3.886.695.444,00	200.000.000,00	0,00	(521.848.189,00)	3.564.847.225,00	Koreksi SAK- ETAP



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Tahun	Ekuitas Awal PDAM (Rp)	Jumlah Investasi	Koreksi Nilai Investasi	Laba/(Rugi) PDAM (Rp)	Ekuitas Akhir PDAM (Rp)	Ket
2011	3.564.847.225,00	500.000.000,00	0,00	(62.911.741,00)	4.001.935.514,00	Koreksi SAK-ETAP
2012	4.001.935.514,00	4.194.348.252,00	0,00	29.298.472,00	4.031.233.986,00	
2013	4.031.233.986,00	0,00	1.610.866.514,00	0,00	5.642.100.500,00	Koreksi Bertambah Saldo Awal
2013	5.642.100.500,00	0,00	0,00	(261.106.808,00)	5.380.993.692,00	
2014	5.380.993.692,00	0,00	0,00	26.981.130,00	5.407.974.882,00	
2015	5.407.974.882,00	0,00	0,00	15.685.348,23	5.423.660.230,23	
2016	5.423.642.231,00	0,00	0,00	7.964.592,00	5.431.606.823,00	
2017	5.431.606.823,00	0,00	0,00	6.548.653.535,00	11.980.260.358,00	
2018	11.980.260.358,00	0,00	0,00	(704.980.327,00)	11.275.280.031,00	
2019	11.275.280.031,00	0,00	19,048,00	(504.134.029,00)	10.771.165.050,00	
2020	10.771.165.050,00	0,00	0,00	(400.792.388,00)	10.370.372.662,00	
2021	10.370.372.662,00	0,00	0,00	(877.630.271,00)	9.492.742.391,00	
2022	9.492.742.391,00	0,00	0,00	(762.311.077,00)	8.730.431.315,00	

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk periode tahun 2022, PDAM mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp762.311.077,00 sebagai pemupukan Modal.

Keberadaan PDAM tidak sekedar untuk mengejar keuntungan finansial semata, melainkan lebih kepada memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Untuk Tahun 2022 Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lembata menggunakan Laporan Keuangan *audited*. Data Laporan Keuangan terlampir.

#### 5.3.2.2.3. Penyertaan Modal pada PD Purin Lewo

Nilai Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Purin Lewo tahun 2022 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2021 PD Purin Lewo berhenti beroperasi sehingga baik tahun 2021 maupun tahun 2022, informasi penyertaan modal tetap menggunakan Laporan Keuangan 2020.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dimana pada metode ekuitas, ketika nilai ekuitas berkurang menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh maka Investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil maka nilai Investasi PD Purin Lewo yang tersaji pada laporan Neraca 2022 adalah sebesar nihil.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.3.37.**  
**Nilai Investasi Penyertaan Modal pada PD Purin Lewo**

*dalam rupiah*

Tahun	Ekuitas Awal PD Purin Lewo (Rp)	Nilai investasi	Koreksi Nilai Investasi	Laba/(Rugi) (Rp)	Ekuitas Akhir PD Purin Lewo (Rp)
2004	0,00	1.000.000.000,00	0,00	(35.236.565,00)	964.763.435,00
2005	964.763.435,00	1.000.000.000,00	0,00	(51.891.494,00)	1.912.871.941,00
2006	1.912.871.941,00	0,00	0,00	(112.444.939,00)	1.800.427.002,00
2007	1.800.427.002,00	1.000.000.000,00	0,00	37.972.691,00	2.838.399.693,00
2008	2.838.399.693,00	1.500.000.000,00	0,00	(799.901.894,00)	3.538.497.799,00
2009	3.538.497.799,00	500.000.000,00	0,00	10.942.687,27	4.049.440.486,27
2010	4.049.440.486,27	0,00	0,00	(524.175.680,99)	3.525.264.805,28
2011	3.525.264.805,28	0,00	0,00	(268.788.097,98)	3.256.476.707,30
2012	3.256.476.707,30	0,00	28.730.000,00	(354.113.516,86)	2.931.093.190,44
2013	2.931.093.190,44	0,00	0,00	(397.235.955,00)	2.533.857.235,44
2014	2.533.857.235,44	0,00	0,00	(172.053.136,67)	2.361.804.098,77
2015	2.361.804.098,77	0,00	700.000.000,00	(141.225.981,00)	2.920.578.117,77
2016	2.920.578.117,77	0,00	0,00	0,00	2.920.578.117,77
2017	2.920.578.117,77	0,00	0,00	(3.018.799.907,77)	(98.221.790,00)
2018	(98.221.790,00)	0,00	0,00	(369.938.325,00)	(468.160.115,00)
2019	(468.160.115,00)	0,00	0,00	(213.192.913,00)	(681.353.028,00)
2020	(681.353.028,00)	0,00	0,00	(241.760.355,00)	(923.113.383,00)

Terhadap hasil audit BPKP perwakilan NTT atas kinerja Perusahaan Daerah Purin Lewo yang dilaksanakan pada akhir tahun 2020 sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-1172/PW24/4/2020 tanggal 11 Desember 2020 menunjukkan bahwa kinerja Perusahaan Daerah Purin Lewo tidak baik sejak tahun 2015 dengan berbagai faktor penyebab seperti yang telah diuraikan dalam Laporan hasil Pemeriksaan. Untuk itu saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sedang melakukan kajian untuk mengganti Badan Usaha menjadi Perseroan Terbatas atau tetap dengan Badan Usaha Daerah tetapi dilakukan perubahan nomenklatur dan core bisnis.

**5.3.3. Aset Tetap**

*dalam rupiah*

Nilai Buku Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	<b>1.564.030.082.551,45</b>	<b>1.431.647.101.063,61</b>

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 Rp1.564.030.082.551,45 dan per 31 Desember Tahun 2021 Rp1.431.647.101.063,61, Rincian Nilai Buku masing-masing Jenis Aset Tetap, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.3.38.**  
**Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2022***dalam rupiah*

No	Uraian	Per 31 Desember 2022		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	304.028.992.619,50	0,00	304.028.992.619,50
2	Peralatan dan Mesin	345.986.165.278,91	(274.957.289.788,89)	71.028.875.490,02
3	Gedung dan Bangunan	577.950.557.878,96	(97.001.712.375,24)	480.948.845.503,72
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.011.067.726.081,71	(467.763.599.523,01)	543.304.126.558,70
5	Aset Tetap Lainnya	12.952.861.045,17	0,00	12.952.861.045,17
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	151.766.381.334,34	0,00	151.766.381.334,34
<b>Jumlah</b>		<b>2.403.752.684.238,59</b>	<b>(839.722.601.687,14)</b>	<b>1.564.030.082.551,45</b>

Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2022 Rp2.403.752.684.238,59 dan per 31 Desember Tahun 2021 Rp2.157.963.890.838,96 dengan demikian terjadi penambahan nilai Perolehan Aset Tetap sebesar Rp245.788.793.399,63 dengan rincian mutasi Aset Tetap, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.39.**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2022***dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	303.790.230.619,50	11.880.784.074,00	11.642.022.074,00	304.028.992.619,50
2	Peralatan dan Mesin	310.875.128.477,97	52.291.068.439,52	17.180.031.638,58	345.986.165.278,91
3	Gedung dan Bangunan	557.833.174.180,54	47.677.099.510,00	27.559.715.811,58	577.950.557.878,96
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	960.238.408.654,44	224.670.984.887,00	173.841.667.459,73	1.011.067.726.081,71
5	Aset Tetap Lainnya	12.926.698.145,17	2.325.588.001,00	2.299.425.101,00	12.952.861.045,17
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.300.250.761,34	153.934.152.314,00	14.468.021.741,00	151.766.381.334,34
<b>Jumlah</b>		<b>2.157.963.890.838,96</b>	<b>492.779.677.225,52</b>	<b>246.990.883.825,89</b>	<b>2.403.752.684.238,59</b>

Dari gambaran nilai Perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2022, sebagaimana yang tersaji pada tabel di atas, saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.403.752.684.238,59 diakibatkan oleh mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.3.40.  
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap**

*dalam rupiah*

URAIAN	MUTASI
<b>SALDO AWAL</b>	<b>2.157.963.890.838,96</b>
<b>Penambahan</b>	<b>492.779.677.225,52</b>
Belanja Modal	249.758.102.523,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	14.273.920.415,00
Kapitalisasi Belanja Tidak Terduga Bencana	17.310.700,00
Hibah dari Pemerintah Pusat	17.169.746.639,00
Pengakuan Utang Jangka Pendek	4.595.417.749,00
Kurang Catat tahun sebelumnya	74.912.000,00
Reklasifikasi dari SKPD Lain	21.298.457.555,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	10.501.592.203,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	5.781.742.800,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	153.822.868.309,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	69.013.500,00
Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan	14.468.021.741,00
Reklasifikasi aset yang dicatat sebelumnya secara keseluruhan pada gedung dan bangunan	948.571.091,52
<b>Pengurangan</b>	<b>246.990.883.825,89</b>
Penghapusan	744.383.750,00
Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	1.564.304.000,00
Pengakuan Belanja	487.381.426,00
Koreksi Lebih Catat	958.569.489,77
Kekurangan Volume Pekerjaan	54.476.688,54
Pembayaran Utang Jangka Pendek	29.296.894.829,00
Reklasifikasi ke SKPD Lain	13.335.626.555,00
Reklasifikasi ke Data Ekstrakomptabel	726.158.422,50
Reklasifikasi Ke Persediaan	151.326.776,00
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	11.100.110.803,00
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	4.210.744.092,00
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.690.863.849,00
Reklasifikasi ke Jenis Aset Tetap Lainnya	525.000,00
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	153.640.994.809,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	15.028.523.336,08
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>2.403.752.684.238,59</b>

Informasi Mutasi Aset Tetap, per Jenis Barang, untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.3.3.1. Aset Tetap Tanah**

*dalam rupiah*

Tanah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp304.028.992.619,50	Rp303.790.230.619,50

Saldo Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp304.028.992.619,50 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp303.790.230.619,50. Perubahan Saldo Aset Tetap Tanah ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.3.41.  
Penambahan Pengurangan Aset Tetap Tanah***dalam rupiah*

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>303.790.230.619,50</b>
<b>Penambahan</b>	<b>11.880.784.074,00</b>
Belanja Modal	3.917.953.074,00
Reklas dari SKPD Lain	7.962.831.000,00
<b>Pengurangan</b>	<b>11.642.022.074,00</b>
Pembayaran Utang Jangka Pendek	3.679.191.074,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	7.962.831.000,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>304.028.992.619,50</b>

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan akibat Belanja Modal sebesar Rp3.917.953.074,00 terdiri dari:
  - a. Pembayaran tanah untuk Rujab Bupati senilai Rp3.679.191.074,00 pada Dinas Perkimtan.
  - b. Pengadaan tanah Kuari senilai Rp238.762.000,00 pada Dinas Perkimtan.
2. Penambahan akibat Reklasifikasi dari SKPD Lain sebesar Rp7.962.831.000,00 terdiri dari:
  - a. 1 bidang tanah Jl. Desa Pada - GOR (Jalan Masuk Gor) senilai Rp158.583.000,00 dari Dinas Perkimtan ke Dinas PUPR
  - b. 1 bidang tanah Kosong untuk pembangunan Rujab Bupati dan Peruntukan Lainnya senilai Rp7.291.280.000,00 dari Dinas Perkimtan ke SETDA
  - c. 1 bidang tanah Lokasi Wisata Desa Bour senilai Rp512.968.000,00 dari Dinas Perkimtan ke Dinas Parekraf.
3. Pengurangan akibat Pembayaran Utang Jangka Pendek sebesar Rp3.679.191.074,00 kepada pihak ketiga atas Tanah Kosong untuk pembangunan Rujab Bupati dan Peruntukan Lainnya yang sudah diakui seluruhnya pada tahun 2020 pada Dinas Perkimtan.
4. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke SKPD Lain sebesar Rp7.962.831.000,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada penambahan akibat Reklasifikasi dari SKPD lain tersebut di atas.

**Tabel 5.3.42.  
Rincian Aset Tetap Tanah***dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Tanah Bangunan Perumahan/g.tempat Tinggal	5.923.292.581,00	5.923.292.581,00
2	Tanah Untuk Bangunan Ged. perdagangan/perusahaan	5.368.802.550,00	5.368.802.550,00
3	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	47.550.569.474,00	47.550.569.474,00
4	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
5	Tanah Kering	12.511.961.000,00	12.511.961.000,00
6	Tanah Perkebunan	74.034.107.000,00	74.034.107.000,00
7	Tanah Pertambangan	238.762.000,00	0,00
8	Tanah Lapangan Olah Raga	1.431.821.547,00	1.431.821.547,00
9	Tanah Untuk Jalan	145.081.940.300,00	145.081.940.300,00
10	Tanah Untuk Bangunan Air	10.269.667.477,50	10.269.667.477,50
11	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	116.894.560,00	116.894.560,00
12	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	33.790.000,00	33.790.000,00
13	Tanah Untuk Makam	267.384.130,00	267.384.130,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>304.028.992.619,50</b>	<b>303.790.230.619,50</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Saldo akhir Aset Tanah tahun 2022 dan Saldo akhir Aset Tanah tahun 2021 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang maupun Pengelola Barang Milik Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.43.**  
**Rincian Aset Tanah per OPD**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Dinas Pendidikan	8.998.282.520,00	8.998.282.520,00
2	Dinas Kesehatan	2.231.352.400,00	2.231.352.400,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	704.535.480,00	704.535.480,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155.592.166.777,50	155.433.583.777,50
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	334.762.000,00	8.058.831.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	352.800.000,00	352.800.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	630.000.000,00	630.000.000,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	505.722.000,00	505.722.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	64.800.000,00	64.800.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	587.200.000,00	587.200.000,00
11	Dinas Perhubungan	3.789.477.530,00	3789477530
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	173.700.000,00	173.700.000,00
13	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	867.125.020,00	867.125.020,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	487.200.000,00	487.200.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	1.200.000.000,00	1200000000
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	789.734.281,00	789.734.281,00
17	Dinas Perikanan	193.661.460,00	193.661.460,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.595.589.400,00	1.082.621.400,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.632.723.655,00	75.632.723.655,00
20	Sekretariat Daerah	13.400.734.140,00	6.109.454.140,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.667.000.000,00	1.667.000.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	323.000.000,00	323.000.000,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	512.600.000,00	512.600.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	40.900.000,00	40.900.000,00
25	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	549.600.000,00	549.600.000,00
26	Inspektorat Daerah	527.800.000,00	527.800.000,00
27	Kecamatan Nubatukan	2.394.584.177,00	2.394.584.177,00
28	Kecamatan Lebatukan	543.530.000,00	543.530.000,00
29	Kecamatan Omesuri	115.188.840,00	115.188.840,00
30	Kecamatan Buyasuri	122.400.000,00	122.400.000,00
31	Kecamatan Atadei	522.876.000,00	522.876.000,00
32	Kecamatan Nagawutung	146.210.000,00	146.210.000,00
33	Kecamatan Ile Ape	248.800.000,00	248.800.000,00
34	Kecamatan Wulandoni	194.620.000,00	194.620.000,00
35	Kecamatan Ile Ape Timur	55.438.760,00	55.438.760,00
36	Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah	27.932.878.179,00	27.932.878.179,00
	<b>Jumlah</b>	<b>304.028.992.619,50</b>	<b>303.790.230.619,50</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Terkait Aset Tetap Tanah dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari 621 bidang tanah seluas 12.137.405,51 M<sup>2</sup> yang tercatat pada KIB LBMD Kabupaten Lembata, 169 bidang tanah seluas 3.707.433,15 M<sup>2</sup> merupakan tanah di bawah jalan yang seluruhnya belum bersertifikat. Dari sisa 452 bidang tanah non jalan seluas 8.429.972,36 M<sup>2</sup>, 115 bidang seluas 4.950.016,51 M<sup>2</sup> belum bersertifikat. Dengan demikian, tanah yang telah bersertifikat adalah sebanyak 337 bidang dengan total luas 3.593.694,50 M<sup>2</sup>.
2. Dari 337 bidang tanah yang telah bersertifikat, terdapat 6 (enam) bidang tanah yang memiliki fisik nomor sertifikat yang sama, yaitu :
  - a. Tanah Bangunan SDI Balauring seluas 4.650M<sup>2</sup> di Desa Balauring (Kec. Omesuri) dengan Tanah Pekarangan SDI Balauring seluas 3.412M<sup>2</sup> di Desa Balauring (Kec. Omesuri) memiliki sertifikat dengan nomor yang sama yaitu 24.14.02.01.4.00013.
  - b. Tanah Kuburan Islam seluas 9.630M<sup>2</sup> di Koli Kleten Kel. Lewoleba Selatan dan Tanah Bangunan Aula SDN Wangatoa seluas 1.262M<sup>2</sup> di Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan memiliki sertifikat dengan nomor yang sama yaitu 24.14.05.15.4.00007.
  - c. Tanah Perkebunan Jambu Meteseluas 1.382.470M<sup>2</sup> di Desa Waijarang / Kec. Nubatukan dan Tanah Bangunan SDI Riang Dua (ID:2173) seluas 7.682M<sup>2</sup> di Desa Watokobu, Kec. Nubatukan memiliki sertifikat yang sama yaitu 24.14.05.18.4.00001.
3. Terdapat 3 (tiga) bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Lembata yang sedang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, 2 (dua) bidang tanah bersertifikat ganda sementara 1 (satu) bidang tanah dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kegiatan usaha dengan dasar perjanjian sewa pakai dengan pihak yang mengklaim sebagai tuan tanah (pemilik tanah). Upaya penyelesaian permasalahan tanah dengan kepemilikan ganda telah dilanjutkan ke kantor BPN dan sedang dalam proses rekonsiliasi data dengan kanwil provinsi NTT sementara tanah yang digunakan untuk tempat usaha sedang dalam proses penyelesaian.

**Tabel 5.3.44.**  
**Rincian Aset Tanah yang Dikuasai Masyarakat**

No	Uraian	SKPD	TAHUN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Tanah Bangunan Pasar (Eks Pasar Ikan lewoleba)	Kecamatan Nubatukan	2005	26.800.000,00	Sudah dilakukan pencabutan sertifikat atas nama MT oleh Kantor BPN Kab. Lembata, namun proses selanjutnya harus diselesaikan melalui kejaksaan sesuai ketentuan yang berlaku di BPN. Saat ini tanah tersebut masih dikuasai pihak ketiga karena diatasnya terdapat bangunan milik pihak ketiga.
2	Tanah Pekarangan (Sertifikat atas nama Pemda Flotim)	Kecamatan Lebatukan	2005	14.240.000,00	Dikuasai oleh pihak ketiga berinisial FWW karena memiliki sertifikat tanah atas bidang yang sama dengan nomor sertifikat 24.14.03.01.1.00069
3	Tanah Bangunan Balai Pertemuan	Kecamatan Nubatukan	2005	60.000.000,00	Tanah ini digunakan sebagai tempat usaha oleh pihak ketiga berinisial A (penjual Pakaian); R (penjual pakaian); S (penjual pakaian); B (warung makan; dan PG ( jasa fotocopy)



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.3.3.2. Aset Tetap Peralatan Dan Mesin

dalam rupiah

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	345.986.165.278,91	310.875.128.477,97

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp345.986.165.278,91 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp310.875.128.477,97. Perubahan Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.3.45.

#### Penambahan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

dalam rupiah

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>310.875.128.477,97</b>
<b>Penambahan</b>	<b>52.291.068.439,52</b>
Belanja Modal	22.654.556.480,00
Kapitalisasi belanja Barang dan Jasa	228.975.959,00
Kapitalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Bencana	17.310.700,00
Hibah dari Pemerintah Pusat	17.169.746.639,00
Pengakuan Utang Jangka Pendek	96.884.767,00
kurang catat tahun sebelumnya	74.912.000,00
Reklasifikasi aset yang dicatat sebelumnya secara keseluruhan pada gedung dan bangunan	948.571.091,52
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	422.208.600,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	181.873.500,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	69.013.500,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	10.427.015.203,00
<b>Pengurangan</b>	<b>17.180.031.638,58</b>
Penghapusan	662.515.000,00
Belanja modal peralatan mesin yang diserahkan ke PAUD Negeri tidak menghasilkan aset (BOP)	1.564.304.000,00
Pembayaran Utang Jangka Pendek	1.497.300.540,00
Reklasifikasi aset hasil pengadaan ke Ekstrakomptabel	150.118.918,50
Reklasifikasi aset hasil pengadaan ke Persediaan	8.667.070,00
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.052.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	525.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	2.795.533.907,08
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	10.427.015.203,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>345.986.165.278,91</b>

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan akibat Belanja Modal sebesar Rp22.654.556.480,00 terdiri dari:
  - a. Belanja Modal BOS senilai Rp2.136.726.871,00 pada Dinas Pendidikan.
  - b. Belanja Modal BOP senilai Rp1.564.304.000,00 pada Dinas Pendidikan.
  - c. Belanja Modal JKN senilai Rp165.516.650,00 pada Dinas Kesehatan.
  - d. Belanja Modal Lainnya senilai Rp18.788.008.959,00
2. Penambahan akibat kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp228.975.979,00 terdiri dari:
  - a. Jasa konsultan perencana teknis senilai Rp7.482.000,00.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- b. Jasa konsultan pengawas teknis senilai Rp5.000.000,00.
  - c. Belanja Pemeliharaan senilai Rp4.500.000,00
  - d. Belanja pegawai berupa honor pejabat pengadaan barang dan jasa senilai Rp177.325.219,00 yang dapat diatribusikan secara langsung.
  - e. Belanja barang dan jasa BOS senilai Rp34.668.740,00 pada Dinas Pendidikan.
3. Penambahan akibat kapitalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Bencana sebesar Rp17.310.700,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  4. Penambahan akibat Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp17.169.746.639,00 terdiri dari:
    - a. Hibah 3 unit PC, 1 unit Printer dan 1 unit server senilai Rp65.849.000,00 dari Perpustakaan Nasional pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
    - b. 900 unit alat kesehatan tahun pengadaan 2013 senilai Rp17.103.897.639,00 pada Dinas Kesehatan yang baru dihibahkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022.
  5. Penambahan akibat Pengakuan Utang Jangka Pendek sebesar Rp96.884.767,00 terdiri dari:
    - a. pengakuan utang atas 86 unit barang senilai Rp93.668.740,00 pada Dinas Pendidikan.
    - b. 1 Unit barang berupa Patient Monitor senilai Rp27,00 pada RSUD sebagai akibat selisih kurang total pembayaran dengan nilai kontrak.
    - c. 9 unit aset baru Timbangan Badan Digital senilai Rp3.216.000,00 pada Dinas Kesehatan.
  6. Penambahan akibat Kurang Catat tahun sebelumnya dan reklasifikasi aset yang sebelumnya dicatat sebagai aset gabungan sebesar Rp1.023.483.091,52 berupa 6 rincian barang senilai Rp74.912.000,00 pada Puskesmas Balauring - Dinas Kesehatan dan 42 rincian barang senilai Rp948.571.091,52 pada Puskesmas Wulandoni - Dinas Kesehatan.
  7. Penambahan akibat Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp422.208.600,00 terdiri dari:
    - a. Reklasifikasi 22 rincian barang berupa pagar pengaman senilai Rp232.699.000,00 pada Dinas Perhubungan.
    - b. Reklasifikasi 40 rincian barang senilai Rp144.123.600,00 pada RSUD.
    - c. Reklasifikasi 1 rincian barang berupa pagar pengaman rujab senilai Rp45.386.000,00 pada Sekretariat Daerah.
  8. Penambahan akibat Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp181.873.500,00 berupa Reklasifikasi 19 rincian barang senilai pada Dinas Kominfo.
  9. Penambahan akibat Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.427.015.203,00 1579 yang kodefikasi asetnya (baik eksisting maupun realisasi belanja modal) tidak sesuai dengan fisik barang.
  10. Penambahan akibat Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp69.013.500,00 terdiri dari:
    - a. 22 unit rincian barang senilai Rp48.034.500,00 pada Dinas Pendidikan.
    - b. 1 unit barang berupa Keyboard Yamaha PSR SX 900 senilai Rp20.979.000,00 pada Disporabud.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

11. Pengurangan akibat Penghapusan sebesar Rp662.515.000,00 terdiri dari:
  - a. Penghapusan 1 unit Mobil Jabatan Wakil Bupati Toyota Fortuner senilai Rp606.371.000,00 pada SETDA.
  - b. Penghapusan 1 unit Sepeda Motor Honda GL 15A1DN senilai Rp24.079.000,00 pada Dinas Sosial P2KB.
  - c. Penghapusan 2 unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter senilai Rp32.065.000,00 pada RSUD.
12. Pengurangan akibat Pengakuan Belanja sebesar Rp1.564.304.000,00 berupa Belanja BOP TK/RA.
13. Pengurangan akibat Pembayaran Utang Jangka Pendek sebesar Rp1.497.300.540,00 berupa Pembayaran utang belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 pada Dinas Pendidikan.
14. Pengurangan akibat Reklasifikasi aset hasil pengadaan ke Ekstrakomptabel sebesar Rp Rp150.118.918,50 karena tidak memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap terdiri dari:
  - a. 117 unit barang senilai Rp18.355.200,00 pada Dinas Kesehatan.
  - b. 182 unit barang senilai Rp5.472.146,00 pada Dinas Koperindag.
  - c. 645 unit barang senilai Rp45.394.261,00 pada Dinas Pendidikan.
  - d. 2 unit barang senilai Rp541.952,00 pada Dinas Sosial P2KB.
  - e. 36 unit barang senilai Rp1.206.301,00 pada Kecamatan Omesuri.
  - f. 549 unit barang senilai Rp26.581.378,00 pada RSUD.
  - g. 641 unit barang senilai Rp52.567.680,50 pada Sekretariat Daerah.
15. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke persediaan sebesar Rp8.667.070,00 karena merupakan barang persediaan yang dianggarkan melalui belanja modal berupa 18 rincian barang Dinas Pendidikan.
16. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp74.052.000,00 berupa 1 unit Sumur Bor dengan Pompa pada Sekretariat DPRD yang dianggarkan melalui Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
17. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp525.000,00 berupa 2 buah Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi senilai Rp525.000,00 pada Dinas Pendidikan yang dianggarkan melalui Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
18. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp2.795.533.907,08 terdiri dari:
  - a. 257 rincian barang senilai Rp2.414.063.907,08 pada Dinas Kesehatan sesuai hasil Inventarisasi.
  - b. 13 rincian barang senilai Rp381.470.000,00 pada DLH sesuai hasil Inventarisasi.
19. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.427.015.203,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada penambahan akibat Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin tersebut di atas.

**Tabel 5.3.46.**  
**Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Alat Besar Darat	11.026.206.000,00	11.026.206.000,00
2	Alat Bantu	6.283.230.410,00	6.197.307.128,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	66.522.974.924,10	68.084.748.476,10
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	370.851.200,00	370.851.200,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

No	Uraian	2022	2021
5	Alat Angkutan Apung Bermotor	6.851.018.447,00	6.851.018.447,00
6	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	519.761.000,00	519.761.000,00
7	Alat Bengkel Bermesin	5.482.295.296,00	5.464.984.596,00
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	100.473.418,00	93.868.418,00
9	Alat Ukur	574.502.752,61	574.525.335,04
10	Alat Pengolahan	236.971.888,00	236.321.888,00
11	Alat Kantor	17.023.547.095,34	15.872.844.718,34
12	Alat Rumah Tangga	29.534.633.410,07	25.665.776.633,21
13	Meja Dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	3.656.511.460,73	3.527.269.394,73
14	Alat Studio	2.012.193.877,15	1.871.019.874,15
15	Alat Komunikasi	3.187.244.781,15	3.040.003.262,15
16	Peralatan Pemancar	2.837.544.095,39	144.007.628,39
17	Alat Kedokteran	112.605.707.768,32	93.033.277.623,39
18	Alat Kesehatan Umum	11.926.574.509,00	11.926.574.509,00
19	Unit Alat Laboratorium	10.300.846.032,98	8.164.188.261,98
20	Alat Peraga Praktek Sekolah	6.646.379.162,28	6.409.527.662,28
21	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	-	124.769.200,00
22	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.471.729.700,00	1.785.229.700,00
23	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	164.485.115,00	-
24	Komputer Unit	32.261.420.356,28	26.918.144.869,72
25	Peralatan Komputer	8.543.011.318,51	7.486.601.406,49
26	Alat Bantu Eksplorasi	4.000.000,00	4.000.000,00
27	Alat Sar	1.436.876.260,00	1.418.326.260,00
28	Alat Kerja Penerbangan	5.059.500,00	5.059.500,00
29	Unit Peralatan Proses/produksi	7.000.000,00	7.000.000,00
30	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	4.201.990.886,00	3.949.449.886,00
31	Peralatan Olahraga	191.124.615,00	102.465.600,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>345.986.165.278,91</b>	<b>310.875.128.477,97</b>

Saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 dan 2021 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.47.**  
**Peralatan dan Mesin OPD**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Dinas Pendidikan	49.346.605.521,33	42.372.857.651,33
2	Dinas Kesehatan	92.625.393.265,47	70.032.678.790,03
3	Rumah Sakit Umum Daerah	74.285.731.723,95	71.284.163.735,95
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.472.260.781,04	8.353.831.781,04
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	922.510.960,58	917.910.960,58
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.239.942.319,00	2.239.942.319,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.480.109.952,00	3.462.799.252,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.931.010.314,66	5.411.403.676,66
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	106.411.724,29	106.411.724,29
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	376.051.681,00	376.051.681,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.544.518.250,00	4.925.988.250,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.303.218.515,92	2.303.218.515,92



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	2022	2021
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	807.169.179,00	776.151.479,00
14	Dinas Perhubungan	12.610.665.734,44	12.309.007.874,44
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.371.939.559,03	5.130.295.733,03
16	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.037.195.562,33	2.898.026.708,33
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	772.829.839,71	772.829.839,71
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	1.337.342.569,64	1.126.190.569,64
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.255.235.232,47	3.161.806.374,47
20	Dinas Perikanan	6.551.204.204,00	6.543.520.804,00
21	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.805.831.947,40	1.805.831.947,40
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.228.286.914,44	11.228.286.914,44
23	Sekretariat Daerah	23.051.637.922,19	22.966.075.948,69
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7.421.481.311,58	7.060.157.311,58
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.556.977.849,60	1.556.977.849,60
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.860.932.862,80	3.679.904.862,80
27	Badan Pendapatan Daerah	2.144.983.224,88	1.949.124.408,88
28	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.902.042.326,00	1.546.912.326,00
29	Inspektorat Daerah	1.087.471.353,00	1.087.471.353,00
30	Kecamatan Nubatukan	5.631.019.773,66	5.631.019.773,66
31	Kecamatan Lebatukan	898.839.346,00	898.839.346,00
32	Kecamatan Omesuri	795.962.979,00	763.351.750,00
33	Kecamatan Buyasuri	921.009.035,00	921.009.035,00
34	Kecamatan Atadei	885.424.628,00	858.161.015,00
35	Kecamatan Nagawutung	840.338.630,00	840.338.630,00
36	Kecamatan Ile Ape	843.680.084,00	843.680.084,00
37	Kecamatan Wulandoni	811.291.175,00	811.291.175,00
38	Kecamatan Ile Ape Timur	1.029.723.669,00	1.029.723.669,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	891.883.357,50	891.883.357,50
	<b>Jumlah</b>	<b>345.986.165.278,91</b>	<b>310.875.128.477,97</b>

Selain itu, perlu juga diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 unit Aset Tetap Kapal Rakyat "Aku Lembata" 150 GT pengadaan 2019 senilai Rp2.742.871.947,00 yang tercatat pada KIB Dinas Perhubungan sedang dalam proses hukum oleh Aparat Penegak Hukum.
2. Terdapat 4 (empat) Kendaraan Dinas yang belum dilengkapi informasi Nomor BPKB dan Nomor Polisi yaitu :
  - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New Mega Pro tahun 2013 pada Kecamatan Ile Ape yang tidak dilengkapi faktur pembelian oleh karena proses pengadaan yang bermasalah dan telah melalui proses hukum. SKPD telah berkoordinasi dengan dealer untuk penyelesaiannya, dan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian.
  - b. 2 (dua) unit Sepeda Motor CBR 150 R Streetfire pengadaan tahun 2021 pada Dinas Porabud yang masih dalam proses pengurusan sesuai keterangan informasi dari SKPD.
  - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cabin tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan yang masih dalam proses pengurusan sesuai informasi dari SKPD.
3. Selain 4(empat) kendaraan tersebut di atas, masih terdapat 20 (dua puluh) kendaraan yang belum dilengkapi informasi Nomor BPKB:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

---

- a. 3 (tiga) unit sepeda motor tahun pengadaan 2022 di Dinas Kesehatan yang masih dalam proses pengurusan (minimal 6 bulan sejak pembelian).
  - b. 9 (sembilan) unit mobil yaitu mobil Toyota Hilux tahun 2012 di Dinas PUPR, Mobil Laboratorium Lingkungan tahun 2008 di DLH, Mobil Toyota Hilux tahun 2015 di Dinas Perikanan, Mobil Pickup Isuzu Turbo tahun 2008 di Dinas Pertanian, mobil Toyota Hilux Double Cabin tahun 2014 di Dinas Pertanian, mobil Toyota Hilux Double Cabin tahun 2014 di Bappelitbangda, Mobil Dump Truck Toyota di Kecamatan Nubatukan, mobil Toyota Hilux Double Cabin tahun 2013 di Kec. Omesuri, dan mobil Toyota Hilux Double Cabin tahun 2013 di Kec. Wulandoni.
  - c. 8 (delapan) unit sepeda motor yaitu 2 (dua) unit sepeda motor yamaha untuk pengawalan tahun 2019 di Kantor Satpol-PP, Sepeda Motor Honda CB15A1RRF M/T tahun 2015 di Dinas Perhubungan, 2 (dua) unit sepeda motor Honda NF tahun 2006 dan 2007 di BKAD, Sepeda Motor Honda Supra tahun 2012 di Kec. Lebatukan, Sepeda Motor Honda AFX123C08 M/T tahun 2014 di Kec. Lebatukan dan Sepeda Motor - Honda Verza tahun 2018 di Kec. Omesuri.
4. Atas temuan BPK terhadap 10 unit barang pada Dinas Kesehatan belum dapat ditelusuri karena belum didukung dengan informasi yang jelas pada KIB B senilai Rp234.189.849,58,00 sebagaimana termuat pada tabel 1.23 Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 96.B/LHP/XIX.KUP/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 dapat dijelaskan bahwa:
- a. 3 (tiga) unit Layar LCD/Proyektor tahun 2015 senilai 8.520.000,00 (no. urut 5), 2 (dua) unit LCD/Infocus Sony tahun 2015 senilai Rp19.800.000,00 (no. urut 6) dan 3 (tiga) unit Televisi Samsung 32 inch tahun 2015 senilai Rp23.100.000,00 (no. urut 7) adalah merupakan barang-barang hibah dari Kementerian Kesehatan yang baru ditambahkan ke daftar barang Dinas Kesehatan di tahun 2021 karena baru dihibahkan pada tahun 2021 sesuai sesuai Berita Acara Hibah nomor No.KN.02.07/I.3/2249/2021 tanggal 12 Februari 2021, di mana tahun pengadaan barang-barang tersebut dalam dokumen hibah adalah tahun 2015. Dan oleh karena dokumen Berita Acara Hibah baru dibuat 6 (enam) tahun setelah barang diterima, di mana seluruh barang telah habis masa manfaatnya, maka tidak dapat dipastikan apakah seluruh barang yang termuat dalam Berita Acara Hibah dimaksud benar-benar ada dan digunakan oleh SKPD. Pencatatan barang dimaksud baru dilakukan di tahun 2021 sejak adanya Berita Acara Hibah, sementara pencatatan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 (termasuk perubahan kondisi dari baik menjadi rusak maupun kehilangan) tidak dapat dibuat karena tidak ada dasar hukum untuk dicatat oleh Pemda Kabupaten Lembata dan masih menjadi aset milik Kementerian Kesehatan. Untuk itu, pada tahun 2023 akan dilakukan inventarisasi khusus oleh SKPD atas keberadaan fisik barang-barang hibah tersebut.
  - b. Belum ditemukan dokumen pendukung yang memadai tentang asal usul perolehan, harga maupun jumlah atas 1 (satu) unit P. C. Unit (Komputer PC) tahun 2006 senilai Rp45.095.000,00 (no. urut 2). Namun secara historis pencatatan diketahui bahwa:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

- 1) Pada LBMD tahun 2009 tercatat 2 (dua) unit komputer pengadaan tahun 2006 tanpa merk / spesifikasi dan tanpa nilai perolehan.
  - 2) Pada LBMD tahun 2010 tercatat 1 (satu) unit komputer tanpa merk/spesifikasi pengadaan tahun 2006 senilai Rp45.095.000,00. Data ini muncul sebagai akibat pelaksanaan uji petik dan koreksi pencatatan BMD dengan basis data Laporan Hasil Penilaian Properti File No.2504-3075a-MKS tanggal 14 April 2005 dalam rangka tindak lanjut atas Opini BPK RI Perwakilan NTT yang “*Tidak menyatakan pendapat*” terhadap Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Lembata Tahun 2009. Data ini konsisten sampai dengan LBMD tahun 2020.
  - 3) Pada LBMD tahun 2021 sebagai akibat pelaksanaan tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Audit Kinerja BPK tentang kelengkapan KIB, maka aset tersebut dilengkapi pencatatannya menjadi Komputer dengan merk/type IBM 16 bit intel 8088. Data ini tidak mengalami perubahan pada LBMD tahun 2022.
- c. Terhadap 1 (satu) unit P. C. Unit (Komputer PC) Compaq tahun 2009 senilai Rp89.010.000,00 (no. urut 1), belum ditemukan dokumen pendukung yang memadai tentang asal usul perolehan, harga maupun jumlahnya. Secara historis pencatatan diketahui bahwa:
- 1) Tidak ada komputer pengadaan tahun 2009 yang tercatat pada LBMD tahun 2009.
  - 2) Pada LBMD tahun 2010 tercatat 6 (enam) unit komputer tanpa merk/spesifikasi pengadaan tahun 2006 senilai Rp Rp89.010.000,00. Dengan demikian harga satuan untuk masing-masing komputer adalah senilai Rp14.835.000,00. Data ini muncul sebagai akibat pelaksanaan uji petik dan koreksi pencatatan dan konsisten sampai dengan LBMD 2012.
  - 3) Pada LBMD tahun 2013 terdapat perubahan informasi merk/type sehingga tercatat ada 6(enam) unit komputer merk Compaq pengadaan tahun 2006 senilai Rp89.010.000,00. Data ini konsisten sampai dengan LBMD tahun 2015.
  - 4) Pada LBMD tahun 2016 aset tersebut dicatat sebagai 1 (satu) unit komputer merk Compaq senilai Rp89.010.000,00. Besar kemungkinan perubahan jumlah ini diakibatkan oleh kesalahan penginputan data saat peralihan dari pencatatan secara manual ke pencatatan dengan menggunakan aplikasi SIMASET. Informasi ini konsisten sampai dengan LBMD tahun 2021 dan baru diperbaiki pada LBMD tahun 2022.
- d. Terhadap 2 (dua) unit P. C. Unit (Komputer PC) Acer tahun 2010 masing-masing senilai Rp14.800.000,00 (no. urut 3 dan 4), belum ditemukan dokumen pendukung yang memadai tentang asal usul perolehan, harga maupun jumlahnya. Secara historis pencatatan diketahui bahwa :
- 1) Pada LBMD tahun 2010 tercatat 3 (tiga) unit Komputer tanpa merk/spesifikasi senilai Rp44.400.000,00 (harga satuan Rp14.800.000,00). Data ini konsisten sampai dengan LBMD tahun 2012.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- 2) Pada LBMD tahun 2013 ada perubahan informasi merk/type sehingga tercatat 3 (tiga) unit Komputer Merk Acer senilai Rp44.400.000,00 (harga satuan Rp14.800.000,00). Data ini konsisten sampai dengan LBMD tahun 2018.
- 3) Pada LBMD tahun 2019, salah satu dari ketiga komputer tersebut berubah kondisinya menjadi rusak berat dan diReklasifikasi ke aset lain-lain. Sehingga pada KIB LBMD tahun 2019 tercatat 2 (dua) Komputer Merk Acer senilai Rp39,600.000,00 (harga satuan Rp14.800.000,00). Data ini tetap konsisten sampai dengan LBMD tahun 2022.
- e. Terhadap Kipas Angin pengadaan tahun 2019 senilai Rp7.264.849,58 (no. urut 8) dapat diinformasikan nilai tersebut merupakan nilai 14 (empat belas) unit Kipas Angin merk GMC, Model – 320 yang dicatat berdasarkan informasi pengadaan barang dari dana JKN/Kapitasi tahun 2019 pada Puskesmas Balauring.
- f. Terhadap Kipas Angin pengadaan tahun 2020 senilai Rp10.000.000,00 (no. urut 9) dapat diinformasikan nilai tersebut merupakan nilai 20 (dua puluh) unit Kipas Angin merk GMC, Model – 320 yang dicatat berdasarkan informasi pengadaan barang dari belanja BTT Covid tahun 2020 pada Puskesmas Balauring.
- g. Terhadap Kipas Angin Besar pengadaan tahun 2020 senilai Rp1.800.000,00 (no. urut 10) dapat diinformasikan nilai tersebut merupakan nilai 2 (dua) unit Kipas Angin merk GMC, Model–320 yang dicatat berdasarkan informasi pengadaan barang dari belanja BTT Covid tahun 2020 pada Puskesmas Balauring.

Terhadap permasalahan ini, akan dilakukan inventarisasi khusus dengan melibatkan aparat pengawas internal pemerintah (inspektorat) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

#### 5.3.3.3. Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

*dalam rupiah*

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp577.950.557.878,96	Rp557.833.174.180,54

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp577.950.557.878,96 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp557.833.174.180,54. Perubahan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.48.**

#### Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

*dalam rupiah*

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>557.833.174.180,54</b>
<b>Penambahan</b>	<b>47.677.099.510,00</b>
Belanja Modal	20.611.697.456,00
Kapitalisasi belanja Barang dan Jasa	7.061.286.214,00
Pengkakuan Utang Jangka Pendek	2.692.284.893,00
Reklasifikasi dari SKPD Lain	13.101.086.855,00
Reklasifikasi dari KDP	874.153.292,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Uraian	Mutasi
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	3.336.590.800,00
<b>Pengurangan</b>	<b>27.559.715.811,58</b>
Penghapusan	74.400.000,00
Kekurangan Volume Pekerjaan	35.839.337,06
Pembayaran Utang Jangka Pendek	4.617.573.520,00
Reklasifikasi ke SKPD Lain	13.101.086.855,00
Reklasifikasi aset hasil pengadaan ke Persediaan	35.002.206,00
Lebih catat nilai aset	948.571.091,52
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	422.208.600,00
Reklasifikasi ke JIJ	2.022.943.400,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	2.965.500.002,00
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	3.336.590.800,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>577.950.557.878,96</b>

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan dan pengurangan masing-masing sebesar Rp13.101.086.855,00 berupa reklasifikasi antar-SKPD terdiri dari:
  - a. 1 unit bangunan Kantor Dinas Koperindag (Eks. Rujab KDH) senilai Rp1.431.579.899,00 dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ke Dinas Koperindag.
  - b. 1 unit bangunan Rumah Jabatan Bupati senilai Rp9.495.760.000,00 dari Dinas PUPR ke SETDA.
  - c. 1 unit bangunan Kamar Ganti dan Loker Wulen Luo senilai Rp79.555.300,00 dari Dinas Parekraf ke Kec. Nubatukan.
  - d. 1 unit bangunan Pos Tiket Wulen Luo senilai Rp17.542.400,00 dari Dinas Parekraf ke Kec. Nubatukan.
  - e. 1 unit bangunan Warung Los Kuliner Wulen Luo senilai Rp150.108.200,00 dari Dinas Parekraf ke Kec. Nubatukan.
  - f. Bangunan Taman Kota (Swaolsa Tite) senilai Rp9.000.000,00 dari DLH ke Kec. Nubatukan.
  - g. Bangunan Kantor Camat Nagawutung senilai Rp1.917.541.056,00 dari Dinas PUPR ke Kec. Nagawutung.
2. Penambahan akibat Belanja Modal sebesar Rp20.611.697.456,00 merupakan realisasi dari LRA belanja modal tahun berjalan.
3. Penambahan akibat Kapitalisasi belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.061.286.214,00 terdiri dari:
  - a. Jasa konsultan perencana teknis senilai Rp621.239.900,00.
  - b. Jasa konsultan pengawas teknis senilai Rp535.755.350,00.
  - c. Penambahan akibat Kapitalisasi belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.736.950.374,00.
  - d. Penambahan akibat Kapitalisasi belanja pegawai berupa honorarium pengadaan barang dan jasa senilai Rp163.180.590,00
4. Penambahan akibat Pengakuan Utang Jangka Pendek sebesar Rp2.692.284.893,00 terdiri dari
  - a. 1 unit bangunan gedung kantor sekolah, 4 unit bangunan MCK, 1 unit Lab Komputer, 1 unit bangunan UKS, 1 unit Bangunan Perpustakaan dan



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

- 4 unit bangunan sekolah senilai Rp2.551.817.078,00 pada Dinas Pendidikan.
- b. 1 unit bangunan kantor camat nubatukan senilai Rp140.467.815,00 pada Dinas PUPR.
5. Penambahan akibat Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp874.153.292,00 terdiri dari:
  - a. 1 unit Atap Tribun Bangunan Pertunjukan senilai Rp149.049.900,00 pada Dinas Parekraf.
  - b. 1 unit Bangunan Galeri senilai Rp64.184.745,00 pada Dinas Parekraf.
  - c. 2 unit Bangunan Gazebo senilai Rp54.907.055,00 pada Dinas Parekraf.
  - d. 1 unit Bangunan Selasar senilai Rp25.664.200,00 pada Dinas Parekraf.
  - e. 1 unit Kantor Camat Nagawutung senilai Rp568.358.392,00 pada Dinas PUPR.
  - f. Perencanaan Teknis Kantor Camat Nagawutung senilai Rp11.989.000,00 pada Kecamatan Nagawutung.
6. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.336.590.800,00 berupa 17 rincian barang yang kodefikasi asetnya (baik eksisting maupun korolari belanja modal) tidak sesuai dengan fisik barang.
7. Pengurangan akibat Penghapusan sebesar Rp74.400.000,00 berupa pangkuan Patung Soekarno, Petani dan Nelayan Wangatoa senilai Rp74.400.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
8. Pengurangan akibat Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp35.839.337,06 terdiri dari:
  - a. Bangunan Ruang NICU RSUD senilai Rp20.782.908,27 pada RSUD.
  - b. Bangunan Ruang PICU senilai Rp9.657.809,71 pada RSUD.
  - c. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Nubatukan senilai Rp5.398.619,08 pada Dinas Pendidikan.
9. Pengurangan akibat Pembayaran Utang Jangka Pendek sebesar Rp4.617.573.520,00 terdiri dari:
  - a. 1 unit Bangunan GOR 99 senilai Rp1.426.775.400,00 pada Dinas Porabud.
  - b. 1 unit Bangunan Rumah Jabatan Bupati senilai Rp2.799.291.000,00 pada Dinas PUPR.
  - c. Lapangan Bola Desa Laranwutun senilai Rp99.464.000,00 dan Lapangan Bola Lamahora - Kel. Lewoleba Timur senilai Rp99.764.000,00 pada Dinas Porabud.
  - d. 1 unit Penataan Areal senilai Rp86.510.800,00 pada DLH.
  - e. 1 unit Pintu Masuk senilai Rp105.768.320,00 pada DLH.
10. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp35.002.206,00 terdiri dari 5 buah pilar batas tanah pada Dinas Perkimtan senilai Rp22.671.725,00 dan 9 buah papan nama tanah pada Dinas Perkimtan senilai Rp12.330.481,00.
11. Pengurangan akibat lebih catat nilai aset sebesar Rp948.571.091,52 terdiri dari 1 unit Bangunan Gedung Puskesmas Loang senilai Rp489.775.032,00 dan 1 unit Bangunan Gedung Puskesmas Wulandoni senilai Rp458.796.059,52 pada Dinas Kesehatan.
12. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp422.208.600,00 terdiri dari:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- a. 2 set Pagar Pengaman Jalan Ruas Jalan Kabupaten senilai Rp232.699.000,00 pada Dinas Perhubungan.
  - b. Pagar pengaman teras rujab Kepala Daerah senilai Rp45.386.000,00.
  - c. 40 rincian barang senilai Rp144.123.600,00 pada RSUD.
13. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke JIJ sebesar Rp2.022.943.400,00 berupa 13 unit bangunan toilet / MCK Sekolah senilai Rp2.022.943.400,00 pada Dinas Pendidikan.
  14. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp2.965.500.002,00 berupa 17 unit bangunan kesehatan senilai Rp2.892.207.771,68 pada Dinas Kesehatan dan sebagian nilai Patung Soekarno, Petani dan Nelayan Wangatoa sebesar Rp53.250.000,00 pada DLH (badan patung diReklasifikasi ke aset lain-lain karena masih akan digunakan, sementara pangkuan patung dihapus karena telah dibongkar dan didirikan bangunan baru).
  15. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.336.590.800,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada penambahan akibat Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan tersebut di atas.

**Tabel 5.3.49.**  
**Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Bangunan Gedung Kantor	134.130.399.758,03	128.220.481.991,03
2	Bangunan Gudang	7.872.730.302,46	7.792.278.302,46
3	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/hanggar	257.609.600,00	257.609.600,00
4	Bangunan Gedung Instalasi	300.932.959,34	300.932.959,34
5	Bangunan Gedung Laboratorium	13.218.069.777,54	12.076.687.784,54
6	Bangunan Kesehatan	147.313.897.267,58	141.906.204.332,35
7	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6.000.000,00	6.000.000,00
8	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.199.721.234,00	4.199.721.234,00
9	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	131.641.623.751,02	124.739.196.600,02
10	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	26.619.381.800,00	26.419.690.800,00
11	Bangunan Gedung Pertokoan/koperasi/pasar	16.261.177.725,05	16.060.267.725,05
12	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	521.992.630,65	369.204.858,65
13	Bangunan Gedung Garasi/pool	1.481.408.057,50	1.481.408.057,50
14	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	525.705.000,00	525.705.000,00
15	Bangunan Gedung Perpustakaan	17.670.130.320,32	16.903.144.220,32
16	Bangunan Gedung Terminal/pelabuhan/bandara	2.815.951.128,70	2.815.951.128,70
17	Bangunan Terbuka	82.682.444,00	24.052.800,00
18	Bangunan Peternakan/perikanan	1.451.418.900,00	1.243.706.200,00
19	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.623.002.333,10	15.614.002.333,10
20	Bangunan Fasilitas Umum	8.309.086.234,88	7.369.633.234,88
21	Bangunan Parkir	1.041.055.692,00	1.017.224.550,00
22	Bangunan Gedung Pabrik	3.209.278.565,00	3.209.278.565,00
23	Bangunan Stasiun Bus	59.742.000,00	59.742.000,00
24	Taman	1.920.984.596,00	1.920.984.596,00
25	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.377.956.518,24	1.377.956.518,24
26	Rumah Negara Golongan I	11.670.290.041,50	13.101.869.940,50
27	Rumah Negara Golongan Iii	4.960.634.718,00	4.939.395.850,00
28	Mess/wisma/bungalow/tempat Peristirahatan	21.367.144.977,05	21.767.733.308,54

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

No	Uraian	2022	2021
29	Asrama	641.941.000,00	641.941.000,00
30	Tugu	894.229.000,00	1.032.921.230,32
31	Candi/tugu Peringatan/prasasti Lainnya	210.511.090,00	210.511.090,00
32	Pagar	293.868.457,00	227.736.370,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>577.950.557.878,96</b>	<b>557.833.174.180,54</b>

Saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 dan 2021 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dan Pengelola Barang Milik Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.50.**  
**Gedung dan Bangunan OPD**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Dinas Pendidikan	191.017.940.246,48	179.931.503.841,56
2	Dinas Kesehatan	111.778.850.690,49	115.619.629.553,69
3	Rumah Sakit Umum Daerah	48.794.434.220,52	40.864.678.102,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.882.977.999,00	12.378.737.999,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	266.430.350,00	266.430.350,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.271.090.600,00	2.271.090.600,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	797.999.000,00	797.999.000,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.408.428.687,00	3.365.194.687,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.223.802.913,00	3.353.495.143,32
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.798.715.201,00	2.798.715.201,00
11	Dinas Perhubungan	10.136.330.073,70	10.136.330.073,70
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	161.123.000,00	161.123.000,00
13	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	20.644.080.346,69	18.939.574.447,69
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	739.437.450,00	739.437.450,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	25.382.724.100,00	25.183.033.100,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.735.876.467,00	11.167.456.366,00
17	Dinas Perikanan	4.694.298.465,00	4.694.298.465,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.200.403.193,16	11.517.156.093,16
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.899.594.758,00	10.691.882.058,00
20	Sekretariat Daerah	45.177.416.193,75	35.554.634.548,75
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28.601.551.434,67	28.405.953.566,67
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.026.444.623,00	4.026.444.623,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.611.952.832,62	4.611.952.832,62
24	Badan Pendapatan Daerah	1.216.721.274,00	1.216.721.274,00
25	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.234.520.100,00	2.078.024.100,00
26	Inspektorat Daerah	1.726.431.030,00	1.726.431.030,00
27	Kecamatan Nubatukan	12.679.205.763,88	12.422.999.863,88
28	Kecamatan Lebatukan	2.793.560.217,00	2.793.560.217,00
29	Kecamatan Omesuri	2.142.720.129,00	2.142.720.129,00
30	Kecamatan Atadei	640.945.000,00	640.945.000,00
31	Kecamatan Nagawutung	3.092.002.889,00	1.162.472.833,00
32	Kecamatan Ile Ape	913.930.718,00	913.930.718,00
33	Kecamatan Wulandoni	2.332.446.600,00	2.332.446.600,00
34	Kecamatan Ile Ape Timur	1.711.151.501,00	1.711.151.501,00
35	Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah	1.215.019.812,00	1.215.019.812,00
	<b>Jumlah</b>	<b>577.950.557.878,96</b>	<b>557.833.174.180,54</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

Terhadap pencatatan Barang Milik Daerah yang digolongkan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai hasil inventarisasi Dinas Kesehatan sebagai tindak lanjut Audit Kinerja tahun 2020 (LHP Nomor 160/LHP/XIX.KUP/12/2020 tanggal 22 Desember 2020) ditemukan fakta bahwa nilai perolehan bangunan Gedung Puskesmas Loang sebesar Rp10.205.884.000,00 dan bangunan Puskesmas Wulandoni sebesar Rp10.224.383.200,00 sesungguhnya merupakan gabungan antara nilai bangunan dan peralatan mesin yang merupakan satu kesatuan pengadaan sebagaimana termuat dalam dokumen kontrak. Untuk itu pada tahun 2022 dilakukan koreksi pencatatan sebagai berikut:
  - a. Koreksi pengurangan (lebih catat) nilai bangunan Puskesmas Loang sebesar Rp489.775.032,00 dan koreksi penambahan (kurang catat) 125 unit barang senilai Rp489.775.032,00 pada Peralatan dan Mesin.
  - b. Koreksi pengurangan (lebih catat) nilai bangunan Puskesmas Wulandine sebesar Rp458.796.059,52 dan koreksi penambahan (kurang catat) 111 unit barang senilai Rp458.796.059,52 pada Peralatan dan Mesin.
  - c. Koreksi nilai akumulasi penyusutan bangunan Puskesmas Loang berupa pengurangan sebesar Rp408.235.360,00 untuk menolkan total penyusutan yang sudah tercatat dan penambahan Rp388.644.358,72 yang merupakan perhitungan penyusutan sampai dengan tahun 2021 dengan menggunakan nilai perolehan baru (hasil koreksi).
  - d. Koreksi nilai akumulasi penyusutan bangunan Puskesmas Wulandoni berupa pengurangan sebesar Rp204.487.664,00 untuk menolkan total penyusutan yang sudah tercatat dan penambahan Rp166.599.821,62 yang merupakan perhitungan penyusutan sampai dengan tahun 2021 dengan menggunakan nilai perolehan baru (hasil koreksi). Nilai penyusutan ini lebih kecil dari nilai penyusutan bangunan Puskesmas Loang karena bangunan Puskesmas Loang sudah selesai dikerjakan pada tahun 2020 sementara bangunan Puskesmas Wulandoni baru selesai dikerjakan pada tahun 2021 (tahun 2020 masih berstatus KDP).
  - e. Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin berupa penambahan sebesar Rp454.527.932,00 sebagai hasil perhitungan penyusutan untuk 125 rincian barang kurang catat pada Puskesmas Loang dan 111 rincian barang kurang catat pada Puskesmas Wulandoni dari tahun 2020 sampai 2021 sesuai nilai perolehan dan masa manfaat masing-masing item barang.
2. Pada tahun 2020 dan 2021, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur melaksanakan pekerjaan rehabilitasi atas sarana prasarana sekolah pada 22 Sekolah Dasar di Kabupaten Lembata, yang belum dapat dicatat sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata sampai dengan akhir tahun 2022 karena belum ada dokumen pendukung berupa Berita Acara Serah Terima, sebagaimana termuat pada tabel berikut:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Tabel 5.3.51.

**Daftar Sekolah yang direhab oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah  
Nusa Tenggara Timur**

No	Nama Sekolah	Rehab Tahun	Keterangan
1	SD Inpres Ile Kimok	2020	Rehab berat
2	SD Inpres Paulolo	2020	Rehab berat
3	SD Inpres Waimuda	2020	Bongkar seluruhnya dan bangun baru
4	SD Inpres Lusikawak	2020	Rehab berat
5	SD Inpres Paubokol	2020	Bongkar seluruhnya dan bangun baru
6	SD Inpres Eltari	2020	Rehab berat
7	SD Inpres Muruona	2020	Rehab berat
8	SD Inpres Waiwaru	2020	Rehab berat
9	SD Inpres Lamadale	2020	Rehab berat
10	SD Inpres Atalojo	2020	Rehab berat
11	SD Inpres Wulandoni	2020	Rehab berat
12	SD Inpres Lamalewar	2021	Rehab berat
13	SD Inpres Lewoblolong	2021	Rehab berat
14	SD Inpres 92 Bean	2021	Rehab berat
15	SD Inpres Baopukang	2021	Rehab berat
16	SD Inpres Ilo Wutung	2021	Rehab berat
17	SD Inpres Kimakama	2021	Rehab berat
18	SD Inpres Lebe	2021	Rehab berat
19	SD Inpres Lite	2021	Rehab berat
20	SD Inpres Luki	2021	Rehab berat
21	SD Inpres Napor	2021	Rehab berat
22	SD Inpres Watuwara	2021	Rehab berat

3. Pada tahun 2022, dalam rangka proses pengusulan putra daerah Brigjen Pol (Purn) Anton Enga Tifaona sebagai pahlawan nasional, pihak keluarga dan yayasan pengusung proses pengusulan dimaksud dengan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Lembata, membangun patung Brigjen Pol (Purn) Anton Enga Tifaona di perlimaan wangatoa, pada lokasi tempat aset patung soekarno, petani dan nelayan tahun 2014 senilai Rp147.692.230,32 yang tercatat di daftar barang pengguna Dinas Lingkungan Hidup berada, dan selanjutnya akan dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata. Untuk keperluan dimaksud, maka aset eksisting berupa patung soekarno, petani dan nelayan dibongkar, di mana pangkuan patung dirobuhkan dan patungnya diamankan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk selanjutnya dipindahkan ke lokasi yang lain.

Atas kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Lembata melakukan koreksi pencatatan atas aset dimaksud sebagai berikut:

- Menghapus sebagian nilai aset sebesar Rp74.000.000,00 (Fisik Pangkuan senilai Rp70.481.147,00, perencanaan teknis pembangunan pangkuan senilai Rp2.114.435,00, pengawasan fisik pembangunan pangkuan senilai Rp1.804.418,00).
- Mereklasifikasikan sisa nilai aset (nilai fisik patung) sebesar Rp73.292.230,32 ke aset lain-lain.
- Menghapuskan sebagian nilai akumulasi penyusutan (proporsional terhadap nilai aset yang dihapus) sebesar Rp13.070.949,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- d. Mereklasifikasikan sisa nilai penyusutan (proporsional terhadap nilai aset yang direklasifikasikan ke aset lain-lain) sebesar Rp12.876.332,32 ke aset lain-lain.

#### 5.3.3.4. Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

dalam rupiah

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	1.011.067.726.081,71	960.238.408.654,44

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.011.067.726.081,71 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp960.238.408.654,44. Perubahan Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.52.**  
**Penambahan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

dalam rupiah

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>960.238.408.654,44</b>
<b>Bertambah</b>	<b>224.670.984.887,00</b>
Belanja Modal	200.252.654.512,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	5.314.063.652,00
Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	925.409.900,00
Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	504.675.385,00
Pengakuan Utang Jangka Pendek	1.748.777.889,00
Reklasifikasi dari SKPD Lain	234.539.700,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	74.052.000,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	2.022.943.400,00
Reklasifikasi dari KDP	13.593.868.449,00
<b>Berkurang</b>	<b>173.841.667.459,73</b>
Penghapusan	7.468.750,00
Lebih Catat Nilai Aset akibat kekeliruan pengakuan UJP tahun 2020	9.998.398,25
Kekurangan Volume Pekerjaan	18.637.351,48
Pengakuan Belanja	487.381.426,00
Reklasifikasi ke SKPD Lain	234.539.700,00
Reklasifikasi aset hasil pengadaan ke Persediaan	10.877.500,00
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	181.873.500,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	1.304.658.427,00
Reklasifikasi ke KDP	153.640.994.809,00
Pembayaran Utang Jangka Pendek	17.945.237.598,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.011.067.726.081,71</b>

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Antar-OPD yang menyebabkan perubahan saldo pada SKPD baik bertambah maupun berkurang sebesar Rp234.539.700,00 terdiri dari:
  - a. 1 unit Jeti Tambahan Wulen Luo senilai Rp99.562.800,00 dari Dinas Parekraf ke Kec. Nubatukan.
  - b. 1 unit Toilet Wulen Luo senilai Rp36.496.900,00 dari Dinas Parekraf ke Kec. Nubatukan.
  - c. 1 unit MCK di Lokasi Wisata Wulen Luo senilai Rp98.480.000,00 dari Dinas Perkimtan ke Kec. Nubatukan.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

2. Penambahan akibat Belanja Modal sebesar Rp200.252.654.512,00 merupakan realisasi dari LRA belanja modal tahun berjalan.
3. Penambahan akibat Kapitalisasi belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.314.063.652,00 terdiri dari:
  - a. Jasa konsultan perencana teknis senilai Rp3.552.485.290,00.
  - b. Jasa konsultan pengawas teknis senilai Rp1.761.578.362,00.
  - c. Kapitalisasi belanja pemeliharaan senilai Rp925.409.900,00.
  - d. Kapitalisasi Belanja pegawai berupa Honor Pejabat pengadaan barang dan jasa senilai Rp504.675.385,00 yang dapat diatribusikan secara langsung.
4. Penambahan akibat Pengakuan Utang Jangka Pendek sebesar Rp1.748.777.889,00 terdiri dari:
  - a. Jaringan Perpipaan (SR) 2022 di Desa Bakalerek - Dusun Tobitelek Desa Watokobu senilai Rp301.020.300,00 pada Dinas PUPR
  - b. Jaringan Perpipaan (SR) 2022 di Desa Babokerong Kec. Nagawutun senilai Rp18.990.000,00 pada Dinas PUPR
  - c. Jaringan Perpipaan (SR) 2022 di Desa Baopana Kec. Lebatukan senilai Rp16.145.000,00 pada Dinas PUPR
  - d. Jaringan Perpipaan (SR) 2022 di Desa Labalimut dan Belabaja senilai Rp9.600.000,00 pada Dinas PUPR
  - e. Jembatan di Desa Nubaboli/Crossway senilai Rp28.500.483,00 pada Dinas PUPR
  - f. Jl. 001.018: Jalan Sengsara - Trans Atadei senilai Rp209.733.000,00 pada Dinas PUPR
  - g. Jl. 001.049: Sp. Trans Lembata – SDN Wangatoa – Sp. Lasitarda senilai Rp106.473.900,00 pada Dinas PUPR
  - h. Jl. 001.058: Sp. Gereja Wangatoa - SP. Bapak Pehang senilai Rp85.857.550,00 pada Dinas PUPR
  - i. Jl. 001.083: Sp. Lima Wangatoa - Gereja Wangatoa – Sp. Lasitarda senilai Rp84.582.000,00 pada Dinas PUPR
  - j. Jl. 038: Hingalamamengi - Kalikur - Wairiang- Hading Manuk senilai Rp544.126.571,00 pada Dinas PUPR
  - k. Jl. Lingk. Sp. Gereja Solavide - Sp. Lasitarda senilai Rp88.375.000,00 pada Dinas PUPR
  - l. Pengembangan Jaringan Air Bersih (SPAM) di Desa Lamadale senilai Rp58.946.995,00 pada Dinas PUPR
  - m. Peningkatan Jalan Sp. Poloama - SDN Wangatoa senilai Rp61.457.150,00 pada Dinas PUPR
  - n. Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - Gereja Lamahora senilai Rp134.969.940,00 pada Dinas PUPR.
5. Penambahan akibat Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp74.052.000,00 berupa 1 unit Sumur Bor dengan Pompa pada Sekretariat DPRD.
6. Penambahan akibat Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.022.943.400,00 berupa 13 unit bangunan toilet / MCK Sekolah senilai Rp2.022.943.400,00 pada Dinas Pendidikan (*bandingkan penjelasan*



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

*pengurangan akibat reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Gedung dan Bangunan).*

7. Penambahan akibat Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp13.593.868.449,00 terdiri dari:
  - a. 1 unit Jaringan Air Minum Rumah Sakit senilai Rp467.859.505,00 pada RSUD
  - b. Peningkatan Jln Samping Gereja Solavide Menuju Lasitarda senilai Rp860.413.300,00 pada Dinas PUPR. senilai Rp860.413.300,00 pada Dinas PUPR.
  - c. Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Gereja Wangatoa - Sp. Lasitarda senilai Rp824.020.100,00 pada Dinas PUPR.
  - d. Peningkatan Jalan Sengsara - Trans Atadei senilai Rp2.001.977.000,00 pada Dinas PUPR.
  - e. Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - Gereja Lamahora senilai Rp804.023.060,00 pada Dinas PUPR.
  - f. Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - SDN Wangatoa - Sp. Lasitarda senilai Rp1.020.731.100,00 pada Dinas PUPR.
  - g. Peningkatan Jalan Kantor Lurah Selandoro - Gereja Wangatoa senilai Rp822.839.950,00 pada Dinas PUPR.
  - h. Peningkatan Jalan Sp. Poloama - SDN Wangatoa senilai Rp590.898.350,00 pada Dinas PUPR.
  - i. "Peningkatan Jalan Hingalamamengi - Kalikur - Wairiang - Hadingmanuk (Segmen Wairiang - Tobotani) (T1)
  - j. senilai Rp5.006.309.149,00 pada Dinas PUPR."
  - k. Pembangunan Jembatan di Desa Nubaboli/Crossway
  - l. Peningkatan Jalan samping Kantor Telkom - Jembatan Komak I (Segmen: Perempatan ANKARA - Jembatan KOMAK I).
8. Pengurangan akibat Penghapusan sebesar Rp7.468.750,00 berupa 1 unit Sumur Resapan-Pustu Pada pada Dinas Kesehatan.
9. Pengurangan akibat Lebih Catat Nilai Aset sebesar Rp9.998.398,25 sebagai akibat dari kekeliruan pengakuan Utang Jangka Pendek tahun 2020.
10. Pengurangan akibat Pengakuan Belanja sebesar Rp487.381.426,00 terdiri dari:
  - a. Pemeliharaan Lampu PJU PLN senilai Rp214.010.000,00 pada Dinas Perhubungan.
  - b. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PLN) senilai Rp213.510.000,00 pada Dinas Perhubungan.
  - c. Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Paket Peningkatan Jl. Wowong-Bean-Pantai Paheng Wag senilai Rp510.000,00 pada Dinas PUPR.
  - d. Perjalanan Dinas Aloys Muli Kedang, ST.,MT senilai Rp575.000,00, Perjalanan Dinas Aloysius Panang, ST.,MT, cs senilai Rp375.000,00 dan Perjalanan Dinas Longginus Lagadoni, ST,cs senilai Rp400.000,00 pada Dinas PUPR.
  - e. 1 paket Peralatan Listrik untuk Kebutuhan Listrik di Wulen Luo (Lampu, Kabel, Stop Kontak, Colokan, Mobilisasi dan Pemasangan) senilai Rp58.001.426,00 pada Kec. Nubatukan.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

11. Pengurangan akibat Pembayaran Utang Jangka Pendek sebesar Rp17.945.237.598,00 berupa 1 unit Bak Reservoir Wailain Desa Meluwiting senilai Rp119.475.000,00, Bendung Jaringan Irigasi Letuboro senilai Rp49.950.000,00, Peningkatan 23 ruas senilai Rp17.121.671.598,00, 1 unit Saluran Pembawa Air Baku Tertutup Desa Pantai Harapan senilai Rp19.976.000,00, 1 unit Talud Pengaman Abrasi Pantai di Desa Babokerong senilai Rp315.000.000,00 dan 1 unit Talud Pengaman Pantai (Desa Mampir) senilai Rp319.165.000,00 pada Dinas PUPR.
12. Pengurangan akibat Reklasifikasi aset hasil pengadaan ke Persediaan sebesar Rp10.877.500,00 pada Dinas Kominfo.
13. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp181.873.500,00 berupa 19 rincian barang pada Dinas Kominfo.
14. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke KDP sebesar Rp153.640.994.809,00 berupa 57 rincian Pekerjaan pada Dinas PUPR.
15. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp1.304.658.427,00 berupa 1 unit Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)- Puskesmas Loang senilai Rp623.130.000,00, 1 unit Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)-Puskesmas Lamaau senilai Rp669.059.677,00, 1 unit Sumur Bor Rumah Dinas Puskesmas Lewoleba senilai Rp5.000.000,00 dan 1 unit Sumur Resapan-Pusk. Lewoleba senilai Rp7.468.750,00 pada Dinas Kesehatan.
16. Pengurangan akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp18.637.351,48 atas pekerjaan Jl. 030: Tapobaran - Lodoblolong - Nilanapo - Bean - Tobotani - Hading Manuk pada Dinas PUPR senilai Rp13.338.272,55 dan Pembangunan MCK SMPN 1 Nubatukan pada Dinas Pendidikan senilai Rp5.299.078,93
17. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke SKPD lain sebesar Rp234.539.700,00 berupa 1 unit Jeti Tambahan Wulen Luo dari Dinas Parekraf ke Kec. Nubatukan senilai Rp99.562.800,00, 1 unit Toilet Wulen Luo dari Dinas Parekraf ke Kec. Nubatukan senilai Rp36.496.900, dan 1 unit MCK di Lokasi Wisata Wulen Luo dari Dinas Perkimtan ke Kec. Nubatukan senilai Rp98.480.000.

**Tabel 5.3.53.**

#### Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Jalan	719.635.762.710,55	677.040.815.239,10
2	Jembatan	39.235.364.939,51	38.912.712.303,51
3	Bangunan Air Irigasi	37.364.524.376,61	37.374.522.774,86
4	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	24.000.409.510,42	24.000.409.510,42
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	508.605.695,13	259.976.145,13
6	Bangunan Air Bersih/air Baku	28.319.455.391,97	25.437.397.401,90
7	Bangunan Air Kotor	7.963.738.279,44	7.963.738.279,44
8	Instalasi Air Bersih / Air Baku	2.035.966.705,00	1.269.998.500,00
9	Instalasi Air Kotor	3.757.625.063,70	5.049.814.740,70
10	Instalasi Pengolahan Sampah	11.667.197.000,00	11.667.197.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

No	Uraian	2022	2021
11	Instalasi Pembangkit Listrik	5.068.344.000,00	5.068.344.000,00
12	Instalasi Gardu Listrik	1.220.442.990,00	1.220.442.990,00
13	Jaringan Air Minum	95.697.411.757,33	90.380.162.107,33
14	Jaringan Listrik	24.222.527.475,08	24.222.527.475,08
15	Jaringan Telepon	4.181.300,00	4.181.300,00
16	Jaringan Gas	10.366.168.886,97	10.366.168.886,97
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.011.067.726.081,71</b>	<b>960.238.408.654,44</b>

Saldo akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 dan 2021 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.54.**  
**Jalan, Irigasi, dan Jaringan OPD**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Dinas Pendidikan	10.139.119.196,33	8.015.237.966,26
2	Dinas Kesehatan	9.753.887.300,21	11.076.012.875,46
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.854.509.195,00	1.093.114.490,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	908.833.854.618,50	859.855.592.901,05
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	98.480.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.814.000,00	4.814.000,00
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55.569.000,00	55.569.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	11.209.048.300,00	11.209.048.300,00
9	Dinas Perhubungan	17.254.490.396,74	17.254.490.396,74
10	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	556.047.300,00	556.047.300,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.933.500,00	4.933.500,00
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	373.205.000,00	373.205.000,00
13	Dinas Perikanan	4.715.758.950,00	4.715.758.950,00
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.544.802.462,01	2.680.862.162,01
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	828.880.972,00	797.527.672,00
16	Sekretariat Daerah	36.948.039.006,79	36.813.108.530,79
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	455.768.500,00	381.716.500,00
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	181.365.850,00	181.365.850,00
19	Badan Pendapatan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
20	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	55.474.200,00	55.474.200,00
21	Inspektorat Daerah	13.114.313,00	13.114.313,00
22	Kecamatan Nubatukan	5.146.851.821,13	4.884.253.547,13
23	Kecamatan Lebatukan	58.691.200,00	58.691.200,00
24	Kecamatan Nagawutung	46.011.000,00	26.500.000,00
25	Kecamatan Ile Ape	18.490.000,00	18.490.000,00
26	Kecamatan Wulandoni	10.000.000,00	10.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.011.067.726.081,71</b>	<b>960.238.408.654,44</b>

Terhadap pencatatan Barang Milik Daerah yang digolongkan sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan jaringan dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

- Pada tahun 2022 terdapat hibah barang dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berupa 1 (satu) paket Dermaga Penyeberangan Waijarang pengadaan tahun 2010 senilai Rp26.121.985.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor HK.201/14/20/DJPD/2022 dan : HK.180/106/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor PL.301/1/14/ BPTDXIII-NTT/2022 dan HK.180/107/2022 tanggal 22 Agustus 2022. Pemerintah Kabupaten Lembata kesulitan melakukan pencatatan atas barang dimaksud karena hal-hal sebagai berikut:
- Nilai hibah sebesar Rp26.121.985.000,00 tersebut merupakan nilai atas 1 (satu) rincian barang dalam satuan paket, yang tidak dirinci lebih detail walaupun secara fisik sebenarnya terdiri dari beberapa aset antara lain Dermaga Penyeberangan, Bangunan Gedung Terminal dan bangunan lainnya, Pagar Pengaman, Area Parkir, Jalan dalam kawasan dan instalasi listrik dalam kawasan.
  - Tahun perolehan barang sesuai dokumen hibah adalah 2010, namun tidak ada informasi nilai penyusutan dan / atau nilai buku atas barang tersebut pada dokumen hibah.
  - Jika dicatat sebagai 1 (satu) rincian barang pada kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan sesuai dokumen hibah, Umur ekonomis barang dan nilai penyusutan tidak sesuai dengan klasifikasi dan kodefikasi barang sesuai fisik barang berdasarkan ketentuan yang berlaku (tidak wajar).

Untuk itu, akan dilakukan penilaian pada terlebih dahulu pada tahun 2023 sebelum dicatat ke dalam Daftar Barang Milik Daerah agar nilai buku yang disajikan dapat diakui kewajarannya.

### 5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya

*dalam rupiah*

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	12.952.861.045,17	12.926.698.145,17

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.952.861.045,17 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.926.698.145,17. Perubahan Saldo Aset Tetap Lainnya ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.55.**  
**Penambahan Pengurangan Aset Tetap Lainnya**

*dalam rupiah*

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>12.926.698.145,17</b>
<b>Penambahan</b>	<b>2.325.588.001,00</b>
Belanja Modal	2.321.241.001,00
Kapitalisasi belanja Barang dan Jasa	3.822.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	525.000,00
<b>Pengurangan</b>	<b>2.299.425.101,00</b>
Pembayaran Utang Jangka Pendek	1.557.592.097,00
Reklasifikasi ke Data Ekstrakomptabel	576.039.504,00
Reklasifikasi aset hasil pengadaan ke Persediaan	96.780.000,00
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	69.013.500,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>12.952.861.045,17</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan akibat Belanja Modal sebesar Rp2.321.241.001,00 merupakan realisasi dari LRA belanja modal sebesar Rp1.672.673.097,00 dan belanja modal dana BOS sebesar Rp648.567.904,00.
2. Penambahan akibat Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.822.000 terdiri dari:
  - a. Belanja Atribusi Honor pejabat pengadaan barang dan jasa senilai Rp2.080.000,00 pada DISTANKP
  - b. Belanja Barang dan Jasa BOS berupa 2 unit Microphone senilai Rp1.742.000,00 pada Dinas Pendidikan.
3. Penambahan akibat Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp525.000,00 berupa 2 buah Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi pada Dinas Pendidikan..
4. Pengurangan akibat Pembayaran Utang Jangka Pendek sebesar Rp1.557.592.097,00 berupa Pembayaran UJP atas pengadaan buku tahun 2021 senilai Rp1.557.592.097,00 pada Dinas Pendidikan.
5. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Data Ekstrakomptabel sebesar Rp576.039.504,00 berupa 2822 rincian barang pada Dinas Pendidikan yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap.
6. Pengurangan akibat Reklasifikasi aset hasil pengadaan ke Persediaan sebesar Rp96.780.000,00 terdiri dari 4 ekor bibit ternak senilai Rp96.182.000,00 pada Dinas pertanian dan ketahanan pangan bola kaki (alat peraga sekolah) pada Dinas Pendidikan.
7. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp69.013.500,00 terdiri dari 22 rincian barang senilai Rp48.034.500,00 pada Dinas Pendidikan dan 1 unit barang berupa Keyboard Yamaha PSR SX 900 senilai Rp20.979.000,00 pada Disporabud.

**Tabel 5.3.56.**  
**Rincian Aset tetap Lainnya**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	12.460.009.195,17	12.436.175.895,17
2	Barang Bercorak Kesenian	26.031.250,00	26.031.250,00
3	Alat Bercorak Kebudayaan	19.584.600,00	17.255.000,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	447.236.000,00	447.236.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.952.861.045,17</b>	<b>12.926.698.145,17</b>

Saldo akhir Aset Tetap Lainnya tahun 2022 dan 2021 untuk masing-masing OPD selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.57.**  
**Aset Tetap Lainnya OPD**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Dinas Pendidikan	11.593.586.480,17	11.567.423.580,17
2	Dinas Kesehatan	447.236.000,00	447.236.000,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	870.182.315,00	870.182.315,00
4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	40.656.250,00	40.656.250,00
5	Kecamatan Lebatukan	1.200.000,00	1.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.952.861.045,17</b>	<b>12.926.698.145,17</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

dalam rupiah

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	151.766.381.334,34	12.300.250.761,34

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp151.766.381.334,34 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.300.250.761,34. Perubahan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.58.**  
**Perubahan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan**

dalam rupiah

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>12.300.250.761,34</b>
<b>Bertambah</b>	<b>153.934.152.314,00</b>
Kapitalisasi dari belanja Barang dan Jasa	235.687.305,00
Pengakuan Utang Jangka Pendek	57.470.200,00
Reklasifikasi dari JIJ	153.640.994.809,00
<b>Berkurang</b>	<b>14.468.021.741,00</b>
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	874.153.292,00
Reklasifikasi ke JIJ	13.593.868.449,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>151.766.381.334,34</b>

Atas mutasi tersebut dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan akibat Kapitalisasi belanja Barang dan Jasa berupa Jasa konsultan perencana teknis senilai Rp235.687.305,00 terdiri dari:
  - a. Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis pada BPBD senilai Rp198.327.305,00
  - b. Kapitalisasi belanja pegawai berupa honor pejabat pengadaan barang dan jasa senilai Rp37.360.000,00.
2. Penambahan akibat Pengakuan Utang Jangka Pendek sebesar Rp57.470.200,00 terdiri atas:
  - a. Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Lewoeleng senilai Rp7.495.000,00 pada Dinas PUPR.
  - b. 1 unit aset baru Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata-Bpk. Aldin Rauf senilai Rp14.988.000,00 pada Dinas PUPR.
  - c. 1 unit aset baru Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - Samping Polres - Masjid Agung senilai Rp34.987.200,00 pada Dinas PUPR
3. Penambahan akibat Reklasifikasi dari Jalan, jaringan dan Irigasi sebesar Rp153.640.994.809,00 berupa 57 rincian Pekerjaan pada Dinas PUPR.
4. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp874.153.292,00 terdiri dari:
  - a. 1 unit Atap Tribun Bangunan Pertunjukan senilai Rp149.049.900,00, 1 unit Bangunan Galeri senilai Rp64.184.745,00, 2 unit Bangunan Gazebo senilai Rp54.907.055,00 dan 1 unit Bangunan Selasar senilai Rp25.664.200,00 pada Dinas Parekraf.
  - b. Kantor Camat Nagawutung senilai Rp568.358.392,00 pada Dinas PUPR.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- c. Perencanaan Teknis Kantor Camat Nagawutung senilai Rp11.989.000,00 pada Kecamatan Nagawutung.
5. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Jalan, jaringan dan Irigasi sebesar Rp13.593.868.449,00 berupa 1 paket pekerjaan pada RSUD dan 10 paket pekerjaan pada Dinas PUPR sebagaimana diuraikan pada penjelasan tentang mutasi bertambah pada Jalan, Irigasi dan Jaringan.

**Tabel 5.3.59.**  
**Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Gedung Dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.857.400.100,00	2.731.553.392,00
2	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Dalam Pengerjaan	149.908.981.234,34	9.568.697.369,34
	<b>JUMLAH</b>	<b>151.766.381.334,34</b>	<b>12.300.250.761,34</b>

Saldo akhir Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 dan 2021 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.60.**  
**Konstruksi Dalam Pengerjaan OPD**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2021	2020
1	Dinas Kesehatan	236.967.200,00	236.967.200,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	467.859.505,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	143.467.775.468,34	3.448.677.795,34
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	220.687.305,00	0,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	15.008.000,00	15.008.000,00
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Dinas Perikanan	826.726.100,00	826.726.100,00
8	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.430.125.461,00	6.723.931.361,00
9	Kecamatan Nubatukan	11.500.000,00	11.500.000,00
10	Kecamatan Buyasuri	552.591.800,00	552.591.800,00
11	Kecamatan Nagawutung	0,00	11.989.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>151.766.381.334,34</b>	<b>12.300.250.761,34</b>

Paket-paket pekerjaan yang tersaji dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan sebanyak 91 paket yang tersebar pada 11 SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.61.**  
**Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**

*dalam Rupiah*

NO	URAIAN	TAHUN	NILAI	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>236.967.200,00</b>	
1	Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Pembantu ATANILA	2021	236.967.200,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
<b>B</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>143.467.775.468,34</b>	
1	Perencanaan Teknis (DED) Pemb Jaringan Air dari Mata Air Waiujan	2005	225.471.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
2	Perencanaan Teknis Jl. Akses Lingkar Tanjung Baja	2019	8.380.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

NO	URAIAN	TAHUN	NILAI	KETERANGAN
3	Perencanaan Teknis Jl. Benihading II - Bean (Segmen Peumole-Bean)	2019	27.999.666,67	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
4	Perencanaan Teknis Jl. Walangsawah-Wowong	2019	27.999.666,67	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
5	Perencanaan Teknis Pembangunan Bendungan Krebeleu	2022	21.630.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
6	Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Lewoeleng	2022	7.495.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
7	Perencanaan Teknis Bangunan Gedung Garasi/Pool Alat Berat	2020	5.400.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
8	Perencanaan Teknis Rehab/Perbaikan Pagar Workshop	2020	8.400.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
9	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan sp. Lamaheku - Ile Werung	2021	70.568.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
10	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih/Air Minum di Desa Belabaja	2021	9.680.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
11	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Hingalamamengi - Kalikur - Wairiang - Hadingmanuk	2021	70.645.500,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
12	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Penikenek - Atawai - Sp. Belabaja Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Penikenek - Atawai - Sp. Belabaja	2021	50.488.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
13	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek	2021	50.631.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
14	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Simpang Atulaleng - Kantor Camat Loyobuya	2021	50.679.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
15	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watobua	2021	70.574.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
16	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Waikomo - Belobatang - Wulandoni	2021	49.916.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
17	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Tapobaran - Lodoblolong - Nilanapo - Bean - Tobotani - Hadingmanuk	2021	70.538.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
18	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wowong - Bean - Pantai Pahengwaq	2021	70.660.625,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
19	Jasa Konsultan Review Perencanaan Teknis pembangunan Kantor Camat Buyasuri	2021	40.000.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
20	Peningkatan Jalan Belakang SMP St. Pius - Petigaan Bidan Isabela	2022	565.944.301,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
21	Peningkatan Jalan Rumah Bapak Sinyo Kaona - Depan Radio Kalong - Menuju Rumah Bapak Pasklis Lasar	2022	775.758.600,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
22	Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - Hj. Siti - Kantor KIR - Masjid Agung	2022	465.249.686,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
23	Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - Pekuburan Katholik - Kantor KIR	2022	574.101.097,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
24	Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - BKPSDM - Kntor SAMSAT	2022	170.207.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
25	Peningkatan Jalan Aramengi - Wowong	2022	3.989.540.500,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
26	Peningkatan Jalan Bandar Udara Wunopito Lewoleba - CWC - Sp. Lasitarda (Segmen CWC - Sp. Lasitarda)	2022	1.018.687.419,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

NO	URAIAN	TAHUN	NILAI	KETERANGAN
27	Peningkatan Jalan Bandar Udara Wunopito Lewoleba - Pasar Lewoleba (Segmen Samping Timur SMU PGRI - Pasar Lewoleba)	2022	946.742.556,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
28	Peningkatan Jalan Beluwa - Pasar Pada (Segmen Samping SDI Waikomo I - SMEA Kawula Karya)	2022	2.232.294.050,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
29	Peningkatan Jalan Biara CIY - PLN - Panti Asuhan - Pekuburan Kolikleteng - Lingkar Selatan (1.004)	2022	4.006.512.916,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
30	Peningkatan Jalan Gaspar Djerandut - Sp. Latsitarda	2022	314.838.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
31	Peningkatan Jalan Kawasan RSUD Lewoleba	2022	545.094.721,90	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
32	Peningkatan Jalan Lodotodokowa - Atakowa	2022	725.863.460,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
33	Peningkatan Jalan Lodotodokowa - Seranggorang - Balurebong - Sp. Nilanapo (Segmen Lodotodokowa - Balurebong)	2022	1.418.680.698,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
34	Peningkatan Jalan Pasakraja - Lamau - Riangbao - Laranwutun - Sp. Waiara (Segmen Polsubsektor Ile Ape - Riangbao)	2022	14.672.947.500,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
35	Peningkatan Jalan Pasakraja - Lamau - Riangbao - Laranwutun - Sp. Waiara (Segmen Sp. Waiara - Watodiri - Jontona)	2022	2.380.835.800,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
36	Peningkatan Jalan Riangbao - Dulitukan - Kolipadan - Pelabuhan Jety - Tanjung Bahagia - Pelabuhan Peti Kemas - Palilolon (Segmen Riangbao - Kolipadan)	2022	6.335.392.700,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
37	Peningkatan Jalan Rumah F. Borgias - Pekuburan Waikmo - Pasar Pada	2022	1.826.952.400,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
38	Peningkatan Jalan Samping Kantor Camat Wulandoni - Belobao	2022	322.054.900,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
39	Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Yance Manuk Menuju Lasitarda	2022	980.081.955,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
40	Peningkatan Jalan Samping Timur Taman Swaolsa Tite - Korbaha - Sp. SMAN 2 Lewoleba (Segmen Lanjutan SDK 2 Lewoleba - SMAN 2 Lewoleba)	2022	3.322.189.200,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
41	Peningkatan Jalan SDI Waikomo I - Pasar Lewoleba	2022	10.225.682.390,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
42	Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek (Segmen SDI Waaikomo II - Sp. Lusikawak)	2022	4.273.982.490,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
43	Peningkatan Jalan SDI Waikomo II - Lerek (Segmen Lusikawak - Kalikasa)	2022	10.049.810.660,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
44	Peningkatan Jalan Sp. Kantor Kejaksaan Negeri Lewoleba - SMK Kelautan	2022	817.768.853,30	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
45	Peningkatan Jalan Sp. Lerahinga - Sp. Banitobo - (Segmen Lerahinga - Banitobo - Lamalela)	2022	5.301.568.724,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
46	Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watubuah (004) (Segmen Belame - Puor- Watubuah)	2022	6.747.044.283,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
47	Peningkatan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watubuah (004) (Segmen Waikomo - Belang - Belame)	2022	21.676.484.001,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
48	Peningkatan Jalan Sp. Meru - RS. Penyangga - Dolulolong (Segmen Sp. Meru - Stadion)	2022	728.323.737,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
49	Peningkatan Jalan Sp. Pasar Timur - Depan Gereja Lamahora - Belakang RSUD - PLN - Sp. Trans Lembata	2022	4.194.631.686,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

NO	URAIAN	TAHUN	NILAI	KETERANGAN
	(Segmen Gereja Lamahora - Rujab - Belakang Kantor Bupati)			
50	Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - Bpk. Aldin Rauf	2022	156.360.577,32	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
51	Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - Samping Polres - Masjid Agung	2022	1.356.822.800,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
52	Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - SMPN 4 - SMK St. Yakobus Lamahora - Lingkar selatan	2022	1.489.230.450,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
53	Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata/NSC-Bandara	2022	234.970.522,68	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
54	Peningkatan Jalan Sp. Wailolong - Lamadale -Sp. Lodotodokowa (Segmen Lodotodokowa - Lamadale)	2022	488.607.200,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
55	Peningkatan Jalan Sp.Kantor POL PP - Kantor CAPIL	2022	415.154.770,80	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
56	Peningkatan Jalan Sp.Trans Lembata (Barat Kantor POL PP) - Kantor Dis DUKCAPIL - Terminal Timur	2022	1.085.226.650,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
57	Peningkatan Jalan Sp.Trans Lembata - Bengkel Aluminium - Pekuburan Wangatoa Lingkar Selatan (Segmen Lasitarda - Pekububuran Wangatoa)	2022	309.944.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
58	Peningkatan Jalan Tapobaran - Lodoblolng - Nilanapo - Bean - Tobotani - Hading Manuk (Segmen Tapobaran - Lodoblolng)	2022	9.404.325.300,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
59	Peningkatan Jalan Toko Sumber Rejeki - Gua Maria Walamkeam - Sp. Lasitarda - SMAN 2	2022	3.367.223.510,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
60	Peningkatan Jalan Walangsawah - Wowong (T1)	2022	510.103.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
61	Peningkatan Jalan Wowong - Bean - Pantai pahengwa	2022	9.560.056.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
62	Penyusunan Dokumen Perijinan Lingkungan Daerah Irigasi Waimatan Puor	2020	49.986.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
63	Perencanaan Teknis Bak Reservoar Wailain	2020	32.356.373,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
64	Perencanaan Teknis Jaringan Air Minum dari Mata Air Wailuba untuk melayani Desa Lerek, Atawolo, Atakore, Nubahaeraka, Baoraja dan Desa Lewogoma, yang	2020	29.855.815,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
65	Perencanaan Teknis Jl. Lamadale - Wailolong	2020	49.980.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
66	Perencanaan Teknis Jl. Walangsawah - Weiwutuq (Walangsawah - Wowong)	2020	29.986.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
67	Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Uprating IPA SPAM Tanjung untuk Desa Beutaran, Tagawiti, Dulitukan, Palilolon dan Kolipadan Kecamatan Ile ape Kabupaten Lembata	2020	80.406.923,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
68	Perencanaan Teknis SPAM Waisia Kecamatan Wulandoni	2020	22.646.117,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
69	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Jaringan Air MInum Pantai Harnus Wulen Luo	2021	9.664.990,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
70	Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Minum dari Mata Air Waiplatin menuju 5 Desa di Tanjung (Desa Beutaran, Tagawiti, Dulitukan, Palilolon, Kolipadan Kec. Ile Ape)	2022	575.040.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
71	SPAM Jaringan Perpipaan di Ds. Baobolak Kec. Nagawutung	2021	1.471.599.727,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

NO	URAIAN	TAHUN	NILAI	KETERANGAN
72	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan RUJAB - Bupati	2018	195.807.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
<b>C</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		<b>220.687.305,00</b>	
1	Perencanaan Teknis Paket Pekerjaan Ruas Jalan Sp. Waikomo-Belobatang-Wulandoni	2022	110.347.305,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
2	Perencanaan Teknis Paket Pekerjaan Ruas jalan Sp. Watugolok-Bakan-Lebala	2022	110.340.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
<b>D</b>	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan</b>		<b>15.008.000,00</b>	
1	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis LAPANGAN BOLA di Omesuri	2021	15.008.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
<b>E</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>		<b>5.000.000,00</b>	
1	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Landscape Fasilitas Pelayanan Perpustakaan	2020	5.000.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
<b>F</b>	<b>Dinas Perikanan</b>		<b>826.726.100,00</b>	
1	Pembangunan Pabrik Es	2018	826.726.100,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
<b>G</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>		<b>6.430.125.461,00</b>	
1	Jembatan Jeti - Destinasi Wisata PULAU SIPUT AWALOLONG	2018	6.430.125.461,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
<b>H</b>	<b>Kecamatan Nubatukan</b>		<b>11.500.000,00</b>	
1	Perencanaan Teknis Peningkatan Fasilitas Taman Kota	2020	11.500.000,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
<b>I</b>	<b>Kecamatan Buyasuri</b>		<b>552.591.800,00</b>	
1	Pembangunan Gedung Kantor Camat	2014	552.591.800,00	Masih dilanjutkan sesuai rencana awal
	<b>JUMLAH</b>		<b>151.766.381.334,34</b>	

#### 5.3.3.7. Akumulasi Penyusutan

dalam rupiah

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp839.722.601.687,14)	(Rp726.316.789.775,35)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp839.722.601.687,14) dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp726.316.789.775,35). Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.62.**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan**

dalam rupiah

No	URAIAN	2022	2021
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(274.957.289.788,89)	(226.569.069.199,34)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(97.001.712.375,24)	(86.530.284.739,63)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan	(467.763.599.523,01)	(413.217.435.836,38)
	<b>Jumlah</b>	<b>(839.722.601.687,14)</b>	<b>(726.316.789.775,35)</b>

- Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp274.957.289.788,89) dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

(226.569.069.199,34). Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.63.**  
**Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>226.569.069.199,34</b>
<b>Penambahan</b>	<b>51.548.573.850,63</b>
Perhitungan Penyusutan Tahun Berjalan	33.921.503.919,63
Koreksi Penyusutan	17.627.069.931,00
<b>Pengurangan</b>	<b>3.160.353.261,08</b>
Penghapusan	489.266.142,00
Koreksi Penyusutan	24.539.298,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	2.646.547.821,08
<b>Saldo Akhir</b>	<b>274.957.289.788,89</b>

2. Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp97.001.712.375,24) dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp86.530.284.739,63). Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.64.**  
**Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>86.530.284.739,63</b>
<b>Penambahan</b>	<b>12.332.092.878,61</b>
Perhitungan Penyusutan Tahun Berjalan	11.197.957.528,08
Koreksi Penyusutan	574.188.101,53
Reklasifikasi dari SKPD Lain	559.947.249,00
<b>Pengurangan</b>	<b>1.860.665.243,00</b>
Penghapusan	13.070.949,00
Koreksi Penyusutan	612.723.024,00
Reklasifikasi ke SKPD Lain	559.947.249,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	674.924.021,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>97.001.712.375,24</b>

3. Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp467.763.599.523,01) dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp413.217.435.836,38). Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.3.65.****Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan***dalam rupiah*

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>413.217.435.836,38</b>
<b>Penambahan</b>	<b>54.718.115.830,88</b>
Perhitungan Penyusutan Tahun Berjalan	54.701.107.736,28
Koreksi Penyusutan	8.738.718,60
Reklasifikasi dari SKPD Lain	8.269.376,00
<b>Pengurangan</b>	<b>171.952.144,25</b>
Penghapusan	2.240.632,00
Koreksi Penyusutan	9.138.667,25
Reklasifikasi ke SKPD Lain	8.269.376,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	152.303.469,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>467.763.599.523,01</b>

**5.3.4. Aset Lainnya***dalam rupiah*

Aset Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	<b>Rp25.007.677.217,00</b>	<b>Rp20.842.975.754,46</b>

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp25.007.677.217,00 dan Tahun 2021 senilai Rp20.842.975.754,46 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.66.****Rincian Aset Lainnya***dalam rupiah*

No	URAIAN	2021	Bertambah	Berkurang	2022
1	Tagihan Jangka Panjang	998.828.433,63	54.476.688,54	0,00	1.053.305.122,17
2	Aset Tidak Berwujud	2.643.440.891,00	0,00	0,00	2.643.440.891,00
3	Aset Lain-Lain	54.179.526.543,83	8.166.573.804,08	1.786.125.388,40	60.559.974.959,91
	a. Aset Rusak Berat / Usang	41.989.000.920,15	6.760.634.455,76	1.770.256.238,40	46.979.379.137,51
	- Peralatan dan Mesin	27.838.085.052,97	2.576.668.257,08	1.706.586.238,40	28.708.167.071,65
	- Gedung dan Bangunan	9.126.332.128,79	2.879.307.771,68	63.670.000,00	11.941.969.900,47
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.996.092.238,39	1.304.658.427,00	0,00	6.300.750.665,39
	- Aset Tetap Lainnya	28.491.500,00	0,00	0,00	28.491.500,00
	b. Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	12.190.525.623,68	305.057.880,32	15.869.150,00	12.479.714.354,00
	- Tanah	641.200.000,00	0,00	0,00	641.200.000,00
	- Peralatan dan Mesin	4.767.414.117,54	218.865.650,00	15.869.150,00	4.970.410.617,54
	- Gedung dan Bangunan	2.182.482.945,00	86.192.230,32	0,00	2.268.675.175,32
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.526.979.811,14	0,00	0,00	4.526.979.811,14
	- Aset Tetap Lainnya	72.448.750,00	0,00	0,00	72.448.750,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

No	URAIAN	2021	Bertambah	Berkurang	2022
	c. Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.100.881.468,00	0,00	1.100.881.468,00
4	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(36.978.820.114,00)	(3.991.028.116,08)	(1.720.804.474,40)	(39.249.043.755,68)
	a. Akumulasi Amortisasi ATB	(1.256.201.663,00)	(517.252.805,00)	0,00	(1.773.454.468,00)
	b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(35.722.618.451,00)	(3.473.775.311,08)	(1.720.804.474,40)	(37.475.589.287,68)
	<b>Jumlah</b>	<b>20.842.975.754,46</b>	<b>4.230.022.376,54</b>	<b>65.320.914,00</b>	<b>25.007.677.217,00</b>

Penjelasan dari masing-masing akun di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

**5.3.4.1. Tagihan Jangka Panjang***dalam rupiah*

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp1.053.305.122,17	Rp998.828.433,63

Tagihan Jangka Panjang yang dimaksudkan disini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah dimana merupakan hak pemerintah daerah akibat kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh bendahara maupun kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain. Saldo Awal Tahun 2022 untuk tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp998.828.433,63. Dalam Tahun 2022 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp54.476.688,54 yang merupakan kekurangan volume pekerjaan aset tetap yang harus disetor kembali ke Kas Daerah. Dengan demikian saldo akhir Tagihan Jangka Panjang tahun 2022 tetap menjadi sebesar Rp1.053.305.122,17. Rincian Aset Lainnya untuk Tagihan Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.67.**  
**Tagihan Jangka Panjang**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan BPK	107.658.616,63	54.476.688,54	0,00	162.135.305,17
1.1	Temuan BPK RI Perwakilan Denpasar Pemeriksaan Penyelenggaraan Pilkada Oktober 2006	6.062.613,63	0,00	0,00	6.062.613,63
1.1.1	Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak sesuai ketentuan.	6.062.613,63	0,00	0,00	6.062.613,63
1.1.1.1	Wilhelmina Peni	6.062.613,63	0,00	0,00	6.062.613,63
1.2	Temuan BPK RI Perwakilan NTT Pemeriksaan LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2018	101.596.003,00	0,00	0,00	101.596.003,00
1.2.1	Sisa Kas di bendahara Pengeluaran Tahun 2018 pada Dinas Penanaman	101.596.003,00	0,00	0,00	101.596.003,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
	Modal, Pelayanan Satu pintu dan ketenagakerjaan				
1.2.1.1	Theresia Ose, A.Md	101.596.003,00	0,00	0,00	101.596.003,00
1.3	Temuan BPK RI Perwakilan NTT Pemeriksaan LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2022		54.476.688,54		54.476.688,54
1.3.1	Pembangunan Ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) pada RSUD		20.782.908,27		20.782.908,27
1.3.2	Pembangunan Ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) pada RSUD		9.657.809,71		9.657.809,71
1.3.3	Pembangunan Rumah Dinas Guru/Kepala Sekolah SMPN 1 Nubatukan pada Dinas Pendidikan		5.398.619,08		5.398.619,08
1.3.4	Pembangunan Jamban/Toilet Siswa Beserta Sanitasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN 1) Nubatukan		5.299.078,93		5.299.078,93
1.3.5	Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran - Lodoblolong - Nilanapo - Bean - Tobotani - Hading Manuk		13.338.272,55		13.338.272,55
2	Pemeriksaan BPKP	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTT	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lembata	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00
4.1	INSPEK.700/19/LHP/PKPT/2010 tanggal 16 Sept. 2010	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
4.1.1	Pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan TA 2009	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
4.1.1.1	Pius Suban Raya	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
4.2	INSPEK/700/03/LHP/PKPT/2012 Tgl. 10 April 2012	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
4.2.1	Pendobelan Perjalanan Dinas Dalam Daerah TA. 2010 sebesar Rp.7.050.000,-	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
4.2.1.1	Igo Konstantinus	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
5	Sisa UUDP 2005/2006 dan Sisa UP 2012, 2017	119.875.207,00	0,00	0,00	119.875.207,00
5.1	Sisa UUDP 2005/2006	58.385.725,00	0,00	0,00	58.385.725,00
5.1.1	Sekretariat DPRD	45.767.225,00	0,00	0,00	45.767.225,00
5.1.2	Kecamatan Buyasuri	3.295.000,00	0,00	0,00	3.295.000,00
5.1.3	Kecamatan Wulandoni	9.323.500,00	0,00	0,00	9.323.500,00
5.2	Sisa UP 2012	19.931.782,00	0,00	0,00	19.931.782,00
5.2.1	Dinas Sosial PMD	19.931.782,00	0,00	0,00	19.931.782,00
5.3	Sisa UP 2017	41.557.700,00	0,00	0,00	41.557.700,00
5.3.1	RSUD	41.557.700,00	0,00	0,00	41.557.700,00
6	Panjar TKI dan Pembangunan Rumjab	768.719.610,00	0,00	0,00	768.719.610,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
6.1	Panjar TKI	686.144.000,00	0,00	0,00	686.144.000,00
6.2	Panjar Kegiatan Pembangunan Rumjab	82.575.610,00	0,00	0,00	82.575.610,00
	<b>Jumlah Tagihan Jangka Panjang</b>	<b>998.828.433,63</b>	<b>54.476.688,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.305.122,17</b>

Penjelasan lebih lanjut atas tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Sisa UUDP 2005/2006

Merupakan sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2005/2006 yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT sesuai LHP Nomor: 08.3.A/Pwk.BPK RI di Kpg/07/2007, 11 JULI 2007 atas LKPD TA 2006. Temuan ini diungkapkan kembali oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT pada Tahun 2008 dalam LHP Nomor: 03.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2008, 11 Mei 2008 atas LKPD Tahun Anggaran 2007 yang diuraikan pada bagian kondisi temuan, bahwa per 31 Desember 2007, terdapat Sisa UUDP TA 2005 dan 2006 sebesar Rp1.225.608.170,00. Setelah tanggal 31 Desember 2007, terdapat penyetoran sebesar Rp151.263.256,00, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 11 Mei 2008 sebesar Rp1.074.344.914,00. Selanjutnya, Sisa UUDP 2005/2006 pada Tahun 2015 sesuai LHP Nomor: 4.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/08/2015, 25 Agustus 2015 atas LKPD Tahun Anggaran 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata sedang berupaya untuk menelusuri dan menyelesaikan tindak lanjut temuan tersebut berupa penyetoran ke kas daerah sehingga sampai dengan Tahun 2015 saldo akhir menjadi Rp1.046.017.273,00 dan sebesar Rp889.293.991,00 telah ditindaklanjuti oleh SKPD dalam bentuk pengumpulan bukti. Atas bukti yang ada, BPK merekomendasikan untuk Inspektorat melakukan pengujian bukti pertanggungjawaban atas sisa UUDP 2005/2006 dan Majelis TGR melakukan sidang untuk menentukan statusnya. Pada Tahun 2018, Majelis TGR melakukan sidang dengan memutuskan bahwa bukti Pertanggungjawaban sebesar Rp875.511.277,00 diakui sebagai bukti SPJ yang dipakai sebagai tindak lanjut temuan Sisa UUDP 2005/2006 sedangkan sisanya sebesar Rp170.505.996,00 harus disetor ke kas daerah. Selanjutnya, Sisa UUDP 2005/2006 telah dilakukan penyetoran ke kas daerah dengan posisi saldo akhir Tahun 2021 sebesar Rp58.385.725,00. Untuk Tahun 2022 tidak terdapat mutasi sehingga saldo akhir Tahun 2022 tetap sebesar Rp58.385.725,00.

2. Sisa UP 2021

Merupakan sisa UP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang belum disetor bendahara pengeluaran atas nama Amin Lamawulo dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.931.782,00. Tahun 2022 tidak terdapat mutasi.

3. Sisa UP 2017

Merupakan sisa UP Tahun 2017 di RSUD berupa bukti pertanggungjawaban dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.557.700,00. Terhadap temuan ini, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah pada tanggal 16 Januari



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

2023 telah melakukan verifikasi terhadap dokumen bukti SPJ yang diajukan oleh mantan Bendahara RSUD atas nama Daniel Dolu Sogen dan menemukan bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap hasil verifikasi ini telah disampaikan kepada BPK RI Perwakilan NTT melalui surat Bupati Lembata Nomor. BU.700/190/TPKN/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 Perihal Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Nega/Daerah.

#### 4. Panjar TKI dan Panjar Pembangunan Gedung Rumah Jabatan

##### ➤ Panjar TKI

Saldo awal dan akhir dari Panjar TKI DPRD adalah sebesar Rp686.144.000,00. Sepanjang tahun 2022, saldo ini tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang sesuai Lampiran 2.

Panjar sebesar Rp686.144.000,00 terjadi pada TA. 2006 untuk pembayaran Intensif bagi Anggota DPRD periode 2004-2009 sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor: 321/S/XIX.KUP/11/2010 Tanggal 24 November 2010 dengan rincian antara lain:

Tunjangan Komunikasi Intensif	Rp 553.340.000,00
Dana Operasional Pimpinan	<u>Rp 132.804.000,00</u>
Jumlah	Rp 686.144.000,00

Pembayaran atas Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Lembata TA. 2006 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan pada Tanggal 14 Nopember 2006 dan sesuai pasal 14D bahwa pembayaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006. Jadi pada saat itu, Pemerintah Kabupaten Lembata mencairkan TKI DPRD dan Tunjangan Operasional diakhir tahun 2006 dalam bentuk 'panjar' dengan catatan akan dianggarkan pada APBD perubahan Tahun 2007 karena APBD TA. 2007 sudah ditetapkan. Namun pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan pada Tanggal 16 Maret 2007, menghapus dan menambahkan pasal-pasal dimana Pasal 14D diubah menjadi Pasal 14B yang menyatakan Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 dan Pasal 29A ayat (1) menyatakan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Terhadap masalah ini pendekatan persuasif dengan para Anggota DPRD telah dilakukan bahkan kasus ini pernah diserahkan kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti namun hanya beberapa Anggota DPRD yang telah melunasi temuan dimaksud dan saat



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

ini beberapa Anggota DPRD yang terlibat dalam temuan ini telah meninggal Dunia.

➤ Panjar Pembangunan Gedung Rumah Jabatan

Saldo awal dan akhir Tahun 2021 dari Panjar Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD adalah sebesar Rp82.575.610,00. Sepanjang tahun 2021, saldo ini tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang.

Panjar ini merupakan pembayaran uang muka yang diberikan kepada Pihak Ketiga CV. Sarana Baru pada TA. 2006 atas pekerjaan fisik Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD dan menjadi temuan pemeriksaan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor: 321/S/XIX.KUP/11/2010 Tanggal 24 November 2010.

### 5.3.4.2. Aset Tidak Berwujud

*dalam rupiah*

Aset Tidak berwujud	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	2.643.440.891,00	2.643.440.891,00

Saldo Awal dari Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.643.440.891,00. Saldo akhir Aset Tidak Berwujud adalah sebesar Rp2.643.440.891,00. Aset ini merupakan Software dan Kajian yang tersebar pada berbagai SKPD.

Tidak ada penambahan maupun pengurangan Aset Tidak Berwujud pada tahun 2022.

Saldo akhir Aset Tidak Berwujud tahun 2022 dan 2021 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.68.**  
**Aset Tidak Berwujud OPD**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Dinas Pendidikan	14.500.000,00	14.500.000,00
2	Dinas Kesehatan	14.465.000,00	14.465.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	754.465.000,00	754.465.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	496.255.399,00	496.255.399,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14.465.000,00	14.465.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	14.465.000,00	14.465.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.728.800,00	14.728.800,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.465.000,00	14.465.000,00
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.465.000,00	14.465.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	14.728.800,00	14.728.800,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.465.000,00	14.465.000,00
12	Dinas Perhubungan	115.463.104,00	115.463.104,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	264.297.500,00	264.297.500,00
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	64.465.000,00	64.465.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.520.000,00	14.520.000,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	2022	2021
16	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.465.000,00	14.465.000,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.465.000,00	14.465.000,00
18	Dinas Perikanan	113.842.800,00	113.842.800,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.193.800,00	29.193.800,00
20	Sekretariat Daerah	41.047.000,00	41.047.000,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	145.529.800,00	145.529.800,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.728.800,00	14.728.800,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	34.858.500,00	34.858.500,00
24	Badan Pendapatan Daerah	61.567.000,00	61.567.000,00
25	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	128.103.000,00	128.103.000,00
26	Inspektorat Daerah	14.465.000,00	14.465.000,00
27	Kecamatan Nubatukan	74.165.000,00	74.165.000,00
28	Kecamatan Lebatukan	15.025.400,00	15.025.400,00
29	Kecamatan Omesuri	14.465.000,00	14.465.000,00
30	Kecamatan Buyasuri	15.025.400,00	15.025.400,00
31	Kecamatan Atadei	14.465.000,00	14.465.000,00
32	Kecamatan Nagawutung	14.465.000,00	14.465.000,00
33	Kecamatan Ile Ape	14.465.000,00	14.465.000,00
34	Kecamatan Ile Ape Timur	14.420.788,00	14.420.788,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.465.000,00	14.465.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.643.440.891,00</b>	<b>2.643.440.891,00</b>

#### 5.3.4.3. Aset Lain-Lain

*dalam rupiah*

Aset Lain-Lain	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	<b>60.559.974.959,51</b>	<b>54.179.526.543,83</b>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp60.559.974.959,51 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp54.179.526.543,83.

Saldo akhir Aset Lain-Lain sebesar Rp60.559.974.959,51 meliputi 3 bagian yakni aset yang rusak berat/using; Aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF).

##### 5.3.4.3.1. Aset Rusak Berat / Usang

*dalam rupiah*

Aset Rusak Berat / Usang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	<b>46.979.379.137,51</b>	<b>41.989.000.920,15</b>

Saldo Aset Rusak Berat/Usang pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp46.979.379.137,51 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp41.989.000.920,15.

Perubahan Saldo Aset Rusak Berat/Usang, sebagaimana terbaca di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.3.69.**  
**Penambahan Pengurangan Aset Rusak Berat / Usang**

*dalam rupiah*

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>41.989.000.920,15</b>
<b>Penambahan</b>	<b>6.760.634.455,76</b>
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	2.576.668.257,08
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	2.879.307.771,68
Reklasifikasi dari jalan, Irigasi dan Jaringan	1.304.658.427,00
<b>Pengurangan</b>	<b>1.770.256.238,40</b>
Penghapusan	1.770.256.238,40
<b>Saldo Akhir</b>	<b>46.979.379.137,51</b>

Rincian Aset Rusak berat dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.70.**  
**Rincian Aset Rusak Berat / Usang**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Peralatan Dan Mesin Rusak Berat	28.708.167.071,65	27.838.085.052,97
2	Gedung Dan Bangunan Rusak Berat	11.941.969.900,47	9.126.332.128,79
3	Jalan, Irigasi Dan Jaringan Rusak Berat	6.300.750.665,39	4.996.092.238,39
4	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	28.491.500,00	28.491.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>46.979.379.137,51</b>	<b>41.989.000.920,15</b>

Saldo akhir Aset Rusak Berat/Usang tahun 2022 dan 2021 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.71.**  
**Aset Rusak Berat / Usang OPD**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Dinas Pendidikan	2.746.092.911,01	2.973.527.411,01
2	Dinas Kesehatan	13.141.024.268,19	6.905.103.412,43
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.936.318.853,00	6.128.895.853,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.504.536.981,36	3.504.536.981,36
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.139.006,64	8.139.006,64
6	Satuan Polisi Pamong Praja	137.037.790,00	137.037.790,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.460.876.550,00	2.460.876.550,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	558.889.536,00	942.570.636,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.023.500,00	7.023.500,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	617.277.300,00	307.251.700,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	112.544.166,00	112.544.166,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	157.236.750,00	233.986.500,00
13	Dinas Perhubungan	92.377.370,66	92.377.370,66
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.832.038,97	33.832.038,97
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	468.766.313,51	468.766.313,51
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	131.313.808,00	131.313.808,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	79.923.125,67	79.923.125,67
18	Dinas Perikanan	1.338.668.273,00	1.423.313.273,00
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.463.680.128,34	1.503.915.162,34



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	2022	2021
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.817.337.950,13	3.904.865.450,13
21	Sekretariat Daerah	5.246.908.404,00	5.372.787.504,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	764.108.066,33	764.108.066,33
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	335.113.946,66	411.317.201,06
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	364.352.888,00	382102888
25	Badan Pendapatan Daerah	143.687.500,00	143.687.500,00
26	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	297.732.871,00	297.732.871,00
27	Inspektorat Daerah	196.114.330,00	305.744.330,00
28	Kecamatan Nubatukan	924.765.825,04	924.765.825,04
29	Kecamatan Lebatukan	424.946.224,00	444.793.224,00
30	Kecamatan Omesuri	36.461.612,00	36.461.612,00
31	Kecamatan Buyasuri	152.181.146,00	201.480.146,00
32	Kecamatan Atadei	251.463.914,00	251.463.914,00
33	Kecamatan Nagawutung	112.610.150,00	176.720.150,00
34	Kecamatan Ile Ape	491.769.482,00	491.769.482,00
35	Kecamatan Wulandoni	164.438.100,00	164.438.100,00
36	Kecamatan Ile Ape Timur	99.013.983,00	99.013.983,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	136.814.075,00	136.814.075,00
38	Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>46.979.379.137,51</b>	<b>41.989.000.920,15</b>

#### 5.3.4.3.2. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

dalam rupiah

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	12.479.714.354,00	12.190.525.623,68

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.479.714.354,00 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.190.525.623,68.

Perubahan Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, sebagaimana terbaca di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.72.**  
**Penambahan Pengurangan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah**

dalam rupiah

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>12.190.525.623,68</b>
<b>Penambahan</b>	<b>305.057.880,32</b>
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	218.865.650,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	86.192.230,32
<b>Pengurangan</b>	<b>15.869.150,00</b>
Penghapusan	15.869.150,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>12.479.714.354,00</b>

Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.3.73.****Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah***dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	641.200.000,00	641.200.000,00
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.970.410.617,54	4.767.414.117,54
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.268.675.175,32	2.182.482.945,00
4	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.526.979.811,14	4.526.979.811,14
5	Aset Tetap Lainnya yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	72.448.750,00	72.448.750,00
	<b>Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah</b>	<b>12.479.714.354,00</b>	<b>12.190.525.623,68</b>

Saldo akhir Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah tahun 2022 dan 2021 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.74.****Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah per OPD***dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Dinas Pendidikan	266.761.507,12	266.761.507,12
2	Dinas Kesehatan	2.258.579.099,00	2.031.239.849,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	227.905.825,00	227.905.825,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.428.561.828,90	1.428.561.828,90
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.125.288.172,03	1.125.288.172,03
6	Satuan Polisi Pamong Praja	65.463.475,00	65.463.475,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.007.838.050,00	2.007.838.050,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	70.506.435,00	70.506.435,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	332.191.380,32	254.472.750,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.775.250,00	32.775.250,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	168.773.508,34	168.773.508,34
12	Dinas Perhubungan	412.300.000,00	412.300.000,00
13	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	554.332.081,49	554.332.081,49
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	56.045.084,00	56.045.084,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	110.540.700,00	110.540.700,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	118.818.406,28	118.818.406,28
17	Dinas Perikanan	539.976.226,00	539.976.226,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	27.598.158,60	27.598.158,60
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	629.627.550,75	629.627.550,75
20	Sekretariat Daerah	871.111.216,67	871.111.216,67
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	83.518.207,00	83.518.207,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	54.922.620,00	54.922.620,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	89.044.750,00	89.044.750,00
24	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.116.790,00	164.985.940,00
25	Kecamatan Nubatukan	84.264.995,00	84.264.995,00
26	Kecamatan Lebatukan	23.200.000,00	23.200.000,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	2022	2021
27	Kecamatan Omesuri	417.235.321,00	417.235.321,00
28	Kecamatan Buyasuri	60.122.750,00	60.122.750,00
29	Kecamatan Ile Ape	68.854.134,00	68.854.134,00
30	Kecamatan Wulandoni	11.089.650,00	11.089.650,00
31	Kecamatan Ile Ape Timur	11.922.300,00	11.922.300,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	53.428.882,50	53.428.882,50
33	Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah	68.000.000,00	68.000.000,00
	<b>Jumlah Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah</b>	<b>12.479.714.354,00</b>	<b>12.190.525.623,68</b>

#### 5.3.4.3.3. Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. TDF ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 Tahun 2023.

Penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia untuk Kabupaten Lembata pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.100.881.468,00 Nilai ini disajikan pada akun Aset Lainnya pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU-LO sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor.900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF.

#### 5.3.4.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp36.978.820.114,00, mengalami penambahan Penyusutan/Amortisasi sebesar Rp3.991.028.116,08 dan pengurangan sebesar Rp1.720.804.474,40 sehingga saldo akhir Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp39.249.043.755,68 yang terdiri dari Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.773.454.468,0) dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain senilai Rp37.475.589.287,68.

Seluruh Nilai Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lain-lain tahun 2022 dititipkan pencatatannya pada akun Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa karena akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lain-lain tidak tersedia sebagai akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.3.5. Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2022 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

##### 5.3.5.1. Kewajiban Jangka Pendek

*dalam rupiah*

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp38.152.592.964,64	Rp44.011.076.345,89

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp38.152.592.964,64 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp44.011.076.345,89. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.75.**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Saldo Akhir
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.482.136,00	11.638.397,00	1.258.569,00	11.861.964,00
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	20.244.273.712,00	0,00	20.244.273.712,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	23.896.000,00	0,00	11.948.000,00	11.948.000,00
4	Utang Belanja	43.985.698.209,89	4.599.060.454,00	30.700.249.375,25	17.884.509.288,64
	<b>Jumlah</b>	<b>44.011.076.345,89</b>	<b>24.854.972.563,00</b>	<b>30.713.455.944,25</b>	<b>38.152.592.964,64</b>

##### 5.3.5.1.1. Utang perhitungan Pihak Ketiga

*dalam rupiah*

Utang Perhitungan Pihak Ketiga	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp11.861.964,00	Rp1.482.136,00

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lembata memiliki Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp11.861.964,00. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp11.861.964,00, terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dinas Kesehatan sebesar Rp 2.789.964,00;
2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 9.072.000,00.

##### 5.3.5.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

*dalam rupiah*

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	20.244.273.712,00	0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2022 sebesar Rp20.244.273.712,00 sedangkan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang ini merupakan pemotongan DAU untuk pembayaran pengembalian pokok pinjaman PEN Tahun 2021 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan sebesar Rp2.530.534.214,00 terhitung Bulan Mei Tahun 2023 atau 8 bulan selama Tahun 2023 yakni sebesar Rp20.244.273.712,00 (8 bulan x Rp2.530.534.214).



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.3.5.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

dalam rupiah

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	11.948.000,00	23.896.000,00

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 sebesar Rp11.948.000,00 sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 sebesar Rp23.896.000,00. Pendapatan Diterima Dimuka mengalami pengurangan sebesar Rp11.948.000,00 dari tahun sebelumnya. Pendapatan ini merupakan pengakuan atas sewa tanah yang dibayar dimuka oleh Bank NTT terhadap tanah pada Kantor Cabang Bank NTT yang telah diterima pada tahun 2019 senilai Rp59.740.000,00 sesuai STS Nomor 0679/STS/PAD.TS/III/PB/2019 tanggal 14 Maret 2019 untuk sewa s.d 2023 dengan sewa per tahun sebesar Rp11.948.000,00 ( $\text{Rp}59.740.000,00 \div 5$ ).

#### 5.3.5.1.4. Utang Belanja

dalam rupiah

Utang Belanja	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	16.348.552.147,89	43.985.698.209,89

Utang Belanja tahun 2022 sebesar Rp16.348.552.147,89 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp43.985.698.209,89. Perubahan Saldo Utang Belanja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.76.**  
**Penambahan Pengurangan Utang Belanja**

dalam rupiah

Uraian	Mutasi
<b>Saldo Awal</b>	<b>43.985.698.209,89</b>
<b>Bertambah</b>	<b>4.599.060.454,00</b>
Koreksi kurang catat Utang belanja Barang dan Jasa RSUD Lewoleba	3.642.732,00
Pengakuan Utang Belanja Modal Dinas Pendidikan	2.645.485.818,00
Pengakuan Utang Belanja Modal Dinas Kesehatan	3.216.000,00
Pengakuan Utang Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.946.715.904,00
<b>Berkurang</b>	<b>30.700.249.375,25</b>
Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Utang Belanja pada RSUD	25.216.340,00
Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Utang Belanja pada Dinas Kesehatan	9.998.398,25
koreksi saldo saldo Utang Belanja yang bersumber dari hibah pihak ketiga pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	10.000.000,00
koreksi saldo awal Utang Belanja yang bersumber dari hibah pihak ketiga pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	2,00
Pembayaran Utang Belanja tersebar pada SKPD	30.655.034.635,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>17.884.509.288,64</b>

Rincian atas Utang Belanja dapat dilihat pada Lampiran 3.



### 5.3.5.2. Kewajiban Jangka Panjang

Pemerintah Kabupaten Lembata mengajukan permohonan Pinjaman daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang lebih dikenal dengan Pinjaman PEN Daerah pada Tahun 2021 kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp225.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). Berdasarkan permohonan tersebut serta pertimbangan dan kajian oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri RI telah diberikan persetujuan dan akan disalurkan melalui PT. Multi Sarana Infrastruktur (PT. SMI). Menindaklanjuti persetujuan yang telah diberikan, maka pihak PT. SMI dan Pemerintah Kabupaten Lembata melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman pada tanggal 30 Desember 2021 dengan nilai Pinjaman sebesar Rp225.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman tersebut diperkuat dengan Akta Pernyataan Kembali Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: 05, Tanggal 12 April 2022 dihadapan Notaris Pratiwi Handayani, SH.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman bahwa jangka waktu pinjaman selama 96 (Sembilan Puluh Enam) bulan atau selama 8 tahun dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kalinya atau masa efektif perjanjian pinjaman. Suku bunga yang ditetapkan adalah sebesar 6,19% per tahunnya dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik oleh Pemda dan dibayarkan melalui pemotongan Dana Transfer Umum (DTU). Pemerintah Kabupaten Lembata juga diharuskan membayar biaya pengelolaan sebesar 0,185% (Nol Koma Seratus Delapan Puluh Lima Persen) untuk pertama kalinya dan untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 0,185% dihitung berdasarkan *outstanding/terutang*. Biaya pengelolaan pinjaman (Provisi) sebesar 1% (Satu Persen) yang dibayarkan pada saat pencairan tahap pertama.

Pemerintah Kabupaten Lembata mengalokasikan Pinjaman PEN Daerah tersebut untuk membangun infrastruktur fisik jalan sebesar Rp213.864.500.000,00 (Dua Ratus Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan sebesar Rp11.135.500.000,- (Sebelas Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Semua paket pekerjaan yang ditangani dengan menggunakan dana Pinjaman PEN Daerah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Jalan Kabupaten Kota yang Bersumber dari Dana Pinjaman PEN Daerah Kabupaten Lembata

Setelah proses pengadaan barang dan jasa sampai pada tahap penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Kabupaten Lembata mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan RI untuk dilakukan addendum terhadap perjanjian pemberian pinjaman yang semula di sebesar Rp225.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp212.564.908.020,66 (Dua Ratus Dua Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Dua Puluh Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen) dan permohonan masa pencairan pinjaman. Terhadap hal ini telah dituangkan dalam Addendum Pertama Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-163/SMI/1122 dan Addendum Kedua Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-198/SMI/1222. Dengan adanya perubahan atas Perjanjian Pemberian Pinjaman tersebut maka semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Lembata selama pelaksanaan pinjaman ini berlaku efektif mengacu pada nilai pinjaman sebesar Rp212.564.908.020,66 (Dua Ratus Dua Belas Miliar



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Dua Puluh Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen).

#### 5.3.6. Ekuitas

Nilai Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.528.154.631.095,11. Nilai ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah.

#### 5.4. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2022 sebagai salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Penyajian akun-akun Laporan LO sebagaimana dirincikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.4.1.**  
**Ringkasan- LO**

*dalam rupiah*

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	701.480.368.835,75
2	Beban Operasi	649.845.982.300,41
3	Surplus/Defisit Dari Operasi (1 – 2)	51.634.386.535,34
4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(667.115.555,00)
5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (3+4)	50.967.270.980,34
6	Pos Luar Biasa	(62.308.047,00)
7	Surplus/Defisit LO (5+6)	50.904.962.933,34

#### 5.4.1. Pendapatan-LO

*dalam rupiah*

Pendapatan – LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	701.480.368.835,75	672.634.872.833,41	28.845.496.002,34	4,29

Pendapatan-LO Kabupaten Lembata adalah Pendapatan untuk periode tahun 2022 sebesar Rp701.480.368.835,75 jika dibandingkan dengan pendapatan-LO periode tahun 2021 sebesar Rp672.634.872.833,41 mengalami kenaikan sebesar Rp28.845.496.002,34 atau sebesar 4,29% sebagaimana pada tabel berikut yang menggambarkan masing-masing jenis pendapatan daerah beserta capaian dan besarnya kenaikan/penurunan:

**Tabel 5.4.2.**  
**Rincian Pendapatan LO 2022 dan 2021**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	42.036.881.942,20	38.843.803.351,47	3.193.078.590,73	8,22
2	Pendapatan Transfer	605.310.185.518,00	601.292.885.795,00	4.017.299.723,00	0,67
3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	54.133.301.375,55	32.498.183.686,94	21.635.117.688,61	66,57
	<b>Jumlah</b>	<b>701.480.368.835,75</b>	<b>672.634.872.833,41</b>	<b>28.845.496.002,34</b>	<b>4,29</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah– LO

*dalam rupiah*

Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	42.036.881.942,20	38.843.803.351,47	3.193.078.590,73	8,22

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp42.036.881.942,20 mengalami kenaikan sebesar Rp3.193.078.590,73 atau sebesar 8,22% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp38.843.803.351,47. Kenaikan ini disebabkan oleh faktor ekstern yaitu meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan efek dari adanya dana pinjaman PEN yang menyebabkan peningkatan pendapatan diantaranya pada pajak hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan bunga atas penempatan uang, serta penerimaan denda atas keterlambatan pekerjaan.

Nilai PAD-LO periode tahun 2022 adalah sebesar Rp42.036.881.942,20, jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA dalam periode yang sama dengan realisasi sebesar Rp41.605.946.911,20 maka terjadi selisih sebesar Rp430.935.031,00 yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah sebesar Rp325.439.567,00, akibat mutasi bertambah dari pengakuan piutang pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp436.827.068,00 dan mutasi berkurang atas penyetoran Piutang Pajak Daerah tahun sebelumnya sebesar Rp111.387.501,00.
2. Retribusi Daerah sebesar Rp848.175.500,00 akibat mutasi bertambah dari pengakuan penerimaan piutang klaim BPJS RSUD tahun 2022 sebesar Rp836.227.500,00 dan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang telah diterima dimuka atas Sewa pakai Tanah oleh Bank NTT pada tahun 2019 sebesar Rp11.948.000,00.
3. Lain-lain PAD yang Sah sebesar (Rp742.680.036,00), akibat dari adanya mutasi bertambah dari penerimaan remunerasi Dana Bagi Hasil TDF sebesar Rp266.997,00 serta adanya mutasi berkurang atas penyetoran piutang tuntutan ganti kerugian sebesar Rp407.945.484,00, serta hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direklasifikasikan ke Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp335.001.549,00.

Rincian Perbandingan Pendapatan Asli Daerah-LO dan LRA Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.4.3.**  
**Perbandingan Pendapatan Asli Daerah – LO dan LRA**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pendapatan Pajak Daerah	12.862.690.003,00	12.537.250.436,00	325.439.567,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	21.535.540.082,00	20.687.364.582,00	848.175.500,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.474.364.950,00	2.474.364.950,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	5.164.286.907,20	5.906.966.943,20	(742.680.036,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>42.036.881.942,20</b>	<b>41.605.946.911,20</b>	<b>430.935.031,00</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

**Tabel 5.4.4.**  
**Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO dan LRA**

*dalam rupiah*

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pajak Hotel	108.593.300,00	108.593.300,00	0,00
2	Pajak Restoran	1.752.341.095,00	1.752.341.095,00	0,00
3	Pajak Hiburan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
4	Pajak Reklame	116.896.744,00	116.896.744,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan	2.815.751.120,00	2.815.751.120,00	0,00
6	Pajak Air Tanah	5.508.000,00	5.508.000,00	0,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.790.939.380,00	5.790.939.380,00	0,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.812.054.984,00	1.486.615.417,00	325.439.567,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	454.755.380,00	454.755.380,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Pajak Daerah</b>		<b>12.862.690.003,00</b>	<b>12.537.250.436,00</b>	<b>325.439.567,00</b>

Selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA, Pajak Daerah sebesar Rp325.439.567,00 sebagai akibat adanya Pengakuan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp436.827.068,00, Penyetoran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp111.387.501,00.

#### 5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

**Tabel 5.4.5.**  
**Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan LRA**

*dalam rupiah*

No.	Uraian	LO	LRA	SELISIH
1.	Retribusi Jasa Umum	18.687.896.517,00	17.851.669.017,00	836.227.500,00
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.891.751.108,00	17.055.523.608,00	836.227.500,00
1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	115.950.000,00	115.950.000,00	0,00
1.3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	67.380.000,00	67.380.000,00	0,00
1.4	Retribusi Pelayanan Pasar	370.002.400,00	370.002.400,00	0,00
1.5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00
1.6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	2.313.000,00	2.313.000,00	0,00
1.7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	155.300.009,00	155.300.009,00	0,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	2.540.577.565,00	2.528.629.565,00	11.948.000,00
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	546.271.215,00	534.323.215,00	11.948.000,00
2.2	Retribusi Tempat Pelelangan	57.800.000,00	57.800.000,00	0,00
2.3	Retribusi Terminal	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
2.4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	257.255.400,00	257.255.400,00	0,00
2.5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	861.856.950,00	861.856.950,00	0,00
2.6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	451.460.000,00	451.460.000,00	0,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No.	Uraian	LO	LRA	SELISIH
2.7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	317.934.000,00	317.934.000,00	0,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	307.066.000,00	307.066.000,00	0,00
3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3.2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	196.625.000,00	196.625.000,00	0,00
3.3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	109.041.000,00	109.041.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>21.535.540.082,00</b>	<b>20.687.364.582,00</b>	<b>848.175.500,00</b>

Perbedaan Pendapatan Retribusi-LO dan LRA disebabkan akibat adanya penerimaan piutang klaim BPJS RSUD tahun 2022 sebesar Rp836.227.500,00 dan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO atas sewa pakai tanah oleh Bank NTT yang telah diterima dimuka sebesar Rp11.948.000,00.

#### 5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang terdapat pada LO dan LRA tidak terdapat perbedaan yaitu sebesar Rp2.474.364.950,00 dengan uraian perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.6.**  
**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan LRA**

*dalam rupiah*

No.	Uraian	LO	LRA	SELISIH
1.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	2.474.364.950,00	2.474.364.950,00	0,00
1.1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.474.364.950,00	2.474.364.950,00	0,00
	<b>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan</b>	<b>2.474.364.950,00</b>	<b>2.474.364.950,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.1.1.4. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah yang terdapat pada LO dan LRA terdapat perbedaan yaitu sebesar (Rp742.680.036,00), dengan uraian perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.7.**  
**Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO dan LRA**

*dalam rupiah*

No.	Uraian	LO	LRA	SELISIH
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00	335.001.549,00	(335.001.549,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3	Jasa Giro	415.203.297,74	415.203.297,74	0,00
4	Pendapatan Bunga	1.824.493.149,22	1.824.226.152,22	266.997,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.874.685.010,97	2.282.630.494,97	(407.945.484,00)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	369.767.375,27	369.767.375,27	0,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No.	Uraian	LO	LRA	SELISIH
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	415.683.907,00	415.683.907,00	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	50.314.167,00	50.314.167,00	0,00
	<b>Jumlah Lain -lain PAD yang Sah</b>	<b>5.164.286.907,20</b>	<b>5.906.966.943,20</b>	<b>(742.680.036,00)</b>

Perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA sebesar (Rp742.680.036,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan yaitu surplus Penjualan kendaraan dinas sebesar Rp335.001.549,00.
2. Penyetoran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp407.945.484,00.
3. Pendapatan remunerasi Dana Bagi Hasil TDF sebesar Rp266.997,00.

#### 5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

*dalam rupiah*

Pendapatan Transfer-LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
	<b>605.310.185.518,00</b>	<b>601.292.885.795,00</b>	<b>4.017.299.723,00</b>	<b>0,67</b>

Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Lembata periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp605.310.185.518,00 atau naik sebesar Rp4.017.299.723,00 atau 0,67% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp601.292.885.795,00. Rincian Pendapatan Transfer dan pengurangan masing-masing obyek pendapatan transfer sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.4.8.**  
**Pendapatan Transfer - LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	582.693.936.442,00	585.188.642.087,00	(2.494.705.645,00)	(0,43)
1.1	Dana Perimbangan	582.693.936.442,00	585.188.642.087,00	( 2.494.705.645,00 )	(0,43 )
a.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.615.368.172,00	12.800.921.362,00	( 1.185.553.190,00)	(9,26)
b.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	436.974.250.495,00	437.999.954.000,00	( 1.025.703.505,00 )	( 0,23 )
c.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.678.698.279,00	94.987.490.248,00	( 6.308.791.969,00 )	(6,64)
d.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	45.425.619.496,00	39.400.276.477,00	6.025.343.019,00	15,29
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	6.368.630.000,00	0,00	6.368.630.000,00	100,00
a.	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Dana Insentif Daerah	6.368.630.000,00	0,00	6.368.630.000,00	100,00
c.	Dana Istimewa	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.247.619.076,00	16.104.243.708,00	143.375.368,00	0,89
a.	Pendapatan Bagi Hasil	16.247.619.076,00	16.104.243.708,00	143.375.368,00	0,89
b.	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>605.310.185.518,00</b>	<b>601.292.885.795,00</b>	<b>4.017.299.723,00</b>	<b>0,67</b>

Nilai Pendapatan Transfer-LO periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp605.310.185.518,00, jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LRA dalam periode yang sama dengan realisasi sebesar Rp727.806.014.320,00, maka terjadi selisih sebesar Rp122.495.828.802,00 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.4.9.**  
**Perbandingan Pendapatan Transfer – LO dan LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	LO	LRA	SELISIH
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	582.693.936.442,00	581.593.054.974,00	1.100.881.468,00
1.1	Dana Perimbangan	582.693.936.442,00	581.593.054.974,00	1.100.881.468,00
a.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.615.368.172,00	10.514.486.704,00	1.100.881.468,00
b.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	436.974.250.495,00	436.974.250.495,00	0,00
c.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.678.698.279,00	88.678.698.279,00	0,00
d.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	45.425.619.496,00	45.425.619.496,00	0,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	6.368.630.000,00	129.709.942.030,00	(123.341.312.030,00)
a.	Dana Insentif Daerah	6.368.630.000,00	6.368.630.000,00	0,00
b.	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
c.	Dana Istimewa	0,00	0,00	0,00
d.	Dana Desa	0,00	123.341.312.030,00	(123.341.312.030,00)
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.247.619.076,00	16.503.017.316,00	(255.398.240,00)
a.	Pendapatan Bagi Hasil	16.247.619.076,00	16.503.017.316,00	(255.398.240,00)
b.	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>605.310.185.518,00</b>	<b>727.806.014.320,00</b>	<b>(122.495.828.802,00)</b>

Selisih penyajian Pendapatan Transfer pada LO dan LRA sebesar Rp122.495.828.802,00 terdiri dari:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp1.100.881.468,00 yang merupakan pendapatan Transfer DBH TDF yang tidak disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar (Rp123.341.312.030,00) yang merupakan pendapatan Transfer Dana Desa yang tidak disajikan pada Laporan Operasional.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil sebesar (Rp255.398.240,00) yang diakibatkan oleh pengakuan Piutang Bagi Hasil Pajak-Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp4.352.349.290,00 dan penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak-Provinsi tahun sebelumnya sebesar Rp4.607.747.530,00.

#### 5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

dalam rupiah

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	54.133.301.375,55	32.498.183.686,94	21.635.117.688,61	66,57

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2022 sebesar Rp54.133.301.375,55 atau mengalami kenaikan sebesar Rp21.635.117.688,61 atau sebesar 66,57% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp32.498.183.686,94. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan hibah yang meliputi Hibah dari Pemerintah Pusat, Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya, dan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan.

Nilai Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah-LO periode Tahun 2022 sebesar Rp54.133.301.375,55, jika dibandingkan dengan Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah-LRA dalam periode yang sama dengan realisasi sebesar Rp33.487.319.932,00, maka terjadi selisih sebesar Rp20.645.981.443,55 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.10.

#### Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dan LRA

dalam rupiah

No	Uraian	LO	LRA	SELISIH
1	Pendapatan Hibah	33.970.160.443,55	13.324.179.000,00	20.645.981.443,55
1.1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	30.493.925.639,00	13.324.179.000,00	17.169.746.639,00
1.1.1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	30.493.925.639,00	13.324.179.000,00	17.169.746.639,00
1.2	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	3.464.029.889,48	0,00	3.464.029.889,48
1.2.1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	3.464.029.889,48	0,00	3.464.029.889,48
1.3	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri	12.204.915,07	0,00	12.204.915,07
1.3.1	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri	12.204.915,07	0,00	12.204.915,07
1.4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	20.163.140.932,00	20.163.140.932,00	0,00
2.1	Lain-lain Pendapatan	20.163.140.932,00	20.163.140.932,00	0,00
2.1.1	Pendapatan Hibah Dana BOS	14.911.126.169,00	14.911.126.169,00	0,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	LO	LRA	SELISIH
2.1.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.252.014.763,00	5.252.014.763,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah</b>		<b>54.133.301.375,55</b>	<b>33.487.319.932,00</b>	<b>20.645.981.443,55</b>

Selisih penyajian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdapat pada LO dan LRA sebesar Rp20.645.981.443,55 terdiri dari:

1. Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp17.169.746.639,00 berupa Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp65.849.000,00 dan hibah Aset tetap pada Dinas Kesehatan sebesar Rp17.103.897.639,00.
2. Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp3.464.029.889,48 berupa Hibah Obat-obatan dari Provinsi NTT pada Dinas Kesehatan.
3. Pengakuan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp2.270.888,07 berupa Hibah Dana Donasi banjir bandang.
4. Pengakuan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp27,00 berupa Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pihak Ketiga pada RSUD.
5. Pengakuan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp10.000.000,00 berupa Hibah Utang Belanja karena telah diperoleh surat pernyataan tidak menagih.
6. Pengurangan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp66.000,00 merupakan jasa administrasi Bank atas rekening dana donasi banjir bandang.

#### 5.4.2. Beban

*dalam rupiah*

Beban	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	<b>649.845.982.300,41</b>	<b>625.951.220.305,44</b>	<b>23.894.761.994,97</b>	<b>3,82</b>

Beban Tahun 2022 adalah sebesar Rp649.845.982.300,41 mengalami kenaikan sebesar Rp23.894.761.994,97 atau 3,82% dari Beban Tahun 2021 sebesar Rp625.951.220.305,44. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan manfaat ekonomis dan potensi jasa atas beban pengeluaran dan pemanfaatan aset selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Beban untuk Pemerintah Kabupaten Lembata terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban Tak Terduga. Rincian Beban dengan kenaikan/penurunan selama periode Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.4.11.  
Beban-LO**

*dalam rupiah*

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	300.596.890.941,12	299.996.265.435,00	600.625.506,12	0,20
2	Beban Persediaan	64.608.618.669,03	71.667.216.671,76	(7.058.598.002,73)	(9,85)
3	Beban Jasa	81.732.415.911,88	64.955.156.593,00	16.777.259.318,88	25,83
4	Beban Pemeliharaan	4.714.088.370,00	4.810.249.839,00	(96.161.469,00)	(2,00)
5	Beban Perjalanan Dinas	32.489.564.858,00	29.231.053.061,00	3.258.511.797,00	11,15
6	Beban Bunga	5.200.346.251,00	0,00	5.200.346.251,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	5.045.863.370,00	4.521.940.207,52	523.923.162,48	11,59
9	Beban Bantuan Sosial	8.907.500.000,00	7.598.430.600,00	1.309.069.400,00	17,23
10	Beban Penyusutan	99.820.569.183,98	94.566.185.817,05	5.254.383.366,93	5,56
11	Beban Amortisasi	517.252.805,00	517.252.803,00	2,00	0,00
12	Beban Penyisihan Piutang	371.038.159,40	428.005.418,11	(56.967.258,71)	(13,31)
13	Beban Transfer	45.841.833.781,00	47.298.284.860,00	(1.456.451.079,00)	(3,08)
14	Beban Tak Terduga	0,00	361.179.000,00	(361.179.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah Beban</b>		<b>649.845.982.300,41</b>	<b>625.951.220.305,44</b>	<b>23.894.761.994,97</b>	<b>3,82</b>

**5.4.2.1. Beban Pegawai – LO**

*dalam rupiah*

Beban Pegawai	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	<b>300.596.890.941,12</b>	<b>299.996.265.435,00</b>	<b>600.625.506,12</b>	<b>0,20</b>

Jumlah Beban Pegawai periode Tahun 2022 adalah Rp300.596.890.941,12 mengalami kenaikan sebesar Rp600.625.506,12 atau sebesar 0,20% dari jumlah beban pegawai pada periode Tahun 2021 sebesar Rp299.996.265.435,00.

**Tabel 5.4.12.  
Beban Pegawai-LO**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	238.013.428.511,00	236.129.542.071,00	1.883.886.440,00	0,80
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	7.811.524.547,00	9.756.372.321,00	(1.944.847.774,00)	(19,93)
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.015.986.495,11	38.362.084.133,00	4.653.902.362,11	12,13
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.222.308.026,00	10.016.221.960,00	1.206.086.066,00	12,04
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	175.741.694,00	161.011.972,00	14.729.722,00	9,15
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	357.901.668,00	266.460.005,00	91.441.663,00	34,32
7	Beban Pegawai BOS		5.304.572.973,00	(5.304.572.973,00)	0,00
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>		<b>300.596.890.941,12</b>	<b>299.996.265.435,00</b>	<b>600.625.506,12</b>	<b>0,20</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Nilai Beban Pegawai-LO periode Tahun 2022 sebesar Rp300.596.890.941,12 lebih kecil dari Belanja Pegawai-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp301.481.512.135,12 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.4.13.**  
**Perbandingan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai LRA**

*dalam rupiah*

No	Uraian	LO	LRA	SELISIH
1	Gaji dan Tunjangan ASN	238.013.428.511,00	238.013.428.511,00	0,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	7.811.524.547,00	7.811.524.547,00	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.015.986.495,11	43.900.607.689,12	(884.621.194,01)
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	11.222.308.026,00	11.222.308.026,00	0,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	175.741.694,00	175.741.694,00	0,00
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	357.901.668,00	357.901.668,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>300.596.890.941,12</b>	<b>301.481.512.135,12</b>	<b>(884.621.194,00)</b>

Selisih penyajian Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA sebesar (Rp884.621.194,00) merupakan beban honorarium yang diatribusikan pada Aset Tetap.

#### 5.4.2.2. Beban Barang

*dalam rupiah*

Beban Persediaan	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	<b>64.608.618.669,03</b>	<b>71.667.216.671,76</b>	<b>(7.058.598.002,73)</b>	<b>(9,85)</b>

Jumlah Beban Barang periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp64.608.618.669,03 mengalami penurunan sebesar Rp7.058.598.002,73 atau sebesar 9,85% dari Beban Barang pada periode Tahun 2021 sebesar Rp71.667.216.671,76.

**Tabel 5.4.14.**  
**Beban Barang-LO**

*dalam rupiah*

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	64.579.333.669,03	68.399.722.809,56	(3.820.389.140,53)	(5,59)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	29.285.000,00	3.267.493.862,20	(3.238.208.862,20)	(99,10)
	<b>Jumlah</b>	<b>64.608.618.669,03</b>	<b>71.667.216.671,76</b>	<b>(7.058.598.002,73)</b>	<b>(9,85)</b>

Nilai Beban Barang-LO periode Tahun 2022 sebesar Rp64.608.618.669,03 lebih besar dari Belanja Barang-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.899.632.576,00 atau selisih sebesar Rp15.708.986.093,03 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

**Tabel 5.4.15.**  
**Perbandingan Beban Barang-LO dan Belanja Barang –LRA**

*dalam rupiah*

NO	URAIAN	LO	REALISASI LRA	SELISIH
1	Bahan Pakai Habis	64.579.333.669,03	48.870.347.576,00	15.708.986.093,03
2	Barang Tak Habis Pakai	29.285.000,00	29.285.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>64.608.618.669,03</b>	<b>48.899.632.576,00</b>	<b>15.708.986.093,03</b>

Selisih penyajian Beban Barang-LO dan Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp15.708.986.093,03 disebabkan antara lain:

1. Pengakuan beban barang awal tahun yang sudah digunakan sebesar Rp26.611.023.511,75
2. Persediaan yang bersumber dari Belanja Modal pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp96.182.000,00.
3. Persediaan yang bersumber dari Belanja Modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi sebesar Rp1.246.169.424,49.
4. Persediaan Obat-Obatan yang bersumber dari Buffer Stock Provinsi NTT sebesar Rp3.464.029.889,48.
5. Persediaan Obat-Obatan Lainnya yang berasal dari alat kesehatan yang tidak memenuhi batas kapitalisasi sebesar Rp18.355.200,00.
6. Beban persediaan yang bersumber dari Beban dibayar dimuka atas barang persediaan yang sudah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp241.662.636,35.
7. Pengurangan beban persediaan atas persediaan akhir tahun berjalan sebesar Rp (Rp15.932.025.829,04).
8. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer menambah Aset Tetap pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp15.550.740,00).
9. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor menambah Aset Tetap pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp20.860.000,00).

#### 5.4.2.3. Beban Jasa

*dalam rupiah*

Beban Jasa	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	<b>81.732.415.911,88</b>	<b>64.955.156.593,00</b>	<b>16.777.259.318,88</b>	<b>25,83</b>

Jumlah Beban Jasa periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp81.732.415.911,88 mengalami kenaikan sebesar Rp16.777.259.318,88 atau sebesar 25,83% dari Beban Jasa pada periode Tahun 2021 sebesar Rp64.955.156.593,00.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.4.16.  
Beban Jasa-LO***dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	58.065.574.456,88	54.798.892.906,00	3.266.681.550,88	5,96
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.951.158.600,00	3.525.844.500,00	7.425.314.100,00	210,60
3	Beban Sewa Tanah	6.000.000,00	19.200.000,00	(13.200.000,00)	(68,75)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	993.871.747,00	582.545.350,00	411.326.397,00	70,61
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.066.150.526,00	599.917.937,00	466.232.589,00	77,72
6	Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi	0,00	99.350.000,00	(99.350.000,00)	0,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.233.452.600,00	1.209.673.800,00	1.023.778.800,00	84,63
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.789.594.766,00	3.500.897.100,00	1.288.697.666,00	36,81
11	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.611.113.216,00	618.835.000,00	2.992.278.216,00	483,53
<b>Jumlah Belanja Jasa</b>		<b>81.732.415.911,88</b>	<b>64.955.156.593,00</b>	<b>16.777.259.318,88</b>	<b>25,83</b>

Nilai Beban Jasa-LO periode Tahun 2022 sebesar Rp81.732.415.911,88 lebih kecil dari Belanja Jasa-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp87.792.856.810,88 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.4.17.  
Perbandingan Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa -LRA***Dalam Rupiah*

No	Uraian	LO	Realisasi	Selisih
1	Jasa Kantor	58.065.574.456,88	59.008.451.148,88	(942.876.692,00)
2	Iuran Jaminan/Asuransi	10.951.158.600,00	10.951.158.600,00	0,00
3	Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4	Sewa Peralatan dan Mesin	993.871.747,00	993.871.747,00	0,00
5	Sewa Gedung dan Bangunan	1.066.150.526,00	1.066.150.526,00	0,00
6	Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
7	Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
8	Jasa Konsultansi Konstruksi	2.233.452.600,00	8.915.320.807,00	(6.681.868.207,00)
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
10	Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.789.594.766,00	4.789.594.766,00	0,00
11	Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.611.113.216,00	2.046.809.216,00	1.564.304.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>81.732.415.911,88</b>	<b>87.792.856.810,88</b>	<b>(6.060.440.899,00)</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Selisih penyajian Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA sebesar (Rp6.060.440.899,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Jasa kesehatan sebesar (Rp942.968.752,00) yang merupakan beban jasa kesehatan atas utang jasa pelayanan kesehatan.
2. Beban Jasa Transaksi Keuangan yang berasal dari Dana BTT Rp92.060,00.
3. Beban Jasa Konsultansi yang dikapitalisasi ke Aset Tetap sebesar (Rp6.681.868.207,00).
4. Beban Hibah uang Dana BOP PAUD yang diterima satuan Pendidikan TK/PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.564.304.000,00

#### 5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

dalam rupiah

Beban Pemeliharaan	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	4.714.088.370,00	4.810.249.839,00	(96.161.469,00)	(2,00)

Jumlah Beban Pemeliharaan periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.714.088.370,00 mengalami penurunan sebesar Rp96.161.469,00 atau sebesar 2,00% dari Beban Pemeliharaan pada periode Tahun 2021 sebesar Rp4.810.249.839,00.

Tabel 5.4.18.  
Beban Pemeliharaan

dalam rupiah

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	299.917.000,00	0,00	299.917.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.470.725.220,00	2.860.500.094,00	(389.774.874,00)	(13,63)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.636.441.555,00	717.809.319,00	918.632.236,00	127,98
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290.957.095,00	1.231.940.426,00	(940.983.331,00)	(76,38)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.047.500,00	0,00	16.047.500,00	0,00
<b>Jumlah Pemeliharaan</b>		<b>4.714.088.370,00</b>	<b>4.810.249.839,00</b>	<b>(96.161.469,00)</b>	<b>(2,00)</b>

Nilai Beban Pemeliharaan-LO periode Tahun 2022 sebesar Rp4.714.088.370,00, jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan-LRA dalam periode yang sama dengan realisasi sebesar Rp11.380.948.644,00 maka terjadi selisih sebesar (Rp6.666.860.274,00) dengan rincian sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.4.19.****Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan- LRA***dalam rupiah*

No	Uraian	LO	Realisasi LRA	Selisih
1	Pemeliharaan Tanah	299.917.000,00	2.475.225.220,00	0,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.470.725.220,00	7.373.391.929,00	(4.500.000,00)
3	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.636.441.555,00	1.216.366.995,00	(5.736.950.374,00)
4	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290.957.095,00	16.047.500,00	(925.409.900,00)
5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.047.500,00	2.475.225.220,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.714.088.370,00</b>	<b>11.081.031.644,00</b>	<b>(6.666.860.274,00)</b>

Selisih penyajian Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar (Rp6.666.860.274,00) merupakan beban pemeliharaan yang menambah Aset Tetap yang terdiri dari:

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp4.500.000,00).
2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp5.736.950.374,00).
3. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang menambah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (Rp925.409.900,00).

**5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	<b>32.489.564.858,00</b>	<b>29.231.053.061,00</b>	<b>3.258.511.797,00</b>	<b>11,15</b>

Jumlah Beban Perjalanan Dinas periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp32.489.564.858,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.258.511.797,00 atau sebesar 11,15% dari Beban Perjalanan Dinas pada periode Tahun 2021 sebesar Rp29.231.053.061,00.

**Tabel 5.4.20.****Beban Perjalanan Dinas - LO***dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Perjalanan Dinas Biasa	18.934.491.839,00	19.295.806.659,00	(361.314.820,00)	(1,87)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	1.133.762.000,00	(1.133.762.000,00)	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.452.491.509,00	8.598.921.802,00	4.853.569.707,00	56,44
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102.581.510,00	168.873.000,00	(66.291.490,00)	(39,26)
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	33.689.600,00	(33.689.600,00)	0,00
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>		<b>32.489.564.858,00</b>	<b>29.231.053.061,00</b>	<b>3.258.511.797,00</b>	<b>11,15</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Nilai Beban Perjalanan Dinas-LO periode Tahun 2022 sebesar Rp32.489.564.858,00 sama dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp32.489.564.858,00 atau selisih Rp0,00 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.4.21.**

#### Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas –LRA

*dalam rupiah*

No	Uraian	LO	Realisasi LRA	Selisih
1	Perjalanan Dinas Biasa	18.934.491.839,00	18.934.491.839,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.452.491.509,00	13.452.491.509,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102.581.510,00	102.581.510,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>32.489.564.858,00</b>	<b>32.489.564.858,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.2.6. Beban Bunga

*dalam rupiah*

Beban Bunga	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	5.200.346.251,00	0,00	5.200.346.251,00	100,00

Jumlah Beban Bunga Periode Tahun 2022 sebesar Rp5.200.346.251,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.200.346.251,00 atau sebesar 100,00% dari Beban Bunga pada periode Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

Nilai Beban Bunga periode Tahun 2022 sebesar Rp5.200.346.251,00 sama dengan Belanja Bunga-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.200.346.251,00 atau selisih Rp0,00.

#### 5.4.2.7. Beban Subsidi

*dalam rupiah*

Beban Subsidi	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah Beban Subsidi Periode Tahun 2022 maupun periode Tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00, serta tidak ada mutasi Beban Subsidi selama periode Tahun 2022.

#### 5.4.2.8. Beban Hibah

*dalam rupiah*

Beban Hibah	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	5.045.863.370,00	4.521.940.207,52	523.923.162,48	11,59

Jumlah beban hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.045.863.370,00 mengalami kenaikan sebesar Rp523.923.162,48 atau sebesar 11,59% dari realisasi beban hibah pada periode 2021 sebesar Rp4.521.940.207,52.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.4.22.  
Beban Hibah – LO***dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	4.544.862.350,00	4.020.939.187,52	523.923.162,48	13,03
2	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	501.001.020,00	501.001.020,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Hibah</b>		<b>5.045.863.370,00</b>	<b>4.521.940.207,52</b>	<b>523.923.162,48</b>	<b>11,59</b>

Nilai Beban Hibah-LO periode Tahun 2022 sebesar Rp5.045.863.370,00, jika dibandingkan dengan Belanja Hibah-LRA dalam periode yang sama dengan realisasi sebesar Rp4.943.063.370,00 maka terjadi selisih sebesar Rp102.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.23.  
Perbandingan Beban Hibah-LO dan Belanja Hibah –LRA***dalam rupiah*

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	4.544.862.350,00	4.544.862.350,00	0,00
3	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	501.001.020,00	501.001.020,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Hibah</b>		<b>5.045.863.370,00</b>	<b>5.045.863.370,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak ada selisih penyajian Beban Hibah-LO dan Belanja Hibah-LRA..

**5.4.2.9. Beban Bantuan Sosial***dalam rupiah*

Beban Bantuan Sosial	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	<b>8.907.500.000,00</b>	<b>7.598.430.600,00</b>	<b>1.309.069.400,00</b>	<b>17,23</b>

Jumlah beban bantuan sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp8.907.500.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.309.069.400,00 dari jumlah beban bantuan sosial pada periode 2021 sebesar Rp7.598.430.600,00.

**Tabel 5.4.24.  
Beban Bantuan Sosial-LO***dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>A.</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>1.795.930.600,00</b>	<b>(1.780.930.600,00)</b>	<b>(99,16)</b>
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan secara Individu	0,00	1.795.930.600,00	(1.795.930.600,00)	0,00
<b>B.</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>8.892.500.000,00</b>	<b>5.802.500.000,00</b>	<b>3.090.000.000,00</b>	<b>53,25</b>
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	8.892.500.000,00	5.802.500.000,00	3.090.000.000,00	53,25
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial</b>		<b>8.907.500.000,00</b>	<b>7.598.430.600,00</b>	<b>1.309.069.400,00</b>	<b>17,23</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Nilai Beban Bantuan Sosial-LO periode Tahun 2022 sebesar Rp8.907.500.000,00, jika dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA dalam periode yang sama dengan realisasi sebesar Rp8.892.500.000,00 maka terdapat selisih sebesar Rp15.000.000,00. Selisih ini merupakan Beban Bantuan Sosial pemulangan jenazah yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga. Perbandingan Beban Bantuan Sosial-LO dan Beban Bantuan Sosial LRA sebagai berikut:

Tabel 5.4.25.

#### Perbandingan Beban Bantuan Sosial-LO dan Beban Bantuan Sosial LRA

dalam rupiah

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
<b>A.</b>	<b>Bantuan Sosial Uang kepada Individu</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2	Bantuan Sosial Barang yang direncanakan secara Individu	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>8.892.500.000,00</b>	<b>8.892.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	8.892.500.000,00	8.892.500.000,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial</b>		<b>8.907.500.000,00</b>	<b>8.892.500.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>

#### 5.4.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

dalam rupiah

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	99.820.569.183,98	94.566.185.817,05	5.254.383.366,93	5,56

Jumlah beban penyusutan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp99.820.569.183,98 mengalami peningkatan sebesar Rp5.254.383.366,93 dari jumlah beban penyusutan pada periode 2021 sebesar Rp94.566.185.817,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.26.

#### Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

dalam rupiah

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.921.503.919,63	32.709.471.816,41	1.212.032.103,22	3,71
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.197.957.528,07	10.864.587.972,55	333.369.555,52	3,07
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	54.701.107.736,28	50.992.126.028,09	3.708.981.708,19	7,27
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>		<b>99.820.569.183,98</b>	<b>94.566.185.817,05</b>	<b>5.254.383.366,93</b>	<b>5,56</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.4.2.11. Beban Amortisasi

dalam rupiah

Beban Amortisasi	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	517.252.805,00	517.252.803,00	2,00	0,00

Jumlah beban amortisasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp517.252.805,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2,00 dari jumlah beban amortisasi pada periode 2021 sebesar Rp517.252.803,00

#### 5.4.2.12. Beban Penyisihan Piutang

dalam rupiah

Beban Penyisihan Piutang	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	371.038.159,40	428.005.418,11	(56.967.258,71)	(13,31)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp371.038.159,40 dengan penurunan sebesar Rp56.967.258,71 dari jumlah Beban Penyisihan Piutang pada periode Tahun 2021 sebesar Rp428.005.418,11 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.27.**  
**Beban Penyisihan Piutang-LO**

dalam rupiah

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	340.169.974,98	420.271.373,61	(80.101.398,63)	(19,06)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	4.181.137,50	3.810.000,00	371.137,50	9,74
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.334,99	0,00	1.334,99	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	4.923.965,48	3.924.044,50	999.920,98	25,48
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer	21.761.746,45	0,00	21.761.746,45	0,00
	<b>Jumlah Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>371.038.159,40</b>	<b>428.005.418,11</b>	<b>(56.967.258,71)</b>	<b>(13,31)</b>

#### 5.4.2.13. Beban Transfer

dalam rupiah

Beban Transfer	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	45.841.833.781,00	47.298.284.860,00	(1.456.451.079,00)	(3,08)

Jumlah beban transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp45.841.833.781,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.456.451.079,00 dari jumlah beban transfer pada periode Tahun 2021 sebesar Rp47.298.284.860,00, dengan rincian sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.4.28.**  
**Beban Transfer-LO***dalam rupiah*

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil	1.092.000.000,00	2.774.572.460,00	(1.682.572.460,00)	(60,64)
1.1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.092.000.000,00	878.424.270,00	213.575.730,00	24,31
1.2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	0,00	1.896.148.190,00	(1.896.148.190,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Keuangan	44.749.833.781,00	44.523.712.400,00	226.121.381,00	0,51
2.1	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	44.749.833.781,00	44.523.712.400,00	226.121.381,00	0,51
	<b>Jumlah Beban Transfer</b>	<b>45.841.833.781,00</b>	<b>47.298.284.860,00</b>	<b>(1.456.451.079,00)</b>	<b>(3,08)</b>

Nilai Beban Transfer-LO periode Tahun 2022 sebesar Rp45.841.833.781,00 lebih kecil dari Belanja Transfer-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp169.183.145.811,00 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.4.29.**  
**Perbandingan Beban Transfer-LO dan Belanja Transfer -LRA***dalam rupiah*

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Bagi Hasil	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00	0,00
1.1	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00	0,00
1.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
2	Bantuan Keuangan	44.749.833.781,00	168.091.145.811,00	(123.341.312.030,00)
2.1	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	44.749.833.781,00	168.091.145.811,00	(123.341.312.030,00)
	<b>Jumlah Beban Transfer</b>	<b>45.841.833.781,00</b>	<b>169.183.145.811,00</b>	<b>(123.341.312.030,00)</b>

Selisih penyajian Beban Transfer-LO dan Belanja Transfer-LRA sebesar (Rp123.341.312.030,00) merupakan Dana Desa yang tidak disajikan dalam Laporan Operasional.

**5.4.2.14. Beban Tidak Terduga***dalam rupiah*

Beban Tidak Terduga	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	0,00	361.179.000,00	(361.179.000,00)	(100,00)

Jumlah Beban Tidak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dimana mengalami penurunan sebesar Rp361.179.000,00 dari jumlah Beban Tidak Terduga pada periode 2021 sebesar Rp361.179.000,00.

Nilai Beban Tidak Terduga-LO periode Tahun 2022 sebesar Rp0,00 lebih kecil sebesar (Rp94.710.807,00) dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp94.710.807,00. Dapat dijelaskan bahwa nilai sebesar Rp17.310.700,00 diakui sebagai aset, nilai sebesar Rp92.060,00 dicatat pada Beban Transaksi



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Keuangan, dan nilai sebesar Rp15.000.000,00 dicatat pada Beban Bantuan Sosial, serta nilai sebesar Rp62.308.047,00 dicatat pada Beban Luar Biasa.

#### 5.4.3. Surplus/Defisit Dari Operasi

dalam rupiah

Surplus/Defisit Dari Operasi	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	51.634.386.535,34	46.683.652.527,97	4.950.734.007,37	10,60

Jumlah sebesar Rp51.634.386.535,34 adalah nilai Surplus Defisit dari Operasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 yang merupakan selisih antara Pendapatan LO sebesar Rp701.480.368.835,75 dan Beban Operasional sebesar Rp649.845.982.300,41 yang diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.30.**  
**Surplus/Defisit Dari Operasi**

dalam rupiah

No	Uraian	Surplus/Defisit LO
1	Jumlah Pendapatan LO	701.480.368.835,75
2	Jumlah Beban Operasional	649.845.982.300,41
<b>Surplus/Defisit Dari operasi (1-2)</b>		<b>51.634.386.535,34</b>

#### 5.4.4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

dalam rupiah

Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(667.115.555,00)	(877.630.271,00)	210.514.716,00	(23,99)

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Jumlah surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp667.115.555,00) adalah nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 yang diperoleh dari nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp335.001.549,00 yang merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa penjualan peralatan dan mesin, dikurangi nilai Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp239.806.027,00 terdiri atas defisit dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp173.248.858,00, defisit dari penghapusan gedung dan bangunan sebesar Rp61.329.051,00, defisit dari penghapusan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp5.228.118,00 dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.002.117.104,00 yang merupakan kerugian PDAM pada tahun 2022 sebesar Rp762.311.077,00 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.4.31.  
Surplus/Defisit Dari kegiatan Non Operasional 2022**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
1	Surplus Dari Kegiatan Operasional	335.001.549,00
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	335.001.549,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00
2	Defisit Dari Kegiatan Operasional	1.002.117.104,00
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	239.806.027,00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	762.311.077,00
	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (1-2)	(667.115.555,00)

**5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**

*dalam rupiah*

Surplus Defisit sebelum pos Luar Biasa	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		50.967.270.980,34	45.806.022.256,97	734.437.878,48

Jumlah surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp50.967.270.980,34 adalah nilai Surplus Defisit sebelum Pos Luar Biasa untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 yang diperoleh dari nilai Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp51.634.386.535,34 ditambah nilai Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp667.115.555,00) yang dapat terbaca pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.4.32.  
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 2022**

*dalam rupiah*

No	Uraian	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
1	Surplus/Defisit Dari operasi	51.634.386.535,34
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(667.115.555,00)
	<b>Surplus/Defisit Dari sebelum Pos Luar Biasa (1+2)</b>	<b>50.967.270.980,34</b>

**5.4.6. Pos Luar Biasa**

*dalam rupiah*

Pos Luar Biasa	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp62.308.047,00

Jumlah pos luar biasa sebesar (Rp62.308.047,00) adalah nilai dari Pos Luar Biasa untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Nilai Pos Luar Biasa sebesar (Rp62.308.047,00) merupakan reklasifikasi dari Beban Tidak Terduga karena digunakan untuk penanganan bencana.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.4.7. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit LO	<i>dalam rupiah</i>			
	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	50.904.962.933,34	45.806.022.256,97	672.129.831,48	1,47

Jumlah sebesar Rp50.904.962.933,34 adalah nilai Surplus/Defisit-LO untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 yang merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dan Pos Luar Biasa yang diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.33.**  
**Surplus/Defisit – LO**

No	Uraian	<i>dalam rupiah</i>
		Surplus/Defisit LO
1	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	50.967.270.980,34
2	Pos Luar Biasa	(62.308.047,00)
	<b>Surplus/Defisit LO (1+2)</b>	<b>50.904.962.933,34</b>

#### 5.5. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tahun 2022 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

##### 5.5.1. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	<i>dalam rupiah</i>	
	Tahun 2022	Tahun 2021
	132.103.198.351,20	Rp113.909.793.864,81

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp132.103.198.351,20 dan tahun 2021 sebesar Rp113.909.793.864,81. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi tahun 2022 berasal dari Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi sebesar Rp802,564,279,614.20 dan Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi sebesar Rp670.461.081.263,00.

##### 5.5.1.1. Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	<i>dalam rupiah</i>	
	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp802,564,279,614.20	Rp786.646.026.698,47

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp802,564,279,614.20 dan tahun 2021 sebesar Rp786.646.026.698,47 merupakan penerimaan dari aktivitas operasional berupa penerimaan PAD, penerimaan Transfer dan lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Pencatatan nilai Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2022 pada LAK bila dibandingkan dengan akun padanannya pada LRA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.5.1.  
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

No	Uraian Akun LAK	2022	2021
1	Penerimaan Pajak Daerah	12,537,250,436.00	10.010.621.852,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	20,687,364,582.00	14.979.864.145,00
3	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,474,364,950.00	4.837.043.529,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,571,965,394.20	8.310.288.544,68
5	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	10,514,486,704.00	12.800.921.362,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	436,974,250,495.00	437.999.954.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	88,678,698,279.00	94.987.490.248,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus- Non Fisik	45,425,619,496.00	39.400.276.477,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	6,368,630,000.00	0,00
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
11	Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Desa	123,341,312,030.00	133.302.249.800,00
13	Penerimaan Dana Bantuan Keuangan	16,503,017,316.00	13.212.444.051,00
14	Penerimaan Hibah	13,324,179,000.00	16.804.611.600,00
15	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	20,163,140,932.00	261.089,79
	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>802,564,279,614.20</b>	<b>786.646.026.698,47</b>

**5.5.1.2. Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi**

Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	Tahun 2022	Tahun 2021
	670.461.081.263,00	Rp672.736.232.833,66

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp670.461.081.263,00 dan tahun 2021 sebesar Rp672.736.232.833,66 merupakan pengeluaran dari aktivitas operasi berupa pembayaran gaji pegawai, pembayaran barang dan jasa, pembayaran bunga, pembayaran hibah, pembayaran bantuan sosial, pembayaran tidak terduga bagi hasil, pembayaran bantuan keuangan.

Pencatatan nilai Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2022 pada LAK dibandingkan dengan akun padanannya pada LRA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.5.2.  
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

No	Uraian Arus Keluar Kas	2022	2021
1	Pembayaran Pegawai	301.481.512.135,12	302.508.861.983,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	180.563.002.888,88	166.260.128.776,14
3	Pembayaran Bunga	5.200.346.251,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	5.045.863.370,00	4.521.940.207,52
6	Pembayaran Bantuan Sosial	8.892.500.000,00	7.598.430.600,00
7	Pembayaran Tidak Terduga	94.710.807,00	11.246.336.607,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	1.092.000.000,00	2.774.572.460,00
9	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	0,00	0,00
10	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Kabupaten /Kota	0,00	0,00
11	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kepada Desa	168.091.145.811,00	177.825.962.200,00
12	Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Ke Kabupaten	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>670.461.081.263,00</b>	<b>672.736.232.833,66</b>

**5.5.2. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi**

*dalam rupiah*

Arus Kas bersih Aktivitas Investasi	Tahun 2022	Tahun 2021
	(254.423.100.974,00)	(Rp129.920.364.842,37)

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi tahun 2022 sebesar (Rp254.423.100.974,00) dan tahun 2021 sebesar (Rp129.920.364.842,37).

Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi tahun 2022 berasal dari Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi sebesar Rp335.001.549,00 dan Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi sebesar Rp254.758.102.523,00

**5.5.2.1. Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi**

Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp335.001.549,00	Rp0,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 sebesar Rp335.001.549,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 ini. Pencatatan nilai Arus Masuk Kas dari Aktivitas



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Investasi tahun 2022 pada LAK dibandingkan dengan akun padanannya pada LRA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.5.3.**  
**Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

Uraian Akun LAK	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	335.001.549,00	0,00
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>335.001.549,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.5.2.2. Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

*dalam rupiah*

Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	Tahun 2022	Tahun 2021
	<b>Rp 254.758.102.523,00</b>	<b>Rp129.920.364.842,37</b>

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 sebesar Rp254.758.102.523,00 dan tahun 2021 sebesar Rp129.920.364.842,37.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pencatatan nilai Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi pada LAK tahun 2022 dibandingkan dengan akun padanannya pada LRA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.5.4.**  
**Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

Uraian Arus Keluar Kas	2022	2021
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	3.917.953.074,00	1.654.743.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	22.654.556.480,00	20.099.069.382,53
Perolehan Gedung dan Bangunan	20.611.697.456,00	36.428.364.408,00
Perolehan Jalan, Jaringan dan Instalasi	200.252.654.512,00	64.032.970.721,38
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.321.241.001,00	5.205.217.330,46
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>254.758.102.523,00</b>	<b>129.920.364.842,37</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.5.3. Aktivitas Pendanaan

*dalam rupiah*

Arus Kas bersih Aktivitas Pendanaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	212,564,908,020.66	0,00

Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan tahun 2022 sebesar Rp212,564,908,020.66 dari tahun 2021 sebesar Rp0,00. Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan tahun 2022 berasal dari Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp212,564,908,020.66 dan Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00.

##### 5.5.3.1. Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

*dalam rupiah*

Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	212,564,908,020.66	0,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 sebesar Rp212,564,908,020.66 dan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

##### 5.5.3.2. Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan

*dalam rupiah*

Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	0,00	0,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

#### 5.5.4. Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris

*dalam rupiah*

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp10.379.828,00	(Rp11.597.483,00)

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 sebesar Rp10.379.828,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2021 sebesar (Rp11.597.483,00). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris tahun 2022 berasal dari Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp15.350.028.881,00 dan Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp90.306.640.061,86.

##### 5.5.4.1. Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

*dalam rupiah*

Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	Tahun 2022	Tahun 2021
	15.350.028.881,00	37.502.323.483,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 sebesar Rp15.350.028.881,00 dan tahun 2021 sebesar Rp37.502.323.483,00.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 ini terdiri dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Pajak Negara pada Bendahara Umum Daerah sebesar Rp15.338.390.484,00, Penerimaan Pajak Negara pada Bendahara Pengeluaran tahun berjalan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp9.072.000,00 dan penerimaan pajak Negara bendahara JKN Tahun berjalan yang belum disetor sebesar Rp2.566.397,00.

#### 5.5.4.2. Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

*dalam rupiah*

Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	Tahun 2022	Tahun 2021
	15,339,649,053.00	37.513.920.966,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 sebesar Rp15,339,649,053.00 dan tahun 2021 sebesar Rp37.513.920.966,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 sebesar Rp15,339,649,053.00 ini terdiri dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD sebesar Rp15.338.390.484,00 Pembayaran Pajak Negara Bendahara pengeluaran Tahun 2021 yang ada di Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.250.000,00 serta Pembayaran Pajak Negara Bendahara JKN Tahun 2021 sebesar Rp8.569,00.

#### 5.5.5. Saldo Akhir Kas

*dalam rupiah*

Saldo Akhir Kas	Tahun 2022	Tahun 2021
	95.591.859.835,00	5.329.288.473,14

Saldo akhir Kas tahun 2022 sebesar Rp95.591.859.835,00 dari tahun 2021 sebesar Rp5.329.288.473,14. Saldo Akhir Kas di BUD terbentuk dari penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris, ditambah saldo awal kas di BUD.

**Tabel 5.5.5.**  
**Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2022**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2022	2021
1	Saldo Awal Kas	5.329.288.473,14	21.351.456.933,70
2	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	132.103.198.351,20	113.909.793.864,81
3	Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(254.415.914.838,00)	(129.920.364.842,37)
4	Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	212.564.908.020,66	0,00
5	Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	10.379.828,00	(11.597.483,00)
6	Kenaikan/ Penurunan Kas	90.262.571.361,86	(16.022.168.460,56)
7	Koreksi Saldo Awal Kas	0,00	0,00
8	Saldo Akhir Kas	95.591.859.835,00	5.329.288.473,14
9	Terdiri dari		
10	Saldo akhir Kas BUD	95.263.811.223,46	3.190.114.819,54
11	Saldo akhir Kas Bendahara Penerimaan	34.472.000,00	160.000,00
12	Saldo akhir Kas Bendahara Pengeluaran	14.971.098,00	188.394.566,35
13	Saldo akhir Kas Bendahara JKN	114.479.254,25	555.752.059,25
14	Saldo akhir Kas Bendahara BOS	152.264.295,29	1.394.867.028,00
15	Kas Lainnya (Terkait PFK)	11.861.964,00	0,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 5.6. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Ekuitas Awal

*dalam rupiah*

Ekuitas Awal	Tahun 2022	Tahun 2021
	1.494.357.632.535,05	1.422.514.781.148,98

Jumlah ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp1.494.357.632.535,05 merupakan jumlah ekuitas pada Neraca LKPD Tahun 2022 dan sama dengan Jumlah Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp1.494.357.632.535,05 yang merupakan akumulasi dari ekuitas awal Tahun 2021 sebesar Rp1.422.514.781.148,98 surplus/defisit-LO sebesar Rp45.806.022.256,97 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp26.036.829.129,10.

##### 2. Surplus/Defisit-LO

*dalam rupiah*

Surplus / Defisit-LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp50.904.962.933,34	Rp45.806.022.256,97

Nilai Surplus/Defisit-LO 2022 pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp50.904.962.933,34 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.806.022.256,97.

Nilai Surplus/Defisit-LO 2022 pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 mengacu pada nilai Surplus/Defisit-LO 2022 yang tersaji pada laporan operasional Tahun 2022, yaitu sebesar Rp50.904.962.933,34.

##### 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

*dalam rupiah*

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp17.107.964.373,28)	Rp26.036.829.129,10

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022 pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar (Rp17.107.964.373,28) dari tahun 2021 sebesar Rp26.036.829.129,10 merupakan nilai total dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun 2022 yang berasal dari akun lain-lain seperti pada tabel berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 5.6.1. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar***dalam rupiah*

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2022</b>	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2021</b>
1	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Lainnya	0,00	7.620.396,41
2	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	5.508.409,32	(8.491.999,37)
3	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Pengembalian Pokok Dana Bergulir	7.186.136,00	0,00
4	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Penyisihan Pajak Daerah	(3.398.906,70)	0,00
5	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Mebel	369.350.000,00	0,00
6	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pendingin	422.959.891,52	0,00
7	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	115.636.200,00	0,00
8	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pemadam Kebakaran	18.750.000,00	0,00
9	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Personal Computer	74.912.000,00	0,00
10	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Personal Computer	21.875.000,00	0,00
11	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Gedung Kantor	1.431.579.899,00	6.331.949.647,33
12	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Bangunan Kesehatan	(948.571.091,52)	0,00
13	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Rumah Negara Golongan I	(1.431.579.899,00)	0,00
14	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Mebel	(147.740.000,00)	0,00
15	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Alat Pendingin	(169.183.952,00)	0,00
16	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(46.432.481,00)	19.719.628.998,59
17	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	(7.500.000,00)	0,00
18	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(11.889.000.106,00)	0,00
19	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	(1.407.664.170,00)	0,00
20	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	(2.064.425.499,00)	0,00
21	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(926.640.000,00)	0,00
22	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	(819.720.000,00)	0,00
23	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Personal Computer	(72.912.000,00)	0,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	Uraian	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2022	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2021
24	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(51.312.425,00)	0,00
25	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(360.143.813,00)	0,00
26	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	38.934.871,10	0,00
27	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	360.143.813,00	0,00
28	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya	0,00	0,00
29	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lain-lain	(937.496.484,00)	(3.200.000,00)
30	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Lain-Lain	872.175.570,00	0,00
31	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	21.573.608	(10.677.913,86)
32	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering	2,00	0,00
33	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	199.691.000,00	0,00
34	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Jalan-Jalan Kabupaten	15.900.000,00	0,00
35	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.995.000,00	0,00
36	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	189.585.054,00	0,00
		<b>(17.107.964.373,28)</b>	<b>26.036.829.129,10</b>

Penjelasan lain-lain pada tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang sebesar Rp5.508.409,32 berasal dari koreksi bertambah sebesar Rp7.565.853,32 dan mengalami koreksi berkurang sebesar Rp2.057.444,00.
2. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Pengembalian Pokok Dana Bergulir. Koreksi sebesar Rp7.186.136,00 merupakan koreksi atas penyeteroran pokok dana bergulir yang sudah disisihkan 100%
3. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Daerah sebesar (Rp3.398.906,70).
4. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Mebel sebesar Rp369.350.000,00 pada Dinas Kesehatan.
5. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pendingin sebesar Rp422.959.891,52 pada Dinas Kesehatan.
6. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp115.636.200,00 pada Dinas Kesehatan.
7. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp18.750.000,00 pada Dinas Kesehatan.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

8. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Personal Computer sebesar Rp74.912.000,00 pada Dinas Kesehatan.
9. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Personal Komputer sebesar Rp21.875.000,00 pada Dinas Kesehatan.
10. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Gedung Kantor karena terjadi mutasi gedung dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Bangunan Kesehatan terhadap Puskesmas Pembantu Pada yang diserahkan ke Desa Pada.
12. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Rumah Negara Golongan I karena terjadi mutasi berkurang gedung ke Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
13. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Mebel sebesar (Rp147.740.000,00) pada Dinas Kesehatan.
14. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Alat Pendingin sebesar (Rp169.183.952,00) pada Dinas Kesehatan.
15. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) akibat kekeliruan kodefikasi tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan dari nilai sebesar Rp88.999 menjadi sebesar Rp267.000 dan pada Dinas Kesehatan.
16. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran sebesar (Rp7.500.000,00) pada Dinas Kesehatan.
17. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan terhadap Alkes tahun pengadaan 2012 yang dihibahkan pada tahun 2022 sebesar Rp11.885.447.970 dan koreksi Bertambah dan berkurang pada Dinas Lingkungan Hidup masing-masing sebesar Rp13.320.500,00 dan Rp9.768.364,00.
18. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi Dinas Kesehatan terhadap Alkes tahun pengadaan 2012 yang dihibahkan pada tahun 2022.
19. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Dinas Kesehatan terhadap Alkes tahun pengadaan 2012 yang dihibahkan pada tahun 2022
20. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum Dinas Kesehatan terhadap Alkes tahun pengadaan 2012 yang dihibahkan pada tahun 2022
21. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi Dinas Kesehatan terhadap Alkes tahun pengadaan 2012 yang dihibahkan pada tahun 2022
22. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer akibat kekeliruan penempatan kode barang pada Dinas Kesehatan dan Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer akibat kesalahan kodefikasi pada Sekretariat Daerah dari nilai sebesar Rp748.502,00 menjadi sebesar Rp2.806.850,00.
23. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer pada Dinas Kesehatan.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

---

24. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan atas gedung yang dimutasikan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
25. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp38.934.871,12 diperoleh dari koreksi bertambah nilai sebesar Rp613.122.972,65 dan koreksi berkurang sebesar Rp574.188.101,53.
26. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I karena terjadi mutasi berkurang gedung ke Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan.
27. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Rusak Berat/Usang akibat penjualan kendaraan pada
  - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp227.434.500;
  - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp63.670.000;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp76.749.750;
  - d. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp383.681.100;
  - e. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp40.235.034;
  - f. Sekretariat Daerah sebesar Rp125.879.100; dan
  - g. Kecamatan Lebatukan sebesar Rp19.847.000.
28. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Lain-Lain
  - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp224.475.784;
  - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp18.762.552;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp73.210.102;
  - d. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp376.334.668;
  - e. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp37.828.386;
  - f. Sekretariat Daerah sebesar Rp124.552.368; dan
  - g. Kecamatan Lebatukan sebesar Rp17.011.710.
29. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Lewoleba sebesar Rp21.573.608 diperoleh dari koreksi bertambah sebesar Rp3.642.732,00 serta koreksi berkurang sebesar Rp25.216.340,00.
30. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan.
31. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga karena pembayaran utang diakui sebagai penambah aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan.
32. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Jalan-Jalan Kabupaten karena terdapat Koreksi Nilai Utang yang Menambah Nilai Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

33. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten karena terdapat Koreksi Nilai Utang yang Menambah Nilai Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
34. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku karena terdapat Koreksi Nilai Utang yang Menambah Nilai Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.6.2.**

**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar masing-masing SKPD**

*dalam rupiah*

No	SKPD	2022	2021
1	Dinas Pendidikan	(3.136.717,00)	-36.908.779.658,96
2	Dinas Kesehatan	(17.527.802.724,90)	-3.539.084.568,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	21.573.608,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(8.931.781.746,00)	42.304.180.861,58
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	(8.058.848.998,00)	-6.021.381.885,73
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	454.014.396,41
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(3.539.648,00)	-28.408.583,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	97.636.719,00
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	(7.346.432,00)	23.886.414,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	(12.552.136,00)	-11.500.000,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	28.148.483.780,78
12	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	1.071.436.086,00	-340.955.681,00
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	-6.915.284,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan	199.691.000,00	16.453.144.634,00
15	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	142.991.364,00	-445.364.281,33
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	(1.071.436.086,00)	-5.945.185.603,00
17	Dinas Perikanan	0,00	-95.800.000,00
18	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	0,00	-829.413.629,00
19	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	5.647.944,00
20	Sekretariat Daerah	16.593.739.720,00	-11.227.323.443,28
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	-9.012.438,00
22	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	9.295.638,62	-633.101.317,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	SKPD	2022	2021
23	Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.125.660.946,00
24	Nubatukan	472.587.988,00	2.156.808.482,00
25	Lebatukan	(2.835.290,00)	0,00
26	Omesuri	0,00	722.007.317,00
27	Buyasuri	0,00	-2.200.000,00
28	Atadei	0,00	-29.288.000,00
29	Ile Ape	0,00	627.564.006,00
30	PPKD	0,00	-8.491.999,37
	<b>Jumlah</b>	<b>(17.107.964.373,28)</b>	<b>26.036.829.129,10</b>

#### 4. Ekuitas Akhir

*dalam rupiah*

Ekuitas Akhir	Tahun 2022	Tahun 2021
	<b>Rp1.528.154.631.095,11</b>	<b>Rp1.494.357.632.535,05</b>

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.528.154.631.095,11 dan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.494.357.632.535,05. Ekuitas akhir ini merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar





**BAB VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

**6.1. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah**

**6.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

**6.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

Secara Geografis, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan Selat Merica Kabupaten Alor, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Boleng, Selat Lamakera Kabupaten Flores Timur.

Luas administrasi daratan Kabupaten Lembata adalah sebesar 1.266,40 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 9 kecamatan, 144 desa dan 7 kelurahan. Luas serta sebaran per masing-masing kecamatan tersaji pada **tabel 6.1** berikut:

**Tabel 6. 1 Nama, Luas Wilayah per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Lembata Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan dan Desa	Luas Wilayah	
			(Km <sup>2</sup> )	(%)Thd Total
1	Nagawutung	18	185,70	14,66
2	Atadei	15	150,42	11,88
3	Ile Ape	17	96,86	7,65
4	Lebatukan	17	241,90	19,10
5	Nubatukan	11 Desa 7 Kelurahan	165,64	13,08
6	Omesuri	22	161,91	12,79
7	Buyasuri	20	104,26	8,23
8	Wulandoni	15	121,44	9,59
9	Ile Ape Timur	9	38,26	3,02
<b>Jumlah</b>		<b>144 Desa 7 Kelurahan</b>	<b>1.266,40</b>	<b>100</b>

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Lembata 2017 – 2022

**6.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara morfologi Kabupaten Lembata terbagi menjadi dua satuan, yaitu satuan daerah pegunungan dan pedataran. Berikut ini tipe morfologi Kabupaten Lembata hasil bentukan aktivitas tektonik dan vulkanik dapat disajikan pada Tabel 6.2 berikut:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

**Tabel 6. 2 Tipe Morfologi Kabupaten Lembata**

Tipe Morfologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
Pedataran	33,684,17	26,59%
Pebukitan dan Gelombang	52.461,44	41,42%
Pebukitan Terjal	40.517,40	31,99%
Luas Total	126.683,01	100%

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Lembata 2017 - 202

#### 6.1.1.3. Topografi (Kemiringan Lahan, Ketinggian Lahan)

Wilayah Kabupaten Lembata pada umumnya terdiri dari tanah pegunungan/pebukitan dan sedikit dataran yang tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan. Daratan Kabupaten Lembata bagian timur mempunyai topografi yang bergunung dengan gunung berapi Uyelewon yang mempunyai ketinggian 1.080 meter dari permukaan laut. Bagian selatan dan bagian barat juga mempunyai topografi bergunung. Sedangkan bagian utara sebagian datar dan sebagian bergunung-gunung dengan gunung berapi Ile Ape (Ile Lewotolok) yang mempunyai ketinggian 1.913 meter dari permukaan laut. Sebagian besar Desa di Kabupaten Lembata merupakan desa pesisir yang jumlahnya mencapai 86 (delapan puluh enam) desa/kelurahan dan 65 (enam puluh lima) desa berada di dataran tinggi.

Adapun kemiringan lahan di Kabupaten Lembata dikelompokkan dalam 3 (tiga) kisaran antara lain :

Daerah kemiringan 0 – 15% seluas 60.220 Ha

Daerah kemiringan 16 – 40% seluas 53.110 Ha dan Daerah kemiringan > 40% seluas 12.800 Ha

#### 6.1.1.4. Geologi (Struktur dan Karakteristik Potensi)

Ragam formasi geologi yang terbentuk di Kabupaten Lembata akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik tersaji pada **tabel 6.3** berikut :

**Tabel 6. 3 Formasi Geologi Kabupaten Lembata**

Formasi Geologi	Geology Formation	Simbol Formasi Geologi	Luas (Ha)
Aluvial dan Endapan Koastal	<i>Alluvial and Coastal Deposits</i>	Qal	2.679,23
Batuan Gunung Api Tua	<i>Old Volcanic Rocks</i>	QTv3	34.972,08
Batuan Gamping Korai	<i>Corraline Limestone</i>	Ql	17.167,18
Formasi Kiro	<i>Kiro Formation</i>	Tmk1	44.345,73
Formasi Laka	<i>Laka Formation</i>	Tmpl	161,67
Formasi Nangapanda	<i>Nangapanda Formation</i>	Tmn3	15.862,84
Formasi Waihekang	<i>Waihekang Formation</i>	Tmpw1	3.250,28
Produk vulkanik muda	<i>Younger Volcanic Product</i>	Qhv3	8.224,00
<b>Luas Total</b>			<b>126.663,01</b>

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Lembata 2017 - 2022

Strategi umum di wilayah ini secara berurutan dari umur tua ke umur muda, terdiridari formasi kiro, Nangapanda, Waihekang Batuan Gunung Api Tua dan Undak Pantai.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 6.1.1.5. Hidrologi (Daerah Aliran Sungai, Sungai, Danau, Rawa, Debit)

Ditinjau dari aspek hidrologi ketersediaan air permukaan maupun air tanah sangat terbatas, karena adanya curah hujan. Potensi simpanan air tanah seluas 13.757,75 Ha pada Tabel 6.4 berikut :

**Tabel 6. 4 Formasi Hidrologi Kabupaten Lembata**

Formasi Hidrologi	Hidrology Formation	Simbol Formasi Hidrologi	Luas (Ha)
Batuan Gunung Api Tua	Old Volcanic Rocks	QTV3	34.751,66
Batu Ganping Korai	Coraline Limestone	Ql	20.129,94
Endapan Pantai	Coastal Terraces	Qct	4.954,18
Formasi Laka	LakaFormation	Tmpl	53.069,47
Daerah Air Tanah	Daerah Air Tanah	Daerah Air Tanah	13.757,75
<b>Luas Total</b>			<b>126.663,00</b>

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Lembata 2017 – 2022

**Tabel 6. 5 Formasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Lembata**

Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)
DAS Delamo	6.761,70
DAS Riang	5.304,36
DAS Maa	11.401,97
DAS Beten	9.150,08
DAS Teba	14.138,46
DAS Wewang	10.714,20
DAS Atawuwur	6.967,18
DAS Lelang	6.151,48
DAS Kima	7.642,77
DAS Bau	513,09
DAS Nongabeleng	11.155,26
DAS Pokang	7.649,57
DAS Mulankepa	14.238,59
DAS Lani	5.059,32
DAS Lema	4.815,00
<b>Luas Total</b>	<b>121.663,03</b>

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Lembata 2017 – 2022

#### 6.1.1.6. Klimatologi (Tipe, Curah Hujan, Suhu, dan Kelembaban)

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Lembata tergolong kering, berdasarkan data curah hujan, rata-rata curah hujan dalam setahun sebesar 1.286,37 mm dan rata-rata curah hujan perbulannya sebesar 107,22 mm.

Musim hujan berlangsung rata-rata bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Nopember setiap tahunnya. Suhu udara rata-rata 27°C, dengan suhu minimum 20°C dan suhu maksimum mencapai 33°C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 72% sampai 84% sedangkan kecepatan angin tergolong rendah rata-rata 8,4 knot/jam.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 6.1.1.7. Penggunaan Lahan (Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung)

##### a. Kawasan Budidaya

Penggunaan Lahan didominasi semak yaitu sebesar 93.119,25 Ha (71,43%) dan padang rumput sebesar 15.524,33 Ha (11,91%). Lahan tempat bercocok tanam dengan luas sangat sedikit yaitu tegalan 5,66%, kebun 4,28%, dan sawah 0,07%. Luas proporsi hutan dan bakau hanya sebesar 1,61% dan 1,08% sedangkan lahan terbuka berupa pasir sebesar 1,85%. Lahan pemukiman penduduk sebesar 1,43% dan sisanya sebesar 0,434% berupa sungai dan danau. Luas penggunaan lahan tersaji dalam **Tabel 6.6** sebagai berikut:

**Tabel 6. 6 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Lembata**

Tipe Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
Bakau	1.413,44	1,08
Danau	5,5	0,004
Hutan	2.095,83	1,61
Kebun	5.575,62	4,28
Pasir	2.417,82	1,85
Pemukiman	1.869,66	1,43
Rawa	178,56	0,14
Rumput	15.524,33	11,91
Sawah	95,98	0,07
Semak	93.119,25	71,43
Sungai	562,07	0,43
Tegalan	7.507,81	5,76
<b>Luas Total</b>	<b>130.365,87</b>	<b>100</b>

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Lembata 2017 - 2022

##### b. Kawasan Lindung

Luas hutan lindung disajikan pada **tabel 6.7** berikut :

**Tabel 6. 7 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Lembata**

No	Kecamatan / RPH	Kelompok Hutan / Fungsi	RTK	Luas (Ha)	%
1	Buyasuri	1 Ile Papar/HP	92	1650	3,39
		2 Ile Kodang/HP	91	1100	2,26
2	Omesuri	3 Hadakewa Labalekang/HL	130	2248	4,62
		4 Ile Kodang/HL	91	1100	2,26
		5 Natu /HP	116	300	0,62
3	Lebatukan	6 Hadakewa Labalekang/HL	130	17040	35,04
4	Ile Ape dan Ile Ape Timur	7 Ile Lewotolok / HL	90	5092,86	10,47
5	Nubatukan	8 Hadakewa Labalekang/HL	130	4172,69	8,58
6	Atadei	9 Ile Paugora /HL	135	1650	3,39
		10 Hadakewa Labalekang/HL	130	3452	7,10
7	Nagawutung	11 Ile Mahino/HL	144	1109,89	2,28
		12 Hadakewa Labalekang/HL	130	6262	12,88
		13 Ile Mingar /HL	88	3450	7,09
<b>JUMLAH</b>				<b>48627,44</b>	<b>100</b>

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Lembata 2017 – 2022



### 6.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lembata tahun 2011 – 2031 distribusi peruntukan ruang untuk fungsi budidaya digambarkan sebagai berikut

#### 6.1.2.1. Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan lahan basah dengan komoditas padi terdiri dari :

1) Kawasan tanaman pangan lahan basah irigasi berdasarkan daerah irigasi berada di kecamatan Nubatukan, Nagawutung, Wulandoni, Atadei, Lebatukan dan Omesuri

2) Kawasan tanaman pangan lahan basah tadah hujan diseluruh kecamatan.

Kawasan tanaman pangan lahan kering tersebar diseluruh kecamatan dengan komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau.

b. Pengembangan tanaman jagung tersebar diseluruh kecamatan.

c. Pengembangan tanaman padi ladang tersebar diseluruh kecamatan.

#### 6.1.2.2. Kawasan Holtikultura

Rencana pengembangan kawasan pertanian holtikultura terdiri dari kawasan tanaman sayur- sayuran direncanakan di dataran tinggi Kecamatan Atadei, dan Nubatukan dan buah-buahan tersebar diseluruh kecamatan.

#### 6.1.2.3. Kawasan Perkebunan

Rencana pengembangan kawasan perkebunan, adalah kawasan perkebunan diseluruh kecamatan; kelapa diprioritaskan di Kecamatan Nubatukan, Nagawutung, Lebatukan, Wulandoni, Atadei, Omesuri dan Buyasuri.

#### 6.1.2.4. Kawasan Peternakan

Rencana pengembangan kawasan peternakan, terdiri atas :

6.1.2.4.1. Kawasan budi daya ternak besar berupa sapi potong, tersebar diseluruh kecamatan.

6.1.2.4.2. Kawasan budi daya ternak kecil berupa babi, kambing, tersebar diseluruh kecamatan

6.1.2.4.3. Kawasan budi daya ternak unggas berupa ayam potong, ayam bura, itik, tersebar diseluruh kecamatan

#### 6.1.2.5. Kawasan Perikanan

Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan terdiri dari :

6.1.2.5.1. Kawasan Perikanan tangkap terdiri dari :

6.1.2.5.1.1. Budi daya ikan laut tersebar dipesisir pulau Lembata khususnya Teluk Lewoleba, Teluk Nuhanera, dan Teluk Lewolein

6.1.2.5.1.2. Rumput laut di Kecamatan Nagawutung, dan Nubatukan

6.1.2.5.2. Kawasan budi daya perikanan darat tersebar diseluruh kecamatan

6.1.2.5.3. Kawasan minapolitan perikanan budidaya di kecamatan Nubatukan, Ile Ape, Ile Ape Timur, Lebatukan, Nagawutung, Omesuri, Buyasuri dan Wulandoni.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

#### 6.1.2.6. Kawasan Pertambangan

Peruntukan Kawasan Pertambangan :

- 6.1.2.6.1. Panas Bumi di Kecamatan Atadei
- 6.1.2.6.2. Bahan Galian Mineral Non Logam dan Batuan tersebar diseluruh kecamatan

#### 6.1.2.7. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan Kawasan Industri, terdiri dari :

- 6.1.2.7.1. Kawasan Industri Besar terdapat di Kecamatan Ile Ape
- 6.1.2.7.2. Kawasan Industri Menengah di Kecamatan Nubatukan
- 6.1.2.7.3. Kawasan Industri Kecil Menengah dan Rumah Tangga di seluruh kecamatan.

#### 6.1.2.8. Kawasan Pariwisata

Pengembangan Kawasan Pariwisata :

- 6.1.2.8.1. Kawasan Pariwisata Alam
  - 6.1.2.8.1.1. Teluk Nuhanera
  - 6.1.2.8.1.2. Pantai Wowong – Tanjung Leur
  - 6.1.2.8.1.3. Pantai Waijarang – Bour – Mingar
  - 6.1.2.8.1.4. Pesisir Utara Ile Ape (Kolipadan, Pasir Putih Meko, dan Pantai Kasang diatas Lewotolok)
  - 6.1.2.8.1.5. Pegunungan Ile Lewotolok dan Batutara
  - 6.1.2.8.1.6. Pariwisata Tirta Lodovavo Atawuwur dan Hidalabi
  - 6.1.2.8.1.7. Dapur Alam di Desa Atakore - Atadei
- 6.1.2.8.2. Kawasan Pariwisata Budaya Desa Lamalera A, Lamalera B, Lewohala, Jontona, Leuwayang, Lamanunang, Atakore, Lusilame, Wakio, Benihading.
- 6.1.2.8.3. Kawasan Wisata Rohani
  - 6.1.2.8.3.1. Wisata Rohani Doa Watomiten di Bour Nubatukan
  - 6.1.2.8.3.2. Taman Doa Gua Maria Lewopenutung Desa Lusiduawutung dan Desa Lite Kecamatan Nubatukan
  - 6.1.2.8.3.3. Taman Doa P. Konrardus Beeker, SVD di Desa Watuwawer-Atakore Kecamatan Atadei
- 6.1.2.8.4. Kawasan Wisata Buatan
  - 6.1.2.8.4.1. Kawasan Bukit Cinta / Wolorpas – Nubatukan
  - 6.1.2.8.4.2. Agro wisata KEK Wade yang dalam tahun 2021 meraih Juara II Nasional
  - 6.1.2.8.4.3. Wisata Kuliner Pantai Hadakewa, Pantai Lewolein – Lebatukan
  - 6.1.2.8.4.4. Wisata Pantai Roma – Buyasuri



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 6.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Pulau Lembata terletak pada pusat kegiatan tektonik dari busur magmatic Sunda-Banda berarah Barat – Timur yang menunjukkan tempat bertemunya tiga lempeng tektonik besar (Hamilton, 1979). Pulau Lembata merupakan bagian dari sistem Busur Banda bagian dalam dan terbentuk dalam rangkaian kepulauan bergunung api aktif.

Beberapa potensi bencana yang ada antara lain, bencana alam seperti:

Gempa bumi, tsunami, gelombang pasang, erupsi gunung api, kekeringan, longsor, kebakaran padang, banjir dan abrasi.

##### 6.1.3.1. Gempa Bumi

Pulau Lembata dihimpit oleh 2 sesar aktif, yakni pertama *Timor Back Arc* disebelah selatan yang maksimum magnitudonya 7,5 M serta slip-rate 30 mm/tahun dan kedua sesar aktif Timor/Sumba normal yang maksimum manitudonya 8,3 M serta slip-rate 10 mm / tahun.

**Tabel 6. 8 Potensi Rawan Gempa Kabupaten Lembata**

Zona/Kawasan Rawan Gempa	Luas (%)	Desa/Kelurahan Kecamatan
Zona rawan Gempa Bumi Tinggi (MMI = VI –VIII)	10,60	Desa Kolipadan, Desa Kolontobo, Kelurahan Lewoleba, Lewoleba Tengah, Lewoleba Selatan, Lewoleba Utara, Lewoleba Barat, Lewoleba Timur, Selandoro, Watokobu, Duawutun, Pasir Putih, Wailolong, Tobotani, Bean Dan Lodotodokowa.
Zona rawan Gempa Bumi Menengah (MMI=VIII-VIII) terjadi kerusakan pada bangunan kuat, pengemudi kendaraan terganggu	1,99	Desa Amakaka, Leudanung, dan Balauring
Zona rawan Gempa Bumi Rendah dan Sangat Rendah	87,41	Seluruh wilayah yang tidak termasuk kedalam zona
<b>Luas Total</b>	<b>100</b>	

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Lembata 2017 – 2022

##### 6.1.3.2. Tsunami

Kondisi ancaman bahaya tsunami di Kabupaten Lembata dibagi menjadi zona rawan tsunami dan zona tidak rawan tsunami. Zona rawan tsunami sebanyak 49,67% yang terdiri dari 7 (tujuh) zona sebagai berikut :

- Zona I yang meliputi Bour, Wuakerong, Baopukang, Baobolak, Pasir Putih, Duawutun, Penikenek, Warawatung, dan Lusiduawutung.
- Zona II yang meliputi Lamalera B, Wulandoni, Pantai Harapan, Atakera, Leworaja dan Alap Atadei. Zona II ini termasuk zona tsunami akibat gempa vulkanik hobal.
- Zona III yang meliputi Watodiri, Todanara, Jontona, Lamawolo dan Lamatoka.
- Zona IV yang meliputi Baolaliduli, Lamaau, Aulesa, Lamagute, Napasabok, Bungamuda, Amakaka, Tanjung Batu, Lamawara, dan Waowala.
- Zona V yang meliputi Muruona, Laranwutun, Kolontobo, Riangbao, Dulitukan, Tagawiti, Beutaran, Palilolon, dan Kolipadan.
- Zona VI yang meliputi Merdeka, Hadakewa, Lerahinga, Waienga, Tapolangu, dan Dikesare.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- g. Zona VII yang meliputi Wailolong, Lebewala, Balauring, Dolulolong, Roma, Leuwayan, Normal, Normal I, Kalikur, Bareng, Leuwohung, Mampir, Buriwutung, Umaleu, KalikurWL, Rumang, Tobotani, Bean, dan Nilanapo.

Untuk zona tidak rawan tsunami sebesar 50,33% yang tidak mencakup keseluruhan lokasi pada zona rawan tsunami diatas.

#### 6.1.3.3. Erupsi Gunung Berapi

Gunung Api di Kabupaten Lembata umumnya adalah akibat gaya tektonik, sehingga dapat mempengaruhi aktivitas gunung berapi tersebut. Kabupaten Lembata terdapat 4 (empat) gunung berapi aktif, yaitu : Ile Lewotolok, Ile Batutara, Ile Werung, dan Ile Hobal. 1 (satu) gunung api tipe B yaitu Ile Labalekang. Ancaman erupsi gunung berapi dibagi menjadi :

- a. Gunung Ile Lewotolok



*Gunung Api Ile Lewotolok di Kab. Lembata, NTT saat Erupsi malam hari tanggal 29 Nopember 2020.*

Gunung Ile Lewotolok atau dalam keseharian masyarakat menyebutnya dengan Ile Ape pada akhir tahun 2020 mengalami erupsi.

Gunung Ile Lewotolok terbagi menjadi :

- Kawasan Rawan bencana III 3,97%
- Kawasan Rawan bencana II dengan luas 5,30%
- Kawasan Rawan bencana I dengan luas 3,97%
- Kawasan diluar KRB I,II, dan III dengan luas 86,76%

- b. Gunung Ile Werung

Gunung Ile Werung terbagi menjadi :

- Kawasan Rawan bencana III
- Kawasan Rawan bencana II dengan luas 2,65%
- Kawasan Rawan bencana I dengan luas 3,315%
- Kawasan diluar KRB I,II, dan III dengan luas 94,04%



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 6.1.3.4. Kekeringan

Secara geografis letak Kabupaten Lembata berada pada belahan bumi dengan iklim *monsoon tropis* yang sangat sensitif terhadap anomaly iklim. *El-Nino Southern Oscillation (ENSO)*. Akibatnya terdapat 76,82% kawasan dengan tingkat kekeringan tinggi dan 23,18% kawasan dengan tingkat kekeringan rendah.

Faktor penyebab kekeringan di Kabupaten Lembata adalah :

1. Adanya penyimpangan iklim;
2. Adanya gangguan keseimbangan hidrologis;
3. Kekeringan agronomis.

#### 6.1.3.5. Kebakaran Lahan

Ancaman kebakaran tanah di Kabupaten Lembata mencakup seluruh wilayah/daerah padang yang rawan kebakaran. Kebakaran terjadi hampir setiap tahun diseluruh wilayah Kabupaten Lembata.

#### 6.1.3.6. Banjir

Daerah rawan banjir Kabupaten Lembata seluas 33,11% sedangkan daerah yang tidak rawan banjir seluas 66,89% yang tersebar hampir setiap kecamatan. Resiko bencana banjir terjadidi 6 (enam) kecamatan meliputi : Kecamatan Nagawutung, Wulandoni, Atadei, Lebatukan, Nubatukan dan Omesuri.

#### 6.1.3.7. Abrasi

Ancaman abrasi yang ada di Kabupaten Lembata tersebar diseluruh wilayah pesisir. Resiko bencana abrasi pantai terjadi di 5 (lima) kecamatan meliputi : Kecamatan Nagawutung, Wulandoni, Ile Ape Timur, Lebatukan dan Omesuri.

#### 6.1.3.8. Longsor

Potensi Longsor di Kabupaten Lembata dominan dapat dikategorikan berada pada tingkat rendah.

Berikut sebaran potensi longsor di Kabupaten Lembata tersaji sebagai berikut :

**Tabel 6. 9 Potensi Longsor di Kabupaten Lembata**

Tingkat Potensi Gerakan Tanah	Luas (Ha)
Potensi Gerakan Tanah Rendah	110.034,40
Potensi Gerakan Tanah Sedang	14.398,77
Potensi Gerakan Tanah Tinggi	2.229,83
<b>Luas Total</b>	<b>126.663,00</b>

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Lembata 2017 - 2022

#### 6.1.4. Demografi

##### 6.1.4.1. Penduduk dan Ketenagakerjaan

- a. Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk, yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka yaitu Tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Selain Sensus Penduduk, untuk menjembatani ketersediaan data kependudukan diantara dua periode sensus, Badan Pusat Statistik melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). SUPAS telah dilakukan



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

sebanyak lima kali yaitu tahun 1976, 1985, 1995, 2005, dan 2015. Selain Sensus Penduduk dan SUPAS, data penduduk juga diperoleh dari Proyeksi Penduduk serta Registrasi Penduduk yang dilakukan di masing-masing desa. Dalam Sensus Penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia, termasuk warga negara asing, kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya. Berbeda dengan pelaksanaan Sensus Penduduk sebelumnya, Sensus Penduduk 2010 melaksanakan metode pencacahan lengkap dengan jumlah variabel yang lebih banyak. Sensus Penduduk 2010 dilakukan serentak diseluruh tanah air mulai tanggal 1 – 31 Mei 2010. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden. Cara pencacahan yang dipakai dalam sensus penduduk adalah kombinasi antara *de jure* dan *de facto*. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dipakai cara *de jure De facto*, yaitu dicacah ditempat dimana mereka ditemukan petugas sensus, biasanya pada malam hari sensus yang termasuk penduduk tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia dan Asing, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap tetapi sedang bertugas keluar wilayah lebih dari enam bulan dan bermaksud menetap disana dicacah ditempat tersebut. Selain itu, seseorang atau keluarga yang pindah kesuatu tempat kurang dari enam bulan tapi bermaksud untuk tinggal menetap dicacah ditempat tersebut.

- b. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- c. Rata-rata pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun dalam jangka waktu tertentu.
- d. Kepadatan Penduduk adalah banyaknya penduduk per km persegi
- e. Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.
- f. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan makanan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.
- g. Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal disuatu rumah tangga, baik yang berada dirumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.
- h. Rata-rata Anggota Rumah Tangga adalah angka yang menunjukkan jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga.
- i. Penduduk Usia Kerja adalah Penduduk yang berumur 15 tahun keatas.
- j. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

- k. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.
- l. Jumlah Jam Kerja seluruhnya adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal lain diluar pekerjaan).
- m. Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) dalam 1 digit.
- n. Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan.
- o. Pekerja Tak Dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji.
- p. Upah Buruh adalah pendapatan yang diterima buruh dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan lainnya sejauh diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjanganlainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR),tunjangan bersifat tahunan, kuartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk Natura.

**Tabel 6. 10 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata Desember 2022**

Kecamatan	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Nagawutung	7,45	56,1	90,33
Wulandoni	6,55	75,4	88,67
Atadei	5,53	51,4	89,21
Ile Ape	9,65	139,3	87,98
Ile Ape Timur	4,33	158,0	88,23
Lebatukan	7,17	41,4	91,74
Nubatukan	29,82	251,7	97,22
Omesuri	13,92	120,2	93,83
Buyasuri	15,58	208,8	93,63
<b>Lembata</b>	<b>100,00</b>	<b>110,4</b>	<b>92,94</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lembata Dalam Angka 2022



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 6.1.4.2. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

- Tidak/Belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah atau belum pernah aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal.
- Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Bagi mahasiswa yang masih cuti dianggap masih bersekolah.
- Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan.
- Tamat Sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan Tanda Tamat Belajar /Ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.
- Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dengan suatu aksara tertentu.
- Klinik Keluarga Berencana adalah suatu tempat dimana dapat diperoleh pelayanan medis KB. Tempat ini bisa berada di Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Kesehatan Ibu Anak (BKIA), tempat-tempat lainnya yang ditentukan dan dalam bentuk Tim Medis Keliling (TMK).
- Luas Lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Air Leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber Air ini biasanya diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM.

#### 6.1.5. Pendidikan

**Tabel 6. 11 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata Desember 2021/2022 dan 2022/2023**

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	2	2	7	9	9	11
Wulandoni	1	1	11	12	12	13
Atadei	1	1	4	4	5	5
Ile Ape	3	3	6	6	9	9
Ile Ape Timur	2	2	5	5	7	7
Lebatukan	2	2	8	12	10	14
Nubatukan	2	2	10	11	12	13
Omesuri	2	2	6	7	8	9
Buyasuri	1	1	8	8	9	9
<b>Lembata</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>65</b>	<b>74</b>	<b>81</b>	<b>90</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Lanjutan Tabel 6.11

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	6	13	24	24	30	37
Wulandoni	5	6	32	33	37	39
Atadei	3	3	10	11	13	14
Ile Ape	12	17	20	18	32	35
Ile Ape Timur	6	7	11	15	17	22
Lebatukan	9	10	24	34	33	44
Nubatukan	16	17	38	42	54	59
Omesuri	7	11	15	19	22	30
Buyasuri	3	6	19	21	22	27
<b>Lembata</b>	<b>67</b>	<b>90</b>	<b>193</b>	<b>217</b>	<b>260</b>	<b>307</b>

Lanjutan Tabel 6.11

Kecamatan	Murid/Siswa					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	45	53	148	164	193	217
Wulandoni	16	25	140	138	156	163
Atadei	23	20	79	68	102	88
Ile Ape	75	57	161	145	236	202
Ile Ape Timur	47	48	98	95	145	143
Lebatukan	63	52	111	189	174	241
Nubatukan	105	103	326	404	431	507
Omesuri	69	62	180	186	249	248
Buyasuri	10	29	255	247	265	276
<b>Lembata</b>	<b>453</b>	<b>449</b>	<b>1498</b>	<b>1636</b>	<b>1951</b>	<b>2085</b>

Tabel 6. 12 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Dibawah Kementerian Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata Desember 2021/2022 dan 2022/2023

Kecamatan	Data					
	Sekolah		Guru		Murid	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	2	2	5	6	42	57
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	1	1	2	2	28	26
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	2	3	9	11	146	170
Omesuri	7	7	22	24	215	201
Buyasuri	9	10	24	29	307	345
<b>Lembata</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>738</b>	<b>799</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 6. 13 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata Desember 2021/2022 dan 2022/2023**

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	10	10	7	7	17	17
Wulandoni	9	9	7	7	16	16
Atadei	11	12	9	9	20	21
Ile Ape	8	8	6	6	14	15
Ile Ape Timur	4	4	4	4	8	8
Lebatukan	10	10	9	9	19	19
Nubatukan	21	21	6	6	27	27
Omesuri	13	13	5	5	18	18
Buyasuri	15	15	5	5	20	20
<b>Lembata</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>159</b>	<b>160</b>

**Lanjutan Tabel 6.13**

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	90	96	56	53	146	149
Wulandoni	69	76	59	53	128	129
Atadei	69	66	52	52	121	118
Ile Ape	81	77	55	47	136	124
Ile Ape Timur	44	45	33	32	77	77
Lebatukan	84	90	70	72	154	162
Nubatukan	313	316	85	81	398	397
Omesuri	105	128	43	46	148	174
Buyasuri	148	147	46	45	194	192
<b>Lembata</b>	<b>1003</b>	<b>1041</b>	<b>499</b>	<b>481</b>	<b>1502</b>	<b>1522</b>

**Lanjutan Tabel 6.13**

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	754	763	553	520	1307	1283
Wulandoni	599	578	599	570	1198	1148
Atadei	442	399	467	421	909	820
Ile Ape	829	774	562	547	1391	1321
Ile Ape Timur	299	298	439	379	738	677
Lebatukan	563	505	607	556	1170	1061
Nubatukan	3813	3687	1325	1232	5138	4919
Omesuri	1356	1331	612	573	1968	1904
Buyasuri	1516	1455	543	513	2059	1968
<b>Lembata</b>	<b>10171</b>	<b>9790</b>	<b>5707</b>	<b>5311</b>	<b>15878</b>	<b>15101</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 6. 14 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah Kementerian Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata, Desember 2021/2022 dan 2022/2023**

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	1	1	1	1
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	1	1	1	1
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	0	0	1	1	1	1
Omesuri	1	1	8	8	9	9
Buyasuri	1	1	8	8	9	9
<b>Lembata</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

**Lanjutan Tabel 6.14**

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	7	8	7	8
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	10	17	10	17
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	0	0	27	29	27	29
Omesuri	18	22	62	75	80	97
Buyasuri	22	25	85	97	107	122
<b>Lembata</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>191</b>	<b>226</b>	<b>231</b>	<b>273</b>

**Lanjutan Tabel 6.14**

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	71	64	71	64
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	79	96	79	96
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	0	0	500	503	500	503
Omesuri	141	139	658	681	799	820
Buyasuri	176	178	762	732	938	910
<b>Lembata</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>2070</b>	<b>2076</b>	<b>2387</b>	<b>2393</b>

Sumber : Kementerian Agama, Data Semester



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

**Tabel 6. 15 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata, Desember 2021/2022 dan 2022/2023**

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	4	4	1	1	5	5
Wulandoni	4	4	1	1	5	5
Atadei	4	4	0	0	4	4
Ile Ape	3	3	2	2	5	5
Ile Ape Timur	3	3	0	0	3	3
Lebatukan	5	5	1	1	6	6
Nubatukan	5	5	6	6	11	11
Omesuri	6	6	1	1	7	7
Buyasuri	4	4	1	2	5	6
<b>Lembata</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>52</b>

**Lanjutan Tabel 6.15**

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	55	55	9	7	64	62
Wulandoni	46	51	12	12	58	63
Atadei	46	53	0	0	46	53
Ile Ape	53	52	27	23	80	75
Ile Ape Timur	38	35	0	0	38	35
Lebatukan	67	69	11	10	78	79
Nubatukan	134	140	112	115	246	255
Omesuri	111	112	13	9	124	121
Buyasuri	78	79	15	20	93	99
<b>Lembata</b>	<b>628</b>	<b>646</b>	<b>199</b>	<b>196</b>	<b>827</b>	<b>842</b>

**Lanjutan Tabel 6.15**

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	559	527	53	49	612	576
Wulandoni	348	352	149	143	497	495
Atadei	415	461	0	0	415	461
Ile Ape	498	460	135	121	633	581
Ile Ape Timur	362	306	0	0	362	306
Lebatukan	437	449	171	154	608	603
Nubatukan	1498	1490	1239	1245	2737	2735
Omesuri	837	816	135	75	972	891
Buyasuri	588	574	214	228	802	802
<b>Lembata</b>	<b>5542</b>	<b>5435</b>	<b>2096</b>	<b>2015</b>	<b>7638</b>	<b>7450</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 6. 16 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanaiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata, Desember 2021/2022 dan 2022/2023**

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	2	2	2	2
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	1	1	0	0	0	1
Omesuri	0	0	1	1	1	1
Buyasuri	2	2	1	1	3	3
<b>Lembata</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**Lanjutan Tabel 6.16**

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	22	24	22	24
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	35	41	0	0	35	41
Omesuri	0	0	20	21	20	21
Buyasuri	61	62	18	18	79	80
<b>Lembata</b>	<b>96</b>	<b>103</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>156</b>	<b>166</b>

**Lanjutan Tabel 6.16**

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	114	110	114	110
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	330	353	0	0	330	353
Omesuri	0	0	213	252	213	252
Buyasuri	622	630	243	170	865	800
<b>Lembata</b>	<b>952</b>	<b>983</b>	<b>570</b>	<b>532</b>	<b>1522</b>	<b>1515</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 6. 17 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata, Desember 2021/2022 dan 2022/2023**

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	1	1	0	0	1	1
Wulandoni	1	1	0	0	1	1
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	1	1	1	1	2	2
Ile Ape Timur	1	1	0	0	1	1
Lebatukan	1	1	0	0	1	1
Nubatukan	2	2	4	4	6	6
Omesuri	1	1	0	0	1	1
Buyasuri	1	1	0	0	1	1
<b>Lembata</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

**Lanjutan Tabel 6.17**

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	19	24	0	0	19	24
Wulandoni	18	17	0	0	18	17
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	28	30	10	9	38	39
Ile Ape Timur	23	25	0	0	23	25
Lebatukan	21	24	0	0	21	24
Nubatukan	104	116	73	85	177	201
Omesuri	26	34	0	0	26	34
Buyasuri	16	19	0	0	16	19
<b>Lembata</b>	<b>255</b>	<b>289</b>	<b>83</b>	<b>94</b>	<b>338</b>	<b>383</b>

**Lanjutan Tabel 6.17**

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	323	321	0	0	323	321
Wulandoni	155	165	0	0	155	165
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	234	233	72	58	306	291
Ile Ape Timur	112	103	0	0	112	103
Lebatukan	202	201	0	0	202	201
Nubatukan	1671	1691	995	1021	2666	2712
Omesuri	450	460	0	0	450	460
Buyasuri	195	225	0	0	195	225
<b>Lembata</b>	<b>3342</b>	<b>3399</b>	<b>1067</b>	<b>1079</b>	<b>4409</b>	<b>4478</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 6. 18 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata, Desember 2021/2022 dan 2022/2023**

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	1	1	0	0	1	1
Atadei	1	1	0	0	1	1
Ile Ape	1	1	0	0	1	1
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	1	1	4	4	5	5
Omesuri	0	0	0	0	0	0
Buyasuri	1	1	0	0	1	1
<b>Lembata</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

**Lanjutan Tabel 6.18**

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	12	14	0	0	12	14
Atadei	18	19	0	0	18	19
Ile Ape	39	42	0	0	39	42
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	48	50	92	98	140	148
Omesuri	0	0	0	0	0	0
Buyasuri	21	19	0	0	21	19
<b>Lembata</b>	<b>138</b>	<b>144</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>230</b>	<b>242</b>

**Lanjutan Tabel 6.18**

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	86	105	0	0	86	105
Atadei	43	51	0	0	43	51
Ile Ape	458	378	0	0	458	378
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	429	408	981	934	1410	1342
Omesuri	0	0	0	0	0	0
Buyasuri	201	215	0	0	201	215
<b>Lembata</b>	<b>1217</b>	<b>1157</b>	<b>981</b>	<b>934</b>	<b>2198</b>	<b>2091</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 6. 19 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata, Desember 2021/2022 dan 2022/2023**

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	0	0	0	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	0	0	1	1	1	1
Omesuri	0	0	0	0	0	0
Buyasuri	1	1	1	1	2	2
<b>Lembata</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Lanjutan Tabel 6.19**

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	0	0	0	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	0	0	26	26	26	26
Omesuri	0	0	0	0	0	0
Buyasuri	65	69	4	6	69	75
<b>Lembata</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>95</b>	<b>101</b>

**Lanjutan Tabel 6.19**

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Nagawutung	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	0	0	0	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	0	0	224	208	224	208
Omesuri	0	0	0	0	0	0
Buyasuri	578	566	74	78	652	644
<b>Lembata</b>	<b>578</b>	<b>566</b>	<b>298</b>	<b>286</b>	<b>876</b>	<b>852</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 6. 20 Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas Sekolah di Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Lembata, Desember 2020-2021**

Kecamatan	SD		SMP		SMA		SMK	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Nagawutung	16	15	5	5	1	1	0	0
Wulandoni	14	14	5	5	1	1	1	1
Atadei	14	15	4	4	0	0	1	1
Ile Ape	13	13	5	6	1	2	1	1
Ile Ape Timur	7	8	3	3	1	2	0	0
Lebatukan	17	16	6	6	1	1	0	0
Nubatukan	17	17	7	7	5	4	4	4
Omesuri	21	20	9	8	1	1	0	0
Buyasuri	19	18	8	6	2	1	1	1
<b>Lembata</b>	<b>138</b>	<b>136</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**6.1.6. Kesehatan****Tabel 6. 21 Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Sarana Kesehatan di Kecamatan Kabupaten Lembata, Desember 2020 -2021**

Kecamatan	Rumah Sakit		Poliklinik		Puskesmas		Puskesmas Pembantu		Apotek	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Nagawutung	0	0	0	1	1	1	5	3	1	0
Wulandoni	0	0	0	0	1	1	4	4	0	0
Atadei	0	0	1	1	1	1	4	4	0	0
Ile Ape	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0
Lebatukan	0	1	0	0	1	1	5	6	0	0
Nubatukan	2	3	0	0	1	2	1	1	7	7
Omesuri	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1
Buyasuri	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1
<b>Lembata</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>9</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 6.1.7. Agama dan Sosial Lainnya

**Tabel 6. 22 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Yang Dianut di Kabupaten Lembata, Tahun 2022**

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Nagawutung	1433	0	10221	0	0	0
Wulandoni	1765	0	7082	0	0	0
Atadei	0	0	10322	0	0	0
Ile Ape	3140	0	9005	0	0	0
Ile Ape Timur	281	15	5035	0	0	0
Lebatukan	601	67	8877	0	0	0
Nubatukan	9428	2191	27500	56	0	0
Omesuri	11687	81	11505	0	0	0
Buyasuri	13199	0	12202	0	0	0
<b>Lembata</b>	<b>41534</b>	<b>2354</b>	<b>101749</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Kantor Kementerian Dalam Negeri Kabupaten Lembata.

**Tabel 6. 23 Jumlah Tempat Peribadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata, Tahun 2022**

Kecamatan	Mesjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Wihara
Nagawutung	3	0	0	16	0	0
Wulandoni	4	0	0	14	0	0
Atadei	0	0	0	23	0	0
Ile Ape	10	0	0	10	0	0
Ile Ape Timur	1	1	1	7	0	0
Lebatukan	3	0	2	20	0	0
Nubatukan	9	2	8	22	1	0
Omesuri	27	2	1	15	0	0
Buyasuri	25	7	0	11	0	0
<b>Lembata</b>	<b>82</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>138</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Sumber : Kantor Kementerian Dalam Negeri Kabupaten Lembata.

#### 6.2. Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan

Ditingkat Kabupaten Survei Pertanian (SP) diselenggarakan oleh BPS bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten. Semua Data Pertanian diperoleh dari Dinas terkait. Data Pokok Tanaman Pangan yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas (produksi per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Tanaman Pangan mencakup padi, palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar)



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 6.2.1. Data Lahan Sawah dikumpulkan setiap tahun meliputi

##### 6.2.1.1. Sawah berpengairan teknis

Sawah berpengairan teknis dimana sawah dengan pengairan saluran terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Jaringan ini biasanya terdiri dari saluran induk, sekunder, dan tersier. Saluran Induk Sekunder serta bangunannya dibuat, dikuasai dan dipelihara pemerintah.

##### 6.2.1.2. Sawah berpengairan setengah teknis:

Sawah berpengairan setengah teknis tetapi pemerintah hanya menguasai bangunan penadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan jaringan selanjutnya tidak diukur dan dikuasai oleh pihak Pemerintah.

- Sawah berpengairan sederhana; sawah yang memperoleh pengairan yang cara pembagian dan pembuangan airnya belum teratur, walaupun pemerintah sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut (misalnya biaya pembuatan bendungannya)
- Sawah tadah hujan; sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan.
- Sawah pasang surut; sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.
- Sawah lainnya; sawah yang termasuk sawah lebak, polder, dan lainnya.

#### 6.2.2. Produksi padi mencakup padi sawah dan padi ladang

Data Produksi padi dan palawija yang dikumpulkan dalam satuan gabah kering giling (padi), pipilan kering (jagung), umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar) dan biji kering (kacang tanah dan kedelai).

**Tabel 6. 24 Luas Panen Tanaman Sayuran menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Lembata(Ha) 2021 dan 2022**

Kecamatan	Bawang Merah		Cabai Besar		Cabai Rawit		Kentang		Kubis	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Nagawutung	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Ile Ape	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Nubatukan	4	3	0	0	0	3	2	0	0	0
Omesuri	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Buyasuri	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
<b>Lembata</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 6. 25 Luas Panen Tanaman Sayuran menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Lembata(Ha) 2021 dan 2022 Lanjutan**

Kecamatan	Tomat		Bawang Putih		Bayam		Kangkung	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Nagawutung	0	0	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	0	0	2	2	4	3
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	2	2	1	0	23	18	23	24
Omesuri	3	2	0	0	3	0	15	7
Buyasuri	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Lembata</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>34</b>

**Tabel 6. 26 Produksi Tanaman Sayuran menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Lembata(Kuintal) 2021 dan 2022**

Kecamatan	Bawang Merah		Cabai Besar		Cabai Rawit		Kentang		Kubis	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Nagawutung	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Ile Ape	400	50	3	0	8	8	0	0	0	0
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	100	0	0	8	0	8	0	0	0	0
Nubatukan	140	80	0	0	0	8	6	0	0	0
Omesuri	15	12	0	0	40	0	0	0	0	0
Buyasuri	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
Lembata	715	142	3	8	64	40	6	0	0	0

**Tabel 6. 27 Produksi Tanaman Sayuran menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Lembata(Kuintal) 2021 dan 2022 lanjutan**

Kecamatan	Tomat		Bawang Putih		Bayam		Kangkung	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Nagawutung	0	0	0	0	0	0	0	0
Wulandoni	0	0	0	0	0	0	0	0
Atadei	0	0	0	0	0	0	0	0
Ile Ape	0	0	0	0	24	14	23	21
Ile Ape Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
Lebatukan	0	0	0	0	0	0	0	0
Nubatukan	20	3	5	0	54	81	54	149
Omesuri	45	5	0	0	22	0	88	14
Buyasuri	0	0	0	0	0	0	5	0
<b>Lembata</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>170</b>	<b>184</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 6. 28 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Jenis Tanaman di Kabupaten Lembata(Kuintal) 2020 - 2022**

Jenis	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Bawang Merah	24	10	5
Bawang Putih	0	1	0
Bayam	27	28	20
Buncis	0	1	0
Cabai Besar	0	1	1
Cabai Rawit	11	4	8
Kacang Merah	0	0	0
Kacang Panjang	7	12	6
Kangkung	42	43	34
Ketimun	7	10	3
Labu Siam	1	2	4
Petsai /Sawi	22	28	30
Semangka	2	3	0
Terung	12	8	16
Tomat	1	5	4
Wortel	0	0	0

**Tabel 6. 29 Produksi Tanaman Sayuran menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Lembata(Kuintal) 2020 - 2022**

Jenis	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Bawang Merah	315	715	142
Bawang Putih	0	5	0
Bayam	119	100	95
Buncis	0	4	0
Cabai Besar	0	3	8
Cabai Rawit	132	64	40
Kentang	0	6	0
Kacang Panjang	48	83	31
Kangkung	241	170	184
Ketimun	89	109	26
Kembang Kol	0,5	0	0
Labu Siam	25	15	8
Petsai /Sawi	124	107	86
Semangka	2	3	15
Terung	200	153	81
Tomat	4	65	8



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 6.2.3. Sub Sektor Perkebunan

Sub Sektor Perkebunan termasuk sub sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan turut menopang perekonomian masyarakat petani di Kabupaten Lembata. Potensi unggulan sub sektor ini adalah kelapa, kopi, kakao, jambu mente, dan pinang dengan data ini tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 6. 30 Luas Lahan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)
1	Kelapa	257,20	6.103
2	Jambu Mente	1.500,00	10.093
3	Kopi	18,38	713
4	Cengkeh	0,20	8
5	Kakao	17,22	914
2	Pinang	7,80	399
7	Pala	0,20	7
8	Kapuk	2,50	125
9	Tembakau	0,64	29

#### 6.2.4. Sub Sektor Peternakan

Jenis-jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Lembata antara lain : sapi, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras, itik, dan lainnya. Gambaran tentang perkembangan budidaya peternakan pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 6. 31 Luas Lahan Produksi Komoditas Perternakan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Sapi	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Buras	Bebek
1	Nagawutung	574	8	2.268	2	3.611	6.695	225
2	Atadei	0	50	3.003	0	15.229	9.781	98
3	Ile Ape	1.427	229	10.747	1.467	4.894	16.583	604
4	Lebatukan	945	24	1.622	0	3.728	12.732	302
5	Nubatukan	1.090	16	2.498	13	27.463	12.541	1.013
6	Omesuri	309	96	5.819	0	2.800	25.111	181
7	Buyasuri	133	942	9.636	0	4.719	34.070	218
8	Wulandoni	204	1	3.261	2	2.184	12.291	45
9	Ile Ape Timur	259	122	3.063	2	3.331	3.600	25
	<b>Jumlah</b>	<b>4.941</b>	<b>1.488</b>	<b>41.917</b>	<b>1.486</b>	<b>67.959</b>	<b>133.404</b>	<b>2.711</b>

#### 6.2.5. Sub Sektor Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Lembata memiliki perikanan dan kelautan yang sangat prospektif. Hal ini karena kita memiliki wilayah laut seluas 335.389 Ha dengan garis pantai sepanjang 492,80 Km. Pada sektor ini, pemerintah daerah mengarahkan perkembangan pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan, memajukan kualitas desa pantai melalui peningkatan dan



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

diversifikasi produksi ikan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta meningkatkan nilai ekspor. Dukungan sumber daya manusia serta kondisi sarana/prasarana sampai dengan tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 6.2.5.1. Jumlah Nelayan sebanyak 2.876 orang terdiri dari :

- a. Nelayan Penuh sebanyak 1.169 orang meningkat atau 2,19% dari kondisi tahun 2022 sebanyak 1.144 orang;
- b. Nelayan Sambilan Utama sebanyak 805 orang atau meningkat 2,81% dari kondisi tahun 2022 sebanyak 783 orang;
- c. Nelayan Sambilan Tambahan sebanyak 1.072 orang atau meningkat 17,3% dari kondisi tahun 2022 sebanyak 916 orang.

#### 6.2.5.2. Jumlah Sarana / Prasarana terdiri dari :

- a. Motor Tempel sebanyak 382 unit atau meningkat 4,09% dari kondisi tahun 2022 sebanyak 367 unit;
- b. Kapal Motor < 5 GT sebanyak 275 unit atau meningkat 4,56% dari kondisi tahun 2022 sebanyak 263 unit;
- c. Kapal Motor > 5 GT sebanyak 110 unit atau meningkat 13,40% dari kondisi tahun 2022 sebanyak 97 unit;
- d. Perahu Tanpa Motor sebanyak 1.209 unit atau meningkat 8,24% dari kondisi tahun 2022 sebanyak 1.117 unit;

Khusus budidaya rumput laut, merupakan komoditas strategis unggulan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Hal ini disebabkan karena Kabupaten Lembata memiliki Luas lahan untuk pengembangan rumput laut, seluas 5.730 Ha tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Pada tahun 2022, produksi rumput laut mencapai 2.854 ton. Sementara itu, produksi perikanan tangkap sebanyak 4.581 ton sedangkan perikanan budidaya sebanyak 2.854 ton.

#### 6.2.6. Kehutanan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.591/Menhut-II/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk didalamnya KPHL Unit IX (Lembata). Hingga saat ini potensi dibidang kehutanan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait populasi komoditas berdasarkan struktur kewilayahan untuk dapat mengetahui keunggulan komparatif masing-masing kecamatan. Wilayah KPHL Lembata secara umum memiliki kondisi hutan yang didominasi oleh fungsi Hutan Lindung (HL) seluas 48.576 Ha atau 98,77% dan fungsi Hutan Produksi (HP) seluas 605,10 ha atau 1,23%. Berikut kelompok kawasan hutan, potensi dan sebarannya:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

#### 6.2.6.1. Data Kelompok Kawasan Hutan Lindung Lintas Kecamatan Berdekatan

**Tabel 6. 32 Kelompok Kawasan Hutan Lindung Lintas Kecamatan Berdekatan**

No	Kawasan Hutan	Kecamatan	Luas	No.RTK
1	Hadakewa – Labalekang	Omesuri-Lebatukan-Nubatukan-Atadei-Nagawutung-Wulandoni	33.174,69	130
2	Ile Lewotolok	Ile Ape - Ile Ape Timur	5.092,86	90
3	Ile Kedang	Buyasuri - Omesuri	2.805,10	91
4	Ile Paugora	Atadei	1.650,00	135
5	Ile Papar	Buyasuri	1.650,00	92
6	Ile Mahino	Nagawutung	1.109,90	144
7	Ile Mingar	Nagawutung	3.450,00	88
8	Natu	Omesuri	300,00	116
	<b>Jumlah (Berdekatan)</b>	<b>Paduserasi (TGHK dan RTRWP)</b>	<b>49.232,55</b>	<b>886</b>

Sumber : KPHL Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2017

#### 6.2.6.2. Potensi dan Sebaran Potensi Hutan dalam Kawasan Hutan

**Tabel 6. 33 Potensi dan Sebaran Potensi Hutan dalam Kawasan Hutan**

No	Kawasan Hutan	Kecamatan	Potensi
1	Hadakewa - Labalekang	Omesuri-Lebatukan-Nubatukan-Atadei-Nagawutung-Wulandoni	Ipi, Kesambi, Kukung, Lendor, Kna, Kepapa, Jati, Mahoni
2	Ile Lewotolok	Ile Ape - Ile Ape Timur	Ampupu, Kesambi, Kukung, Ledor, Kna, Kepapa (Nama Lokal)
3	Ile Kedang	Buyasuri - Omesuri	Ampupu, Kesambi
4	Ile Paugora	Atadei	Ampupu
5	Ile Papar	Buyasuri	Ampupu, Kesambi
6	Ile Mahino	Nagawutung	Ampupu
7	Ile Mingar	Nagawutung	Kesambi, Kukung, Lendor, Ipi
8	Natu	Omesuri	Natu

Sumber : KPHL Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2017

**Tabel 6. 34 Hasil Kayu Non Hutan**

No	Kawasan Hutan	Kecamatan	Potensi
1	Hadakewa - Labalekang	Omesuri-Lebatukan-Nubatukan-Atadei-Nagawutung-Wulandoni	Kemiri, Asam, Bamboo, Rotan, Walet, Kutu Lak, dan Lebah Madu
2	Ile Lewotolok	Ile Ape - Ile Ape Timur	Kemiri, Asam, Bambu, Rotan, Kutu Lak
3	Ile Kedang	Buyasuri - Omesuri	Kemiri, Asam, Bambu, Walet, Kutu Lak
4	Ile Paugora	Atadei	Asam
5	Ile Papar	Buyasuri	Asam
6	Ile Mahino	Nagawutung	Ampupu
7	Ile Mingar	Nagawutung	Kemiri, Asam, Bamboo, Rotan, Walet, Kutu Lak, dan Lebah Madu
8	Natu	Omesuri	Asam, Walet

Sumber : KPHL Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2017

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA****Tabel 6. 35 Fauna**

No	Kawasan Hutan	Kecamatan	Potensi
1	Hadakewa - Labalekang	Omesuri-Lebatukan-Nubatukan-Atadei-Nagawutung-Wulandoni	Kakatua Jambul Kuning, Nuri, Kokoak, Beo, Pergam, Beo Kuning, Lalong, Tekukur
2	Ile Lewotolok	Ile Ape - Ile Ape Timur	Beo, Nuri, Tekukur
3	Ile Kedang	Buyasuri - Omesuri	Beo, Beo Kuning, Nuri, Tekukur, Kokoak
4	Ile Paugora	Atadei	Nuri, Kokoak
5	Ile Papar	Buyasuri	Nuri, Kokoak
6	Ile Mahino	Nagawutung	Nuri, Kokoak
7	Ile Mingar	Nagawutung	Nuri, Kokoak
8	Natu	Omesuri	Nuri, Kokoak

Sumber : KPHL Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2017

**Tabel 6. 36 Jasa Lingkungan**

No	Kawasan Hutan	Kecamatan	Potensi	Lokasi
1	Hadakewa – Labalekang	Omesuri-Lebatukan-Nubatukan-Atadei-Nagawutung-Wulandoni	Air Terjun, Air Panas, Mata Air, Wisata Rohani, Wisata Budaya, Puncak Gunung	Nagawutung, Lebatukan, Nubatukan, Omesuri
2	Ile Lewotolok	Ile Ape - Ile Ape Timur	Puncak Gunung, Wisata Budaya	Ile Ape – Ile Ape Timur
3	Ile Kedang	Buyasuri - Omesuri	Puncak Gunung, Wisata Budaya	Buyasuri – Omesuri
4	Ile Paugora	Atadei	Puncak Gunung	Atadei
5	Ile Papar	Buyasuri		
6	Ile Mahino	Nagawutung	Pantai	Nagawutung
7	Ile Mingar	Nagawutung	Air Terjun, Wisata Budaya	Nagawutung
8	Natu	Omesuri	Situs Purba, (Tapak Kaki, Lesung, dan Gerabah), Pantai	Omesuri

Sumber : KPHL Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2017

**6.3. Potensi Pariwisata**

Potensi Sektor Pariwisata dapat diuraikan sebagaimana berikut ini :

**6.3.1. Wisata Alam**

- a. Kecamatan Nubatukan meliputi Pantai Desa Bour dan Alam Bawah Lautnya, Pantai SGB Bungsu, Pulau Siput Awololong, Pantai Wunopito, dan Habitat/Kerang, Teluk Lewoleba dan Alam Bawah Lautnya, Pantai Hukung dan Alam Bawah Lautnya, Bukit Wolor Pass di Desa Bour;
- b. Kecamatan Lebatukan meliputi Pantai dan Teluk Tanah Tereket, Pantai Waienga, dan Alam Bawah Lautnya, Pantai Lewolein dan Alam Bawah Lautnya, Pantai Bobu dan Mancing Mania di Perairan Bobu;
- c. Kecamatan Nagawutung meliputi Pantai Tanjung Naga, Pantai dan Teluk Watan Lolon, Pantai Mingar yang lokasinya berada di Desa Pasir Putih Selatan



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

Pulau Lembata. Keunikan Pantai Pasir Putih Mingar adalah sepanjang pantai berpasir putih dengan kondisi laut yang bersih. Selain itu dipesisir pantai itu sering ditemukan penyu yang sedang bertelur, terutama pada bulan purnama dan tradisi penangkapan Nale Bacollo (sejenis cacing laut yang dapat dimakan) pada bulan Februari dan Maret setiap tahunnya; Sunset Waiwatalolong dan Desa Atawai dengan wisata alam pegunungan (Air Terjun Lodovavo) dan sumber air panas di Desa Labalimut;

- d. Kecamatan Buyasuri meliputi Pantai Kalikur, Pantai Tobotani, dan alam bawah lautnya, Gunung Uyelewun, Pantai Waqlayar di Desa Rumang serta Pasir Putih di Desa Bean terdapat keunikan yakni hamparan pasir putih yang indah dengan kristal-kristal halus yang membentang luas hingga menyatu dengan Pantai Wowong di Desa Wowong Kecamatan Omesuri;
- e. Kecamatan Omesuri meliputi Pantai Tanjung Baja, Pantai Weilolon, Gua Alam Natu dan Pantai Wowong memiliki keunikan yakni hamparan pasir putih yang indah dengan kristal halus yang membentang luas hingga menyatu dengan Pantai Bean (Kecamatan Buyasuri). Selain itu terdapat Hutan Lindung Illi Kedang, sumber air panas Roma dan sumber air panas Leuwayang;
- f. Kecamatan Ile Ape meliputi Ekowisata Pantai Ohe Wewabelen dan alam bawah lautnya, Pantai Tanjung Tuak, Pantai Palilolon, Pantai Pedan dan alam bawah lautnya, Gunung Api Lewotolok dan keindahan panorama alam dasar laut di Kasang dan Muno Wutun;
- g. Kecamatan Ile Ape Timur meliputi Gunung Api Lewotolok dan keindahan saat matahari terbit dan terbenam, Pantai Ebak, Pantai Tokojaeng, Pantai Jontona, Pantai Waimatan, Pantai Lamaau dan Pemandian Alam Belerang di Desa Lamawolo;
- h. Kecamatan Atadei meliputi Pantai Waibura, Panas Bumi Watuwawer, Gunung Api Hobal (ada di dasar Laut) Pantai Waiteba, Pantai Mirekpuke, Bukit Ile Kerbau, Puncak Belek, Air Panas Waikrata, dan Waitupat di Lebaata, Waijawar, Waerkebelol, dan Air TerjunRum di Desa Katakeja, Waimapar di Desa Tubukrajan, Waikenating di Desa Lewogeroma, Waiketi dan Bunga Mengi di Desa Ile Kimok, Waimau di Desa Nubahaeraka, Air Panasdan Panas Bumi Tubuk Bawa di Desa Nogodoni, Tanjung Atadei dan Batu Alap Atadei, Terowongan Atadei (Sarang Burung Walle) dan Gua Makliang (Gua Kelelawar) di Desa Dulir;
- i. Kecamatan Wulandonimeliputi Air Terjun Lewowukum, Teluk Mulandoro, Panorama Alam Watowutun, dan Sarang Walle di Desa Tapobali, Gua Alam dan panorama alam bawah laut di Desa Lamalera B.

#### 6.3.2. Wisata Budaya

- a. Perburuan Ikan Paus Tradisional di Lamalera

Ritual perburuan Ikan Paus Lamalera merupakan obyek wisata bahari yang sangat unik karena memadukan kekayaan bahari dengan nilai-nilai budaya tradisional sehingga sudah dikenal sampai ke manca negara. Hal ini dapat dilihat dari tradisi penangkapan ikan yang sarat dengan peralatan tradisional seperti “Peledang” (perahu kayu tanpa mesin dengan menggunakan layar) dan



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

“Tempuling” (tombak yang ujungnya berkait karena terbuat dari baja yang digunakan untuk menikam paus) serta dikemas dalam ritual/upacara adat setempat. Ritual ini dilakukan setiap tahun yang diawali dengan Perayaan Misa Leva pada Bulan Mei dan masa penangkapan yang dilakukan sampai bulan September yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama “Leva”.

b. Kampung Adat dan Ritus Pesta Kacang

Tradisi Pesta Kacang di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur berlangsung antara Bulan Juli – November dan dilaksanakan masing –masing kampung adat berlawanan arah jarum jam berturut-turut yaitu Bulan Juli di Kampung Adat Atawatung, Bulan Agustus di Kampung Adat Napaulun (Desa Bungamuda dan Napasabok), Bulan September di Kampung Adat Lewotolok, Bulan Oktober di Kampung Adat Lewohala dan berakhir pada Bulan November di Kampung Adat Lamariang. Dalam pelaksanaan pesta kacang ini, juga digelar kesenian daerah berupa Tari Sole Oha, Lia Namang, Soka-Neba, Hedung dan Tari Rotan.

c. Tenun Ikat Tradisional Desa Lamatoka di Kecamatan Ile Ape Timur. Para pengunjung dapat menyaksikan proses pembuatan tenun ikat yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat pengrajin di Desa Lamatoka.

d. Desa Leuwayang di Kecamatan Omesuri, wisata budaya (Kampung Adat)

#### 6.3.3. Wisata Minat Khusus/Buatan Manusia, meliputi :

- a. Kecamatan Nubatukan: Gua Maria dan Salib Yubileum di Lewoleba. Taman Hiburan Swaolsa Tite di Lewoleba dan Rest Area Wolorpas dan Wisata Rohani Bukit doa di Desa Bour.
- b. Kecamatan Lebatukan: Penyangkaran Penyu di Desa Hadakewa dan Wisata Bawah laut Nuhanera dan sekitarnya.
- c. Kecamatan Atadei: Monumen Taman Doa Pater Konrardus Beckeer, SVD, Imam Misionaris Belanda yang mati terbunuh oleh umatnya sendiri tanggal 19 April 1954 di Desa Atakore-Watuwawer.
- d. Kecamatan Buyasuri: Gua Maria di Desa Bean dan Makam Kapitan Kedang yang terletak diatas sebuah batu di pinggir pantai Desa Kalikur.
- e. Kecamatan Wulandoni: Kapel dan Patung Santu Petrus di Desa Lamalera. Tradisional cincin dari Ikan Seguni dan Gigi Ikan Paus. Kerajinan Perahu Peledang Mini dan anyamandi Desa Lamalera serta kerajinan Gegabah di Desa Wulandoni.
- f. Kecamatan Nagawutung: Wisata Penangkaran Telur dan Pengembangbiakan Anak Penyu/Tukik.

#### 6.4. Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Lembata memiliki berbagai macam potensi energi dan sumber daya mineral, antara lain : Potensi Bahan Galian Golongan A (Panas Bumi di Desa Atakore – Watuwawer Kecamatan Atadei), Bahan Galian Golongan B (Emas, Timah Hitam, Tembaga, Barit), Bahan Galian Golongan Cyakni Perlit (di wilayah Kecamatan Nubatukan di Desa Watokobu – Dusun Belame- dan Desa Ile Boli), Toseki (diwilayah Kecamatan Buyasuri yaitu di Bukit Liangbuaya Teluk Hadingmanuk Desa Kalikur WL, Bukit Muden Desa Atulaleng, Bukit Weilawan di Desa Benihading) Batu Apung/Pumice (di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan), Pasir Besi di Pantai Waiteba (Kecamatan Atadei), Pantai



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Penikenek di Kecamatan Nagawutung, Pantai Baka/Teluk Labala, di Desa Leworaja dan Pantai Luki Desa Pantai Harapan di Kecamatan Wulandoni.

#### 6.5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) /Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Bupati dan Wakil Bupati Lembata untuk Periode 2017 – 2022 adalah :

Bupati : Eliaser Yentji Sunur

Wakil Bupati : Thomas Ola

Pada tanggal 17 Juli 2021 Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur meninggal dunia sehingga Wakil Bupati Lembata Thomas Ola dilantik menjadi Bupati Lembata sejak 22 September 2021 sampai dengan 22 Mei 2022. Selanjutnya, Kepemerintahan Kabupaten Lembata dipimpin oleh Marsianus Jawa yang dilantik sebagai Penjabat Bupati Lembata pada tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata, maka Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 adalah :

##### 6.5.1. Sekretariat Daerah (10 Bagian )

Susunan Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi 3 bagian, yaitu:
  - Bagian Pemerintahan;
  - Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
  - Bagian Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi 3 bagian, yaitu:
  - Bagian Perekonomian dan Sumber Alam;
  - Bagian Administrasi Pembangunan;
  - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi 4 bagian yaitu :
  - Bagian Umum;
  - Bagian Organisasi;
  - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
  - Bagian Perencanaan dan Keuangan.

##### 6.5.2. Sekretariat DPRD

##### 6.5.3. Inspektorat



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

---

#### 6.5.4. Badan (5 Badan)

Badan Daerah Kabupaten Lembata terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Badan Pendapatan Daerah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### 6.5.5. Dinas (20 Dinas)

Dinas Daerah Kabupaten Lembata terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Dinas Perikanan;
- p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- s. Dinas Perhubungan;
- t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### 6.5.6. Kecamatan (9 Unit)

Kecamatan di Kabupaten Lembata terdiri dari :

- a. Kecamatan Nubatukan;
- b. Kecamatan Lebatukan;
- c. Kecamatan Omesuri;



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

- d. Kecamatan Buyasuri;
- e. Kecamatan Atadei;
- f. Kecamatan Nagawutung;
- g. Kecamatan Ile Ape;
- h. Kecamatan Wulandoni;
- i. Kecamatan Ile Ape Timur.

Untuk Tahun Anggaran 2022, tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengalami merger atau dipisahkan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 6. 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah  
Tahun 2022**

No	SKPD TAHUN 2022
<b>I</b>	<b>Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>II</b>	<b>Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
16	Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>III</b>	<b>Urusan Pilihan</b>
20	Dinas Perikanan
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>IV</b>	<b>Unsur Pendukung</b>
23	Sekretariat Daerah
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

No	SKPD TAHUN 2022
<b>VI</b>	<b>Unsur Penunjang</b>
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah
27	Badan Pendapatan Daerah
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>VI</b>	<b>Unsur Pengawas :</b>
29	Inspektorat Daerah
<b>VII</b>	<b>Unsur Kewilayahan :</b>
30	Kecamatan Nubatukan
31	Kecamatan Lebatukan
32	Kecamatan Omesuri
33	Kecamatan Buyasuri
34	Kecamatan Atadei
35	Kecamatan Nagawutung
36	Kecamatan Ile Ape
37	Kecamatan Wulandoni
38	Kecamatan Ile Ape Timur
<b>VIII</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum :</b>
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## 6.6. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

### 6.6.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah disini adalah menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan lima tahunan berdasarkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2017 -2022, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata 2017-2022

### 6.6.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lembata 2022

Visi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017 – 2022 yaitu “Terwujudnya Lembata yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan”, dengan misinya yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, serta Optimalisasi Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat;
2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Air Bersih, Energi,



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Komunikasi dan Penataan Kota;

3. Mempercepat Pembangunan dan Mengembangkan Sumber Daya Ekonomi Laut dan Maritim, serta Ekonomi Kreatif Berbasis Industri dan Pariwisata Berkelanjutan;
4. Mempercepat Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan serta Meningkatkan Pasar dan Promosi Daerah Tujuan Wisata;
5. Meningkatkan Pendapatan dan Kerja Sama Daerah serta Mengembangkan Ekonomi Wilayah dan Pembangunan Perdesaan Berbasis Industri Berkelanjutan;
6. Menata dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi serta Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.

Visi dan misi tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran, indikator dan target berikut:

**Tabel 6. 38 Visi Misi, Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Lembata 2017-2022**

Visi : “Terwujudnya Lembata yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan”						
Misi		Sasaran		Indikator		Target Tahun ke-5 (2022)
I	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, serta Optimalisasi Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat	1	Meningkatnya Jangkauan Kualitas Pendidikan Dasar	1.1	Angka Melek Huruf	100%
				1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,50 Tahun
		2	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	2.1	Angka Usia Harapan Hidup	68 Tahun
		3	Berkembangnya Kewirausahaan Para Pemuda	3.1	Persentase Wirausaha Muda	4,25 %
		4	Meningkatnya Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak-hak Dasar Perempuan	4.1	Rasio KDRT	60%
				4.2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	63,70%
5	Terciptanya Rasa Aman	5.1	Angka Kriminalitas yang Tertangani	1,88		
II	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Air	1	Terbangunnya jalan-jalan strategis yang menunjang ekonomi	1.1	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	38,47



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Visi : “Terwujudnya Lembata yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan”						
Misi	Sasaran	Indikator	Target Tahun ke-5 (2022)			
Bersih, Energi, Komunikasi, dan, Penataan Kota	2	Terbangunnya Jaringan Transportasi darat, laut, dan udara	2.1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	8	
	3	Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Bersih	3.1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	100%	
	4	Tersedianya Prasarana dan Sarana Listrik	4.1	Rasio Elektrifikasi	100 %	
	5	Terbangunnya Jaringan telekomunikasi dan informasi	5.1	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	3,35%	
	6	Meningkatnya Standar dan mutu Parasarana dan Sarana Perkotaan	6.1	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	24%	
			6.2	Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani	11%	
	7	Meningkatnya Kewaspadaan dan Mitigasi Bencana serta Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	7.1	Jumlah Desa/Kota Tangguh Bencana Yang dibentuk Desa/ Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	
	8	Terwujudnya Keserasian Pemanfaatan Ruang Wilayah	8.1	Ketaatan terhadap RT/RW	100%	
	9	Terjaminnya Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Tanah	9.1	Penyelesaian Kasus Tanah Nagara	33%	
III	Mempercepat Pembangunan dan Mengembangkan Sumber Daya Ekonomi Laut dan Maritim, serta Ekonomi Kreatif Berbasis Industri dan Pariwisata Berkelanjutan.	1	Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan dan Sumber Daya Laut	1.1	Produksi Perikanan(Perikanan Tangkap)	10,300 Ton
				1.2	Produksi Perikanan(Perikanan Budidaya)	6,518 Ton
				1.3	Rumput Laut	6,500 Ton
				1.4	Produksi Garam	972 Ton
				1.5	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PRDP	9,48%
				1.6	Pertumbuhan Ekonomi	5,75-7,00%
				1.7	PDRB Konstan TD 2010	1.375,676 Miliar
IV	Mempercepat Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata	1	Berkembangnya Jasa Pariwisata	1.1	Kunjungan Wisata	12.500 Orang
				1.2	Lama Kunjungan Wisata PAD Sektor Pariwisata	7 hari



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

### PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Visi : “Terwujudnya Lembata yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan”						
Misi	Sasaran	Indikator	Target Tahun ke-5 (2022)			
Berkelanjutan serta Meningkatkan Pasar dan Promosi Daerah Tujuan Wisata.		1.3	PAD Sektor Pariwisata	40.500.000		
		1.4	Jumlah Pelaku Usaha Wisata Bahari	6 Pelaku		
		1.5	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	4 Investor		
		1.6	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	45		
V Meningkatkan Pendapatan dan Kerja Sama Daerah serta Mengembangkan Ekonomi Wilayah dan Pembangunan Perdesaan Berbasis Industri Berkelanjutan.	1	1.1	Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	38,21%		
		2.1	Jumlah Desa Tematik	9 Desa		
	3	Menurunnya kemiskinan	3.1	Tingkat kemiskinan	21.39-21.94%	
	4	4.1	Meningkatnya kesempatan kerja	4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,67%
		4.2		4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.29-2.35%
	5	5.1	Terwujudnya Ketahanan Pangan	5.1	Ketersediaan Pangan Utama	31%
		5.2		5.2	Tingkat Inflasi	5%
VI Menata dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi serta Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.	1	1.1	Terwujudnya Revolusi Kerja APIIKKK (ASpiratif, Produktif, Inovatif, Integratif, Konkrit, Kontributif dan Kompetitif) sebagai Human Capital Management melalui pengembangan potensi ASN berbasis informasi teknologi	1.1	Cakupan layanan E-Government	20%
		2	Terwujudnya Administrasi pemerintahan yang Efisien dan Efektif	2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	80
	3	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah	3.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	
	4	4.1	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bemutu dan adil	4.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.022
4.2			4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	

Sumber : RPJMD Kabupaten Lembata 2017-2022

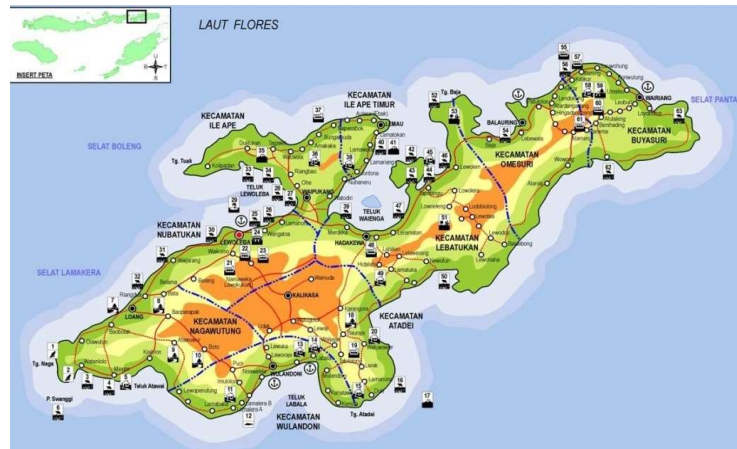


## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

## PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

### BAB VII PENUTUP





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

## PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

### BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lembata secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah berusaha melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun tidak dapat dihindari terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, diantaranya yaitu kesiapan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan proses penyesuaian dan stabilisasi sistem keuangan yang berbeda-beda terutama dengan diberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai tahun 2015.
4. Pemerintah Kabupaten Lembata menyadari bahwa proses pemeriksaan akan menjadi ukuran sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Lembata melaksanakan peraturan perundang-undangan dan sejauh mana peran APIP dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sehingga setiap koreksi dan rekomendasi BPK akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lembata untuk ditindaklanjuti.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk memberikan informasi yang komprehensif dan informatif, yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Neraca pada Pemerintah Kabupaten Lembata, diharapkan dapat sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance* dan sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Lembata tahun 2022 secara keseluruhan.

Lewoleba, April 2023

**PENJABAT BUPATI LEMBATA,**

**MANSIANUS JAWA**